LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 1

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1
1.1.1 Penjelasan Umum 1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah 1
b. Data Geografis Wlayah 2
c. Jumlah Penduduk 19
d. Jumlah Kecamatan Desa dan Kelurahan 21
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah 27
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 36
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah 39
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah 39
b. Visi dan Misi Kepala Daerah 54
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah 59
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan 71
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal 149

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 165

2.1 Capaian Kinerja Makro 165
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 169
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran 170
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil 217
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 239
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 242

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN .....

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah 298
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah 304

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 309

4.1 Urusan Kesehatan 309
4.2 Urusan Pendidikan 333
4.3 Urusan Pekerjaan Umum 347
4.4 Urusan Perumahan Rakyat 353
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 356
4.6 Urusan Sosial 383
4.7 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan 400

BAB V PENUTUP 411

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunianya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan LPPD merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan strategi Pemerintah Kabupaten Toba berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dalam pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Kami sampaikan juga terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022. Semoga materi LPPD Ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam memberikan panduan dan pembinaan pemerintah daerah serta bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan lebih lanjut untuk tahun-tahun berikutnya.

BUPATI TOBA

Ir. POLTAK SITORUS

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Toba Samosir dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Peresmian pemekaran tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 1999. Pada saat dibentuk Kabupaten Toba Samosir terdiri dari 13 kecamatan dan 4 perwakilan kecamatan, 281 desa serta 19 kelurahan. Dan pada tahun 2002, 4 perwakilan kecamatan ditetapkan menjadi kecamatan definitif sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2002, yaitu : Kecamatan Ajibata, Pintu Pohan Meranti, Uluan dan Ronggur Nihuta. Pada tahun itu juga Kecamatan Borbor dibentuk berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2002.

Pada tahun 2003 Kabupaten Toba Samosir dimekarkan menjadi Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003. Dan setelah dimekarkan Kabupaten Toba Samosir terdiri dari 10 kecamatan. Pada Tahun 2005 Kecamatan Sigumpar dibentuk yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Silaen dengan Perda Nomor 6 Tahun 2005. Tahun 2006 terbentuk lagi 3 kecamatan baru yaitu Kecamatan Tampahan, Kecamatan Nassau dan Kecamatan Siantar Narumonda berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2006. Tahun 2008 Kecamatan Bonatua Lunasi dan Kecamatan Parmaksian terbentuk dengan perda Nomor 5 Tahun 2008, sehingga sampai saat ini Kabupaten Toba Samosir terdiri dari 16 Kecamatan yang terdiri dari 231 desa dan 13 Kelurahan. Pada Tahun 2020 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara sehingga pada saat ini Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba.

b. Data Geografis Wilayah

b.1 Karateristik Lokasi dan Wilayah

b.1.1 Letak Geografis & Wilayah Administrasi Pemerintahan

Secara geografis, Kabupaten Toba berada pada posisi 2°03' - 2°40' Lintang Utara dan 98°56' - 99°40' Bujur Timur, dengan luas wilayah 2 021,80 km^2. Kabupaten Toba berbatasan dengan 5 (lima) Kabupaten yaitu

Utara : Kabupaten Simalungun

Timur : Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Asahan

Selatan : Kabupaten Tapanuli Utara

Barat : Kabupaten Samosir

Letak Wilayah Kabupaten Toba secara administratif dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Toba

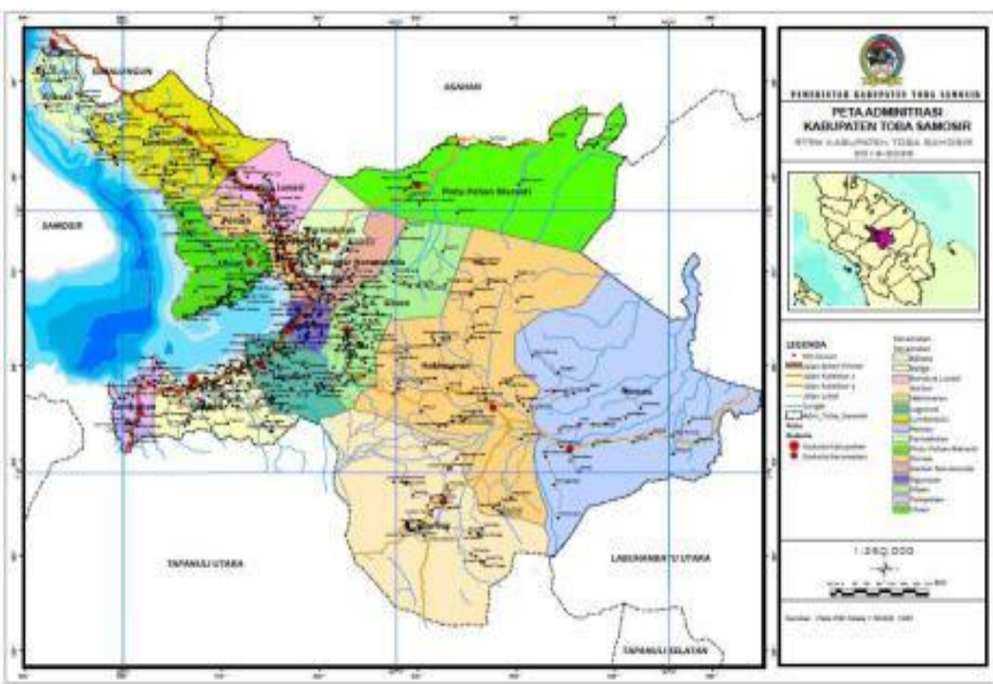

Kabupaten Toba, secara administratif terdiri dari 16 Kecamatan, 231 desa dan 13 Kelurahan. Luas wilayah per-kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1

Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Toba

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wil. (Km²)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Balige	29	6	91,05
2	Tampahan	6	-	24,45
3	Laguboti	22	1	73,90
4	Habinsaran	21	1	408,70
5	Borbor	15	-	176,65
6	Nassau	10	-	335,50
7	Silaen	23	-	172,58
8	Sigumpar	9	1	25,20
9	Porsea	14	3	37,88
10	Pintu Pohan Meranti	7	-	277,27
11	Siantar Narumonda	14	-	22,20
12	Lumban Julu	12	-	90,90
13	Uluan	17	-	109,00
14	Ajibata	9	1	72,80
15	Parmaksian	11	-	45,98
16	Bonatua Lunasi	12	-	57,74
	Jumlah	231	13	2 021,80

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba*

b.1.2 Kondisi Topografi

Kabupaten Toba berada di Dataran Tinggi Bukit Barisan dengan ketinggian 900-2.200 m dpl, dengan topografi secara umum terdiri dari daerah bergelombang dan berbukit yang diselingi oleh dataran yang relatif rata serta berbatasan langsung dengan Danau Toba. Kondisi kelerengan atau topografi wilayah Kabupaten Toba sangat variatif, yaitu datar (0-8%), berombak (8-15%), bergelombang (15-25%), curam (25-40%), dan terjal/bergunung (>40%) untuk lebih jelas dapat dilihat pada berikut:

Tabel 1.2
Kondisi Kelerengan Lahan Kabupaten Toba

No	Kecamatan	Luas Lereng (Ha)				
		Datar	Berombak	Bergelombang	Curam	Terjal
		(D)	(BK)	(BG)	(C)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		0-8%	**8-15%**	**15-25%**	**25-40%**	**>40 %**
1	Balige	6,125.95	2,494.74			
2	Tampahan	2,287.69			472.85	
3	Laguboti	5,660.21	694.65			
4	Habinsaran	13,720.30	11,565.55	5,939.97	285.26	
5	Borbor	368.00	15,201.63	18,577.11	3,907.23	
6	Nassau	2,211.80	14,203.99	12,738.67	648.82	
7	Silaen	6,084.53	459.12			
8	Sigumpar	2,237.44				
9	Porsea (*masih termasuk Parmaksian dan Bonatua Lunasi*)	6,614.47			512.47	
10	PP. Meranti	17,199.40	6,873.08	2,259.92	12,160.07	
11	Siantar Narumonda	3,460.68			20.06	
12	Lumban Julu	7,452.46			11,795.64	
13	Uluan	5,252.68			1,036.66	
14	Ajibata	2,252.07			4,826.82	
	Jumlah	**80,927.69**	**51,492.76**	**39,515.67**	**35,665.90**	**-**

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba*

b.1.3 Geologi dan Jenis Tanah

Kondisi struktur geologi di Kabupaten Toba terdiri dari 2 (dua) alluvium, 7 (tujuh) formasi, 1 (satu) kelompok dan 1 (satu) tufa. Variasi tersebut antara lain: alluvium muda, formasi bohorok, formasi gunung api, formasi kuala, formasi puetu, formasi samosir, formasi sihapas, formasi telisa dan tufa toba. Jenis tanah secara

umum di Kabupaten Toba Samosir terdiri dari komposisi tanah yang didominasi tanah tufa toba, pasir bercampur tanah liat, kapur dan sebagian lainnya yang terdiri dari lapisan tanah yang relatif kurang subur untuk pertanian. Struktur Geologi Kabupaten Toba dapat dilihat pada gambar berikut :

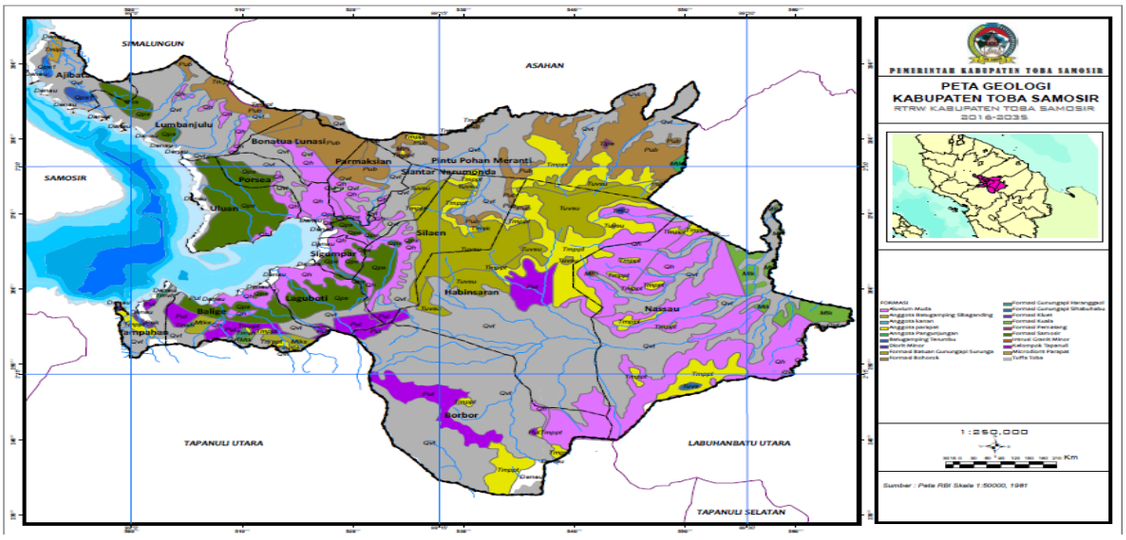

Sumber: Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang RTRW Kabupaten Toba Tahun 2017-2037.

b.1.4. Hidrologi dan Sumber Daya Air

Kabupaten Toba merupakan wilayah yang terdiri dari pegunungan dan memiliki potensi sumber daya air dengan keberadaaan air permukaan seperti Danau Toba, sungai dan mata air, yang cukup banyak tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Toba.

a. Danau Toba

Danau Toba memiliki luas permukaan perairan sebesar 110.260 Ha, dengan luas Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba lebih kurang 369.854 Ha, yang terdiri dari 190.314 Ha daratan di Pulau Sumatera (keliling luar danau), 69.280 Ha daratan Pulau Samosir (di tengah danau). Terbentuknya Danau Toba didahului oleh pembentukan Geantiklin Batak sepanjang Pegunungan Barisan. Zona Sesar Semangko memotong Geantiklin tersebut secara agak eksentrik di sebelah Barat Daya sepanjang lembah Batang Toru dan lembah Way Renun. Pembentukan cekungan Toba didahului

oleh letusan gas, piroklastik, dan magma yang membentuk tufa, kini dikenal sebagai Tufa Toba; dimana awan panas yang terjadi menyebar ke wilayah yang luas sejauh 300 – 400 Km hingga ke Malaysia. Tufa Toba tersebar cukup luas hingga 20.000 – 30.000 Km^2 di sekitar cekungan Toba. Letusan besar tersebut diikuti dengan runtuhnya atap dapur magma yang kemudian membentuk cekungan Toba atau Danau Toba.

b. Sungai

Sungai-sungai yang terdapat di DTA Danau Toba mengalirkan airnya dari DTA ini ke dalam Danau Toba yang terdiri dari 19 sungai yaitu : S. Sigubang, Bah Bolon, S. Guloan, S. Arun, S. Tomok, S. Pulau Kecil, S. Halian, S. Simare, S. Aek Bolon, S. Mandosi, S. Gopgopan, Bah Tongguran, S. Mongu, S. Kijang, S. Sinabung, S. Ringo, S. Prembakan, S. Sipultakhuda dan S. Silang. Sedangkan satu-satunya sungai yang merupakan pelepasan air dari Danau Toba menuju laut adalah Sungai Asahan yang mengalir dan bermuara di Pantai Timur Sumatera Utara. Air yang mengalir ke Sungai Asahan ini dimanfaatkan sebagai sumber daya energi listrik. Kabupaten Toba Samosir merupakan salah satu wilayah yang menjadi Daerah Tangkapan Air Danau Toba yang memiliki 8 Sub DTA Danau Toba, Seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Luas Sub DTA dalam DTA Danau Toba di wilayah Kabupaten Toba

No.	Sub DTA	Letak Geografis	Kecamatan	Luas (Ha)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Bolon	$2^0$49' LU	Borbor	983,60
		$99^0$25' BT	Laguboti	3.550,00
			Porsea	595,60
			Siantar Narumonda	2.071,60
			Sigumpar	2.965,20
			Silaen	4.167,90
		Total		**14.333,90**
2	Gopgopan	$2^0$63' LU	Lumban Julu	5.881,90
		$99^0$07' BT	Porsea	418,80

			Uluan	1.350,20
		Total		**7.650,90**
3	Halian	$2^0$35' LU	Balige	10.882,90
		$99^0$17' BT	Laguboti	820,60
			Tampahan	299,30
		Total		**12.002,80**
4	Mandosi	$2^0$57' LU	Lumban Julu	6.054,30
		$99^0$21' BT	Porsea	7.811,40
			Siantar Narumonda	460,40
			Uluan	6.649,30
			-	717,80
		Total		**21.693,20**
5	Naborsahon	$2^0$75' LU	Ajibata	3.340,60
		$99^0$04' BT	Lumban Julu	14,60
		Total		**3.355,20**
6	Simare	$2^0$39' LU	Balige	381,90
		$99^0$21' BT	Borbor	736,40
			Laguboti	8.646,00
		Total		**9.764,30**
7	Sitobu	$2^0$36' LU	Balige	86,60
		$99^0$04' BT	Tampahan	3.952,90
		Total		**4.039,50**
8	Tongguran	$2^0$60' LU	Ajibata	2.241,60
		$99^0$4' BT	Lumban Julu	5.589,40
		Total		**7.831,00**

Sumber *: SIPD Kabupaten Toba*

c. Daerah Aliran Sungai

Kabupaten Toba terdiri dari 3 Daerah Aliran Sungai yaitu DAS Toba-Asahan, DAS Kualuh dan DAS Bilah yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4
Nama DAS dan Sungai di Kabupaten Toba

DAS ASAHAN TOBA	DAS KUALUH	DAS BILAH
1	*2*	*3*
Aek Tongguran	Aek Simalapak	Aek Simampur
Aek Siponot	Aek Sibue	Aek Bilah
Aek Bolon	Aek Siattaladan	Aek Rimau
Aek Mardubur	Aek Sigala-gala	
Aek Sitabo	Aek Paung	
Aek Sitobu	Aek Simanggala	
Aek Silimbat	Aek Rau	
Aek Simangatasi	Aek Sihuranjar	
Aek Siampapaga	Aek Hurangan	
Aek Siitang	Aek Gonting	
Aek Sitakkola	Aek Sipagu	

DAS ASAHAN TOBA	DAS KUALUH	DAS BILAH
1	*2*	*3*
Aek Sihoruhoru Aek Mardugu Aek Galagala Aek Siharompur Aek Siarsikarsik Aek Situmurun Aek Naurihon Sungai Asahan Aek Salak Aek Simantorop Aek Halian Aek Simare Aek Serasera Aek Naborsahon Aek Sigilang Aek Sijumbang Aek gopgopan Aek Natio Aek Sitagilan Aek Lumbabi Aek Siubanuban	Aek Rimau Aek Daodao Aek Simorot Aek Sagar Aek Sibaning Aek Sibaruan Aek Parsoluman Aek Lubuk Siursa Aek Siantuni Aek Kualu Aek Bulu Siamun Aek Natinggir Aek Sigalapang Aek Bolon Aek Simbakko Aek Paseruan Aek Agong Aek Ihan Aek Bulu Aek Sitagilan Aek Bantangit	
Aek Kuais Aek Jambudolok Aek Bang Aek Gopgopan Aek Nalela Aek Mandosi Aek Bulangan Aek Antalbung Aek Baruara Aek Nabara	Aek Bintatar Aek Napa Aek Maritongge Aek Andoi Aek Longgas Aek Nabara Aek Melo Aek Kualuh Aek Kuala Aek Pulojaba Aek Bulu Siamun Aek Bontar	

Sumber : *SIPD Kabupaten Toba*

d. Irigasi

Berdasarkan kondisi topografinya, di Kabupaten Toba banyak terdapat potensi pengembangan Daerah Irigasi untuk persawahan. Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Toba meliputi sebanyak 79 D.I dengan luas total areal 14.068 Ha sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 4/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status daerah irigasiDaerah irigasi yang ada di kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi di Kabupaten Toba

No.	Nama Daerah Irigasi	Lintas Kabupaten (Ha)	Utuh Kabupaten (Ha)
1	*2*	*3*	*4*
1	D.I. Hinalang	205	-
2	D.I. Meat	62	-
3	D.I. Sijambur	62	-
4	D.I. Simangatasi II	-	1.515,00
5	D.I. Aek Mandosi I	-	1.060,00

Sumber : Permen PU No.14/PRT/m/2015 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaanya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

Tabel 1.6
Luas dan Sebaran Daerah Irigasi di Kabupaten Toba

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
1	*2*	*3*
1	D. I. Aek Jangga	400,0
2	D. I. Aek Mandosi II	905,0
3	D. I. Aek Mandosi III	724,0
4	D. I. Aek Mandosi IV	311,0
5	D. I. Aek Nabara	467,0
6	D. I. Aek Salak	151,0
7	D. I. Aek Simare	430,0
8	D. I. Bahal Pinang	400,0
9	D. I. Bendar Juda	300,0
10	D. I. Bendar Sijambe	150,0
11	D. I. Bulu Duri	350,0
12	D. I. Bulu Laga	70,0
13	D. I. Dolok Jior	285,0
14	D. I. Lagundi	90,0
15	D. I. Lumban Gaol	119,0
16	D. I. Lumban Huala	100,0
17	D. I. Lumban Julu	108,0
18	D. I. Lumban Lobu	176,0
19	D. I. Lumban Rang	250,0
20	D. I. Lumban Ria-Ria	148,0
21	D.I. Paindoan	141,0
22	D. I. Sianipar	100,0
23	D. I. Sibaruang	56,0
24	D. I. Sibong-bong	200,0
25	D. I. Sidulang	580,0
26	D. I. Sihail-hail	500,0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
1	*2*	*3*
27	D.I. Silam Banua	910,0
28	D. I. Simanampang	81,0
29	D. I. Siamanampang/Simatipung	57,0
30	D. I. Simangatasi I	485,0
31	D. I. Simarintop	150,0
32	D. I. Sirandos Simanobak	600,0
33	D. I. Sisera-sera	100,0
34	D. I. Sisuhar-suhar	600,0
35	D. I. Song-Song Batu	90,0
36	D. I. Waduk Motung	100,0
37	D. I. Bendar Tabu	50,0
38	D. I. Bor-Bor	50,0
39	D. I. Gala-Gala Pangkailan	50,0
40	D. I. Lobu Hole	500,0
41	D. I. Losung Batu	50,0
42	D. I. Lumban Gala-Gala	50,0
43	D. I. Lumban Gorat	39,0
44	D. I. Sibitara	45,0
45	D. I. Sigaol	50,0
46	D. I. Aek Bolon	300,0
47	D. I. Nalela	300,0
48	D. I. Lumban Pinasa	150,0
49	D. I. Aek Bolon	75,0
50	D. I. Siantar Tonga-Tonga	75,0
51	D. I. Raut Bosi	100,0
52	D. I. Natolu Tali	55,0
53	D. I. Siring-Ringo	80,0
54	D. I. Sidoras	70,0
55	D. I.Bondar Sitobu	65,0
56	D. I. Parik	60,0
57	D. I. Meranti Barat	50,0
58	D. I. Sionggang	37,0
59	D. I. Sihiong	75,0
60	D. I. Atehe	45,0
61	D. I. Silamosik	40,0
62	D. I. Sibide Parpatihan	50,0
63	D. I. Situhulon	60,0
64	D. I. Simalau	55,0
65	D. I. Tali Air Harangan	50,0
66	D. I. Jonggi Manulus	43,0
67	D. I. Huta Gurgur	100,0
68	D. I. Pea-pea Hutaginjang	50,0
69	D. I. Pintu Pohan	45,0
70	D. I. Sinar Sabungan	50,0
71	D. I. Pantil	50,0
72	D. I. Sipange	35,0
73	D. I. Sidogor-Dogor	50,0
74	D. I. Hitetano	25,0
75	D. I. Lumban Pea	40,0
76	D. I. Sigodang Tua	50,0
77	D. I. Sidari	40,0
78	D. I. Sibosur	75,0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
1	*2*	*3*
79	D. I. Sibodiala	55,0
	Jumlah	14.068,0

e. Klimatologi

Sesuai dengan letaknya yang berada di garis khatulistiwa, Kabupaten Toba tergolong ke dalam daerah beriklim tropis. Kabupaten Toba terletak pada wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 900-2.200 meter di atas permukaan laut (mdpl). Jumlah hari hujan tertinggi terjadi ada bulan November sebanyak 20 hari hujan dengan rata-rata curah hujan 257 mm, sedangkan hari hujan terendah terjadi pada bulan Februari sebanyak 13 hari dengan rata-rata curah hujan 30 mm.

b.1.5. Pola Penggunaan Lahan

a. Kawasan Budi Daya

Luas wilayah Kabupaten Toba berdasarkan data statistik adalah 202.180 ha, sedangkan berdasarkan luasan dari analisis peta tutupan lahan sebesar 207.348 ha. Penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Toba berdasarkan hasil interpretasi citra landsat Kabupaten Toba Tahun 2011, dengan menggunakan analisis peta tutupan lahan, diperoleh penggunaaan lahan yang terdiri dari hutan primer, hutan sekunder, kebun campuran, perkebunan, permukiman, sawah, semak belukar, tanah terbuka , ladang/tegalan dan tubuh air. Penggunaan lahan terbesar terdiri dari penggunaan lahan hutan primer 38,66%, dan terkecil penggunaan lahan untuk tubuh air. Untuk lebih jelasnya luasan tiap jenis penggunaan lahan di Kabupaten Toba berdasarkan analisis tutupan lahan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikutsebagai berikut :

Tabel 1.7
Luas Penggunaan Lahan Menggunakan Analisis Luas Tutupan Lahan di Kabupaten Toba

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Hutan Primer	80.159	38,66
2	Hutan Sekunder	12.596	6,07
3	Kebun Campuran	48.847	23,56
4	Perkebunan	1.476	0,71
5	Permukiman	1.578	0,76
6	Sawah	16.465	7,94
7	Semak/Belukar	13.317	6,42
8	Tanah Terbuka	2.230	1,08
9	Tegalan/Ladang	29.398	14,18
10	Tubuh Air	1.282	0,62
	Jumlah	**202.180**	**100%**

b.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Pola ruang dalam RTRW Kabupaten Toba, Kabupaten Toba dibagi menjadi 2 fungsi kawasan yaitu Kawasan lindung dan kawasan budidaya, dapat diklasifikasikan menjadi :

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi;
   - Kawasan Peruntukan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 10.670,73 ha meliputi Kecamatan Nassau dan Borbor.
   - Kawasan Peruntukan hutan produksi seluar kurang lebih 11.192,85 ha. (meliputi Balige, Laguboti, Habinsaran, Silaen dan borbor.
   - Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat di konversi seluar kurang lebih 386,76 ha yang berada di Ajibata.

b. Kawasan Peruntukan Pertanian terdiri atas:
   - Peruntukan pertanian lahan basah

     Kawasan peruntukan pertanian lahan basah memiliki luas kurang lebih 20.567,47 ha berlokasi di Kecamatan Balige, Laguboti, Sigumpar, Silaen, Porsea, Lumban Julu, Uluan, Parmaksian, Bonatua Lunasi, Pintu Pohan Meranti, Ajibata, Habinsaran, Borbor, Tampahan, Siantar Narumonda, dan Nassau.
   - Peruntukan pertanian lahan kering.

     Kawasan peruntukan pertanian lahan kering memiliki luas kurang lebih 61.954,01 ha tersebar di Kecamatan Balige,

Laguboti, Sigumpar, Silaen, Porsea, Lumban Julu, Uluan, Parmaksian, Bonatua Lunasi, Pintu Pohan Meranti, Ajibata, Habinsaran, Borbor, Tampahan, Siantar Narumonda dan Nassau.

- Kawasan Peruntukan perkebunan;

  Kawasan perkebunan memiliki luas kurang lebih 11.055,79 ha tersebar di Kecamatan Habinsaran, Nassau dan Pintu Pohan Meranti

c. kawasan peruntukan perikanan, terdiri dari:

- Perikanan Budidaya.

  Pengembangan kawasan perikanan budidaya meliputi Kolam Air Tenang di seluruh kecamatan, Kolam Air Deras di kecamatan Balige, Laguboti, Habinsaran, Tampahan, Pintu Pohan Meranti dan Lumban Julu, Mina Padi di Kecamatan Porsea, Uluan, Sigumpar, Silaen, Lumban Julu dan Bonatua Lunasi, serta perbenihan berlokasi di Kecamatan Tampahan, Balige, Laguboti, Silaen, Sigumpar, Porsea, Bonatua Lunasi dan Ajibata.

- Perikanan Tangkap.

  Pengembangan kawasan perikanan tangkap diarahkan dengan memanfaatkan potensi perairan danau, waduk dan sungai berlokasi di Kecamatan Tampahan, Balige, Laguboti, Sigumpar, Porsea, Uluan, Siantar Narumonda, Lumban Julu dan Ajibata.

d. Kawasan peruntukan industri;

   Pola ruang kawasan peruntukan industri meliputi kegiatan industri besar, sedang, kecil dan rumah tangga. Kegiatan industri besar berada di Kecamatan Parmaksian. Pengembangan kegiatan industri sedang, kecil dan rumah tangga sebagaimana dilakukan pada wilayah yang berpotensi dengan memperhatikan kesesuaian terhadap Arahan Peraturan Zonasi Peraturan Daerah ini, serta Rencana Tata Ruang yang lebih rinci sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e. Kawasan peruntukan pertambangan;

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan di wilayah yang memiliki potensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Radioaktif di Kecamatan Tampahan, Balige, Laguboti, Borbor, Sigumpar, Silaen, Siantar Narumonda, Porsea, Parmaksian, Bonatua Lunasi, Pintu Pohan Meranti.
- Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Logam di Kecamatan Lumban Julu, Bonatua Lunasi, Porsea, Uluan, Parmaksian;
- Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Non Logam atau Batuan di Kecamatan Borbor, Laguboti, Habinsaran, Nassau, Pintu Pohan Meranti, Silaen, Parmaksian, Siantar Narumonda;
- Wilayah Pencadangan Negara (WPN) di Kecamatan Nassau, Habinsaran, Pintu Pohan Meranti.

f. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari:

- Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi:
  a) Makam Sisingamangaraja XII di Balige;
  b) gereja dan makam DR. I.L. Nommensen di Kecamatan Sigumpar;
  c) perkampungan tradisional di Nagatimbul Kec. Bonatua Lunasi, Desa Hutatinggi Laguboti, Jangga Dolok Lumban Julu;
  d) Tugu D.I Panjaitan;
  e) Rumah adat Batak di kompleks Tugu D.I Panjaitan dan di Desa Meat
  f) Mual Sisingamangaraja XII di Dolok Tolong Balige dan Mual dan Partapaan Sisingamangaraja XII di Simare Kecamatan Borbor;
  g) Aek Mual di Desa Sibarani Sampulu Kecamatan Laguboti; dan
  h) Perkampungan Batak Talak Batu dan Desa adat Hutagaol Sihujur di Kecamatan Silaen.
  i) makam Raja Namora Paut Lubis di Desa Lumban Rau Barat Kecamatan Habinsaran;

j) perkampungan tradisional di Naga Timbul Kecamatan Bonatua Lunasi, Huta Tinggi Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti, Jangga Dolok Kecamatan Lumban Julu; dan
k) Gereja HKBP Kota Balige.

- Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri dari:
  a) kawasan wisata pantai dengan arah pengembangan potensi pantai Danau
  b) Toba di Lumban Silintong, Lumban Bulbul, Sibola Hotang, Lumban Gaol, Janji Maria di Kecamatan Balige, Pakkodian di Kecamatan Tampahan, Lumban Binanga di Kecamatan Laguboti, Pantai Pasifik dan Pantai Pasir Putih di Kecamatan Porsea, Pantai Sigaol-Siregar Aek Nalas Kecamatan Uluan, Pantai Long Beach di Kecamatan Ajibata dan Pantai Lumban Binanga di Kecamatan Sigumpar;
  c) panorama alam (pegunungan) Dolok Tolong Balige, Bukit Holong Silaen, Bukit Senyum Motung Ajibata, Tarabunga dan Gurgur Tampahan;
  d) panorama alam (pegunungan) Dolok Tolong Balige, Bukit Holong Silaen, Bukit Senyum Motung Ajibata, Tarabunga dan Gurgur Tampahan;
  e) air terjun Siharimo Pintu Pohan Meranti, Sampuran Bonan Dolok, Air Terjun Siboruon Balige;
  f) Mual Sirambe Kecamatan Balige;
  g) Ekowisata Jangga Dolok Kecamatan Lumban Julu, dan ekowisata Tampahan;
  h) kawasan yang merupakan hasil bentukan geologi alam seperti Batu Manumpak di Kecamatan Nassau;
  i) wisata geopark kaldera Danau Toba meliputi Taman Eden 100 Kecamatan Lumban Julu, Gua Liang Sipege di Kecamatan Balige, Batu Basiha Desa Sibodiala, air terjun Situmurun Kecamatan Lumban Julu, sumber air panas Siregar Aek Nalas Kecamatan Uluan;
  j) Kawasan pengembangan wisata Sibodiala dan Bukit Pahoda di Kecamatan Balige; dan

k) Kawasan eco-tourism yang merupakan cakupan wilayah kawasan Pariwisata Danau Toba yang berada di Kecamatan Ajibata.

- kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri dari:
  a) museum TB Silalahi Centre di Kecamatan Balige;
  b) kawasan agrowisata pada pusat pengembangan wisata potensi daerah pertanian dan taman Rest House Gurgur di Kecamatan Tampahan;
  c) kawasan agrowisata Sionggang Tengah di Kecamatan Lumban Julu;
  d) kawasan agrowisata Tornagodang di Kecamatan Habinsaran; dan
  e) kawasan wisata Bukit Gibeon di Kecamatan Ajibata.
- kawasan pariwisata minat khusus terdiri dari :
  a) Arung jeram Sungai Asahan di Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
  b) Wisata Cable Car di Kecamatan Ajibata;
  c) Motor Cross Sibodiala di Kecamatan Balige;
  d) Para layang/para motor dan di Dolok Tolong Kecamatan Balige dan Kecamatan Ajibata; dan
  e) Sepeda gunung di Kecamatan Lumban Julu

g. Kawasan Peruntukan Permukiman terdiri atas

- kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumber daya buatan seperti perumahan, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan; dan kawasan peruntukan lainnya.
- bangunan permukiman di pusat kota terutama di PKW, PKL dan ibukota kecamatan, meliputi pusat Kecamatan Balige, Porsea, Laguboti, Silaen, Parmaksian, Ajibata, Uluan, Bonatua Lunasi, Pintu Pohan Meranti, Siantar Narumonda, Lumban Julu, Sigumpar, Tampahan, Borbor, Nassau, Habinsaran. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk, serta prasarana dan prasarana permukiman yang

lebih rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris yang tersebar di semua kecamatan.

i. Kawasan strategis yang terdapat di Kabupaten, terdiri dari :
   - KSN sebagaimana dimaksud berupa kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Kawasan Danau Toba dan sekitarnya.
   - KSP sebagaimana dimaksud terdiri dari:
     a) kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi di Lumban Julu;
     b) kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu Kawasan Danau Toba dan sekitarnya.
   - KSK sebagaimana dimaksud merupakan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi kabupaten terdiri dari:
     a) kawasan perkotaan Balige;
     b) kawasan Sibisa – Ajibata; dan
     c) kawasan cepat tumbuh Habinsaran – Borbor – Nassau.

b.3. Wilayah Rawan Bencana

b.3.1. Potensi Bencana Alam (Koordinasi dgn BPBD)

Potensi bencana alam dalam suatu wilayah merupakan salah satu pertimbangan yang penting dalam merumuskan rencana pengembangan suatu wilayah pada masa yang akan datang. Di Kabupaten Toba kawasan-kawasan yang berpotensi atau teridentifikasi sebagai daerah rawan bencana alam perlu diketahui untuk dapat membuat suatu perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan memperhatikan keseimbangan alam.

b.3.2. Potensi Rawan Gerakan Tanah

Gerakan tanah atau tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Kabupaten Toba Samosir merupakan daerah yang terdiri dari pegunungan maupun perbukitan yang memiliki sudut kemiringan lereng yang cukup terjal dengan kondisi geologi, lahan, curah hujan, tanah, keairan yang dapat mendukung proses terjadinya

bencana alam longsor. Kawasan rawan bencana longsor dapat disebabkan oleh beberapa faktor yakni :

1. Faktor kondisi alam, dengan karakteristik :
   - Kondisi lereng yang relatif cembung dengan kemiringan lahan di atas 45% untuk daerah lereng bukit/perbukitan, atau lereng gunung/pegunungan, dan lereng relatif landai dengan kemiringan sekitar 10^0 (20%) hingga 20^0 (40%).
   - Kondisi tanah/batuan penyusun umumnya merupakan lereng yang tersusun oleh tanah lempung yang mudah mengembang apabila jenuh air.
   - Curah hujan mencapai 70 mm/jam atau 100 mm/hari. Curah hujan tahunan mencapai lebih dari 2500 mm, atau kawasan rawan banjir.
   - Keairan lereng, sering muncul rembesan-rembesan air atau mata air pada lereng, terutama pada bidang kontak antara batuan kedap denga lapisan tanah yang lebih *permeable*.
2. Faktor aktifitas manusia, dengan karakteristik :
   - Sistem drainase tidak memadai.
   - Dilakukan pembangunan konstruksi dengan beban yang melampaui daya dukung tanah.
   - Dilakukan pencetakan kolam yang dapat mengakibatkan merembesnya air kolam ke dalam lereng.
   - Lereng ditanami dengan pola tanam yang tidak tepat, misalnya ditanami tanaman berakar serabut, dimanfaatkan sebagai sawah/ladang dan hutan pinus.
   - Dilakukan penggalian/pemotongan lereng, misalnya untuk jalan atau bangunan dan penambangan, tanpa memperhatikan struktur perlapisan tanah/batuan pada lereng dan tanpa perhitungan analisis kestabilan lereng.
3. Jenis gerakan tanah (longsor), dengan karakteristik :
   - Jenis gerakan tanah yang terjadi umumnya berupa rayapan tanah yang mengakibatkan retakan dan amblesan tanah.
   - Kecepatan gerakan lambat hingga menengah (kecepatannya kurang dari 2m per hari).

Kawasan-kawasan yang teridentifikasi rawan terhadap potensi gerakan tanah di Kabupaten Toba terdapat di beberapa kecamatan, yakni;

a. Potensi Menengah di Kecamatan Laguboti, Silaen dan Balige
b. Potensi Menengah- Tinggi di Kecamatan Habinsaran, Ajibata, Porsea, Siantar Narumonda, Sigumpar, Pintu Pohan Meranti, Uluan, Lumban Julu, Borbor, Nassau dan Tampahan.

b.3.3. Potensi Bencana Gempa Bumi

Pulau Sumatera merupakan wilayah kepulauan yang memiliki indikasi adanya potensi bencana gempa bumi. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan sesar besar Sumatera atau sesar Semangko. Sesar besar Sumatera atau sesar Semangko terbentuk akibat adanya aktivitas tektonik, terutama aktivitas pergerakan lempeng Indo Australia yang menunjam dan mendesak lempeng Eurasia. Arah pergerakan lempeng Indo Australia yang tidak tegak lurus, mengakibatkan terbentuknya segmen-segmen sesar geser Sumatera yang membentang sepanjang 1.900 km dari ujung utara Sumatera sampai ujung selatan. Sesar ini terbagi menjadi 9 bagian sesar aktif dan salah satunya berada di sekitar Kabupaten Tapanuli Utara. Dan Kabupaten Toba merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga potensi gempa yang terjadi pada wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dapat berpengaruh ke Kabupaten Toba .

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Toba dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Menurut hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Toba per tahun 2022 sebesar 213.924 jiwa. Jumlah laki-laki sebanyak 106.337 jumlah dan perempuan sebanyak 107.587 jiwa. Sebaran penduduk antar kecamatan di Kabupaten Toba masih timpang. Keadaan ini sebenarnya terjadi hampir di semua daerah yang tentunya dapat mencerminkan tingkat pembangunan atau urbanisasi di suatu daerah. Tidak

merata atau timpangnya sebaran penduduk, tampak lebih jelas jika dikaitkan dengan besarnya variasi luas antar daerah. Untuk melihat tingkat sebaran penduduk dapat dinyatakan dengan ukuran kepadatan penduduk.

Kabupaten Toba yang mempunyai luas wilayah 2.021,80 km^2, Kepadatan penduduk menunjukkan pola distribusi penduduk yang mengindikasikan keberadaan fasilitas dan faktor penarik lain seperti tersedianya pekerjaan. Data hasil proyeksi penduduk tahun 2022 di Kabupaten Toba menunjukkan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki.

Tabel 1.8
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Per Juni Tahun 2022

KECAMATAN	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK
1	*2*	*3*	*4*
Balige	22.552	23.019	45.571
Laguboti	11.351	11.735	23.086
Silaen	7.316	7.508	14.824
Habinsaran	9.360	9.227	18.587
Pintu Pohan Meranti	3.979	3.944	7.923
Borbor	4.376	4.267	8.643
Porsea	7.674	7.875	15.549
Ajibata	4.971	5.045	10.016
Lumbanjulu	5.314	5.354	10.668
Uluan	5.088	5.041	10.129
Sigumpar	4.375	4.562	8.937
Siantar Narumonda	3.770	3.865	7.635
Nassau	4.745	4.639	9.384
Tampahan	2.620	2.604	5.224
Bonatua Lunasi	3.057	3.097	6.154
Parmaksian	5.789	5.805	11.594
Jumlah	106.337	107.587	213.924

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

d. Jumlah Kecamatan Desa dan Kelurahan

Pada tahun 2003 wilayah Kabupaten Toba, berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir. Setelah menjalani pemekaran wilayah maka Kabupaten Toba Samosir bertambah menjadi 11 Kecamatan dengan dibentuknya Kecamatan Sigumpar yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Silaen pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 2006 terbentuk lagi tiga kecamatan baru yaitu, Kecamatan Tampahan, Nassau, Siantar Narumonda. Dan pada 2008 terdapat 2 pemekaran yaitu Parmaksian dan Bonatua Lunasi. Sehingga saat ini terdiri dari 16 Kecamatan yang terdiri dari 231 Desa dan 13 Kelurahan. Adapun Desa dan Kelurahan mempunyai jumlah yang berbeda di setiap kecamatan, dimana kecamatan Balige mempunyai desa dan kelurahan paling banyak, yakni 35 desa/kelurahan, sedangkan kecamatan Tampahan merupakan kecamatan yang paling sedikit jumlah desanya yaitu 6 Desa.

Tabel 1.9
Jumlah Desa/ Kelurahan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Toba Tahun 2022

NO	KECAMATAN	NO	Desa	NO	Kelurahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Tampahan	1	Gurgur Aek Raja		-
		2	Meat		
		3	Tara Bunga		
		4	Tangga Batu Timur		
		5	Tangga Batu Barat		
		6	Lintong Nihuta		
2	Balige	7	Saribu Raja Janji Maria	1	Balige I
		8	Sianipar Sihail – Hail	2	Balige III
		9	Bonan Dolok	3	Sangkar Nihuta
		10	Lumban Bulbul	4	Napitupulu
		11	Huta Dame	5	Pardede Onan
		12	Balige II	6	Lumbandolok
		13	Lumban Gorat		Hauma Bange
		14	Lumban Pea		

NO	KECAMATAN	NO	Desa	NO	Kelurahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		15	Hutanamora		
		16	Aek Bolon Julu		
		17	Bonan Dolok III		
		18	Bonan Dolok II		
		19	Sibuntuon		
		20	Baruara		
		21	Huta Bulu Mejan		
		22	Lumban Silintong		
		23	Matio		
		24	Parsuratan		
		25	Aek Bolon Jae		
		26	Lumban Gaol		
		27	Longat		
		28	Hutagaol Peatalun		
		29	Hinalang		
		30	Siboruon		
		31	Silalahi Pagar Batu		
		32	Sibolahotang SAS		
		33	Paindoan		
		34	Lumban Pea Timur		
		35	Tambunan Sunge		
3	Laguboti	36	Sidulang	7	Pasar Laguboti
		37	Sibuea		
		38	Lumban Bagasan		
		39	Simatibung		
		40	Ompu Raja Hutapea		
		41	Gasaribu		
		42	Pardomuan Nauli		
		43	Pardinggaran		
		44	Pintubosi		
		45	Sintong Marnipi		
		46	Sibarani Nasampulu/ Namungkup		
		47	Sitangkola		
		48	Sitoluama		
		49	Ujung Tanduk		
		50	Haunatas II		
		51	Aruan		
		52	Haunatas I		
		53	Tinggir Nipasir		
		54	Lumban Binanga		
		55	Siraja Gorat		

NO	KECAMATAN	NO	Desa	NO	Kelurahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		56	Ompu Raja Huta Pea Timur		
		57	Ompu Raja Hatulian		
4	Sigumpar	58	Maju	8	Sigumpar Dangsina
		59	Sigumpar		
		60	Situa – Tua		
		61	Marsangap		
		62	Sigumpar Julu		
		63	Dolok Jior		
		64	Nauli		
		65	Banua Huta		
		66	Sigumpar Barat		
5	Silaen	67	Ombur		
		68	Dalihan Natolu		
		69	Sinta Dame		
		70	Huta Gurgur I		
		71	Lumban Dolok		
		72	Parsambilan		
		73	Sigodang Tua		
		74	Sitorang		
		75	Natolutali		
		76	Hutanamora		
		77	Huta Gurgur II		
		78	Pintu Batu		
		79	Pardomuan		
		80	Silaen		
		81	Napitupulu		
		82	Hutagaol Sihujur		
		83	Meranti Barat		
		84	Sibide		
		85	Sibide Barat		
		86	Panindi		
		87	Simanobak		
		88	Siringkiron		
		89	Marbulang		
6	Habinsaran	90	Parsoburan Barat	9	Parsoburan Tengah
		91	Lumban Pinasa		
		92	Lumban Rau Selatan		
		93	Panamparan		
		94	Lumban Ruhap		
		95	Lumban Pea		
		96	Hitetano		
		97	Lumban Rau Barat		
		98	Lumban Balik		

NO	KECAMATAN	NO	Desa	NO	Kelurahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		99	Taon Marisi		
		100	Lobu Hole		
		101	Batunabolon		
		102	Lumban Gaol		
		103	Tornagodang		
		104	Pagar Batu		
		105	Sibuntuon		
		106	Pararungan		
		107	Lumban Lintong		
		108	Pangujungan		
		109	Lumban Pinasa		
			Saroha		
		110	Aek Ulok		
7	Borbor	111	Lintong		
		112	Natumingka		
		113	Rianiate		
		114	Aek Unsim		
		115	Pardomuan Nauli		
		116	Pangururan		
		117	Purbatua		
		118	Lumban Sewa		
		119	Riganjang		
		120	Hutagurgur		
		121	Simare		
		122	Pangururan II		
		123	Pangururan III		
		124	Janji Maria		
		125	Pasar Borbor		
8	Nassau	126	Lumban Rau Timur		
		127	Lumban Rau Utara		
		128	Sipagabu		
		129	Napajoring		
		130	Lumban Rau Tengah		
		131	Liat Tondung		
		132	Batu Manumpak		
		133	Lumban Rau Tenggara		
		134	Cinta Damai		
		135	Siantarasa		
9	Siantar Narumonda	136	Narumonda I		
		137	Narumonda II		
		138	Narumonda III		
		139	Narumonda IV		
		140	Narumonda V		

NO	KECAMATAN	NO	Desa	NO	Kelurahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		141	Narumonda VI		
		142	Narumonda VII		
		143	Narumonda VIII		
		144	Siantar Sitio – Tio		
		145	Siantar Dangsina		
		146	Siantar Tonga–Tonga I		
		147	Siantar Tonga – Tonga II		
		148	Siantar Sigordang		
		149	Siantar Tonga-tonga III		
10	Porsea	150	Parparean I	10	Pasar Porsea
		151	Parparean II	11	Patane III
		152	Parparean IV	12	Parparean III
		153	Patane I		
		154	Patane II		
		155	Patane IV		
		156	Lumban Gurning		
		157	Gala–Gala Pangkailan		
		158	Silamosik I		
		159	Nalela		
		160	Amborgang		
		161	Patane V		
		162	Simpang Sigura-gura		
		163	Raut Bosi		
11	Parmaksian	164	Siantar Utara		
		165	Banjar Ganjang		
		166	Lumban Sitorus		
		167	Tangga Batu I		
		168	Tangga Batu II		
		169	Pangombusan		
		170	Jonggi Manulus		
		171	Lumban Huala		
		172	Bius Gu Barat		
		173	Dolok Nauli		
		174	Lumban Manurung		
12	Uluan	175	Parhabinsaran Janji Matogu		
		176	Sibuntuon		
		177	Sigaol Barat		
		178	Lumban Nabolon		
		179	Parik		

NO	KECAMATAN	NO	Desa	NO	Kelurahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		180	Partoruan Janji Matogu		
		181	Marom		
		182	Dolok Nagodang		
		183	Partor Janji Matogu		
		184	Parbagasan Janji Matogu		
		185	Sigaol Timur		
		186	Lumban Binanga		
		187	Dolok Saribu Janji Matogu		
		188	Siregar Aek Nalas		
		189	Lumban Holbung Lbn Nabolon		
		190	Sampuara		
		191	Doloksaribu Lumban Nabolon		
13	Bonatua Lunasi	192	Silamosik II		
		193	Sihiong		
		194	Sinar Sabungan		
		195	Lumban Lobu		
		196	Harungguan		
		197	Nagatimbul		
		198	Sibadihon		
		199	Partoruan Lumban Lobu		
		200	Pardolok Lumban Lobu		
		201	Silombu		
		202	Lumban Sangkalan		
		203	Nagatimbul Timur		
14	Lumbanjulu	204	Hatinggian		
		205	Jangga Dolok		
		206	Jangga Toruan		
		207	Sibaruang		
		208	Sionggang Utara		
		209	Lintong Julu		
		210	Pasar Lumban Julu		
		211	Sionggang Tengah		
		212	Sionggang Selatan		
		213	Hutanamora		

NO	KECAMATAN	NO	Desa	NO	Kelurahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		214 215	Jonggi Nihuta Aek Natolu Jaya		
15	Ajibata	216 217 218 219 220 221 222 223 224	Pardamean Sibisa Motung Sirungkungon Parsaoran Sibisa Horsik Sigapiton Pardomuan Ajibata Pardamean Ajibata Pardomuan Motung	13	Parsaoran Ajibata
16	Pintu Pohan Meranti	225 226 227 228 229 230 231	Pintupohan Ambar Halim Pintupohan Dolok Halado Meranti Utara Meranti Tengah Meranti Timur		

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

e.1. Perangkat Daerah

Dalam menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang pembentukannya berdasarkan asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tatakerja yang jelas, dan fleksibilitas. Pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraruran perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Toba telah Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir. Sesuai dengan Peraturan Daerah ini, Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba yang terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi;
b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pelayanan administratif legislatif dan pelayanan administratif pemerintahan daerah Kabupaten;
c. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
d. Dinas Daerah terdiri dari:
    1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
    2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
    3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
6. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan, taman hutan rakyat, kebersihan dan persampahan;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, dan pasar;
15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
18. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan dan penyuluhan;

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe B

melaksanakan fungsi penunjang pendapatan;

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia aparatur, pendidikan dan pelatihan;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan umum;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.

f. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Tampahan dengan tipe B ;
2. Kecamatan Balige dengan tipe A ;
3. Kecamatan Laguboti dengan tipe A ;
4. Kecamatan Sigumpar dengan tipe A ;
5. Kecamatan Silaen dengan tipe A ;
6. Kecamatan Siantar narumonda dengan tipe A ;
7. Kecamatan Porsea dengan tipe A ;
8. Kecamatan Parmaksian dengan tipe A ;
9. Kecamatan Uluan dengan tipe A ;
10. Kecamatan Bonatua Lunasi dengan tipe A ;
11. Kecamatan Lumban Julu dengan tipe A ;
12. Kecamatan Ajibata dengan tipe A ;
13. Kecamatan Habinsaran dengan tipe A ;
14. Kecamatan Nassau dengan tipe A ;
15. Kecamatan Borbor dengan tipe A ;
16. Kecamatan Pintupohan Meranti dengan tipe A

e.2. Unit Kerja Perangkat Daerah kabupaten Toba

Sesuai Ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa pada dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah

kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Adapun Unit Pelaksana Teknis Daerah di Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

1) Unit Pelaksana Teknis kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Sesuai Peraturan Bupati Toba Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Toba yaitu sebagai berikut :
   a. Rumah Sakit Umum Daerah Porsea;
   b. UPT. Puskesmas :
      1. UPT. Puskesmas Tampahan Kecamatan Tampahan;
      2. UPT. Puskesmas Balige Kecamatan Balige;
      3. UPT. Puskesmas Soposurung Kecamatan Balige;
      4. UPT. Puskesmas Laguboti Kecamatan Laguboti;
      5. UPT. Puskesmas Sigumpar Kecamatan Sigumpar;
      6. UPT. Puskesmas Narumonda Kecamatan Siantar Narumonda;
      7. UPT. Puskesmas Porsea Kecamatan Porsea;
      8. UPT. Puskesmas Uluan Kecamatan Uluan;
      9. UPT. Puskesmas Janji Matogu Kecamatan Uluan;
      10. UPT. Puskesmas Bonatua Lunasi Kecamatan Bonatua Lunasi;
      11. UPT. Puskesmas Lumban Julu Kecamatan Lumban Julu;
      12. UPT. Puskesmas Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu;
      13. UPT. Puskesmas Ajibata Kecamatan Ajibata;
      14. UPT. Puskesmas Parmaksian Kecamatan Parmaksian;
      15. UPT. Puskesmas Pintu Pohan Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
      16. UPT. Puskesmas Silaen Kecamatan Silaen;
      17. UPT. Puskesmas Parsoburan Kecamatan Habinsaran;
      18. UPT. Puskesmas Nassau Kecamatan Nassau;
      19. UPT. Puskesmas Borbor Kecamatan Borbor.

2) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai Peraturan Bupati Toba Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba, yaitu Balai Benih Ikan Lumban Pea.
3) Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba sesuai Peraturan Bupati Toba Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba, terdiri dari:
   a. UPT Dinas Pendidikan :
      - UPT. Dinas Kecamatan Balige;
      - UPT. Dinas Kecamatan Tampahan;
      - UPT. Dinas Kecamatan Laguboti;
      - UPT. Dinas Kecamatan Sigumpar;
      - UPT. Dinas Kecamatan Silaen;
      - UPT. Dinas Kecamatan Siantar Narumonda;
      - UPT. Dinas Kecamatan Porsea;
      - UPT. Dinas Kecamatan Uluan;
      - UPT. Dinas Kecamatan Parmaksian;
      - UPT. Dinas Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
      - UPT. Dinas Kecamatan Bonatua Lunasi;
      - UPT. Dinas Kecamatan Lumban Julu;
      - UPT. Dinas Kecamatan Ajibata;
      - UPT. Dinas Kecamatan Habinsaran;
      - UPT. Dinas Kecamatan Borbor;
      - UPT. Dinas Kecamatan Nassau.
   b. UPT Satuan Pendidikan non formal Sanggar Kegiatan Belajar
4) Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Pertanian Kabupaten Toba sesuai Peraturan Bupati Toba Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Toba, yaitu :

- Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura Landbow;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan Balige;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah I Puskeswan Balige;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah II Puskeswan Parmaksian;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembibitan Tanaman Perkebunan;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Mesin Pertanian Laguboti.

e.3. Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Toba

Jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) yang terdiri dari PNS (pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Pada Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba sebanyak 4.182 (empat ribu seratus delapan puluh dua) Orang dengan rincian PNS sebanyak 3.755 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima) orang dan PPPK sebanyak 427 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh) Orang pegawai tersebut yang ditempatkan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba, dengan Rincian Sebagai berikut:

1) Berdasarkan Pendidikan
   - SD dengan jumlah tiga (3) Orang
   - SMP dengan jumlah sebelas (11) Orang
   - SMA dengan jumlah pegawai empat ratus tiga puluh lima (435) Orang
   - DI dengan jumlah pegawai lima belas (15) orang
   - DII dengan jumlah empat puluh (45) orang
   - D-III dengan jumlah tujuh ratus enam puluh (758) orang
   - S-1 dengan jumlah dua ribu enam ratus sembilan puluh (2.654) orang
   - D-IV dengan jumlah tiga puluh tiga (33) orang

- S-2 dengan jumlah dua raus dua puluh empat (228) orang

2) Berdasarkan Jabatan
   - Eselon II dengan jumlah dua puluh dua (22) orang
   - Eselon III dengan jumlah seratus lima puluh empat (154) orang
   - Eselon IV dengan jumlah seratus tujuh puluh lima (175) orang
   - Pelaksana dengan jumlah tujuh ratus lima puluh delapan (758) orang
   - Fungsional dengan jumlah tiga ribu tujuh puluh tiga (3.073) orang

3) Berdasarkan golongan
   - Golongan I sepuluh (10) orang
   - Golongan II dengan jumlah enam ratus delapan puluh satu (681) orang
   - Golongan III dengan jumlah dua ribu lima ratus lima puluh enam (2.556) orang
   - Golongan IV dengan jumlah sembilan ratus tiga puluh lima (935) orang

Jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba sampai dengan keadaan 30 Desember 2022 dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 1.10

Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jabatan

Tk. Ijazah	Eselon			Non Eselon		JLH
	II	III	IV	Fung-sional	Pelak-sana	
SD	0	0	0	0	3	3
SMP	0	0	0	0	11	11
SMA	0	0	13	172	250	435
D-I	0	0	1	10	4	15

Tk. Ijazah	Eselon			Non Eselon		JLH
	II	III	IV	Fung-sional	Pelak-sana	
D-II	0	0	2	41	2	45
D-III	0	0	22	625	111	758
D-IV	1	5	3	11	13	33
S-1	11	92	130	2076	345	2.654
S-2	10	56	13	128	21	228
S-3	0	0	0	0	0	0
TOTAL PEGAWAI						4.182

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

f.1. Realisasi Anggaran Pendapatan

Pendapatan daerah APBD TA. 2022 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp. 73.253.546.379,93 atau 101,28 % dari anggarannya sebesar Rp.72.327.296.214,00. Pendapatan Asli Daerah dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada Pemerintah Pusat. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh daerah bersangkutan. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat. Pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp.939.826.648.146,00 atau 94,90% dari anggarannya sebesar Rp.990.330.246.411,00 dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.7.058.455.033,40 atau 80,37 % dari anggarannya sebesar Rp.8.782.135.808,00.

Gambaran lebih lengkap realisasi pendapatan daerah TA. 2022 berdasarkan sumber pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.11
Realisasi Anggaran Pendapatan TA. 2022

NO	PENDAPATAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**72.327.296.214,00**	**73.253.546.379,93**	**101,28**
	Pajak Daerah	43.926.896.000,00	41.248.666.098,13	93,90
	Retribusi Daerah	3.939.228.000,00	4.842.425.770,00	122,93
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.508.877.255,00	8.508.877.255,00	100,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.952.294.959,00	18,653,577,256,80	116,93
2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**990.330.246.411,00**	**939.826.648.146,00**	**94,90**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	929.681.926.642,00	890.413.366.935,00	95,77
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.648.319.769,00	49.413.281.211,00	81,47
3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**8.782.135.808,00**	**7.058.455.033,40**	**80,37**
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	8.782.135.808,00	7.058.455.033,40	80,37
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	**1.071.439.678.433,00**	**1.020.138.649.559,33**	**95,21**

Pendapatan Asli Daerah dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada Pemerintah Pusat. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh daerah bersangkutan. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat.

f.2. Realisasi Belanja Daerah

Belanja daerah APBD TA.2022 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja operasi terealisasi sebesar Rp.638.549.986.563,00 atau 84,48 % dari anggarannya sebesar Rp.755.900.729.962,00. Belanja modal terealisasi sebesar Rp.155.820.839.716,00 atau 89,91 % dari anggarannya sebesar Rp.173.310.345.745,00 Belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp.3.618.255.394,00 atau 43,37 % dari anggarannya sebesar Rp.8.343.468.234,00 dan Belanja transfer terealisasi sebesar Rp.248.774.802.327,00 atau 99,99 % dari anggarannya sebesar Rp.248.781.847.704,00.

Gambaran lebih lengkap realisasi belanja daerah TA. 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.12
Realisasi Anggaran Belanja TA. 2022

NO	BELANJA DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	**BELANJA OPERASI**	**755.900.729.962,00**	**638.549.986.563,00**	**84,48**
	Belanja Pegawai	461.069.325.233,00	399.421.603.747,00	86,63
	Belanja Barang dan Jasa	286.513.244.729,00	234.226.368.286,00	81,75
	Belanja Hibah	7.843.760.000,00	4.434.414.530,00	56,53
	Belanja Bantuan Sosial	474.400.000,00	467.600.000,00	98,57
2.	**BELANJA MODAL**	**173.310.345.745,00**	**155.820.839.716,00**	**89,91**
	Belanja Modal Tanah	145.000.000,00	140.580.000,00	96,95
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.141.446.487,00	44.974.110.246,00	81,56
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.056.056.548,00	15.392.028.806,00	90,24
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	96.748.871.752,00	93.020.345.789,00	96,15
	Belanja Modal AsetTetapLainnya	4.218.970.958,00	2.293.774.875,00	54,37
3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**8.343.468.234,00**	**3.618.255.394,00**	**43,37**
	Belanja Tidak Terduga	8.343.468.234,00	3.618.255.394,00	43,37
4.	**BELANJA TRANSFER**	**248.781.847.704,00**	**248.774.802.327,00**	**99,99**
	Belanja Bagi Hasil	4.363.900.123,00	4.363.900.106,00	99,99
	Belanja Bantuan Keuangan	244.417.947.581,00	244.410.902.221,00	99,99
	TOTAL BELANJA DAERAH	**1.186.336.391.645,00**	**1.046.763.884.000,00**	**88,23**

f.2. Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah APBD TA.2022 terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah Penerimaan pembiayaan APBD TA.2022 terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Sisa lebih perhitungan anggaran tahuns ebelumnya terealisasi sebesar Rp.119.822.494.703,42 atau 99,94 % dari anggarannya sebesar Rp.119.896.713.212,00 Pengeluaran pembiayaan APBD TA. 2022 terdiri dari Penyertaan Modal Daerah. Penyertaan Modal Daerah terealisasi sebesar Rp.5.000.000.000,00 atau 100,00 % dari anggarannya sebesar Rp.5.000.000.000,00.

Tabel 1.13
Realisasi Pembiayaan TA. 2022

NO	PENERIMAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**119.896.713.212,00**	**119.822.494.703,42**	99,94
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	119.896.713.212,00	119.822.494.703,42	99,94
2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**100,00**
	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
	TOTAL PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**114.896.713.212,00**	**114.822.494.703,42**	**99,94**

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dapat dikatakan merupakan "gap expectation" atau perbedaan persepsi/situasi antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang apa yang telah direncanakan sebelumnya didalam membangun suatu wilayah. Atau dapat juga dikatakan bahwa permasalahan pembangunan adalah *"gap"* antara apa yang ingin dicapai pada masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal,

kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Melalui analisis permasalahan pembangunan, akan dapat ditemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh suatu wilayah sebagai bahan untuk kemudian mendalami pokok permasalahan pada masing-masing bidang kegiatan pembangunan daerah.

Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan. Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

a. Isu Strategis

Dalam menentukan isu strategis pembangunan daerah, terdapat beberapa komponen yang diperhatikan untuk mendapatkan inti permasalahan yang harus menjadi prioritas pembangunan di daerah. Berdasarkan analisis terhadap evaluasi capaian pembangunan yang telah dilakukan serta mempertimbangan program pembangunan jangka menengah dan jangka panjang serta konstelasi/dinamika regional dan nasional, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Toba dan dijadikan isu strategis yang menjadi fokus penanganan pada kegiatan pembangunan di Tahun 2023. Beberapa isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya angka kemiskinan.

   Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Toba menunjukkan garis kemiskinan pada tahun 2021 Garis kemiskinan menjadi Rp. 435.332 yang artinya pengeluaran dibawah Rp. 435.332 selama sebulan termasuk dalam kategori miskin. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Toba sebesar 16.610 jiwa, mengalami dari Tahun 2020 penduduk miskin sebanyak 16.050 jiwa sementara tingkat kemiskinan juga mengalami peningkatan dari Tahun 2020 sebesar 8.71 % , Tahun 2021 angka kemiskinan juga mengalami peningkatan menjadi 8.99 %.

2. Perlunya peningkatan daya saing produk lokal Kabupaten Toba.

   Semakin terbukanya pasar digital melalui media internet, barang dan jasa lokal perlu disiasati dengan meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal. Hal ini dimaksudkan, agar produk lokal tetap mampu eksis dan berkembang sehingga para pelaku kegiatan ekonomi yang mengandalkan produk lokal mampu mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Dengan adanya Penetapan Kabupaten Toba sebagai KSPN, produk lokal harus mampu berinovasi dan berkembang . Peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan mutu, kapasitas SDM, inovasi, diversifikasi maupun perluasan pemasaran. Pandemi Covid-19 turut memperburuk kinerja perekonomian daerah. Hal ini berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat.

3. Peningkatan infrastruktur

   Peningkatan Infrastruktur akan berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, Penurunan Angka Kemiskinan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

4. Perlunya peningkatan SDM yang berkualitas dan berbudaya

   Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu kunci sukes Pembangunan. Peningkatan SDM dilakukan melalui berbagai sector yang diantaranya adalah pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hasil realisasi tahun 2021, Angka

Harapan Hidup setiap tahun mengalami peningkatan Tahun 2021 berada pada angka 70.29 sementara Jumlah kematian ibu ada 6 kasus, Jumlah Kematian bayi 14 kasus. Kabupaten Toba Tahun 2022 menjadi Lokus penanganan Stunting, Tahun 2020 kasus bayi stunting sebanyak 15536 kasus, Tahun 2021 sebanyak 990 kasus. Penanangan Lokus Stunting untuk Tahun 2023 ditetapkan di 7 lokasi, Desa Hutagaol, Marom, Banua Huta, Situa tua, Pangunjungan, Parsaoran Ajibata, Meranti Timur.

Urusan Pendidikan juga menjadi penentu dalam peningkatan SDM, secara makro Angka HLS dan RLS terus mengalami peningkatan, namun dalam pencapaian SPM Pendidikan belum rata rata pencapaian indicator sebesar 33 %. Belum tercapainya target pada sektor pendidikan tersebut perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan tahap selanjutnya. Disamping itu perlu juga dilakukan penguatan nilai budaya untuk memperkuat karakter dan identitas masyarakat.

Di sisi lain aparatur pemerintah di Kabupaten Toba perlu ditingkatkan kompetensi, kuantitas dan kualitasnya. Sumber daya aparatur perlu ditambah dari sisi kuantitas untuk mencapai jumlah ideal, sedangkan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perlu dilakukan untuk menjamin kompetensi yang dimiliki dalam melakukan pelayanan publik.

5. Perlunya penyederhanaan tata kelola pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi

Setiap aktivitas masyarakat sedapat mungkin dilakukan menggunakan teknologi agar mempercepat dan mempermudah dalam mendapatkan pelayanan. Tata kelola pelayanan publik sebagai salah satu entitas output kegiatan pemerintahan sudah selayaknya menjadi yang terdepan dalam melakukan inovasi agar jangkauan pelayanan maupun kualitas pelayanan menjadi semakin lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan berbasis teknologi informasi diharapkan akan muncul kemudahan, efisiensi dan efektivitas

pelayanan kepada masyakarakat luas. Penyederhanaan tata kelola pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi ini harus menjadi fokus yang utama.

b. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan pembangunan daerah dapat dikatakan merupakan "gap expectation" atau perbedaan persepsi/situasi antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang apa yang telah direncanakan sebelumnya didalam membangun suatu wilayah. Atau dapat juga dikatakan bahwa permasalahan pembangunan adalah "gap" antara apa yang ingin dicapai pada masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Melalui analisis permasalahan pembangunan, akan dapat ditemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh suatu wilayah sebagai bahan untuk kemudian mendalami pokok permasalahan pada masing-masing bidang kegiatan pembangunan daerah.

Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah , atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan. Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan

kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

Dari berbagai isu dan capaian kinerja sasaran pembangunan tahun 2021, diperoleh identifikasi terhadap permasalahan pembangunan sebagai acuan dalam perencanaan ke depan, yang terangkum sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia yang disebabkan
   - Kematian ibu dan bayi merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Kematian ibu dan bayi tidak hanya disebabkan oleh faktor kesehatan sang ibu dan bayi semata seperti kekurangan gizi, anemia dan hipertensi, komplikasi kelahiran, cacat lahir, Kelahiran prematur dan berat lahir rendah melainkan juga turut dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketersediaan infrastruktur kesehatan yang memadai, serta kesadaran keluarga untuk meminta bantuan tenaga kesehatan dalam proses persalinan. Artinya, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah harus menyasar lebih dari satu insititusi, Ini menunjukan bahwa pentingnya kontribusi seluruh sektor terkait juga masyarakat dalam upaya menurunkan penyebab kasus terbanyak kematian ibu dan kematian bayi.
   - Kabupaten Toba menjadi salah satu Lokus Penanganan Stunting, juga menjadi salah satu akar permasalahan yang harus diselesaikan.
   - Kualitas Pelayanan Pendidikan belum maksimal, SPM Bidang Pendidikan belum mencapai realisasi sesuai target, Masih ada pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal, pandemic covid19 menyebabkan beberapa layanan pendidikan tidak dapat terlaksana dengan baik dan beberapa kegiatan harus dilakukan refocusing terhadap penanganan covid19.
2. Belum Optimalnya derajat ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh :

- Meningkatnya angka kemiskinan.
- Pertumbuhan ekonomi belum bertumbuh sesuai target.
- Produk unggulan daerah belum berdaya saing.

3. Belum optimalnya kualitas infrastruktur Daerah.
   - Belum Optimalnya kualitas jalan dan jembatan .
   - Perlengkapan Jalan belum sesuai standart.
   - SPM Bidang Penataan ruang dan Perumahan belum sesuai target.
4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yang disebabkan oleh :
   - Nilai evaluasi AKIP masih CC, begitu juga dengan hasil Evaluasi IRB masih nilai CC.
   - Inovasi dalam pemerintahan belum berdaya saing.
   - Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika belum memadai.
   - Belum optimalnya system pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.
   - Belum optimalnya kapasitas Sumber daya Aparatur.

c. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

I. Urusan Pemerintah wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

1. Pendidikan
   a) Belum optimalnya pelaksanaan SPM bidang pendidikan sebagaimana Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018.
   b) Belum optimalnya akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan;
2. Kesehatan
   a) Masih ditemukannya Kematian Ibu per 1000 Kelahiran Hidup dan Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
   b) Penyalahgunaan Narkoba cenderung bertambah setiap tahunnya

c) Belum optimalnya penanganan dan deteksi dini penyakit menular
d) Belum optimalnya penanganan dan deteksi dini penyakit tidak menular dan faktor resikonya
e) Belum optimalnya akses dan layanan kesehatan masyarakat
f) Belum optimalnya akses, mutu asuhan pelayanan dan keselamatan pasien

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
   a) Masih rendahnya persentase jalan mantap
   b) Belum memadainya saluran irigasi dalam kondisi baik
   c) Belum optimalnya penyelenggaraan dan pengendalian tata ruang
   d) SDM pelaku jasa konstruksi masih belum memadai
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
   a) Belum terpenuhinya akses air minum layak dan aman
   b) Belum terpenuhinya akses pengolahan air limbah domestic
   c) Belum optimalnya pemenuhan ketersediaan rumah layak huni
   d) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur pelayanan dasar di kawasan permukiman.
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
   a) Belum optimalnya pelayanan dasar sebagaimana yang tertulis pada SPM bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.
   b) Belum optimalnya penegakan PERDA dan PERKADA terhadap pelanggaran ketertiban umum maupun ketentraman.
   c) Belum optimalnya cakupan pelayanan penanganan pemadam kebakaran.
   d) Belum terbentuknya Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di tingkat desa/kelurahan.

e) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan COVID 19.
f) Desa tangguh bencana belum dibentuk.
g) Mitigasi bencana belum optimal.

6. Sosial
   a) Meningkatnya jumlah dan jenis penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
   b) Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial terhadap PMKS.
   c) Belum maksimalnya penanganan pasca bencana dan pelayanan rehabilitasi sosial
   d) Belum optimalnya pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

II. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja
   a) Belum optimalnya perluasan kesempatan kerja untuk menyerap angkatan kerja yang ada di Kabupaten Toba.
   b) Tingkat pengangguran masih tinggi.
   c) Masih rendahnya angkatan kerja/tenaga kerja yang belum memiliki ketrampilan vokasi (keahlian)
   d) Fasilitasi dan perlindungan tenaga kerja masih rendah.
2. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
   a) Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat masih ditemukannya kasus kekerasan perempuan dan anak.
   b) Masih belum optimalnya perwujudan Kabupaten Layak anak.
   c) Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga
3. Pangan
   a) Belum optimalnya produktivitas beberapa komoditi bahan pangan strategis.

b) Masih rendahnya ketersediaan beberapa komoditi bahan pangan dari hasil produksi daerah.
c) Konsumsi pangan belum beragam dan seimbang
d) Minimnya jumlah SDM penyuluh pertanian.

4. Pertanahan
   a) Belum optimalnya pengelolaan asset tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat
   b) Belum terpenuhinya kebutuhan lahan untuk kepentingan umum
   c) Tingginya potensi sengketa dan konflik pertanahan
5. Lingkungan hidup.
   a) Belum Optimalnya penangaan pencemaran air.
   b) Belum optimalnya tata kelola penanganan persampahan dan limbah.
   c) Masih banyaknya usaha/kegiatan yang belum memiliki izin.
   d) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan SDA berbasis daya dukung daya tampung lingkungan hidup.
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
   a) Rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
   b) Belum optimalnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
   c) SDM aparatur yang belum memenuhi kualifikasi
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa
   a) Masih rendahnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan kelembagaan desa
   b) Belum optimalnya pengembangan ekonomi masyarakat desa.
   c) Belum optimalnya pengembangan dan penerapan inovasi desa.
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
   a) Tingginya Total Fertility Rate dalam rangka pengendalian kelahiran

b) Masih rendahanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan Keluaraga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
c) Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan KB

9. Perhubungan
   a) Belum optimalnya aksesibilitas dan kapasitas sarana dan prasarana tansportasi
   b) Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi
   c) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi di lingkungan transportasi dan ASDP
10. Komunikasi dan informatika
   a) Belum optimalnya penyebarluasan informasi pemerintah daerah kepada publik.
   b) Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi di tingkat Desa di Kabupaten Toba.
   c) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi.
11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
   a) Minimnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat.
   b) Belum optimalnya pengembangan dan fasilitasi UMKM.
   c) Belum optimalnya kualitas dan daya saing sektor UMKM.
12. Bidang Penanaman Modal
   a) Belum optimalnya peningkatan investasi yang dapat memperluas lapangan kerja.
   b) Belum tersedianya data informasi potensi penanaman modal
   c) Belum tersedianya regulasi sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyelenggaraan penanaman modal
13. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
   a) Masih minimnya ketersediaan fasilitas dan event olahraga
   b) Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan

c) Belum optimalnya prestasi Pemuda dan olah raga.

14. Statistik
    a) Belum optimalnya pengembangan, pengelolaan da penyediaan data statistik dengan menganut prinsip satu data Indonesia
    b) Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama Pemerintah Kabupaten Toba dengan Badan Pusat Statistik dalam penyelengaraan statistik
15. Persandian
    a) Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian
    b) Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Toba dengan pusat dan provinsi
16. Kebudayaan
    a) Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan sejarah.
    b) Belum optimalnya pengembangan seni dan budaya.
17. Perpustakaan
    a) Masih rendahnya minat baca masyarakat.
    b) Belum optimalnya sarana prasarana perpustakaan
    c) Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM kepustakaan
18. Kearsipan
    a) Belum terselenggaranya penataan kearsipan dalam tatanan pemerintah kabupaten Toba
    b) Belum optimalnya sarana prasarana kearsipan
    c) Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM kearsipan.

III. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan
    a) Belum optimalnya produktivitas perikanan tangkap dan budidaya.

b) Balai Benih Ikan belum mampu menghasilkan benih ikan unggul
c) Sarana dan Prasarana perikanan kurang mendukung budidaya perikanan.

2. Pariwisata
   a) Belum optimalnya peningkatan jumlah kunjungan wisata
   b) Belum optimalnya tata kelola pariwisata
   c) Pembangunan dan pengembangan pariwisata belum secara terpadu dan terintegrasi.
3. Pertanian
   a) Produktivitas dan produksi komoditas padi, jagung dan ubi kayu cenderung menurun serta komoditi lainnya belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan lokal
   b) Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan
   c) Rendahnya tingkat inovasi teknlologi pertanian, perkebunan dan peternakan.
4. Perdagangan
   a) Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana perdagangan.
   b) Belum optimalnya manajemen pengelolaan pasar.
   c) Pengawasan barang bersubsidi dan bahan makanan serta makananan olahan belum maksimal
5. Perindustrian
   a) Nilai tambah komoditas unggulan prioritas daerah di sektor industri masih rendah
   b) Masih belum optimalnya produktivitas dan daya saing produk IKM
   c) Pertumbuhan dan perkembangan IKM masih rendah
   d) Fasilitasi dan pengelolaan IKM belum optimal

IV. Urusan Penunjang Pemerintah

1. Perencanaan

a) Penyusunan dokumen perencanaan belum memenuhi pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial
b) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanan program pembangunan.

2. Penelitian dan Pengembangan
   a) Minimnya kegiatan penelitian dan pengembangan
   b) Belum optimalnya hasil-hasil penelitian dan pengkajian yang
      belum ditindaklanjuti dengan kebijakan
   c) Belum tersedianya sumber daya manusia khususnya fungsional peneliti
   d) Kelembagaan litbang belum memadai
3. Kepegawaian dan pelatihan
   a) Kurang optimalnya manajemen kepegawaian, pola pengembangan karier
   b) Belum memadainya kompetensi ASN yang bersertifikasi.
   c) Belum terpenuhinya jumlah ASN sesuai analisa kebutuhan
   d) Kurang optimalnya penyediaan data dan informasi kepegawaian
4. Keuangan
   a) Belum optimalnya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
   b) Keterlambatan Penyerapan dan pengelolaan dana transfer Pemerintah ke Desa dan OPD
   c) Kurangnya pemahanan dan penguasaan pemanfaatan sistem informasi berbasis online dalam penganggaran
5. Pengawasan
   a) Belum optimalnya implementasi maturitas SPIP pada perangkat daerah
   b) Belum terpenuhinya kapabilitas APIP
   c) Belum optimalnya penyelesaian tindaklanjut hasil temuan pengawasan dan penyelesaian kerugian negara/daerah.

d) Belum optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
e) Belum efektifnya pelaksanaan reformasi birokrasi

6. Kewilayahan
   a) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan, ketrentaman dan ketertiban umum dan pelayanan publik di Kecamatan
   b) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
   c) Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan kelurahan
7. Sekretariat daerah
   a) Masih rendahnya koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
   b) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal dan capaian kinerja belum memenuhi target
   c) Belum optimalnya fungsi kelembagaan agama dan adat dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan sosial
   d) Masih rendahnya kualitas produk hukum daerah
   e) Belum optimalnya penanganan permasalahan ekonomi
   f) Kualitas pelayanan publik masih rendah
   g) Penataan ketatalaksanaan organisasi pemerintah daerah belum optimal
8. Sekretariat dewan
   a) Belum optimalnya pelayanan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi (DPRD)
9. Kesbangpolinmas
   a) Berkurangnya pemahaman indologi kebangsaan, wawasan kebangsaan dan menurunnya penghormatan pada simbol negara
   b) Belum optimalnya pendidikan politik bagi masyarakat
   c) Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam politik dan demokrasi
   d) Belum optimalnya pemberdayaan dan penertiban organisasi kemasyarakatan

e) Masih terjadinya tindak kejahatan dan kekerasan dalam masyarakat

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

B.1. Visi

Visi Pembangunan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah, berdasarkan definisi tersebut maka Visi Pembangunan tersebut menggambarkan keadaan yang diharapkan pada akhir periode pembangunan daerah. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Adapun visi Kabupaten Toba sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026, yaitu:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR"

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (value) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Toba tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.14
Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan Kabupaten Toba Tahun 2021-2026

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN
1	*2*	*3*
TERWUJUDNYA KABUPATEN	UNGGUL	Kondisi dimana Kabupaten Toba menjadi daerah yang maju dan terdepan di provinsi Sumatera

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN
1	*2*	*3*
TOBA UNGGUL DAN BERSINAR		Utara dengan memiliki daya saing melalui peningkatan ekonomi yang didukung infrastruktur bagus dan merata, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, Pengembangan Pariwisata yang bertaraf Internasional dan Pertanian yang modern dan kreatif.
	BERSINAR	Dengan keunggulan dan prestasi yang dicapai Kabupaten akan menjadi panutan bagi daerah lain dan mampu memberi kontribusi besar terhadap pencapaian pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

B.2. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Toba, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Toba tahun 2021-2026 sebagaimana terdapat dalam uraian dibawah ini:

1. **Infrastruktur yang Bagus dan Merata**

   Kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas dan cakupan Infrastruktur yang merata disemua wilayah Kabupaten Toba hingga ke desa dan dusun, meliputi infrastruktur jalan, irigasi, jembatan, permukiman, jaringan listrik dan jaringan internet. Infrastuktur yang

bagus dan merata memiliki daya ungkit terhadap pengembangan ekonomi, pelayanan dasar masyarakat dan potensi pengembangan wilayah dengan memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan serta kerentananan wilayah terhadap bencana alam.

2. **Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal**

   Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berfokus pada peningkatan daya saing melalui peningkatan kompetensi, ketrampilan (skill), kapasitas dan penguatan karakter dilandasi nilai filosofi " Batak Na Raja" sebagai cerminan kepribadian SDM yang unggul dan andal. Batak Na Raja mengandung nilai atau norma : Batak Na Marugamo (beragama), Batak Na Maradat (berlandaskan nilai adat dan budaya), Batak Na Maruhum (taat hukum) dan Batak Na Marparbinotoan (berpendidikan) . Dengan SDM yang unggul dan andal serta memiliki karakter diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah.

3. **Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera**

   Pertanian dan Peternakan adalah sektor yang menopang perekonomian Kabupaten Toba karena sekitar 60% penduduk bergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Pembangunan sektor pertanian dan perkebunan dan peternakan diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan petani serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah dengan mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas komoditi pertanian melalui berbagai terobosan dan inovasi.

4. **Kesehatan yang Prima dan Terjangkau**

   Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) juga diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan. Kesehatan yang prima akan memperkuat kapasitas sosial masyarakat untuk berinteraksi dan

berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Peningkatan kualitas kesehatan ditempuh dengan meningkatkan cakupan dan kualitas fasilitas kesehatan, kualitas tenaga kesehatan dan layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

5. **Pariwisata Berkat dan Meriah**

   Pembangunan pariwisata diharapakan dapat memberikan daya ungkit terhadap perekonomian daerah yang inklusif dimana dapat menodorong pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat, membuka kesempatan kerja dan peluang tumbuhnya investasi dan sektor-sektor usaha ekonomi baru.

6. **Membangun Iman yang terpelihara**

   Pemerintah harus mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar terhindar dari perilaku yang bertentangan dengan ajaran nilai agama, pranata sosial dan aturan hukum yang berlaku. Untuk itu pemerintah akan mendorong peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memperkuat atau memperkokoh keimanan masyarakat melalu berbagai pendekatan. Upaya tersebut dilandasi oleh salah satu nilai filosofi Batak Na Raja yaitu “Batak Namarugamo” yaitu sebagai beragama (*Batak Na Marugamo*) masyarakat Toba diharapkan mampu menampilkan sikap yang sesuai dengan nilai ajaran agama, terhindar dari penyakit social.

7. **Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban**

   Stabilitas keamanan dan ketertiban yang terjaga akan mencipatkan situasi yang kondusif dalam tatatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemanan dan ketertiban erat kaitannya dengan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap aturan dan yang berlaku. Pemerintah kabupaten Toba akan mengoptimalkan perannya dalam menjaga stabilitas kemamanan dan ketertiban melalui pencegahan dan penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maupun bagi investor.

Rumusan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026, diharapkan dapat menjawab permasalahan dan isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk itu lebih lanjut diuraikan hubungan antara permasalahan dan MISI pembangunan ditunjukkan dalam tabel dibawah berikut :

Tabel 1.15
Hubungan Permasalahan Pembangunan dengan Misi Pembangunan

DAMPAK	INTI PERMASALAHAN	MISI
1	2	3
Belum tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.	Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata dan pertanian sebagai sektor unggulan terhadap PDRB	(3) Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera (5) Pariwisata Berkat dan Meriah
	Belum optimalnya peningkatan pendapatan perkapita penduduk	(3) Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera
	Belum optimalnya inovasi dalam pengembangan dan penguatan daya saing produk unggulan daerah	(3) Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera (5) Pariwisata Berkat dan Meriah
	Masih rendahnya nilai dan jumlah investasi	(5) Pariwisata Berkat dan Meriah (7) Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
	Masih minimnya upaya penguatan industri hulu, industri hilir dan industri kreatif	(5) Pariwisata Berkat dan Meriah
Kualitas Sumber Daya Manusia belum mampu berdaya saing	Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	(4) Kesehatan yang Prima dan Terjangkau
	Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan	(2) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal
	Tingkat pengangguran masih tinggi	(5) Pariwisata Berkat dan Meriah
	Belum optimalnya kebijakan dan program pengentasan kemiskinan.	(5) Pariwisata Berkat dan Meriah

DAMPAK	INTI PERMASALAHAN	MISI
1	2	3
	Masih rendahnya kualitas keluarga	(2) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal (6)Membangun Iman yang terpelihara
Belum optimalnya cakupan ketersediaan infrastruktur dasar dan penyelenggaraan penataan ruang.	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air masih belum memenuhi standar pelayanan minimal	(1) Mewujudkan Infrastruktur yang Bagus dan Merata
	Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan sarana dan pasarana publiK.	(1) Mewujudkan Infrastruktur yang Bagus dan Merata
	Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang.	(1) Mewujudkan Infrastruktur yang Bagus dan Merata
	Belum optimalnya tata kelola penanganan persampahan dan limbah	(1) Mewujudkan Infrastruktur yang Bagus dan Merata
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)	Belum Optimalnya penyelenggaran pelayanan publik	(2) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal
	Belum optimalnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	(2) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal
	Belum optimalnya perencaaanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah	(2) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal
	Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM aparatur	(2) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal

C. Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Toba sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Toba, dapat dilihat pada tabel berikut:

Kode	MISI/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*19*
1. Infrastruktur yang Bagus dan Merata				
Tujuan 1.1	**Terwujudnya infrastruktur yang merata dan berkualitas.**	Indeks Infrastruktur	Indeks	
Sasaran 1.1.1	**Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar**	Indeks sarana prasarana	Indeks	
Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	DINAS PU DAN TATA RUANG
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	DINAS PU DAN TATA RUANG
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	DINAS PU DAN TATA RUANG
Sasaran 1.1.2	**Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak**	**Indeks perumahan pemukiman**	**Indeks**	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase rumah yang terfasilitasi PSU	Persen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	MISI/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*19*
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksanaanya penanganan sampah di wilayah kabupaten/ kota	Persen	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	DINAS PU DAN TATA RUANG
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Koefisien kualitas air dan udara	nilai	Dinas Lingkungan Hidup
Sasaran 1.1.3	**Meningkatnya kualitas konektivitas**	**Indeks konektivitas daerah**	**Indeks**	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Konektivitas Jalan Kabupaten / kota	indeks	Dinas Perhubungan
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal				
Tujuan 2.1	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas**	IPM	%	

Kode	MISI/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*19*
Sasaran 2.1.1	**Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan**	**indeks pendidikan**	**Indeks**	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni	Persen	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Persen	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sasaran 2.1.4	**Meningkatnya ketahanan keluarga**	**indeks ketahanan keluarga**	**Indeks**	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	persen PMKS yang tertangani	Persen	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persen	Dinas PMDP dan PA
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	Dinas PMDP dan PA

Kode	MISI/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*19*
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)	Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
Tujuan 2.2	**Terwujudnya Pemerintahan baik, inovatif, kreatif, Produktif dan non koruptif**	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai	
Sasaran 2.2.1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**nilai**	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persen Masyarakat yang menjadi sasaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten	persen	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	MISI/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*19*
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesra	Persen	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	persen	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persen	seluruh kecamatan
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persen	Sekretariat DPRD
Sasaran 2.2.2	**Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**	**Opini BPK**	**opini**	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Deviasi Realisasi Belanja terhadap total dalam APBD	persen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	MISI/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*19*
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	persen	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Sasaran 2.2.3	**Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif**	**Nilai SAKIP**	**Nilai**	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	persen Dokumen atau Laporan	Persen	Bappeda
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks profesionalitas ASN	indeks	BKPSDM
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan	persen	INSPEKTORAT
Tujuan 3.1	Meningkatkan kualitas produksi Pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	NILAI	
Sasaran 3.1.1	**meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan**	**Indeks Produksi Pertanian (IPP)**	**indeks**	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Pertanian dan Peternakan	Ton	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Pertanian dan Peternakan	Ton	DINAS PERTANIAN

Kode	MISI/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*19*
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	DINAS PERTANIAN
Sasaran 3.1.2	**Meningkatnya ketersediaan Pangan**	**Ketersediaan pangan utama**	**persen**	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penguatan Cadangan Pangan	Persen	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	persen Desa Rawan Pangan yang tertangani	Persen	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Tujuan 4.1	**Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat**	**Indeks Kesehatan**	**indeks**	
Sasaran 4.1.1	**Meningkatnya harapan hidup**	**Angka Harapan Hidup**	**Tahun**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan Kesehatan	Persen	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	persen SDM Kesehatan yang berkompetensi sesuai dengan standart.	Persen	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN	persen data izin sarana pelayanan kefarmasia	Persen	DINAS KESEHATAN

Kode	MISI/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*19*
	DAN MAKANAN MINUMAN	n serta produk IRTP yang memenuhi syarat sesuai dengan standar		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK	Persen	DINAS KESEHATAN
Tujuan	terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Pertumbuhan PDRB	%	
Sasaran 5.1.1	**Meningkatnya kesempatan kerja**	**TPT**	**%**	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persen	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
Sasaran 5.1.2	**Meningkatnya Kunjungan Wisata**	**Jumlah Kunjungan wisata**	**orang**	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kunjungan Wisata	persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode	MISI/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*19*
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	tingkat hunian akomodasi	persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Peserta pembekalan sektor pariwisata	persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sasaran 5.1.4	**menurunkan angka kemiskinan**	**persentase Penduduk Miskin**	**%**	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri	Persen	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	persen PMKS yang tertangani	Persen	DINAS SOSIAL
Tujuan 6.1	**Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat**	Penanganan PMKS	Persen	
Sasaran 6.1.2	**Menurunnya penyakit sosial**	**Laju penurunan Persentase PMKS**	**Angka**	

Kode	MISI/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*19*
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persen	DINAS SOSIAL
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase panyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	Persen	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penurunan jumlah kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika	Persen	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Kode	MISI/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*19*
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan MHA	Persen	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Tujuan 7.1	**Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban**	Indeks Ketentteraman dan Ketertiban Umum	Persen	
Sasaran 7.1.1	**Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat**	**persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan**	**persen**	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanggulangan bencana.	Persen	BPBD
	PROGRAM PENCEGAHAN, ENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan penyelematan dan evakuasi korban kebakaran.	Persen	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

D. Kegiatan Pembangunan Daerah

Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Toba dari setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					*2*	*3*	*4*
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
1	**01**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
1	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelengkapan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kelengkapan dokumen pengadaan anggaran perangkat daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kelengkapan dokumen perubahan pengadaan anggaran perangkat daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaporan capaian kinerja dan realisasinya	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					*2*	*3*	*4*
1	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian kinerja dari Dinas Pendidikan, UPT, dan SKB	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
1	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembiayaan gaji dan tunjangan ASN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kelengkapan administrasi perkantoran perangkat daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil verifikasi keuangan perangkat daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pengelolaan akuntansi perangkat daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pelaporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan tanggapan pemeriksaan dari perangkat daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaporan hasil analisis prognosis anggaran perangkat daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**01**	2,03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		
1	01	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kelengkapan dokumen kebutuhan barang milik daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Usaha penanganan dan pengamanan terhadap barang milik daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Evaluasi barang milik daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengawasan terpadu terhadap pengelolaan barang milik daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaporan barang milik daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pencatatan dan pengembangan analisis barang milik daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Penyewaan terhadap barang milik daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
1	01	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pengadaan atribut kedisiplinan dan prasarana pendukung aktivitas bagi ASN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas ASN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan sosialisasi kebijakan pemerintah dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi dan daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan bimbingan teknis bagi ASN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
1	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembiayaan alat-alat listrik, komponen listrik, dan bahan-bahan listrik lainnya	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan urusan administrasi perkantoran	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan alat-alat rumah tangga kebutuhan ASN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan barang- barang keperluan kantor	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembiayaan barang cetak, bahan cetak dan penggandaan dokumen	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengadaan surat kabar, majalah, buletin, buku peraturan perundang- undangan, dan media cetak lainnya	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kelengkapan bahan dan material perkantoran	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pelayanan bagi tamu kementerian, dinas provinsi maupun lainnya	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan kegiatan rapat luar dan dalam daerah ASN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengembangan basis data digital pada Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
1	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan kendaraan dinas dan lapangan penunjang tugas ASN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Kelengkapan mebel dan perabotan kantor	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan alat-alat kantor dan mesin kebutuhan ASN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarana pemerintahan bagi ASN dan prasarana utilitas kinerja	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarana- sarana pendukung ASN dalam tata pemerintahan dan prasarana fasilitas ASN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
1	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembiayaan jasa kurir surat, layanan surat menyurat lainnya	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembiayaan jasa internet, telefon, listrik dan telekomunikasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan pelayanan umum dinas	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pembiayaan pajak kendaraan, bahan bakar dan perbaikan kendaraan dinas	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan perabotan kantor	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Revitalisasi peralatan dan mesin kantor	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya lingkungan kantor	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan berkala terhadap gedung dan bangunan kantor dinas	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		
1	**01**	**02**	2,01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**		
1	01	02	2,01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kebutuhan ruang belajar bagi siswa	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kebutuhan ruang guru sebagai prasarana pembelajaran	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kebutuhan sumber belajar bagi sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengembangan prasarana sekolah terhadap kebutuhan fasilitasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kenyamanan ruang belajar siswa	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kenyamanan ruang tenaga kependidikan dan pendidik dalam pembelajaran	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kenyamanan ruang perpustakaan sebagai sumber belajar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meningkatnya kelayakan sarana,prasarana dan utilitas sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Meningkatnya kelayakan rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan kelengkapan kursi dan meja serta lemari	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kelengkapan alat-alat, bahan dan material lainnya keperluan di sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kelengkapan alat-alat, bahan dan material lainnya keperluan siswa dalam pembelajaran dan ekstrakurikuler	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Kenyamanan prasarana sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kenyamanan prasarana dan sarana sekolah pendukung pembelajaran	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah kepala dinas kepala sekolah /guru/penjaga sekolah yang baik,aman dan nyaman	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Pemberian bantuan biaya sekolah perserta didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kelengkapan dasar buku teks peserta didik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kelengkapan peralatan belajar peserta didik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Pelaksanaan pendidikan terhadap satuan pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Tercapainya Peningkatan Kompetensi dan kreatifitas siswa.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya mutu kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan pengkajian pengelolaan satuan pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Tercapainya Pengelolaan Dana BOS yang tertib transparan dan Akuntabel	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengawasan dan pengendalian BOS SD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	**01**	**02**	2,02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		
1	01	02	2,02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang kelas yang terpenuhi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Meningkatnya mutu sarana dan prasarana sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Tersedianya perpustakaan sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	06	Pembangunan Laboratorium	Tersedianya ruang belajar praktek bagi peserta didik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Tersedianya ruang serba guna/aula	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Tersedianya rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terpenuhinya sarana,prasarana dan utilitas sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Meningkatnya kelayakan gedung sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Meningkatnya kelayakan ruang kelas sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Meningkatnya kelayakan ruang guru sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Meningkatnya kelayakan ruang perpustakaan sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Meningkatnya kelayakan ruang laboratorium sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Meningkatnya kelayakan rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meningkatnya kelayakan sarana,prasarana dan utilitas sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan kelengkapan kursi dan meja serta lemari	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kelengkapan alat-alat, bahan dan material lainnya keperluan di sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kelengkapan alat-alat, bahan dan material lainnya keperluan siswa dalam pembelajaran dan ekstrakurikuler	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Gedung dan ruangan yang baik, aman dan nyaman	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana ,prasarana dan utilitas sekolah yang baik , aman dan nyaman	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	31	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah kepala dinas kepala sekolah /guru/penjaga sekolah yang baik,aman dan nyaman	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Pembiayaan biaya kelengkapan perserta didik Sekolah Menegah Pertama	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Kelengkapan dasar buku teks peserta didik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Kelengkapan peralatan belajar peserta didik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kelengkapan alat praktik dan peraga siswa	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Meningkatnya nilai rata-rata ujian peserta didik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelaksanaan pendidikan terhadap satuan pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Tercapainya Peningkatan Kompetensi dan kreatifitas siswa.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya mutu kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan pengkajian pengelolaan satuan pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tercapainya Pengelolaan Dana BOS yang tertib transparan dan Akuntabel	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengawasan dan pengendalian BOS SMP	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**02**	2,03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**		
1	01	02	2,03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Tersedianya Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Tersedianya sarana,prasarana dan utilitas PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Peningkatan kelayakan Ruang guru PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Peningkatan kelayakan sarana,prasarana dan utilitas PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang kelas/Ruang Guru PAUD yang baik dan aman.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana ,prasarana dan utilitas sekolah yang baik dan aman	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Kelengkapan mebel di lembaga PAUD yang memadai	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,03	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Kelengkapan alat rumah tangga PAUD yang memadai	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Tersedianya perlengkapan PAUD yang memadai	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Tersedianya Perlengkapan siswa PAUD yang memadai	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Pemenuhan pembiayaan kelengkapan perserta didik PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Tersedianya alat praktik dan Peraga siswa PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Pemenuhan standar pembelajaran lembaga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Pelaksanaan pendidikan terhadap satuan pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	01	02	2,03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Meningkatnya mutu dan kualitas pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan pengkajian pengelolaan satuan pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pengembangan lembaga PAUD yang tertib transparan dan Akuntabel	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pengawasan dan pengendalian BOP PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**02**	2,04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		
1	01	02	2,04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Gedung/Ruang Kelas/Ruang Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya sarana,prasarana dan utilitas Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan kelayakan Ruang guru dan ruang kelas Nonformal/Kesetaran	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan kelayakan sarana,prasarana dan utilitas Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,04	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Gedung/Ruang kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang baik dan aman.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,04	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Sarana ,prasarana dan utilitas lembaga Nonformal/Kesetaraan yang baik dan aman	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan mebel lembaga Nonformal/Kesetaraan untuk pembelajaran	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,04	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemenuhan alat rumah tangga lembaga Nonformal/Kesetaraan pendukung pembelajaran	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembenahan kelengkapan belajar siswa Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya biaya personil perserta didik Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan alat praktik dan Peraga siswa Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terselenggaranya proses belajar Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pelaksanaan pendidikan terhadap satuan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya mutu dan kualitas pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Lembaga Kesetaraan yang tertib transparan dan Akuntabel	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2,04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pengawasan dan pengendalian BOP Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**		
1	**01**	**03**	2,01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**		
1	01	03	2,01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pengembangan komponen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	03	2,01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pengembangan komponen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	03	2,01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Banyaknya buku teks muatan lokal yang tersedia di sekolah dan perpustakaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	03	2,01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terselenggaranya pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**03**	2,02		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**		
1	01	03	2,02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pengembangan komponen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	03	2,02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pengembangan komponen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	03	2,02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Banyaknya buku teks muatan lokal yang tersedia di sekolah dan perpustakaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		
1	**01**	**04**	2,01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n**		
1	01	04	2,01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembiayaan dan pengalokasian sebaran pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	04	2,01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan dan pengimplementasian kebijakan keguruan dan tenaga kependidikan di dalam satuan pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**		
1	**01**	**05**	2,01		**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	01	05	2,01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Uji kelayakan atas dokumen dan bahan perizinan bagi pendirian sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	05	2,01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengawasan terhadap perizinan sekolah di satuan pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**05**	2,02		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**		
1	01	05	2,02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Uji kelayakan atas dokumen dan bahan perizinan bagi pendirian lembaga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	05	2,02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengawasan terhadap perizinan sekolah di satuan pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	05	2,02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penyuluhan dan sosialisasi serta bimbingan kelembagaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**06**			**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**		
1	**01**	**06**	2,01		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
1	01	06	2,01	03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Produksi bahan bacaan dan media lainnya untuk pengembangan bahasa dan sastra	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	06	2,01	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Pengadaan buku cerita rakyat dan buku daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	06	2,01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan kegiatan pendukung implementasi bahasa dan sastra	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	06	2,01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya keseragaman dalam modul dan bahan ajar bahasa daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**		
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		
2	**19**	**02**	2,01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**		
2	19	02	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Tersedianya layanan kapasitas dalam Wira usaha	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti temu konsultasi Wira usaha.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2,01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Terlaksananya organisasi pemuda yang akan dibina	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2,01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Strategis Lintas Sektor	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2,01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2,01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2,01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Meningkatnya kepeloporan dalam pemuda	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2,01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Pelaksanaan seleksi dan pelatihan Paskibraka Kabupaten	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**02**	2,02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
2	19	02	2,02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Terlaksananya pemberdayaan organisasi Kepemudaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2,02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang akan dibina	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		
2	**19**	**03**	2,01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		
2	19	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti kegiatan olahraga di bidang prestasi olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Pelajar di Kabupaten	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah paket Peningkatan pembanguna n sarana dan prasarana olah raga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	2,02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
2	19	03	2,02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya even olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2,02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2,02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah peserta pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat di bidang pembudayaan olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	2,03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**		
2	19	03	2,03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah peserta pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat di bidang prestasi olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2,03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kelengkapan sarana pendukung kejuaraan event Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2,03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat di bidang pembudayaan olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2,03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan liga pelajar tingkat Kabupaten	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2,03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Pelaksanaan penyediaan data informasi olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	2,04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**		
2	19	03	2,04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan keolahragaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2,04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Pengelolaan organisasi olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2,04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Terjalinnya kerjasama organisasi yang baik dengan lembaga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2,04	04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Pemberian bantuan kepada organisasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	2,05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**		
2	19	03	2,05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Terselenggaranya even olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2,05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Pengelolaan organisasi olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2,05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Terselenggaranya even olahraga rekreasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2,05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Terselenggaranya even olahraga wisata	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2,05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Pengembangan kegiatan olahraga tradisional	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**		
2	**19**	**04**	2,01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**		
2	19	04	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Pengembangan aplikasi kepemudaan dalam rangka kepramukaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	04	2,01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Terpenuhinya pembenahan pada organisasi kepramukaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	04	2,01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	04	2,01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Terselenggaranya even kepramukaan daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	04	2,01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Pengadaan prasarana dan sarana kepramukaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	04	2,01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana kepramukaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	04	2,01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
1	**02**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	02	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Bidang Kesehatan (RPJMD, Renstra, Renja, RKPD, RKA OPD, DPA OPD)	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan Realiasasi Kinerja	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LAKIP, LKPJ,LPPD Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
1	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2,03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		
1	02	01	2,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Pencatatan BMD	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tertatanya Barang Milik Daerah pada OPD Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jajarannya	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
1	02	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Prasarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersediaanya pakaian dinas dan kelengkapan atributnya	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Data dan Administrasi Bidang Kepegawaian	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terbinanya dan terlaksananya Monev Kinerja pegawai Dinas Kesehatan Toba	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai dengan kepemilikan sertifikat barang dan jasa dan Sertifikat jabatan fungsional lainnya	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersosialisasinya peraturan dan perundangan bidang kepegawaian bagi seluruh pegawai jajaran	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek terhadap ASN Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
1	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor dinas kesehatan	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan, Buku Peraturan dan Perundang- undangan, Surat Kabar	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya dana penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlasananya penatausahaan arsip dinamis Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya dana dukuingan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
1	02	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya di dinas kesehatan	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunnya gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan/Pembanguna Sarana Pendukung Gedung Baru pada Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
1	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,Sumber daya air dam Listrik	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang administratif perkantoran	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
1	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Pajak Tahunan dan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional Pembayaran STNK Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Roda 2 Dinas Kesehatan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Roda 4 Dinas Kesehatan Terpeliharanya Kendaraan dinas perairan Dinas	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitas Gedung Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor lainnya pada Dinas kesehatan	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
1	**02**	**02**	2,01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	02	2,01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas baru	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Bangunan Baru Rumah Dinas tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan penambahan ruangan baru meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat tersedianya pendukung pengembangan puskesmas	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah yang rehabilitasi sedang berat	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan dalam kondisi baik	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan Instalasi Farmasi Kabupaten Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan Poskesdes Baru Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ambulance Jumlah Puskesmas Keliling Roda Dua Jumlah Puskesmas Keliling Roda Empat Penyediaan Prasarana Listrik Penyediaan Sarana Air Bersih/ Instalasi Air Bersih Penyediaan Tempat Cold Storage/Frezeer untuk menyimpan sementara limbah medis (limbah Infeksius,tajam, patologis) Penyediaan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Update Kelengkapan dan validasi alat kesehatan di puskesmas	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah item obat dan vaksin	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya bahan medis habis pakai (BMHP)	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan Instalasi Farmasi Kabupaten yang direhabilitasi sedang/berat Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan Poskesdes yang direhabilitasi sedang/berat Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemiliharaan Ambulance Pemiliharaan Instalasi Pengolahan air Limbah (IPAL) Pemiliharaan Puskesmas Keliling Roda Dua Pemiliharaan Puskesmas Keliling Roda Empat Pemiliharaan Puskesmas Perairan Pemiliharaan Sarana Air Bersih/ Instalasi Air Bersih Pemiliharaan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 Penyediaan Pemiliharaan Storage/Frezeer untuk menyimpan sementara limbah medis (limbah Infeksius,tajam, patologis)	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam kondisi dan berfungsi baik	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlasananya distribusi Obat, vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2,02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	02	2,02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Kesehetan sesuai dengan standar	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Bayi Baru Lahir mendapat pelayanan sesuai standar	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir mendapat pelayanan sesuai standar	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Balita mendapat pelayanan sesuai standar	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Usia Pendidikan Dasar mendapat pelayanan sesuai standar	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Usia Produktif 15-59 mendapat pelayanan sesuai standar	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Usia Lanjut mendapat pelayanan sesuai standar	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Orang Penderita Hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Orang Penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan sesuai standar	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang/Penderita Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat pelayanan sesuai standa	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang/Penderita Orang Terduga Tuberkulosis pelayanan sesuai standar	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	02	02	2,02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) mendapat pelayanan sesuai standar	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase Penduduk Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi status gizi Buruk/Kurang (BB/TB) Prevalensi status gizi Buruk/Kurang (BB/U) Prevalensi status gizi Buruk/Kurang (TB/U)	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase penduduk STOP BABS	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase rumah ber PHBS	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan surveilans aktif Persentase RS yang melaksanakan kegiatan surveilans aktif	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Cakupan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Puskemas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase angka morbiditas	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk dengan kepemilikan jaminan kesehatan	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Tersedianya biaya operasional penyelenggaraaan kabupaten sehat	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya operasional puskesmas	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terselenggaranya operasional Fasilitas kesehatan lainnya (Labkesda, IFK)	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	terlaksananya Re- Akreditasi Puskesmas tersedianya biaya pendukung Re- akreditasi Puskesmas	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Pelayanan Kesehatan untuk pelaksanaan investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan untuk Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Operasional pelayanan kegawat daruratan secara terpadu	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2,03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**		
1	02	02	2,03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Operasional pemanfaatan sistem informasi aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tersedianya Alat/perangkat sistem Informasi kesehatan dan jaringan internet	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2,04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	02	2,04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Sarana pelayanan kefarmasian (RS, puskesmas, klinik, apotek, toko obat)	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah PUskesmas yang di bina	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		
1	**02**	**03**	2,01		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**		
1	02	03	2,01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Peningkatan kepatuhan sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar yang dipersyaratkan melalui legalitas izin sarana dan izin praktik tenaga kesehatan yang terlibat di dalamnya	Dinas Kesehatan
1	02	03	2,01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terbinanya dan terawasinya tenaga kesehatan serta legalitas izin sarana dan izin praktik tenaga kesehatan yang terlibat di dalamnya	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**	2,02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**		
1	02	03	2,02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah tenaga kesehatan dengan perjanjian kontrak	Dinas Kesehatan
1	02	03	2,02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlh SDMK yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**	2,03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	03	2,03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan petugas pengelola fasilitas kefarmasian, peningkatan kompetensi petugas pengawas, serta uji kompetensi bagi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		
1	**02**	**04**	2,01		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**		
1	02	04	2,01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko Obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) berizin yang diawasi	Dinas Kesehatan
1	02	04	2,01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya pengawasan apotek, toko obat dan UMOT terhadap pemenuhna standar dan persyaratan	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	2,03		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	02	04	2,03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terselenggaranya bimbingan teknis (bimtek) keamanan pangan bagi pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), pengawasan dalam rangka penerbitan SPP- IRT, serta pengkajian ulang SPP-IRT	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	2,04		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**		
1	02	04	2,04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terpantaunya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	2,05		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**		
1	02	04	2,05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah penyedia Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang diawasi dan stiker yang diterbitkan	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	2,06		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**		
1	02	04	2,06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya inventarisasi sarana IRTP, pengawasan, uji sampling pangan olahan, serta monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana IRTP	Dinas Kesehatan
1	02	04	2,06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Terlaksananya penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		
1	**02**	**05**	2,01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	05	2,01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan bagi masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2,02		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	05	2,02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan Desa STOP BABS	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2,03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	05	2,03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya peningkatan posyandu dengan status mandiri Terlaksananya peningkatan posyandu dengan status purnama	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
1	**02**	**02**	2,02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di wilayah kerja UPT Puskesmas Tandang Buhit	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	terlaksananya pelayanan yang bermutu dan berkualitas di wilayah Kerja UPT Puskesmas Tandang Buhit	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
1	**02**	**02**	2,02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di wilayah kerja UPT Puskesmas Rawat Inap Ajibata	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	terlaksananya pelayanan yang bermutu dan berkualitas di wilayah Kerja UPT Puskesmas Rawat Inap Ajibata	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
1	**02**	**02**	2,02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di wilayah kerja UPT Puskesmas Pintu Pohan Meranti	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	terlaksananya pelayanan yang bermutu dan berkualitas di wilayah Kerja UPT Puskesmas Pintu Pohan Meranti	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
1	**02**	**02**	2,02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di wilayah kerja UPT Puskesmas Soposurung	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	terlaksananya pelayanan yang bermutu dan berkualitas di wilayah Kerja UPT Puskesmas Soposurung	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
1	**02**	**02**	2,02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di wilayah kerja UPT Puskesmas Parmaksian	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	terlaksananya pelayanan yang bermutu dan berkualitas di wilayah Kerja UPT Puskesmas Parmaksian	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
1	**02**	**02**	2,02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di wilayah kerja UPT Puskesmas Laguboti	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	terlaksananya pelayanan yang bermutu dan berkualitas di wilayah Kerja UPT Puskesmas Laguboti	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
1	**02**	**02**	2,02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di wilayah kerja UPT Puskesmas Rawat Inap Borbor	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	terlaksananya pelayanan yang bermutu dan berkualitas di wilayah Kerja UPT Puskesmas Rawat Inap Borbor	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
1	**02**	**02**	2,02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di wilayah kerja UPT Puskesmas Lumban Lobu	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	terlaksananya pelayanan yang bermutu dan berkualitas di wilayah Kerja UPT Puskesmas Lumban Lobu	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
1	**02**	**02**	2,02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di wilayah kerja UPT Puskesmas Rawat Inap Parsoburan	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	terlaksananya pelayanan yang bermutu dan berkualitas di wilayah Kerja UPT Puskesmas Rawat Inap Parsoburan	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
1	**02**	**02**	2,02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di wilayah kerja UPT Puskesmas Lumbanjulu	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	terlaksananya pelayanan yang bermutu dan berkualitas di wilayah Kerja UPT Puskesmas Lumbanjulu	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
1	**02**	**02**	2,02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di wilayah kerja UPT Puskesmas Uluan	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	terlaksananya pelayanan yang bermutu dan berkualitas di wilayah Kerja UPT Puskesmas Uluan	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
1	**02**	**02**	2,02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di wilayah kerja UPT Puskesmas Tampahan	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	terlaksananya pelayanan yang bermutu dan berkualitas di wilayah Kerja UPT Puskesmas Tampahan	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
1	**02**	**02**	2,02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di wilayah kerja UPT Puskesmas Narumonda	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	terlaksananya pelayanan yang bermutu dan berkualitas di wilayah Kerja UPT Puskesmas Narumonda	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
1	**02**	**02**	2,02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di wilayah kerja UPT Puskesmas Sigumpar	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	terlaksananya pelayanan yang bermutu dan berkualitas di wilayah Kerja UPT Puskesmas Sigumpar	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
1	**02**	**02**	2,02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di wilayah kerja UPT Puskesmas Porsea	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	terlaksananya pelayanan yang bermutu dan berkualitas di wilayah Kerja UPT Puskesmas Porsea	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
1	**02**	**02**	2,02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di wilayah kerja UPT Puskesmas Janji Matogu	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	terlaksananya pelayanan yang bermutu dan berkualitas di wilayah Kerja UPT Puskesmas Janji Matogu	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	**02**	**02**	2,02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di wilayah kerja UPT Puskesmas Silaen	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	terlaksananya pelayanan yang bermutu dan berkualitas di wilayah Kerja UPT Puskesmas Silaen	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
1	**02**	**02**	2,02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di wilayah kerja UPT Puskesmas Aek Natolu	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	terlaksananya pelayanan yang bermutu dan berkualitas di wilayah Kerja UPT Puskesmas Aek Natolu	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
1	**02**	**02**	2,02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di wilayah kerja UPT Puskesmas Nassau	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	terlaksananya pelayanan yang bermutu dan berkualitas di wilayah Kerja UPT Puskesmas Nassau	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
1	**02**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
1	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	**02**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
1	02	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	pendidikan dan pelatihan	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	**02**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
1	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	juumlah komponen listrik/penerangan rumah sakit	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bahan logistik yang digunakan rumah sakit	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	cetakan dan penggandaan	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	koran,majalah,buku perundangundangan	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	sppd luar dan dalam daerah	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	**02**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
1	02	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	mebel rumah sakit	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	02	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	**02**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
1	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik,telepon dan internet	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	gaji tenaga kontrak,honorarium pengelola kegiatan,transport satpol PP	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	**02**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
1	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan peralatan dan mesin	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	rehabilitasi gedung kantor	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	**02**	**01**	2,10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**		
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	pelaksanaan penerapan BLUD	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
1	**02**	**02**	2,01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	02	2,01	05	Pengembangan Rumah Sakit		Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	02	02	2,01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	rehabilitasi/pemeliharaan rumah sakit	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	02	02	2,01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	prasarana dan pendukung fasilitas	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	02	02	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumalh alat kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	02	02	2,01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	obat-obatan rumah sakit	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	02	02	2,01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	bahan medis habis pakai,bahan kimia	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	02	02	2,01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	prasaran dan pendukung fasilitas yang terpelihara	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	alat kesehatan yang terpelihara	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	**02**	**02**	2,02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jasa kebersihan kantor pengelolaan limbah B3 retribusi sampah	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	02	02	2,02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	operasional pelayanan rumah sakit	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	02	02	2,02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	pelaksanaan akreditasi rumah sakit	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	**02**	**02**	2,03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**		
1	02	02	2,03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	02	02	2,03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	**02**	**02**	2,04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
1	02	02	2,04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan BLUD	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1	02	02	2,04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	rumah sakit menjadi rs tipe B	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
1	**03**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
1	03	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan Realisasi Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
1	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
1	03	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
1	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	JJumlah Pengadaan Komponen Listrik Penerangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	cetakan dan penggandaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
1	03	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2,07	03	Pengadaan Alat Besar	Pengadaan Alat Berat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
1	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
1	03	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya pajak kendaraan dinas, KIR	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2,09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat-alat besar dalam keadaan baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dan Bangunan lainyya yang terpelihara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan dan perlengkapan kantor dalam keadaan baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		
1	**03**	**02**	2,01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	03	02	2,01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2,01	05	Pembangunan Bendungan		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2,01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung yang terbangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2,01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tnggul sungai dibangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2,01	16	Pembangunan Check Dam	Jumlah Chek dam terbangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2,01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah embung yang dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2,01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	panjang tanggul sungai yang ditingkatkan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2,01	31	Rehabilitasi Check Dam	Jumlah Chek dam keadaan baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2,01	34	Peningkatan Tanggul Sungai	Pengamanan Sungai, Jalan, Sawah dan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2,01	41	Peningkatan Check Dam	Jumlah Chek dam yang ditingkatkan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2,01	45	Revitalisasi Danau	Luas Danau yang direvitalisasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2,01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2,01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dalam keadaan baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2,01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah tanggul yang dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2,01	58	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Pencegahan Erosi, Pengendalian Banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2,01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan pengelolaan SDA Kewenangan kabupaten/kota yang terbina	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**02**	2,02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		
1	03	02	2,02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersedianya	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2,02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Irigasi yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2,02	03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah bendung yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2,02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang irigasi yang ditingkatkan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2,02	09	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah bendung yang ditingkatkan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2,02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase daerah irigasi dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2,02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung yang direhabilitasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2,02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah D.I yang dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2,02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah bendung yang dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2,02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah petugas pengelola irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**		
1	**03**	**03**	2,01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**		
1	03	03	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	jumlah dokumen perencanaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	2,01	02	Supervisi Pembangunan/Peningk atan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	jumlah dokumen pengawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	2,01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	capaian kinerja pembangunan SPAM sambungan rumah daerah perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	2,01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	capaian kinerja pembangunan SPAM Sambungan rumah daerah perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	2,01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	capaian kinerja peningkatan SPAM sambungan rumah daerah perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	2,01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Capaia Kinerja peningkatan SPAM Sambungan rumah daerah pedesaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	2,01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Luas SPAM jaringan perpipaan di Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	2,01	08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang diperbaiki bukan jaringan perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	2,01	09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Terhadap tarif Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	2,01	10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah yang dibina	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	2,01	11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah yang dibina	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	2,01	12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah Fasilitas Penyiapan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	2,01	13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	2,01	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah yang dikembangkan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	2,01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM perkotaan perkotaan dalam keadaan baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	2,01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	jumlah SPAM baru bukan jaringan perpipaan kawasan pedesaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	03	03	2,01	17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah SPAM baru bukan jaringan perpipaan kawasan pedesaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	2,01	18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah SPAM baru bukan jaringan perpipaan kawasan perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	2,01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Luas SPAM jaringan perpipaan di Perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	2,01	20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Luas SPAM jaringan perpipaan di perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	2,01	21	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang diperbaiki bukan jaringan perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**		
1	**03**	**05**	2,01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
1	03	05	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	2,01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabili tasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah dokumen pengawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	2,01	03	Pembangunan/Penyedi aan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	jumlah sistem pengelolaan air Limbah terpusat skala kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	2,01	04	Rehabilitasi/Peningkata n/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	jumlah sistem pengeelol air limbah domestik terp skala kota yang direhab/tingkatkan/diper	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	2,01	05	Rehabilitasi/Peningkata n/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Capaian kinerja pembangunan sarana dan prasarana sanitasi jumlah RT yang terakses sanitasi Jumlah rumah tangga yang terakses sanitasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	2,01	06	Pembangunan/Penyedi aan Sub Sistem Pengolahan Setempat	sub sistem pengelolaan setempat yang dibangun/tersedia	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	2,01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	jumlah kelompok yang dibina	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	2,01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	kelompok masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	2,01	09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	kelompok masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	2,01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	jumlah sarana sanitasi terpelihara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	2,01	11	Supervisi Pembangunan/Rehabili tasi /Peningkatan/Perluasa n Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Dokumen Pengawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	2,01	12	Pembangunan/Penyedi aan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	jumlah pengelolaan air limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	2,01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	jumlah mobil pengangkut mobil tinja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	2,01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah mobil sedot tinja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	2,01	15	Pembangunan/Penyedi aan Sarana dan Prasarana IPLT	jumlah sarana dan prasarana IPLT	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	2,01	16	Rehabilitasi/Peningkata n/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	jumlah sarana dan prasarana IPLT	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	2,01	17	Supervisi Pembangunan/Rehabili tasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah dokumen pengawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**		
1	**03**	**06**	2,01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
1	03	06	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	jumlah dokumen perencanaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	06	2,01	02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	jumlah dokumen Outline Plan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	06	2,01	04	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	jumlah kawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	06	2,01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	panjang drainase yang terbangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	06	2,01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	panjang drainase yang ditingkatkan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	06	2,01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah kota kota yang drainasenya tertangani	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	06	2,01	08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	panjang sarana drainase perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	06	2,01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	panjang sistem drainase yang dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	06	2,01	10	Supervisi Pembangunan/Peningk atan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	jumlah dokumen pengawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	06	2,01	11	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan	jumlah kawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	06	2,01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terbangunnya saluran Pembuangan Air dari bahu jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	06	2,01	13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	panjang saluran drainase lingkungan yang ditingkatkan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	06	2,01	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	06	2,01	15	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	panjang sarana drainase lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	06	2,01	16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	**03**	**08**	2,01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**		
1	03	08	2,01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	jumlah izin yang diterbitkan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	08	2,01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan Jumlah Dokumen Pengawasan Jumlah Pembangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	08	2,01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	jumlah dokumen regulasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	08	2,01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	jumlah unit bangunan gedung negara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	08	2,01	05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen pengawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	08	2,01	06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	08	2,01	07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah bangunan gedung cagar budaya	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	08	2,01	08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	jumlah bangunan gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	08	2,01	09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	jumlah bangunan gedung penilikan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	08	2,01	10	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah bangunan gedung negara yang terdaftar	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	08	2,01	11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	jumlah bangunan gedung yang mendapatkan sertifikasi laik fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	08	2,01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	jumlah bangunan yang direhabilitasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	08	2,01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung daerah yang dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**		
1	**03**	**09**	2,01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**		
1	03	09	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	09	2,01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaa n Bangunan dan Lingkungan	jumlah dokumen pengawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	09	2,01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	jumlah kawasan perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	09	2,01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	jumlah bangunan yang dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	09	2,01	05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	jumlah kelompok masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	09	2,01	06	Monitoring Penataan/Pemeliharaa n Bangunan dan Lingkungan	capaian kinerja penataan kawasan perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		
1	**03**	**10**	2,01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**		
1	03	10	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen perencanaan penyelenggaraan jalan/jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2,01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Terbayarnya Lahan yang terkena Dampak Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2,01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya dokumen data kondisi jalan dan jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2,01	05	Pembangunan Jalan	Pembukaan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2,01	08	Rekonstruksi Jalan	Bertambahnya panjang jalan yang ditingkatkan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2,01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Direhabilitasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2,01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jalan terpelihara secara berkala	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2,01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jalan terpelihara secara rutin	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2,01	12	Pembangunan Jembatan	Bertambahnya jembatan yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2,01	17	Pelebaran Jembatan	Terwujudnya peningkatan kapasitas jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2,01	18	Rehabilitasi Jembatan	Bertambahnya unit jembatan yang direhabilitasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2,01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jembatan terpelihara secara rutin	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2,01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jumlah lokasi bencana yang ditangani	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2,01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen pengawasan penyelenggaraan jalan/jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**		
1	**03**	**11**	2,01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**		
1	03	11	2,01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Bertambahnya tenaga terampil yang bersertifikat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	11	2,01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	proyek tanpa kecelakaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	**03**	**11**	2,02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		
1	03	11	2,02	04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Persentase data dan proyek yang dilaksanakan dengan skema KPDBU	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	11	2,02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Persentase ketersediaan material dan peralatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**11**	2,03		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**		
1	03	11	2,03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	11	2,03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Badan usaha yang sesuai dengan SOP	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	11	2,03	05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Data IUJK Nasional yang telah ditertibkan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**11**	2,04		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**		
1	03	11	2,04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase jumlah penyedia jasa yang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		
1	**03**	**12**	2,02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		
1	03	12	2,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Materi Teknis Pengajuan PK RTRW	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	12	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Tersedianya RDTR	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**12**	2,03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		
1	03	12	2,03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terciptanya Investasi yang sesuai dengan Perda	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	12	2,03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Website Tentang Informasi Penataan Ruang Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**12**	2,04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		
1	03	12	2,04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terciptanya Investasi yang sesuai dengan Perda	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	12	2,04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terciptanya Investasi yang sesuai dengan Perda	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**		
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**		
2	**10**	**04**	2,01		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
2	10	04	2,01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	10	04	2,01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rapat-rapat koordinasi penyelesaian konflik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**		
2	**10**	**05**	2,01		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		
2	10	05	2,01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Tanah yang diganti rugi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	10	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	rapat-rapat koordinasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**		
2	**10**	**06**	2,01		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		
2	10	06	2,01	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	luas tanah yang didestribusi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	10	06	2,01	02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	inventarisasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	10	06	2,01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Koordinasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	10	06	2,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Koordinasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	**10**	**06**	2,02		**Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		
2	10	06	2,02	01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Daftar inventarisasi tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	10	06	2,02	02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Daftar ganti kerugian tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	**10**	**07**			**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**		
2	**10**	**07**	2,01		**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
2	10	07	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	10	07	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	10	07	2,01	03	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku	Tanah ulayat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	**10**	**08**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**		
2	**10**	**08**	2,01		**Penyelesaian Masalah Tanah Kosong**		
2	10	08	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemanfaatan tanah kosong	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	**10**	**08**	2,02		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**		
2	10	08	2,02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Daftar inventarisasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	10	08	2,02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong	jumlah lokasi tanah kosong yang sudah dimanfaatkan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	**10**	**09**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**		
2	**10**	**09**	2,01		**Penerbitan Izin Membuka Tanah**		
2	10	09	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Koordinasi dan sinkronisasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	10	09	2,01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Lokasi Pemanfaatan tanah negara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**		
2	**10**	**10**	2,01		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**		
2	10	10	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Pelaksanaan Koordinasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	10	10	2,01	02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi pemetaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	10	10	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Penerbitan sertifikat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
1	**04**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
1	04	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA SKPD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA SKPD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA SKPD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan Realisasi Kinerja	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
1	04	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
1	04	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
1	04	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat/komponen listrik	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
1	04	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
1	04	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
1	04	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Kantor	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		
1	**04**	**02**	2,01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		
1	04	02	2,01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**02**	2,03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		
1	04	02	2,03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah yang direhabilitasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	2,03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	2,03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah yang dibangun	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	**04**	**03**	2,02		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		
1	04	03	2,02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	2,02	03	Pembentukan/Pembina an Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Yang dibentuk	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	2,02	04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Kegiatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	2,02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaa n Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**03**	2,03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		
1	04	03	2,03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugara n Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	2,03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Unit Rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	2,03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaa n Permukiman Kumuh	jumlah dokumen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	2,03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Luas yang dibangun/dipugar/direm	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	2,03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen pendataan dan verifikasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**		
1	**04**	**04**	2,01		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**		
1	04	04	2,01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Unit Rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**		
1	**04**	**05**	2,01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**		
1	04	05	2,01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05	2,01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah unit perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Dokumen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA**		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
1	**05**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
1	05	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Data perencanaan	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya kegiatan laporan keuangan , LPPD, Laporan Kinerja,Perjanjian Kinerja, Perubahan Perjanjian Kinerja, ,DPA, Perubahan DPA, RKA , Perubahan RKA ,LKPJ	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
1	05	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
1	05	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan Tamu	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
1	05	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayan Umum Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
1	05	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		
1	**05**	**02**	2,01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		
1	05	02	2,01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2,01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelantikan Anggota Satlinmas	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2,01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Pembinaan Satgas PP dan Satlinmas	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**	2,02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	05	02	2,02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sangsi yang ditegakkan	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**	2,03		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**		
1	05	02	2,03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pengembangan PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		
1	**05**	**04**	2,01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
1	05	04	2,01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian kebakaran yang tertangani	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	2,01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pengadaan Mobil Pemadaman Kebakaran dan APD	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	2,01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Satgas Pemadam Kebakaran yang mempunyai sertifikat	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**04**	2,04		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		
1	05	04	2,04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Sosialisasi	Satuan Polisi Pamong Praja
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA**		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
1	**05**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
1	05	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
1	05	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
1	05	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
1	05	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
1	05	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemelharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		
1	**05**	**03**	2,01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**		
1	05	03	2,01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Penduduk diKawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	2,02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		
1	05	03	2,02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kemampuan Masyarakat Dalam Hal Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa Tangguh Bencana di Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Satuan Kejadian Bencana Yang Sudah Direhabilitasi dan Rekonstruksi Di Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen Rencana Kontijensi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kesiapsiagaan Warga dan Aparatur dalam Menghadapi Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	2,03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		
1	05	03	2,03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Dana Siap Pakai)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
1	**06**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
1	06	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
1	06	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
1	06	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas	Dinas Sosial
1	06	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pegawai mengikuti Bimtek peraturan Per undang- undangan	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
1	06	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Sosial
1	06	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Sosial
1	06	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Dinas Sosial
1	06	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan pengandaan	Dinas Sosial
1	06	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Dinas Sosial
1	06	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
1	06	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Sosial
1	06	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
1	06	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Dinas Sosial
1	06	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
1	06	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Dinas Sosial
1	06	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perpanjangan Surat- surat Kendaraan Dinas, Perizinan Kendaraan Dinas	Dinas Sosial
1	06	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	Dinas Sosial
1	06	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Laptop, Printer, dan Alat Komputer Lainnya	Dinas Sosial
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		
1	**06**	**02**	2,01		**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**		
1	06	02	2,01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Penyuluh untuk Pemantapan Psikologi warga KAT	Dinas Sosial
1	**06**	**02**	2,03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		
1	06	02	2,03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah karang taruna yang diberdayakan	Dinas Sosial
1	06	02	2,03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan/ TKSK	Dinas Sosial
1	06	02	2,03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial yang ditangani di LK3 per Tahun	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		
1	**06**	**04**	2,01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		
1	06	04	2,01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS Yang Memperoleh Alat Bantu	Dinas Sosial
1	06	04	2,01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang Memperoleh Bimbingan	Dinas Sosial
1	06	04	2,01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Julah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar sera Gelandangan Pengemis di Luar Pani Sosial	Dinas Sosial
1	**06**	**04**	2,02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		
1	06	04	2,02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Pemberian Bimbingan Sosial Kpada yang bukan penderita HIV/AIDs dan NAPZA	Dinas Sosial
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		
1	**06**	**05**	2,01		**Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar**		
1	06	05	2,01	01	Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Anak Dalam Penjangkauan Anak Terlantar (Hak Hidup, Hak Tumbuh Kembang, Hak Partisipasi dan Hak Perlindungan)	Dinas Sosial
1	06	05	2,01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial menjadi Rujukan Dasar Anak Terlantar (TEPSA)	Dinas Sosial
1	06	05	2,01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Dinas Sosial Memantau dan Menjangkau 4 Hak Dasar Anak (Hak Hidup, Hak Tumbuh Kembang, Hak Partisipasi dan Hak Perlindungan	Dinas Sosial
1	**06**	**05**	2,02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		
1	06	05	2,02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Memiliki Data Fakir Miskin dan OTM Terupdate pada Tahun Berjalan	Dinas Sosial
1	06	05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang dikelola Datanya dan menerima bantuan	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	06	05	2,02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Pemberian Bantuan Sosial Berbasis Keluarga dan Wanita Rawan Sosial	Dinas Sosial
1	06	05	2,02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan Stimulan Bantuan Sosial yang ada	Dinas Sosial
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		
1	**06**	**06**	2,01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		
1	06	06	2,01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah KK yang menerima bantuan bencana alam	Dinas Sosial
1	06	06	2,01	02	Penyediaan Sandang	Bahan Sandang Korban Bencana	Dinas Sosial
1	06	06	2,01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tempat Penampungan Korban Bencana	Dinas Sosial
1	06	06	2,01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Pelayanan Dukungan Korban Bencana	Dinas Sosial
1	06	06	2,01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Pelayanan Dukungan Psikososial Korban Bencana	Dinas Sosial
1	**06**	**06**	2,02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**		
1	06	06	2,02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terbentuknya Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	Dinas Sosial
1	06	06	2,02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terbentuknya SDM TAGANA	Dinas Sosial
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		
1	**06**	**07**	2,01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**		
1	06	07	2,01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang terpelihara	Dinas Sosial
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**		
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		
8	**01**	**02**	2,01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		
8	01	02	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Upacar Hari Pahlawan Nasional	Dinas Sosial
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
2	**07**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
2	07	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
2	07	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
2	07	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Barang cetakan dan penggandaan	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	07	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening listrik telepon internet dan air	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	07	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		
2	**07**	**03**	2,01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**		
2	07	03	2,01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari kerja yang mendapat pendidikan dan Pelatihan ketrampilan	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**03**	2,02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**		
2	07	03	2,02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		
2	**07**	**04**	2,03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		
2	07	04	2,03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**04**	2,04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**		
2	07	04	2,04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**04**	2,05		**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		
2	07	04	2,05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		
2	**07**	**05**	2,01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		
2	07	05	2,01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	07	05	2,01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan		Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2,01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**05**	2,02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**		
2	07	05	2,02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2,02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2,02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2,02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Tenaga Kerja
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**		
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
2	**09**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
2	09	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA SKPD	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA SKPD	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA SKPD	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan realisasi kinerja	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
2	09	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
2	09	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
2	09	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah tangga	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
2	09	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan kendaraan dinas lapangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	09	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	09	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin kantor	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**		
2	**09**	**02**	2,01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		
2	09	02	2,01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana lumbung pangan dan gudang cadangan pangan daerah	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	**09**	**03**	2,01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**		
2	09	03	2,01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Analisis NBM	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	03	2,01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**03**	2,02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**		
2	09	03	2,02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Cadangan pangan pemerintah	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**03**	2,03		**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**		
2	09	03	2,03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Koordinasi dan sinkronisasi peraturan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**03**	2,04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**		
2	09	03	2,04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Survei pola pangan harapan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	03	2,04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan pekarangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		
2	**09**	**04**	2,01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**		
2	09	04	2,01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah survei data dasar rumah tangga	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**04**	2,02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**		
2	09	04	2,02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersalurnya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		
2	**09**	**05**	2,01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**		
2	09	05	2,01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**		
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		
3	**25**	**03**	2,01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		
3	25	03	2,01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan sampan untuk nelayan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	03	2,01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan alat tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	**25**	**03**	2,02		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
3	25	03	2,02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Restoking ikan di sungai dan danau	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	03	2,02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Pembinaan kelembagaan kelompok nelayan di kabupaten toba	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	**25**	**03**	2,04		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		
3	25	03	2,04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Peraturan persyaratan dan prosedur pendaftaran kapal perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	**25**	**03**	2,06		**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		
3	25	03	2,06	02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Penerbitan pendaftaran kapal perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		
3	**25**	**04**	2,02		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**		
3	25	04	2,02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengadaan benih ikan dan pakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	**25**	**04**	2,03		**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		
3	25	04	2,03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	04	2,03	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil (TDPIK)	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	**25**	**04**	2,04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		
3	25	04	2,04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi pembudidayaan ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	04	2,04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya prasarana budidaya ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	04	2,04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya benih ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	25	04	2,04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	pembinaan kelompok pembudidayaan ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**		
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
2	**11**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
2	11	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
2	11	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
2	11	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	alat kebersihan dan bahan pembersih	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan, fotokopy dan penggandaan	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	koran dan majalah	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	rakor dalam dan luar daerah	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
2	11	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	11	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik dan internet	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	honorarium pengelola keuangan dan tenaga kontrak	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	11	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan laptop, pc, mesin kantor dan printer	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		
2	**11**	**02**	2,01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**		
2	11	02	2,01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen RPPLH	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	2,01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	pengawasan pelaksanaan RPPLH	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**02**	2,02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**		
2	11	02	2,02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	dokumen KLHS RDTR	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		
2	**11**	**03**	2,01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		
2	11	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	pemantauan kualitas lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**	2,02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		
2	11	03	2,02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	papan himbauan	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**	2,03		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		
2	11	03	2,03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	jumlah usaha yang mentaati peraturan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		
2	**11**	**04**	2,01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**		
2	11	04	2,01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	pemeliharaan taman kota	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		
2	**11**	**06**	2,01		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		
2	11	06	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	persentase persetujuan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2,01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	diklat pplh dan ppns	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2,01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha yang dimonitoring	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Persentase Penertiban Usaha	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**		
2	**11**	**07**	2,01		**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	11	07	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	data MHA	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**07**	2,02		**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**		
2	11	07	2,02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Pelatihan MHA	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		
2	**11**	**08**	2,01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
2	11	08	2,01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	penyuluhan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**		
2	**11**	**10**	2,01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**		
2	11	10	2,01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	persentase penanganan kasus lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		
2	**11**	**11**	2,01		**Pengelolaan Sampah**		
2	11	11	2,01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	penyusunan peraturan bupati tentang pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2,01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	penanganan sampah	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2,01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya sosialisasi perda/perbup atau penyuluhan tentang pengelolaan sampah	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2,01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	cakupan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2,01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tercapainya pengelolaan sampah	Dinas Lingkungan Hidup
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
2	**12**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
2	12	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	capaian dan realisasi kinerja	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
2	12	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
2	12	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas pegawai Dukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
2	12	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
2	12	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan kendaraan dinas kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan meja dan kursi kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan mesin kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pengadaan sarana dan prsarana pendukung gedung kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	12	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	12	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas perorangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas lapanga	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jasa pemeliharaan mesin kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung kantor dan bangunan lainnya terpelihara	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	**12**	**02**	2,01		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		
2	12	02	2,01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan dokumen terhadap warga negara asing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2,01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	pelayanan langsung kemasyarakat dalam pembuatan kartu keluarga	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2,01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan langsung ke masyarakat dalam pembuatan E-KTP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**	2,02		**Penataan Pendaftaran Penduduk**		
2	12	02	2,02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	blanko KIA, tinta	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**	2,03		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**		
2	12	02	2,03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jaringan pemanfaatan data kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**	2,04		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**		
2	12	02	2,04	03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Bimtek pendaftaran penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		
2	**12**	**03**	2,01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**		
2	12	03	2,01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan langsung ke masyarakat dalam pembuatan akta lahir	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**03**	2,02		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		
2	12	03	2,02	03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan langsung ke masyarakat dalam pembuatan akta kawin	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	2,02	08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	sosialisasi tentang penerbitan dokumen kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**03**	2,03		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		
2	12	03	2,03	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Pembinaan dan pengawasan terhadap kepemilikan dokumen kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	2,03	04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Bimtek yang diiukuti ASN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		
2	**12**	**04**	2,01		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**		
2	12	04	2,01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD pengguna Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2,01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Inventarisasi kepuasan pelayanan kemasyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**	2,04		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		
2	12	04	2,04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Bimtek Sistem Administrasi Kependudukan dan pengelolaan data kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		
2	**12**	**05**	2,01		**Penyusunan Profil Kependudukan**		
2	12	05	2,01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Penyusunan profil data kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		
2	**08**	**02**	2,02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**		
2	08	02	2,02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah orang yang dilatih Bidang Politik,Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**02**	2,03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		
2	08	02	2,03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Paket KIE yang dibuat dan didistribusikan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		
2	**08**	**03**	2,01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		
2	08	03	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO pada Perangkat Daerah yang sudah di Evaluasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**	2,03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
2	08	03	2,03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		
2	**08**	**04**	2,01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
2	08	04	2,01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Paket KIE yang dibuat dan didistribusikan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	**08**	**05**	2,01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
2	08	05	2,01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki Data Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		
2	**08**	**06**	2,01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**		
2	08	06	2,01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten Layak Anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak Desa/Kel Anak yang terbentuk	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**06**	2,02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**		
2	08	06	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan yang dilakukan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		
2	**08**	**07**	2,01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		
2	08	07	2,01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan yang ditangani	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
2	**13**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
2	13	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	capaian dan realisasi kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**13**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
2	13	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan asn	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**13**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
2	13	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pegawai mengikuti bimtek peraturan perundang- undangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**13**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
2	13	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor per tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	rapat koordinasi dan konsultasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**13**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
2	13	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	mebel	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**13**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	13	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jasa surat menyurat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jasa pelayanan umum kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**13**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	13	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	pemeliharaan mebel	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**		
2	**13**	**02**	2,01		**Penyelenggaraan Penataan Desa**		
2	13	02	2,01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	jumlah desa yang difasilitasi tentang kewenangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	02	2,01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	jumlah desa difasilitasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**		
2	**13**	**03**	2,01		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**		
2	13	03	2,01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	jumlah kerjasama yang difasilitasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		
2	**13**	**04**	2,01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**		
2	13	04	2,01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah desa yang dibina	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	04	2,01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	jumlah peraturan bupati tentang ADD, DD dan bagi hasil pajak serta sosialisasi peraturan bupati	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	04	2,01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan pengelolaan keuangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	04	2,01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	jumlah aparatur desa yang dibina	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	04	2,01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	jumlah pengurus BUM Desa yang terlatih	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	04	2,01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	jumlah aparatur desa yang difasilitasi menyusun profil desa berbasis website	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	04	2,01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	jumlah aparatur desa yang difasilitasi menyusun aset desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	04	2,01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	jumlah anggota BPD yang dibina dalam menyusun administrasi BPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	04	2,01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	jumlah desa yang terpasilitasi terkait batas desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	04	2,01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah desa yang diperlombakan dalam pelaksanaan perlombaan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	**13**	**05**	2,01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
2	13	05	2,01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	jumlah desa yang memiliki masyarakat hukum adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	05	2,01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah LKD dan LAD yang sudah tertata	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	05	2,01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah LKD dan LAD yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	05	2,01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah sarana dan prasarana LKD dan LAD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	05	2,01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	jumlah lembaga yang dibina ex-PNPM	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	05	2,01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah posyantek yang dibentuk	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	05	2,01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	jumlah desa yang melaksanakan gotong royong masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	05	2,01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah PKK yang dibina	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
2	**14**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
2	14	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
2	14	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
2	14	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	pegawai mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
2	14	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Alat-alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Bulanan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangundangan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
2	14	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operaonal/Lapangan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	14	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	14	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik dan internet	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Kontrak/Honorer dan Pengelola Keuangan OPD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	14	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas /Operasional yang terpelihara per tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin- Mesin Kantor terpelihara	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		
2	**14**	**02**	2,01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**		
2	14	02	2,01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen GDPK 5 pilar yang tersusun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2,01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	sekolah formal, non formal yang melakukan pendidikan kependudukan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**02**	2,02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		
2	14	02	2,02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2,02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya data pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2,02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	laporan data pengendalian penduduk dan pelayanan KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		
2	**14**	**03**	2,01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**		
2	14	03	2,01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kenncana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2,01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangga Kencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2,01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Penyediaan sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga di Balai Penyuluhan KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**	2,02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		
2	14	03	2,02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB oleh PKB/PLKB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2,02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Persentase Penyuluh KB/PLKB yang melakukan pembinaan kesertaan ber-KB dalam upaya menurunkan DO	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2,02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Ratio petugas Pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa /Kelurahan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**	2,03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		
2	14	03	2,03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2,03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2,03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan sarana dan prasarana trasnportasi dan pelayanan KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2,03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Persentase Peserta KB Aktif	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2,03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	PUS yang dikonseling tentang Kesehatan Reproduksi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2,03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Tenaga Pelayanan KB mendapatkan fasilitasi kompetensi (Kumulatif)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2,03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**	2,04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	14	03	2,04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB pada Kegiatan Momentum (PKK-KB- Kes, IBI-KB-Kes, TN-KB-Kes)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2,04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Persentase perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan daerah melalui Kampung KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		
2	**14**	**04**	2,01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		
2	14	04	2,01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Sarana dan Prasana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diadakan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2,01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) yang dilatih dan diorientasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2,01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Kelompok BKB dan BKL) yang mendapatkan promosi dan sosialisasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2,01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Pembinaan Kelompok PIK R dan BKR dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**04**	2,02		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		
2	14	04	2,02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	kelompok keluarga yang mengikuti pemberdayaan ekonomi keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**		
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
2	**15**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
2	15	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
2	15	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	capaian dan realisasi kinerja	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
2	15	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
2	15	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas	Dinas Perhubungan
2	15	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
2	15	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Alat Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan
2	15	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan
2	15	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	Dinas Perhubungan
2	15	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan
2	15	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Dinas Perhubungan
2	15	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Perhubungan
2	15	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Aplikasi SIPD	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
2	15	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Kantor	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	15	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan
2	15	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	15	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Dinas Perhubungan
2	15	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Kantor	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		
2	**15**	**02**	2,01		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**		
2	15	02	2,01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Sosialisasi	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2,02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		
2	15	02	2,02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan
2	15	02	2,02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan LPJU dan Pemasangan Lampu LPJU	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2,05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**		
2	15	02	2,05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	alat uji	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	15	02	2,05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji	Dinas Perhubungan
2	15	02	2,05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Alat Uji	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2,06		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		
2	15	02	2,06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	pengamanan dan rekayasa lalu lintas	Dinas Perhubungan
2	15	02	2,06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu lintas	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2,08		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**		
2	15	02	2,08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	pelaksanaan inspeksi, audit (razia)	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**		
2	**15**	**03**	2,12		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**		
2	15	03	2,12	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	manifest penumpang	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
2	**16**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
2	16	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
2	16	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2,04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		
2	16	01	2,04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Menara/ Objek Retribusi	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
2	16	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
2	16	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah tangga	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan Tamu	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
2	16	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	16	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat-menyurat	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	16	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaran gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**02**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		
2	**16**	**02**	2,01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		
2	16	02	2,01	06	Pelayanan Informasi Publik	Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2,01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Konfrensi dan Temu Pers	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2,01	13	Penyediaan/Pengadaa n Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**		
2	**16**	**03**	2,01		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		
2	16	03	2,01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan website dan sub domain pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	16	03	2,01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Cakupan Koneksi, Perangkat Internet/Intranet pada OPD,UPT,Ruang Publik dan Kecamatan (OPD 44,UPT Dinas Pendidikan 17,UPT Kesehatan 19, Ruang Publik 20, Total 100 Titik Jaringan)	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**	2,02		**Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		
2	16	03	2,02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perda Tentang Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2,02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai Indeks SPBE yang ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2,02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Command Center, Data Center, server dan perlengkapannya	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2,02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Gaji Tenaga ahli Programmer	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2,02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan Smart City	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2,02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Penerapan ilmu pengetahuan teknologi informasi, Pengkajian serta penelitian bidang informasi dan informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2,02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengembangan ekosistim SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**		
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**		
2	**20**	**02**	2,01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		
2	20	02	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Pengumpulan dan pengolahan data statistik sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	2,01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Meta Data Kegiatan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	2,01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Peserta Sosialisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**		
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**		
2	**21**	**02**	2,01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		
2	21	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah Penyelenggaraan Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	2,01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	2,01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**		
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
2	**17**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
2	17	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan Realisasi Kinerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	**17**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
2	17	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	**17**	**01**	2,03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		
2	17	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	**17**	**01**	2,04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		
2	17	01	2,04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Target Retribusi Pasar	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	**17**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
2	17	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	**17**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
2	17	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	17	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	**17**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
2	17	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	**17**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	17	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	**17**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	17	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**		
2	**17**	**03**	2,01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		
2	17	03	2,01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Koperasi yang Mandiri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	03	2,01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Aktif yang Diperiksa dan Diawasii	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**		
2	**17**	**04**	2,01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		
2	17	04	2,01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Akuntabilitas Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	04	2,01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat Penghargaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		
2	**17**	**05**	2,01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
2	17	05	2,01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pelatihan Bagi Anggota Koperasi Aktif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		
2	**17**	**06**	2,01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
2	17	06	2,01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**		
2	**17**	**07**	2,01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**		
2	17	07	2,01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Data UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	07	2,01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	17	07	2,01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Izin yang dikeluarkan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	07	2,01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pemasaran Produk UMKM Secara Digital	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	07	2,01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Koordinasi dan sinkronisasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**		
2	**17**	**08**	2,01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**		
2	17	08	2,01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**		
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**		
3	**30**	**02**	2,02		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**		
3	30	02	2,02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Gudang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**		
3	**30**	**03**	2,01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**		
3	30	03	2,01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Revitalisasi Pasar Rakyat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	30	03	2,01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Ketersediaan Tempat Berdagang dan penyediaan Sarana Prasarana Pasar	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**		
3	**30**	**04**	2,01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**		
3	30	04	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Monitoring dan Pengawasan Barang Kadaluarsa dan LPG 3 Kg	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	**30**	**04**	2,02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**		
3	30	04	2,02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pendataan Harga Pangan Komoditi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	30	04	2,02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar/Pasar Murah Menjelang HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	**30**	**04**	2,03		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
3	30	04	2,03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Monitoring dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**		
3	**30**	**06**	2,01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**		
3	30	06	2,01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	30	06	2,01	02	Pengawasan/Penyuluh an Metrologi Legal	Sosialisasi Alat UTTP dan Perlengkapannya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**		
3	**30**	**07**	2,01		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**		
3	30	07	2,01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Mengikuti Event-Event Promosi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	30	07	2,01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Data Informasi Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**		
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		
3	**31**	**02**	2,01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**		
3	31	02	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	31	02	2,01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	31	02	2,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Fasilitasi IKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**		
3	**31**	**03**	2,01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	31	03	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Industri yang difasilitasi Pemenuhan Komitmen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	31	03	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Izin Usaha IKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**		
3	**31**	**04**	2,01		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**		
3	31	04	2,01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Data IKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**		
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		
2	**07**	**03**	2,01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**		
2	07	03	2,01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	07	03	2,01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Angkatan kerja yang memiliki keterampilan/skill sehingga mampu berkompetitif dan produktif	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		
2	**07**	**04**	2,03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		
2	07	04	2,03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**04**	2,05		**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		
2	07	04	2,05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Retribusi PAD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		
2	**07**	**05**	2,02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**		
2	07	05	2,02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	07	05	2,02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten/kota yang diberdayakan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**		
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
2	**18**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
2	18	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan Realisasi Kinerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
2	18	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
2	18	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
2	18	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
2	18	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin lainnya	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	**18**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	18	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	18	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		
2	**18**	**02**	2,02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**		
2	18	02	2,02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Umum Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	02	2,02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Peta Potensi dan Peluang Usaha	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**		
2	**18**	**03**	2,01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		
2	18	03	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		
2	**18**	**04**	2,01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**		
2	18	04	2,01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	04	2,01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan yang tertangani	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		
2	**18**	**05**	2,01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		
2	18	05	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaksanaan Pembinaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**		
2	**18**	**06**	2,01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
2	18	06	2,01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Ketersediaan data	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**		
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
2	**23**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
2	23	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan Realisasi Kinerja	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
2	23	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
2	23	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	23	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Arsip Dinamis SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
2	23	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	23	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	23	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Kendaraan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		
2	**23**	**02**	2,01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
2	23	02	2,01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Layanan perpustakaan elektronik yang berkembang dan Terpelihara	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2,01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Yang Berkembang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2,01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kekhasan koleksi perpustakaan yang dikembangkan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2,01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan yang ditingkatkan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2,01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Koleksi Bahan Pustaka yang dikelola dan dikembangkan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2,01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data-data dan informasi perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**	2,02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
2	23	02	2,02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Pemustaka yang ikut serta dalam sosialisasi budaya baca dan literasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2,02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah peserta pengembangan literasi inklusi sosial	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**		
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		
2	**24**	**02**	2,01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**		
2	24	02	2,01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terciptanya dan Tertatanya Dokumen/Arsip Daerah di OPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2,01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Arsip Dinamis yang dipelihara dan disusutkan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2,01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	2,02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**		
2	24	02	2,02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Arsip Statis yang diakuisisi, diolah, dipreservasi dan diakses	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	2,03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**		
2	24	02	2,03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelola arsip yang dilatih dalam pengelolaan arsip secara baku	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		
2	**24**	**03**	2,01		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**		
2	24	03	2,01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Peraturan tentang Kearsipan dan Jadwal retensi arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**		
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		
2	**22**	**02**	2,01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
2	22	02	2,01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	terlestarikannya objek pemajuan kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	02	2,01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	semakin meningkatnya kapasitas sdm/lembaga kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	**22**	**02**	2,02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
2	22	02	2,02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	terlestarikannya tradisi budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	02	2,02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	semakin meningkatnya kapasitas sdm/lembaga dan pranata tradisional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	**22**	**05**	2,01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**		
2	22	05	2,01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	terdaftarnya/terdatanya objek diduga cagar budaya kabupaten	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**		
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
3	**26**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
3	26	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan Realisasi Kinerja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	**26**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
3	26	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	**26**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
3	26	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	**26**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
3	26	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	**26**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
3	26	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	**26**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
3	26	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		
3	**26**	**02**	2,03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**		
3	26	02	2,03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	02	2,03	04	Pengadaan/Pemelihara an/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terbangunnya sarana pariwisata di lokasi Wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		
3	**26**	**03**	2,01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**		
3	26	03	2,01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Media dan Sarana Informasi, Publikasi dan Iklan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	03	2,01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	03	2,01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Promosi dan Pemasaran Pariwista	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	03	2,01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Mitra	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	03	2,01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Monitoring dan Evaluasi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		
3	**26**	**05**	2,01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**		
3	26	05	2,01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Pengembangan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	05	2,01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	05	2,01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksannya Monitoring dan Evaluasi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**		
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**		
2	**17**	**08**	2,01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**		
2	17	08	2,01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Dinas Pertanian
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
3	**27**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
3	27	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	27	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA SKPD	Dinas Pertanian
3	27	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA SKPD	Dinas Pertanian
3	27	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD	Dinas Pertanian
3	27	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA SKPD	Dinas Pertanian
3	27	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan realisasi kinerja	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
3	27	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pertanian
3	27	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2,03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		
3	27	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Monitoring barang milik daerah di SKPD	Dinas Pertanian
3	27	01	2,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Pertanian
3	27	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Dinas Pertanian
3	27	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2,04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		
3	27	01	2,04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tata laksana pengelolaan retribusi daerah	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
3	27	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Dinas Pertanian
3	27	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas	Dinas Pertanian
3	27	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Dinas Pertanian
3	27	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Dinas Pertanian
3	27	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kualitas SDM Pegawai	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
3	27	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pertanian
3	27	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Pertanian
3	27	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	Dinas Pertanian
3	27	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor	Dinas Pertanian
3	27	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pertanian
3	27	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	Dinas Pertanian
3	27	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan tamu	Dinas Pertanian
3	27	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dinas Pertanian
3	27	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem berbasis elektronik	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
3	27	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kERNDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Dinas Pertanian
3	27	01	2,07	03	Pengadaan Alat Besar	Traktor Roda 4	Dinas Pertanian
3	27	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	Dinas Pertanian
3	27	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
3	27	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat	Dinas Pertanian
3	27	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, air dan listrik	Dinas Pertanian
3	27	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
3	27	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	Dinas Pertanian
3	27	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mebel	Dinas Pertanian
3	27	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan mesin kantor	Dinas Pertanian
3	27	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Dinas Pertanian
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		
3	**27**	**02**	2,01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**		
3	27	02	2,01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengadaan dan Pengawasan Penggunaan Alat Mesin Pertanian	Dinas Pertanian
3	27	02	2,01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase jumlah kelompok tani yang dilakukan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Dinas Pertanian
3	**27**	**02**	2,02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**		
3	27	02	2,02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Benih/bibit yang dikembangkan	Dinas Pertanian
3	27	02	2,02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pengadaan benih/bibit tanaman bagi kelompok tani	Dinas Pertanian
3	**27**	**02**	2,05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
3	27	02	2,05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Ternak unggul yang dikembangkan	Dinas Pertanian
3	27	02	2,05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah produksi bibit ternak	Dinas Pertanian
3	**27**	**02**	2,06		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**		
3	27	02	2,06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan bibit ternak bagi masyarakat Kab. Toba	Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		
3	**27**	**03**	2,01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**		
3	27	03	2,01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta lahan pertanian berkelanjutan dan peraturannya	Dinas Pertanian
3	27	03	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung lainnya	Dinas Pertanian
3	27	03	2,01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Materplant pengembangan prasarana, sarana, kawasan, dan komoditas perkebunan	Dinas Pertanian
3	**27**	**03**	2,02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**		
3	27	03	2,02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pembangunan/rehabilita jaringan irigasi usaha tan	Dinas Pertanian
3	27	03	2,02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Pembangunan/rehabilita embung pertanian	Dinas Pertanian
3	27	03	2,02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan/rehabilita jalan usaha tani	Dinas Pertanian
3	27	03	2,02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Pembangunan DAM Parit	Dinas Pertanian
3	27	03	2,02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Pembangunan / Rehabilitasi BPP	Dinas Pertanian
3	27	03	2,02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Prasarana pertanian lainnya	Dinas Pertanian
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**		
3	**27**	**04**	2,01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
3	27	04	2,01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pemeriksaan , Pengobatan dan Pencegahan penyakit hewan dan Zoonosis	Dinas Pertanian
3	27	04	2,01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan , Pengobatan dan Pencegahan penyakit hewan menular	Dinas Pertanian
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**		
3	**27**	**05**	2,01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**		
3	27	05	2,01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengadaan sarana OPT dan Sosialisasi Pengendalian OPT	Dinas Pertanian
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		
3	**27**	**07**	2,01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		
3	27	07	2,01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Rasio Penyuluh terhadap kegiatan Demplot	Dinas Pertanian
3	27	07	2,01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani aktif	Dinas Pertanian
3	27	07	2,01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah kecamatan yang memiliki Kantor Balai Penyuluh Pertanian dan Sarana Pendukung	Dinas Pertanian
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
4	**01**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
4	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan realisasi kinerja	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
4	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan administrasi ASN	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	**01**	**01**	2,03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		
4	01	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Barang milik daerah yang aman	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang yang tersedia	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyimpanan dan Penyaluran barang	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	**01**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
4	01	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya profesional ASN	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
4	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen listrik dan elektronik	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaan	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan tamu	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	**01**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pengadaan kelengkapan kantor lainnya	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sewa perlengkapan kegiatan	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
4	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin kantor	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan peralatan gedung kantor dan bangunan lainnya	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dan bangunan lainnya	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	**01**	**01**	2,11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		
4	01	01	2,11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan tunjangan Kepala daerah dan Wakil kepala daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pengadaan pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Medical check up	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	**01**	**01**	2,12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		
4	01	01	2,12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah tangga kepala daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	**01**	**01**	2,13		**Penataan Organisasi**		
4	01	01	2,13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Peraturan terkait penataan kelembagaan perangkat daerah yang sudah ditetapkan	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Perangkat daerah yang memiliki dokumen standart pelayanan	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan aktifitas kegiatan pokok 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan pelaksanaan monitoring evaluasi SOP perangkat daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	**01**	**01**	2,14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		
4	01	01	2,14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah layanan keprotokolan kegiatan pimpinan daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi komunikasi pimpinan daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	01	2,14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumentasi kegiatan pimpinan daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		
4	**01**	**02**	2,01		**Administrasi Tata Pemerintahan**		
4	01	02	2,01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Laporan pelaksanaan penilaian kecamatan terbaik	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	02	2,01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen administrasi kewilayahan	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	02	2,01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Laporan pelaksanaan otonomi daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	**01**	**02**	2,02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		
4	01	02	2,02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi peringatan hari besar keagamaan	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	02	2,02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Laporan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	02	2,02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Laporan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	**01**	**02**	2,03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		
4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah perda yang disahkan	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah penanganan perkara yang difasilitasi	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	02	2,03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Informasi produk hukum	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	**01**	**02**	2,04		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**		
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerjasama	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	02	2,04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah kerjasama	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	02	2,04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah evaluasi kerjasama	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		
4	**01**	**03**	2,01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		
4	01	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah kebijakan	Sekretariat Daerah Kabupaten

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	01	03	2,01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan pengendalian perekonomian	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	03	2,01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah kebijakan ekonomi mikro	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	03	2,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah kebijakan	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	**01**	**03**	2,02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		
4	01	03	2,02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah program/kegiatan yang terlaksana	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	03	2,02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	03	2,02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan pembangunan	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	**01**	**03**	2,03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		
4	01	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	03	2,03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase jumlah layanan LPSE terhadap pengguna aplikasi	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	01	03	2,03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah SDM P yang mengikuti pelatihan/sosialisasi/bim teknis peraturan pengad barang/jasa	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	**01**	**03**	2,04		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		
4	01	03	2,04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen hasil evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Sekretariat Daerah Kabupaten
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**		
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
4	**02**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
4	02	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
4	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	2,03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		
4	02	01	2,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Belanja Premi Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
4	02	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis ASN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
4	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan Minum Tamu dan Rapat-Rapat Pengisian Ulang Bahan Logistik Kantor	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
4	02	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Kantor dan Rumah Dinas	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
4	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
4	02	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pengurusan BPKB, Pajak Kendaraan dan STNK	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Kantor	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Rumah Dinas	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	2,15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		
4	02	01	2,15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Gaji dan Tunjangan DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2,15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2,15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Medical Check-Up Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	2,16		**Layanan Administrasi DPRD**		
4	02	01	2,16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		
4	**02**	**02**	2,01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		
4	02	02	2,01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2,01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Pembahasan Perda Inisiatif DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	2,03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	02	02	2,03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Alat Kelengkapan Lainnya	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	2,04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**		
4	02	02	2,04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2,04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2,04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumentasi Kegiatan Rapat Paripurna	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	2,05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		
4	02	02	2,05	03	Pelaksanaan Reses	Kegiatan Reses DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	2,08		**Fasilitasi Tugas DPRD**		
4	02	02	2,08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kunjungan Kerja DPRD Dalam dan Luar Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2,08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rapat Paripurna DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		
5	**01**				**PERENCANAAN**		
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
5	**01**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
5	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan realisasi kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
5	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
5	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN yang terampil dan berwawasan luas	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
5	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan bangunan kantor	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Konsumsi kunjungan tamu	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
5	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Meubelair lengkap	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin kantor	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
5	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet, air dan listrik yang lengkap	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
5	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin kantor	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor terpelihara dengan baik	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**		
5	**01**	**02**	2,01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**		
5	01	02	2,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Pelaksanaaan forum lintas OPD	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2,01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan musrenbang Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	01	02	2,01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Pelaksanaan musrenbang RKPD di kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2,01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**02**	2,03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**		
5	01	02	2,03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	laporan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		
5	**01**	**03**	2,01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**		
5	01	03	2,01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2,01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**03**	2,02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
5	**02**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
5	02	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan Realisasi Kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
5	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
5	02	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
5	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan minuman tamu dan kegiatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
5	02	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
5	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
5	02	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa pemeliharaan dan pajak kenderaan dinas	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala mesin- mesin kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		
5	**02**	**02**	2,01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	02	02	2,01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	dokumen KUA/PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	dokumen perubahan KUA/ perubahan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	2,02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		
5	02	02	2,02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Pembayaran atas beban APBD dan laporan pengelolaan kas daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan bulanan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemoton gan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Buku Kas Umum Pemerin dan Berita Acara RekonsiliasiPemungutan/ dan Penyetoran Perhitun Ketiga (PFK)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	2,03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		
5	02	02	2,03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Perbup tentang pengelolaan keuangan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	2,04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		
5	02	02	2,04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Belanja Tidak Terduga dan Bantuan Sosial Tidak DIprediksi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		
5	**02**	**03**	2,01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**		
5	02	03	2,01	01	Penyusunan Standar Harga	Peraturan Bupati Satuan Standar Harga	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2,01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kebijakan/aturan pengelolaan barang milik daerah Pemkab Toba	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2,01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan barang milik daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2,01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan inventarisasi barang milik daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2,01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Laporan penghapusan barang milik daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2,01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Rekonsiliasi BMD Pemkab Toba	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2,01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan barang milik daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		
5	**02**				**KEUANGAN**		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
5	**02**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
5	02	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan Realisasi Kinerja	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
5	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
5	02	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
5	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan minuman tamu dan kegiatan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
5	02	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan operasional atau lapangan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlalatan gedung kantor	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
5	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
5	02	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa pemeliharaan dan pajak kenderaan dinas	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala mesin- mesin kantor	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		
5	**02**	**04**	2,01		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**		
5	02	04	2,01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Analisa pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	2,01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Regulasi pengelolaan pajak daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	2,01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pelaksanaan penyuluhan pajak daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	2,01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Aplikasi pengelolaan pajak daerah Aplikasi pengelolaan pajak daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	2,01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Data objek/wajib pajak daerah Data objek/wajib pajak daerah Data objek/wajib pajak daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	2,01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Basis data pajak daerah yang akurat dan mutakhir Basis data pajak daerah yang akurat dan mutakhir	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	2,01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Laporan penilaian objek pajak PBB-P2 dan BPHTB	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	2,01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	2,01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah Laporan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	2,01	11	Penagihan Pajak Daerah	Realisasi piutang pajak daerah dan evaluasi data piutang pajak daerah serta pelaksanaan proses penagihan Realisasi piutang pajak daerah dan evaluasi data piutang pajak daerah serta pelaksanaan proses penagihan Realisasi piutang pajak daerah dan evaluasi data piutang pajak daerah serta pelaksanaan proses	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	2,01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian keberatan pajak daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	2,01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daearh Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daearh	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	2,01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Prmbinaan dan pengawasan retribusi daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**		
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
5	**03**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
5	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	**03**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
5	03	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyelenggaraan diklat prajabatan dan diklatpim	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
5	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan Kegiatan kantor Lainya Peralatan Rumah Tangga	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Makan Minum Rapat Kantor	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Cetakan dan Penggandaan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Konsultasi dan Koordinasi	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
5	03	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
5	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Tenagan Informasi dan teknologi	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Jasa Perbaikan Mesin Kantor	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Kantor	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
5	03	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pembayaran pajak kendraan dinas operasional	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralaatan Mesin Kantor	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		
5	**03**	**02**	2,01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**		
5	03	02	2,01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	formasi ASN	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2,01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pengadaan/Rekrutmen ASN	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2,01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2,01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Data ASN Pensiun	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2,01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Data ASN	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2,01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**	2,02		**Mutasi dan Promosi ASN**		
5	03	02	2,02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Penempatan ASN	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2,02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	ASN Naik Pangkat	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2,02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Uji Kompetensi JPTP Es.II	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**	2,03		**Pengembangan Kompetensi ASN**		
5	03	02	2,03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	ujian dinas/ujian penyesuaian	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2,03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Diklat fungsional ASN	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2,03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Tugas belajar	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**	2,04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**		
5	03	02	2,04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Piagam Penghargaan Satya Lancana	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2,04	07	Pembinaan Disiplin ASN	disiplin ASN	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		
5	**04**	**02**	2,01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**		
5	04	02	2,01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**04**	**02**	2,02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		
5	04	02	2,02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**		
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**		
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
6	**01**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
6	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan	Inspektorat Daerah
6	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
6	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat	Inspektorat Daerah
6	**01**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
6	01	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sarana dan prasarana displin pegawai	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang pengawasan	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pegawai mengikuti bimtek peraturan perundang- undangan	Inspektorat Daerah
6	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
6	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen listrik/penerangan kantor	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan cetakan dan penggandaan	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undang	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase keikutsertaan dalam rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah
6	**01**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
6	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel	Inspektorat Daerah
6	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
6	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak d Honoraium Pengelola adminstrasi keuangan/perkantoran(a	Inspektorat Daerah
6	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
6	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang terpelihara	Inspektorat Daerah
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**		
6	**01**	**02**	2,01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**		
6	01	02	2,01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP	Inspektorat Daerah
6	01	02	2,01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Audit/Pengawasan Keuangan	Inspektorat Daerah
6	01	02	2,01	03	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Hasil Reviu Kinerja	Inspektorat Daerah
6	01	02	2,01	04	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu Keuangan	Inspektorat Daerah
6	01	02	2,01	05	Pengawasan Desa	Laporan Hasil Audit Pengelolaan Keuangan Desa	Inspektorat Daerah
6	01	02	2,01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Peningkatan Kapabilitas APIP	Inspektorat Daerah
6	01	02	2,01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase tindak lanjut hasil Rekomendasi PengawasanBPK Persentase tindak lanjut hasil Rekomendasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut hasil Rekomendasi Pengawasan Inspektorat Provinsi	Inspektorat Daerah
6	**01**	**02**	2,02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**		
6	01	02	2,02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah	Inspektorat Daerah
6	01	02	2,02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Audit Investigasi, Audit Kepatuhan	Inspektorat Daerah
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**		
6	**01**	**03**	2,01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**		
6	01	03	2,01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan teknis di bidang pengawasan	Inspektorat Daerah
6	**01**	**03**	2,02		**Pendampingan dan Asistensi**		
6	01	03	2,02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah
6	01	03	2,02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase wajib lapor gratfikasi, LHKPN, dan tingkat Pelaksanaan Kegiatan Saber Pungli	Inspektorat Daerah
6	01	03	2,02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Laporan Hasil Survei Penilaian dan Penegakan Integritas	Inspektorat Daerah
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**		
7	**01**				**KECAMATAN**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
7	**01**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balige
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA SKPD	Kecamatan Balige
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA SKPD	Kecamatan Balige
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD	Kecamatan Balige
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA SKPD	Kecamatan Balige
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan Realisasi Kinerja	Kecamatan Balige
7	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balige
7	**01**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas	Kecamatan Balige
7	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balige
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Balige
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaan	Kecamatan Balige
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Kecamatan Balige
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan Tamu	Kecamatan Balige
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Balige
7	**01**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Balige
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	Kecamatan Balige
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Balige
7	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Balige
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Balige
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balige
7	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Kecamatan Balige
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Kantor	Kecamatan Balige
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Kecamatan Balige
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		
7	**01**	**02**	2,01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balige
7	**01**	**02**	2,03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		
7	01	02	2,03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Kecamatan Balige
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		
7	**01**	**03**	2,01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa/ Kelurahan	Kecamatan Balige
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat keefektifitasan Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balige
7	**01**	**03**	2,02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah infrastruktur/sarana/pras kelurahan yang dibangun	Kecamatan Balige
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kecamatan Balige
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		
7	**01**	**05**	2,01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan Forkopimca yang difasilitasi	Kecamatan Balige
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		
7	**01**	**06**	2,01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Perkades yang dievaluasi	Kecamatan Balige
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa dan Kelurahan yang difasilitasi Kecamatan	Kecamatan Balige
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**		
7	**01**				**KECAMATAN**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
7	**01**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tampahan
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA SKPD	Kecamatan Tampahan
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA SKPD	Kecamatan Tampahan
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD	Kecamatan Tampahan
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA SKPD	Kecamatan Tampahan
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan Realisasi Kinerja	Kecamatan Tampahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tampahan
7	**01**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas	Kecamatan Tampahan
7	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tampahan
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Tampahan
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaan	Kecamatan Tampahan
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Kecamatan Tampahan
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan Tamu	Kecamatan Tampahan
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Tampahan
7	**01**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Tampahan
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	Kecamatan Tampahan
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin lainnya	Kecamatan Tampahan
7	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat	Kecamatan Tampahan
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Kecamatan Tampahan
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Tampahan
7	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	Kecamatan Tampahan
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Kantor	Kecamatan Tampahan
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kecamatan Tampahan
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		
7	**01**	**02**	2,01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kecamatan Tampahan
7	**01**	**02**	2,03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		
7	01	02	2,03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Kecamatan Tampahan
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		
7	**01**	**03**	2,01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa	Kecamatan Tampahan
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat Keefektifitasan kegiatan pemberdayaan di wilayah Kecamatan	Kecamatan Tampahan
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		
7	**01**	**05**	2,01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan forkopimca yang di fasilitasi	Kecamatan Tampahan
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		
7	**01**	**06**	2,01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah perdes dan perkades yang di evaluasi	Kecamatan Tampahan
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa yang difasilitasi Kecamatan	Kecamatan Tampahan
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**		
7	**01**				**KECAMATAN**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
7	**01**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Laguboti
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA SKPD	Kecamatan Laguboti
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA SKPD	Kecamatan Laguboti
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD	Kecamatan Laguboti
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA SKPD	Kecamatan Laguboti
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan realisasi Kinerja	Kecamatan Laguboti
7	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Laguboti
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Laguboti
7	**01**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas	Kecamatan Laguboti
7	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan Listrik	Kecamatan Laguboti
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perelngkapan kantor	Kecamatan Laguboti
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga	Kecamatan Laguboti
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Laguboti
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kecamatan Laguboti
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan Tamu	Kecamatan Laguboti

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Laguboti
7	**01**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas/Jabatan	Kecamatan Laguboti
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	Kecamatan Laguboti
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Laguboti
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	fasilitas sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Laguboti
7	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Laguboti
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi internet, sumber daya Air dan Listrik	Kecamatan Laguboti
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Laguboti
7	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Kecamatan Laguboti
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Kantor	Kecamatan Laguboti
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Kecamatan Laguboti
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		
7	**01**	**02**	2,01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Laguboti
7	**01**	**02**	2,03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		
7	01	02	2,03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Kecamatan Laguboti
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		
7	**01**	**03**	2,01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa/kel	Kecamatan Laguboti
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat Keefektifitasan kegiatan Pemerintahan di wilayah kecamatan	Kecamatan Laguboti
7	**01**	**03**	2,02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Laguboti
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Infrastruktur/sarana prasarana kelurahan yang dibangun	Kecamatan Laguboti
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kecamatan Laguboti
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		
7	**01**	**05**	2,01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Forkopimca yang difasilitasi	Kecamatan Laguboti
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		
7	**01**	**06**	2,01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes/perkades yang di Evaluasi	Kecamatan Laguboti
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa dan kelurahan yang dilakukan Fasilitasi Kecamatan	Kecamatan Laguboti
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**		
7	**01**				**KECAMATAN**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
7	**01**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Silaen
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan realisasi kinerja	Kecamatan Silaen
7	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Silaen
7	**01**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas	Kecamatan Silaen
7	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Silaen
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga kecamatan yang diadakan	Kecamatan Silaen
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Silaen
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kecamatan Silaen
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan Tamu	Kecamatan Silaen
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah	Kecamatan Silaen
7	**01**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kecamatan Silaen
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	Kecamatan Silaen
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Silaen
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dukungan fasilitas sarana prasarana pendukung kantor yang tersedia	Kecamatan Silaen
7	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi Air, Listrik dan Internet	Kecamatan Silaen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Silaen
7	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan dan pajak kenderaan Dinas	Kecamatan Silaen
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin kantor	Kecamatan Silaen
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Kecamatan Silaen
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		
7	**01**	**02**	2,01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait	Kecamatan Silaen
7	**01**	**02**	2,03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		
7	01	02	2,03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Kecamatan Silaen
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		
7	**01**	**03**	2,01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa/kelurahan	Kecamatan Silaen
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat keefektifitasan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan	Kecamatan Silaen
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		
7	**01**	**05**	2,01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan Forkopimca yang difasilitasi	Kecamatan Silaen
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		
7	**01**	**06**	2,01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan perkades yang di evaluasi	Kecamatan Silaen
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa yang dilakukan difasilitasi kecamatan	Kecamatan Silaen
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**		
7	**01**				**KECAMATAN**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
7	**01**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Habinsaran
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan Realisasi Kinerja	Kecamatan Habinsaran
7	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Habinsaran
7	**01**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas	Kecamatan Habinsaran
7	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Habinsaran
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Habinsaran
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Habinsaran
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Kecamatan Habinsaran
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan dan Minum	Kecamatan Habinsaran
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Habinsaran
7	**01**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Habinsaran
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	Kecamatan Habinsaran
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Habinsaran
7	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Habinsaran
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Habinsaran
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Habinsaran
7	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Kecamatan Habinsaran
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Kantor	Kecamatan Habinsaran
7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Habinsaran
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		
7	**01**	**02**	2,01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Habinsaran
7	**01**	**02**	2,03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		
7	01	02	2,03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Kecamatan Habinsaran
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		
7	**01**	**03**	2,01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa / Kelurahan	Kecamatan Habinsaran
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Habinsaran
7	**01**	**03**	2,02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit Infrastruktur / Sarana / Prasarana Kelurahan yang di bangun	Kecamatan Habinsaran
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kecamatan Habinsaran
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		
7	**01**	**05**	2,01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Forkopimca yang difasilitasi	Kecamatan Habinsaran
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		
7	**01**	**06**	2,01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Perkades yang dievaluasi	Kecamatan Habinsaran
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa dan Kelurahan yang difasilitasi Kecamatan	Kecamatan Habinsaran
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**		
7	**01**				**KECAMATAN**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
7	**01**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Borbor
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan realisasi kinerja	Kecamatan Borbor
7	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Borbor
7	**01**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas	Kecamatan Borbor
7	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Borbor
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	Kecamatan Borbor
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaan	Kecamatan Borbor
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kecamatan Borbor
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan tamu	Kecamatan Borbor
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Borbor
7	**01**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	Kecamatan Borbor
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Borbor
7	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kecamatan Borbor
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Borbor
7	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	Kecamatan Borbor
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin kantor	Kecamatan Borbor
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Kecamatan Borbor
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		
7	**01**	**02**	2,01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan peaerah dan instansi vertikal terkaitrangkat d	Kecamatan Borbor
7	**01**	**02**	2,03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		
7	01	02	2,03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Kecamatan Borbor
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		
7	**01**	**03**	2,01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa	Kecamatan Borbor
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat keefektifitasan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan	Kecamatan Borbor
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		
7	**01**	**05**	2,01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan Forkoimpca yang difasilitasi	Kecamatan Borbor
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		
7	**01**	**06**	2,01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah perdes dan perkades yang dievaluasi	Kecamatan Borbor
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa yang difasilitasi kecamatan	Kecamatan Borbor
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	**01**				**KECAMATAN**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
7	**01**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga Kecamatan yang diadakan	Kecamatan Nassau
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum rapat Kecamatan yang diadakan	Kecamatan Nassau
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan Kecamatan yang diadakan	Kecamatan Nassau
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan Kecamatan yang diadakan	Kecamatan Nassau
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah Kecamatan yang terealisasi	Kecamatan Nassau
7	**01**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Kecamatan Nassau
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeulair kecamatan yang diadakan	Kecamatan Nassau
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang diadakan	Kecamatan Nassau
7	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis materai yang diadakan	Kecamatan Nassau
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air, listrik dan internet/ WiFi pada Kantor Camat Nassau yang terealisasi	Kecamatan Nassau
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pegawai Honorariun dan Jasa Tenaga Kontrak	Kecamatan Nassau
7	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas kecamatan yang terpelihara Jumlah kendaraan kecamatan yang terealisasi pembayaran pajaknya	Kecamatan Nassau
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	Kecamatan Nassau
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rumah dinas jabatan yang dipelihara	Kecamatan Nassau
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		
7	**01**	**02**	2,01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musyawarah perencanaan desa/kelurahan dan musyawarah RKPD di Kecamatan	Kecamatan Nassau
7	**01**	**02**	2,03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		
7	01	02	2,03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah lampu jalan yang diganti Pembabatan bahu jalan di Kecamatan Terpeliharanya RTH di Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
7	**01**	**02**	2,04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan event karnaval Pesta Danau Toba	Kecamatan Nassau
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		
7	**01**	**03**	2,01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembinaan kelompok masyarakyat pembangunan desa	Kecamatan Nassau
7	**01**	**03**	2,03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan gotong royong desa Persentasi PKK Aktif	Kecamatan Nassau
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		
7	**01**	**05**	2,01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Perayaan HUT Tobasa, HUT RI.	Kecamatan Nassau
7	01	05	2,01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Perayaan Natal Oikumene dan Paskah Okuumene	Kecamatan Nassau
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		
7	**01**	**06**	2,01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah pendampingan yang dilakukan kecamatan terhadap desa/kel	Kecamatan Nassau
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**		
7	**01**				**KECAMATAN**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
7	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sigumpar
7	**01**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas	Kecamatan Sigumpar
7	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sigumpar
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	Kecamatan Sigumpar
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaan	Kecamatan Sigumpar
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Kecamatan Sigumpar
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan Tamu	Kecamatan Sigumpar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Sigumpar
7	**01**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Sigumpar
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	Kecamatan Sigumpar
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Sigumpar
7	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sigumpar
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sigumpar
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sigumpar
7	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Kecamatan Sigumpar
7	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Mebel yang dipelihara	Kecamatan Sigumpar
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Kantor	Kecamatan Sigumpar
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Kecamatan Sigumpar
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		
7	**01**	**02**	2,01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Sigumpar
7	**01**	**02**	2,03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		
7	01	02	2,03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Kecamatan Sigumpar
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		
7	**01**	**03**	2,01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat keefektifitasan Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sigumpar
7	**01**	**03**	2,02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah infrastruktur/sarana/pras kelurahan yang dibangun/dipelihara	Kecamatan Sigumpar
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kecamatan Sigumpar
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		
7	**01**	**05**	2,01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan Forkopimca yang difasilitasi	Kecamatan Sigumpar
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		
7	**01**	**06**	2,01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa dan Kelurahan yang difasilitasi Kecamatan	Kecamatan Sigumpar
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**		
7	**01**				**KECAMATAN**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
7	**01**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Porsea
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan kinerja OPD	Kecamatan Porsea
7	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Porsea
7	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan dan kelengkapan alat listrik	Kecamatan Porsea
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan ATK dan peralatan kebersihan kantor kecamatan dan kelurahan	Kecamatan Porsea
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan dan alat rumah tangga kantor dan rumah dinas	Kecamatan Porsea
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan konsumsi rapat rapat dan tamu	Kecamatan Porsea
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlh Barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Porsea
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan kantor	Kecamatan Porsea
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Perjalanan dinas	Kecamatan Porsea
7	**01**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
7	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Kecamatan Porsea
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang ditampung	Kecamatan Porsea
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dukungan fasilitas sarana prasarana pendukung kantor yang tersedia	Kecamatan Porsea
7	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, air, internet, pulsa yang ditampung	Kecamatan Porsea
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrk dan jasa pengelola keuangan yang tersedia	Kecamatan Porsea
7	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	Kecamatan Porsea

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan rumah dinas dalam kondisi baik	Kecamatan Porsea
7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dirawat	Kecamatan Porsea
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		
7	**01**	**02**	2,01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen hasil musrenbang Jumlah instansi/OPD yang dikoordinasikan terkait penyediaan data bidang perekonomian dan sosial Jumlah jenis ketersediaan data di bidang sosial Jumlah kegiatan kebudayaan dan kearifan lokal yng diselenggarakan Jumlah kegiatan Pemerintah di Wilayah Kecamatan yang dikoordinasikan Jumlah rekomendasi dan koordinasi penangann dan pengendalian bencana alam dan SDA Koordinasi pencapaian target peneriman PBB dan	Kecamatan Porsea
7	**01**	**02**	2,02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil montoring/pengawasan harga sembako Jumlah pelayanan kemasyarakatan yaang dilaksanakan Jumlah permintaan rekomendasi ijin dan non	Kecamatan Porsea
7	**01**	**02**	2,03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		
7	01	02	2,03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah fasilitas prasarana dan fasilitas umum yang terpelihara	Kecamatan Porsea
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		
7	**01**	**03**	2,01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah musyawarah pembangunan desa yang terfasilitasi Jumlah pelaksanaaan musrenbang desa yang terfasilitasi	Kecamatan Porsea
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan gotong royong yang difasilitasi/digagasi Pemerintah Kecamatan Jumlah organisasi/kelompok masyarakat yang dibina Jumlah pala Desa persentahan	Kecamatan Porsea
7	**01**	**03**	2,02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan yang terfasilitasi	Kecamatan Porsea
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pendampingan dan fasilitasi kegiatan sarana dan prasaraana kelurahan yang dilaksanakan	Kecamatan Porsea
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pendampingan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan	Kecamatan Porsea
7	**01**	**03**	2,03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegitan pembinaan Lembg Kemsyarakatan masyarakat yang dilaksanakan	Kecamatan Porsea
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		
7	**01**	**04**	2,01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan/koordinasi dan komunikasi dengan kepolisian,TNI dan Instansi vertikal yang dilakukan	Kecamatan Porsea
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan/koordinasi dan komunikasi dengan tokoh masyarakat,tokoh agama yang dilakukan	Kecamatan Porsea
7	**01**	**04**	2,02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan Pemilu dan Pilkades yang terfasilitasi Jumlah masalah pengaduan/kasus yang ditangani/diselesaikan Jumlah pendampingan dan koordinasi kegiatan yang dilaksanakan	Kecamatan Porsea
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		
7	**01**	**05**	2,01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan HUT RI,HUT Toba dan Upacara/Kegiatan Kenegaraan lainnya yang dilaksanakan	Kecamatan Porsea
7	01	05	2,01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan ataupun difasilitaasi	Kecamatan Porsea
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Koordinasi Antar Unsur Pimpinan Kecamatan	Kecamatan Porsea
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		
7	**01**	**06**	2,01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah perdes/perkades yang terfasilitasi	Kecamatan Porsea

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintaha yang dibina Jumlah data mopnografi dan profil Desa yang disusun Jumlah Desa/Kelurahan yang dinilai/dievaluasi Jumlah desa/kelurahan yang melakukan tertib administrasi Jumlah maslaah asset/kekayaan Desa yang terselesaikan Jumlah pengisian dan PAW anggota BPD yang terfasilitasi Jumlah tapal batas desa/Kelurahan yang	Kecamatan Porsea
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang difasilitasi dan dimonitoring Jumlah kegiatan pembangunan dan Pemerintahan Desa yang dikoordinasikan dan pendampingan	Kecamatan Porsea
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**		
7	**01**				**KECAMATAN**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
7	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Siantar Narumonda
7	**01**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas	Kecamatan Siantar Narumonda
7	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik yang diadakan	Kecamatan Siantar Narumonda
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Siantar Narumonda
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	Kecamatan Siantar Narumonda
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaaan	Kecamatan Siantar Narumonda
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Kecamatan Siantar Narumonda
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan Tamu	Kecamatan Siantar Narumonda
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Siantar Narumonda
7	**01**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Siantar Narumonda
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	Kecamatan Siantar Narumonda
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Siantar Narumonda
7	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Siantar Narumonda
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Siantar Narumonda
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Siantar Narumonda
7	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Kecamatan Siantar Narumonda
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Kantor	Kecamatan Siantar Narumonda
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Kecamatan Siantar Narumonda
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		
7	**01**	**02**	2,01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Siantar Narumonda
7	**01**	**02**	2,03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		
7	01	02	2,03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Kecamatan Siantar Narumonda
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		
7	**01**	**03**	2,01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Siantar Narumonda
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat keefektifitasan Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Siantar Narumonda
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		
7	**01**	**05**	2,01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan Forkopimca yang difasilitasi	Kecamatan Siantar Narumonda
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		
7	**01**	**06**	2,01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa yang difasilitasi Kecamatan	Kecamatan Siantar Narumonda
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**		
7	**01**				**KECAMATAN**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	**01**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Uluan
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA SKPD	Kecamatan Uluan
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA SKPD	Kecamatan Uluan
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD	Kecamatan Uluan
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA SKPD	Kecamatan Uluan
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan Realisasi Kinerja	Kecamatan Uluan
7	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS	Kecamatan Uluan
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Uluan
7	**01**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas	Kecamatan Uluan
7	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan dan kelengkapan alat listrik	Kecamatan Uluan
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Uluan
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	Kecamatan Uluan
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaan	Kecamatan Uluan
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kecamatan Uluan
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan tamu	Kecamatan Uluan
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Uluan
7	**01**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Uluan
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	Kecamatan Uluan
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Uluan
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Alat-alat perlengkapan	Kecamatan Uluan
7	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat	Kecamatan Uluan
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Uluan
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Uluan
7	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa pemeliharaan dan Pajak kendaraan dinas	Kecamatan Uluan
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin kantor	Kecamatan Uluan
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dan bangunan lainnya terpelihara	Kecamatan Uluan
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		
7	**01**	**02**	2,01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait	Kecamatan Uluan
7	**01**	**02**	2,03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		
7	01	02	2,03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Kecamatan Uluan
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		
7	**01**	**03**	2,01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan	Kecamatan Uluan
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat keefektifitasan kegiatan Pemberdayaan di wilayah Kecamatan	Kecamatan Uluan
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		
7	**01**	**05**	2,01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan Forkopimca yang difasilitasi	Kecamatan Uluan
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		
7	**01**	**06**	2,01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes/Perkades yang di evaluasi	Kecamatan Uluan
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa dan Kelurahan yang difasilitasi Kecamatan	Kecamatan Uluan
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**		
7	**01**				**KECAMATAN**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
7	**01**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pintu Pohan Meranti
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan realisasi Kinerja	Kecamatan Pintu Pohan Meranti
7	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pintu Pohan Meranti
7	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pintu Pohan Meranti

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Pintu Pohan Meranti
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Pintu Pohan Meranti
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan dan Minun	Kecamatan Pintu Pohan Meranti
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Pintu Pohan Meranti
7	**01**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	Kecamatan Pintu Pohan Meranti
7	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kecamatan Pintu Pohan Meranti
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pintu Pohan Meranti
7	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Kecamatan Pintu Pohan Meranti
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		
7	**01**	**02**	2,01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Pintu Pohan Meranti
7	**01**	**02**	2,03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		
7	01	02	2,03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Kecamatan Pintu Pohan Meranti
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		
7	**01**	**03**	2,01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa	Kecamatan Pintu Pohan Meranti
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat Kefektifitasan Kegiatan Pemerintahan di wilayah Kecamatan	Kecamatan Pintu Pohan Meranti
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		
7	**01**	**05**	2,01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Forkopimca Yang Difasilitasi	Kecamatan Pintu Pohan Meranti
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		
7	**01**	**06**	2,01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa dan Kelurahan yang difasilitasi Kecamatan	Kecamatan Pintu Pohan Meranti
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**		
7	**01**				**KECAMATAN**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
7	**01**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Lumban Julu
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan realisasi kinerja	Kecamatan Lumban Julu
7	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Kecamatan Lumban Julu
7	**01**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian dinas	Kecamatan Lumban Julu
7	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Lumban Julu
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	Kecamatan Lumban Julu
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Lumban Julu
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kecamatan Lumban Julu
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	kunjungan tamu	Kecamatan Lumban Julu
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah yang terealisasi	Kecamatan Lumban Julu
7	**01**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas roda dua	Kecamatan Lumban Julu
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel	Kecamatan Lumban Julu
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan PC/Laptop Pengadaan Soundsystem	Kecamatan Lumban Julu
7	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Lumban Julu
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Lumban Julu
7	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	Kecamatan Lumban Julu
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	Kecamatan Lumban Julu
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Kecamatan Lumban Julu
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		
7	**01**	**02**	2,01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kecamatan Lumban Julu
7	**01**	**02**	2,03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		
7	01	02	2,03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah penberangan lampu jalan kecamatan yang dipelihara	Kecamatan Lumban Julu
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		
7	**01**	**03**	2,01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa	Kecamatan Lumban Julu
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat keefektifitasan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan	Kecamatan Lumban Julu
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		
7	**01**	**05**	2,01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan forkopimca yang difasilitasi	Kecamatan Lumban Julu
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		
7	**01**	**06**	2,01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	jumlah perdes/perkades yang difasilitasi	Kecamatan Lumban Julu
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah kegiatan pendampingan yang difasilitasi	Kecamatan Lumban Julu
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**		
7	**01**				**KECAMATAN**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
7	**01**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Ajibata
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan realisasi kinerja	Kecamatan Ajibata
7	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Ajibata
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kecamatan Ajibata
7	**01**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas	Kecamatan Ajibata
7	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan dan kelengkapan alat listrik	Kecamatan Ajibata
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Ajibata
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Ajibata
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaan	Kecamatan Ajibata
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kecamatan Ajibata
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan tamu	Kecamatan Ajibata
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Ajibata
7	**01**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Ajibata
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	Kecamatan Ajibata
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Ajibata
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dukungan fasilitas sarana prasarana pendukung kantor yang tersedia	Kecamatan Ajibata
7	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat	Kecamatan Ajibata
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Kecamatan Ajibata
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Ajibata
7	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	Kecamatan Ajibata
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin kantor	Kecamatan Ajibata
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Kecamatan Ajibata
7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor dalam pemeliharaan	Kecamatan Ajibata
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		
7	**01**	**02**	2,01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kecamatan Ajibata
7	**01**	**02**	2,03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		
7	01	02	2,03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Kecamatan Ajibata
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		
7	**01**	**03**	2,01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa/kelurahan	Kecamatan Ajibata
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat keefektifitasan kegiatan pemerintahan diwilayah kecamatan	Kecamatan Ajibata
7	**01**	**03**	2,02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah infrastruktur/sarana/pras kelurahan yang dibangun	Kecamatan Ajibata
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kecamatan Ajibata
7	**01**	**03**	2,03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kecamatan Ajibata
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		
7	**01**	**05**	2,01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan forkopimca yang difasilitasi	Kecamatan Ajibata
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		
7	**01**	**06**	2,01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah perdes/perkades yang dievaluasi	Kecamatan Ajibata
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa dan kelurahan yang difasilitasi kecamatan	Kecamatan Ajibata
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**		
7	**01**				**KECAMATAN**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
7	**01**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Parmaksian
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA SKPD	Kecamatan Parmaksian
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD	Kecamatan Parmaksian
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan realisasi kinerja	Kecamatan Parmaksian
7	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Parmaksian
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Parmaksian
7	**01**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas PDH ASN	Kecamatan Parmaksian
7	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan dan kelengkapan alat listrik	Kecamatan Parmaksian
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Parmaksian
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	Kecamatan Parmaksian
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Parmaksian
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan Perundang- Undangan	Kecamatan Parmaksian
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan tamu	Kecamatan Parmaksian
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Parmaksian
7	**01**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Parmaksian
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	Kecamatan Parmaksian
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan mesin dan lainnya	Kecamatan Parmaksian
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dukungan fasilitas sarana daan prsarana pendukung kantor yang tersedia	Kecamatan Parmaksian
7	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jasa surat menyurat	Kecamatan Parmaksian
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi sumber air dan listrik	Kecamatan Parmaksian
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Parmaksian
7	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	Kecamatan Parmaksian
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin kantor	Kecamatan Parmaksian
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Kecamatan Parmaksian
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		
7	**01**	**02**	2,01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kecamatan Parmaksian
7	**01**	**02**	2,03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		
7	01	02	2,03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Kecamatan Parmaksian
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		
7	**01**	**03**	2,01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan	Kecamatan Parmaksian
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat keefektifitasan kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatanaya	Kecamatan Parmaksian
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		
7	**01**	**05**	2,01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan Forkopimca yang difasilitasi	Kecamatan Parmaksian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		
7	**01**	**06**	2,01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah perdes/perkades yang dievaluasi	Kecamatan Parmaksian
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa/kelurahan yang di fasilitasi kecamatan	Kecamatan Parmaksian
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**		
7	**01**				**KECAMATAN**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
7	**01**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA SKPD	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA SKPD	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan Realisasi Kinerja	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	**01**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaan	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan Tamu	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	**01**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dukungan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor Yang Tersedia	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Kantor	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		
7	**01**	**02**	2,01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	**01**	**02**	2,03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		
7	01	02	2,03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		
7	**01**	**03**	2,01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan Monitoring Kegiatan di Desa Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat Efektifitas Kegiatan Pemerintah Di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		
7	**01**	**05**	2,01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Forkopimca Yang Difasilitasi	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		
7	**01**	**06**	2,01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Perkades Yang Dievaluasi	Kecamatan Bonatua Lunasi
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa dan Kelurahan yang difasilitasi Kecamatan	Kecamatan Bonatua Lunasi
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**		
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
8	**01**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
8	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan Realisasi Kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
8	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
8	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
8	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan, dan Penggandaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
8	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
8	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		
8	**01**	**02**	2,01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		
8	01	02	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Pendidikan wawasan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan Perayaan hari Besar Kenegaraan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		
8	**01**	**03**	2,01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**		
8	01	03	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Pendidikan Politik Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Partai Politik yang terverifikasi dalam penerimaan Dana Hibah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Fasilitasi Penguatan Demokrasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan situasi perkembangan politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		
8	**01**	**04**	2,01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		
8	01	04	2,01	01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah ormas yang mendapat pembinaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah ormas yang memperoleh dana hibah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8	01	04	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Verifikasi Pendaftaran Ormas,serta inventarisasi data ormas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**		
8	**01**	**05**	2,01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**		
8	01	05	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan serta tes urine	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**		
8	**01**	**06**	2,01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**		
8	01	06	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Rencana Aksi dalam Penanganan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kegiatan Kewaspadaan Dini dan Deteksi Dini	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pemantauan Warga Negara Asing	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2,01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Forkopimda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Konsep otonomi daerah pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis. Dengan memberikan sebagian kewenangan pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, diharapkan bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan sehingga kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar merupakan pelayanan minimal yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintahan didaerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sehingga pelayanan yang diberikan bukanlah pelayanan yang diorietasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai

dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan.

a. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu

Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

b. Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum Daerah

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD. Berikut Arah Kebijakan Umum Kabupaten Toba sesuai misi Pemerintah Kabupaten Toba :

Tabel 1.16
Arah Kebijakan Pembangunan
RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026

Tahun -1 2022	Tahun-2 2023	Tahun-3 2024	Tahun-4 2025	Tahun-5 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Peningkatan kualitas infrastruktur dan inovasi daerah untuk meningkatkan ekonomi yang berdaya saing.	Percepatan Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.	Mendorong produktivitas masyarakat pada sektor pertanian dan pariwisata sebagai sektor unggulan dan ekstensifikasi ekonomi.	Perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan UMKM, mendorong peluang dan iklim investasi yang kondusif	Optimalisasi pembangunan untuk meningkatkan kemandirian, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat

Tabel 1.17
Hubungan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Toba dengan Visi-Misi RPJMD Kabupaten Toba

Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026	Misi RPJMD 2021-2026
1	*2*
Peningkatan kualitas infrastruktur dan inovasi daerah untuk meningkatkan ekonomi yang berdaya saing.	Misi I Infrastruktur yang Bagus dan Merata
Percepatan peningkatan kualitas infrastruktur dasar, sarana dan prasarana Pendidikan yang dan kesehatan, perlindungan social dan pemberdayaan social, peningkatan daya saing angkatan kerja	Misi I Infrastruktur yang Bagus dan Merata
	Misi II Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Andal
	Misi IV Kesehatan yang Prima dan Terjangkau
Mendorong produktivitas masyarakat pada sektor petanian dan pariwisata sebagai sektor unggulan dan ekstensifikasi ekonomi	Misi III Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera
	Misi V Pariwisata Berkat dan Meriah
Perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan UMKM, mendorong peluang dan iklim investasi	Misi V Pariwisata Berkat dan Meriah
	Misi VI Membangun Iman Yang Terpelihara
	Misi VII Menciptakan Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban
Pengembangan inovasi dalam meningkatkan daya saing produk ungulan daerah dan peningkatan kualitas layanan publik	Misi II Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Andal

c. Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Yang Dituangkan Dalam Kebijakan Umum Anggaran

Kerangka pendanaan pembangunan adalah skema pembiayaan pembangunan berdasarkan kemampuan riil keuangan daerah untuk mendanai program pembangunan

selama periode RPJMD. Kerangka pendanaan diperoleh setelah dilakukan proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat yang menjadi acuan dalam pendanaan indikasi rencanan program prioritas yang berisi program-program untuk mencapai visi dan misi jangka menengah dan pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menjalankan Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang Lainnya yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2021-2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar,18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima), unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang, fungsi penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum dan Non Urusan. Untuk 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, dijelaskan sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan.
   - Program Pengelolaan Pendidikan.

     Program ini diarahkan pada perluasan ketersediaan dan keterjangkuan layanan pendidikan yang inklusif dan merata untuk meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup dan peningkatan tata kelola pendidikan untuk pemerataan mutu pendidikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka partisipasi kasar (APK) SD/ MI/ Paket A, Angka partisipasi kasar (APK) SMP/ MTs/ Paket B, Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A, Angka partisipasi murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B, Persentase sekolah ramah anak, Angka putus sekolah SD/MI, angka putus sekolah SMP/MTs, angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs, sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik, sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik, rasio

ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar, % PAUD formal yang terakreditasi, persentase SD berakreditasi A, Persentase SMP Berakreditasi A, Persentase pendidik SD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik, Persentase pendidik SMP dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik, Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4, Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, Persentase Warga negara Usia 7-12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI, Persentase Warga negara Usia 13-15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs, Persentase Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

- Program Pengembangan Kurikulum

  Program ini diarahkan pada penguatan kurikulum yang inovatif dan adaptif untuk menghasilkan SDM berkarakter, mandiri dan berdaya saing. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase sekolah yang menyelenggarakan kurikulum muatan lokal dan persentase sekolah yang melaksanakan pembelajaran berbasis TIK.
- Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

  Program ini diarahkan meningkatkan kualitas tenaga pendidik untuk peningkatan mutu pendidikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.
- Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.

  Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola pendidikan untuk pemerataan mutu pendidikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase satuan pendidikan non formal

terakreditasi.

- Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra.

  Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola pendidikan untuk pemerataan mutu pendidikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi.

2. Urusan Kesehatan.

   a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

      Program ini diarahkan pada peningkatan mutu dan keterjangkauan layanan kesehatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase elemen penilaian akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi, Presentase indikator standar pelayanan minimal (SPM) yang mencapai target , Bed Occupancy Rate (BOR), Average Length of Stay (ALOS), Net Death Rate (NDR), Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM), Persentase cakupan jumlah kelengkapan prasarana dan sarana pendukung pelayanan kesehatan di RSUD Porsea, Persentase Cakupan Jumlah Kelengkapan Alat-, alat Kesehatan di RSUD Porsea, Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Neonatus, Bayi, Balita, Angka Kematian Ibu, Angka Morbiditas, dan pencapaian 12 indicator SPM : Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, Pelayanan kesehatan orang dengan

risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

b. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. Program ini diarahkan pada peningkatan mutu dan keterjangkauan layanan kesehatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas, Persentase penggunaan obat rasional dipuskesmas, Persentase pelayanan kefarmasian sesuai standar, Persentase apotek. Took obat. dan toko alat kesehatan yang memiliki izin, Persentase makanan di kantin sekolah dan industri rumah tangga yang memenuhi syarat, Persentase industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat produksi pangan (SPP-IRT), Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan, Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar, Persentase puskesmas yang memiliki pengolahan limbah standar, Persentase berakses sanitasi layak, Persentase sarana air minum yang sesuai standar.

c. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Program ini diarahkan pada kegiatan penilaian akreditasi Puskesmas, peningkatan kualitas pengelolaan dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat, pengembangan sistem informasi kesehatan, fasilitasi perijinan tenaga kesehatan melalui pelatihan dan uji kompetensi tenaga kesehatan, fasilitasi penerbitan ijin fasilitasi pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase puskesmas yang minimal

memiliki lima jenis tenaga kesehatan, Rasio dokter per satuan penduduk (per 10.000 penduduk).

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Program ini diarahkan pada peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat secara berkelanjutan, peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta kedaruratan kesehatan dan optimalisasi peran aktif dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu cakupan desa siaga aktif strata mandiri, rasio posyandu per satuan balita.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada peningkatan kinerja pelayanan jalan kabupaten (kemantapan jalan) dengan memperhatikan zona rawan bencana, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah kawasan strategis (simpul produksi pertanian, destinasi prioritas pariwisata, kawasan pinggiran/perbatasan) dan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah afirmasi (desa prioritas kemiskinan tinggi dan desa tertinggal). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (40 km/jam).

b. Program pengelolaan sumber daya air (SDA).

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan sumber daya air. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

c. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

Program ini diarahkan pada peningkatan akses air minum layak dan aman. Program ini dilaksanakan untuk

mencapai indikator kinerja yaitu persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten, persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

d. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

Program ini diarahkan pada peningkatan akses layanan air limbah layak dan aman. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.

e. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola sistem drainase ramah lingkungan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat, Persentase titik limpasan banjir yang tertangani.

f. Program penataan bangunan dan lingkungannya

Program ini diarahkan pada peningkatan tata bangunan gedung yang inklusif, sesuai standar keandalan bangunan gedung dan ramah lingkungan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu jumlah bangunan yang bersertifikat laik fungsi, Kepatuhan IMB

g. Program penataan bangunan gedung

Program ini diarahkan pada pengembangan pusat pertumbuhan wilayah strategis yang membentuk koridor pertumbuhan ekonomi. Program ini dilaksanakan untuk

mencapai indikator kinerja yaitu jumlah aset lahan strategis yang ditata sesuai rencana teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan, Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m).

h. Program pengembangan jasa konstruksi

Program ini diarahkan pada penguatan profesionalisme jasa konstruksi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Rasio tenaga operator/teknisi/analisis bidang konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi.

i. Program penyelenggaraan penataan ruang

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Penetapan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang, Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Program pengembangan perumahan

Program ini diarahkan pada fasilitasi Penyediaan hunian layak dan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator kinerja Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani, Persentase rumah korban bencana yang ditangani, Persentase rumah yang terkena relokasi program pemerintah yang ditangani, Persentase warga terdampak program (WTP) yang tertangani karena program pemerintah di bidang kawasan permukiman.

b. Program kawasan permukiman.

Program ini diarahkan pada Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu

Persentase luas kawasan permukiman kumuh di kabupaten yang ditangani.

c. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh.

Program ini diarahkan pada pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani.

d. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Program ini diarahkan pada Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian di Perumahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum).

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

a. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam penegakan ketertiban dan keamanan lingkungan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, persentase pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, persentase Penegakan Perda.

b. Program penanggulangan bencana

Program ini diarahkan pada penguatan kesiapsiagaan dan peningkatan efektivitas mitigasi bencana, peningkatan penyelenggaraan manajemen tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta peringatan dini yang dilakukan secara cepat dan akurat dan Pengembangan sistem pemulihan bencana. Program ini

dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal, persentase desa tangguh bencana.

c. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

   Program ini diarahkan pada percepatan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang tangguh. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator kinerja response time kebakaran.

6. Urusan Sosial

   a. Program pemberdayaan social

      Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan social Program rehabilitasi sosial

   b. Program perlindungan dan jaminan social.

      Program ini diarahkan pada peningkatan peran lembaga dan masyarakat dalam kemandirian PPKS dan penguatan tata kelola sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk ketepatan sasaran dan intervensi program. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase panyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM).

   c. Program penanganan bencana

      Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, Persentase

warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

d. Program pengelolaan taman makam pahlawan

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kelengkapan TMP dalam kondisi baik.

Pada tahun 2022, sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Toba dalam menerapkan SPM, bahwa dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Toba dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Toba atas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Perubahan APBD Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Bupati Toba tentang Penjabaran P.APBD Tahun Anggaran 2022 diperoleh bahwa Pendanaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar Dalam Rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, Sebagaimana Diamanatkan Dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.68.692.623.272,00, dalam pelaksanaanya akan diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten Toba yang mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan, dan tata cara pemenuhan standar.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2022 sebesar Rp41.811.694.758,00, dalam pelaksanaannya akan diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten Toba.

SPM Bidang Kesehatan mempunyai dua fungsi yaitu

(i) Memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat.

(ii) Sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah dalam pelayanan publik bidang kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi Anggaran untuk belanja SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.260.792.014,00, dalam pelaksanaannya akan diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten Toba yang mencakup ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pokok pemenuhan kebutuhan jalan, jembatan, air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.10.787.581.614,00 dalam pelaksanaannya akan diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten Toba.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 4.817.441.238,00, dalam pelaksanaannya akan diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM trantibumlinmas untuk Kabupaten Toba yang mencakup pelayanan ketentraman dan ketertiban umum; pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan

kesiapsiagaan terhadap bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.353.814.601,00, dalam pelaksanaannya akan diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk memenuhi indikator Pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten Toba.

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UNDP membagi tingkatan status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam empat golongan yaitu :

1. Rendah
2. Sedang
3. Tinggi.
4. Sangat tinggi.

Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu juga jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria sedang, hal ini berarti pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan. Jika daerah tersebut mempunyai status pembangunan manusia tinggi, hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut sudah baik/optimal, maka perlu dipertahankan supaya kualitas manusia tersebut lebih produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi.

b. Angka Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan komponen penting dalam menentukan penduduk miskin. Penghitungan garis kemiskinan didasarkan pada sejumlah komoditi yang ditentukan dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic need approach) dan dikonsumsi oleh kelompok penduduk referensi (20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara). Komoditi dikelompokkan menjadi dua yaitu basket komoditi makanan dan non makanan. Basket komoditi makanan digunakan untuk menentukan garis kemiskinan makanan, sedangkan basket komoditi non makanan digunakan untuk menentukan garis kemiskinan non makanan. Berdasarkan garis kemiskinan, penduduk dikategorikan sebagai miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan per kapita pada kelompok referensi yang telah ditetapkan.

c. Angka Pengangguran

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja (punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan pengangguran. Bekerja adalah melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha / kegiatan ekonomi.

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi berharap tetap mendapat pekerjaan, dan kegiatannya terdiri dari :

- Mencari pekerjaan.
- Mempersiapkan usaha.
- Tidak mencari pekerjaan karena alasan merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).
- Tidak mencari pekerjaan karena sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan struktur ekonomi daerah peranan sektor-sektor ekonomi dan pergeserannya yang didasarkan pada PDRB atas dasar harga berlaku. Disamping itu PDRB menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi baik secara total maupun per sektor dengan membandingkan PDRB tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya menggunakan atas dasar harga Konstan tahun 2010.

e. Pendapatan Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

f. Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)

Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, aspek penting yang perlu diperhatikan adalah mengenai ketidakmerataan atau kesenjangan distribusi pengeluaran penduduk. Kesenjangan distribusi pengeluaran merupakan permasalahan yang selalu muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang umumnya terjadi karena ketidakmerataan dari distribusi program pembangunan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. Kebijakan pembangunan yang menempatkan kota sebagai pusat pertumbuhan justru menghasilkan ketimpangan wilayah.

Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk melihat adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk adalah Gini Ratio. Selain itu, Gini Ratio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau semakin buruk.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Toba

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan (%)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,39	75,96	0,57	karena indeks maka perubahan IPM tidak dihitung dengan persentase. perubahan IPM 2022 terhadap IPM 2021 mengalami perubahan sebesar 0,57 poin
2	Angka Kemiskinan	8,99	8,89	-0,10%	tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,1 persen
3	Angka Pengangguran	0,83 (kondisi agustus 2021)	1,39 (kondisi agustus 2022)	0,56%	angka pengangguran dihitung melalui tingkat pengangguran terbuka. tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan sebesar 0,56 persen, diprediksi karena adanya penyesuaian konsep dan definisi pasca covid-19
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,92	4,24	1,32	

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan (%)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5	Pendapatan Per Kapita	39,60	42,16	2,56	Data ini merupakan data PDRB per kapita (satuan dalam rupiah).
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,272	0,305	0,033	karena gini ratio merupakan indeks maka tidak dihitung dengan persentase gini ratio 2022 terhadap gini ratio 2021 mengalami perubahan sebesar 0,033 poin yang diprediksi karena adanya transisi pasca covid 19

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba

2.2 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Toba Tahun 2022 baik Indikator Kinerja Kunci Output (Keluaran) dan Indikator Kinerja Kunci Outcome (Hasil) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

2.2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	49	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5557	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	5557	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	485	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah pendidik pada PAUD	461	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	19	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	71	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	255	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	24819	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	13283	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20804	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	11486	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	1949	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	890	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2115	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	899	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	227	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	102	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	112	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	126	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1464	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	623	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
16	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	122	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
17	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	31	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
18	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
19	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	2	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	46	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah peserta didik ppendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	26	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	42	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	27	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	27	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	2	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	21	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	21	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	361353	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.3	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	582	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.4	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7588	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	545	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.5	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	11058	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.5	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	546	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.6	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	97250	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.6	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	2201	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.7	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	98833	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.7	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1090	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.8	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	57	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.8	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	564	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.9	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	10676	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.9	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	540	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.10	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	282	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.10	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	545	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.11	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	282	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.11	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	564	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.12	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	84	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.12	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	20	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.13	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	15895	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.13	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	345	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.14	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	11170	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.14	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	348	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	2175	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	82799,9	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	70973,731	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	15411,52	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	1	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	38141	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	104	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	38141	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	33,33	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	125	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	717	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	615	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	746,1	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang dibangun	129,66	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang dibangun	47,5	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	6,81	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	44,12	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang dipelihara	0,052	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang dipelihara	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	1	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	124	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	124	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
16	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
17	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
18	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
19	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
20	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
21	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
22	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
23	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
24	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
25	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toba dan Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	528	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	528	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	528	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	528	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	160,43	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	360	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	3,22	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah di kab/kota	55247	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah unit PK RTLH	360	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah tidak layak huni	9711	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	5929	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Rasio rumah dan KK	87,46	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah pembangunan baru	86	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	4	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	34015	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	221	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)	348	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah pengembang yang terregistrasi	0	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba serta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Toba.
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	37	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan	0	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	8	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	4	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Tersedianya sarana prasarana minimal	6	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.3	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.3	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	70	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0,001	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,001	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	0	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	5	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	2	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	12	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	3	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	47	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0	Data diperoleh dari Satpol PP Kab. Toba dan BPBD Kab.Toba.
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	37	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	565	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	JumlahTimReaksi Cepat yang dibentuk	1	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	565	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	375	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlahrumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	190	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	47	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosia	10	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
16	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	12	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
17	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
18	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
19	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
20	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
21	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	10	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	528	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	19	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	80	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	0	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase instruktur bersertifikatkompetensi	16,67	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	8,33	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase LPK yang terakreditasi	16,67	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase LPK yang memiliki perizinan	66,67	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Jumlah penganggur yang dilatih	72	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	97,22	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase penyerapan lulusan	52,86	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Lulusan bersertifikat kompetensi	100	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	1,11	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Data tingkat produktivitas total	0	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	71,05	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	87,5	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	17	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	94,11	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah mogok kerja	73	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah penutupan perusahaan	0	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan kepentingan	1	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan PHK	0	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	4	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	1	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
14	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
15	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	0	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	4	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	599	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	2	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	10	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	83	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)yang mendapatkan sosialisasi	0	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)yang terdata	440	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
14	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	0	Data diperoleh dari Dinas PMPTSPTK Kab.Toba.
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMDP & PA KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.1	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMDP & PA KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMDP & PA KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMDP & PA KABUPATEN TOBA
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMDP & PA KABUPATEN TOBA
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMDP & PA KABUPATEN TOBA
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMDP & PA KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMDP & PA KABUPATEN TOBA

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	30	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMDP & PA KABUPATEN TOBA
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMDP & PA KABUPATEN TOBA
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMDP & PA KABUPATEN TOBA
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	3	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMDP & PA KABUPATEN TOBA
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMDP & PA KABUPATEN TOBA
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMDP & PA KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	17	Data diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba.
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	0	Data diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba.
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	Data diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba.
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	3	Data diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba.
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	Data diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba.
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tertanganinya kerawanan pangan	0	Data diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba.

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	0	Data diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba.
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	0	Data diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba.
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4 ,2.i.5,2.i.6	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba.
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4 ,2.i.5,2.i.6	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	1	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba.
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4 ,2.i.5,2.i.6	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	1	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba.
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4 ,2.i.5,2.i.6	Dokumen Izin membuka tanah	1	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba.
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4 ,2.i.5,2.i.6	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	1	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba.
1a	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	57,69	Data diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba.
1b	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,08	Data diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba.
1c	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	61,41	Data diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba.
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.2	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	792000	Data diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba.

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	21	Data diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba.
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	4,76	Data diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba.
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kotaPenetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	0	Data diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba.
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	Data diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba.
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung	100	Data diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba.
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1,2.k.2	Penerbitan akta perkawinan	1712	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1,2.k.2	Penerbitan akta perceraian	164	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TOBA
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1,2.k.2	Penerbitan akta kematian	1518	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TOBA
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1,2.k.2	Penyajian data kependudukan	2	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.l.1,2.l.2	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMDP & PA KABUPATEN TOBA

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.l.1,2.l.2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMDP & PA KABUPATEN TOBA
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.l.1,2.l.2	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	30	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMDP & PA KABUPATEN TOBA
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.l.1,2.l.2	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMDP & PA KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PPKB KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	28	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PPKB KABUPATEN TOBA
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	1	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PPKB KABUPATEN TOBA
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	2,82	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PPKB KABUPATEN TOBA
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PPKB KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	87,5	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PPKB KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	43,09	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PPKB KABUPATEN TOBA
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	34086	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PPKB KABUPATEN TOBA

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	1,63	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PPKB KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.3	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	57,19	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PPKB KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.3	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	31,29	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PPKB KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	0,2	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	219,2	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TOBA
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	69,23	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TOBA
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	22,22	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	2,27	DATA DIPEROLEH DARI DINAS Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	90,91	DATA DIPEROLEH DARI DINAS Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	34,09	DATA DIPEROLEH DARI DINAS Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	33,33	DATA DIPEROLEH DARI DINAS Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba
14	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1	DATA DIPEROLEH DARI DINAS Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.3	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.3	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	57,5	DATA DIPEROLEH DARI DINAS Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7,69	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	11	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannyauntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihanuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	37,14	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,61	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaranuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	34,28	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	2,62	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	32,59	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	53,48	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,49	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	5,05	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	2,91	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMPTSP & KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMPTSP & KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMPTSP & KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMPTSP & KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Kegiatan pameran penanaman modal	1	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMPTSP & KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	6	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMPTSP & KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	744	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMPTSP & KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1520	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMPTSP & KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Laporan realisasi penanaman modal	357370306864	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMPTSP & KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	22	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMPTSP & KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	33	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMPTSP & KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	1523	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMPTSP & KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, BADAN KESBANGPOL SERTA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAH RAGA KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.1	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, BADAN KESBANGPOL SERTA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAH RAGA KABUPATEN TOBA

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.2	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, BADAN KESBANGPOL SERTA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAH RAGA KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, BADAN KESBANGPOL SERTA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAH RAGA KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.3	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	4	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, BADAN KESBANGPOL SERTA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAH RAGA KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.3	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	4	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, BADAN KESBANGPOL SERTA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAH RAGA KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1,2.s.2	Tersedianya buku profil daerah	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1,2.s.2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	2	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TOBA

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1,2.s.2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	3	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TOBA
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1,2.s.2	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	2	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TOBA
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1,2.s.2	Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	2	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TOBA
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1,2.s.2	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	66,67	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TOBA
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1,2.s.2	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	66,67	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	2.t.1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	2.t.1	Persentase system elektronik yang telahmenerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TOBA
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	2.t.1	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TOBA
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	2.t.1	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	450	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	11	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TOBA
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	4	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TOBA

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TOBA
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TOBA
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TOBA
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TOBA
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TOBA
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TOBA
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	2016	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TOBA
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	22296	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TOBA
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	1	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TOBA
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TOBA
14	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TOBA
15	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TOBA

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
16	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TOBA
17	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TOBA
18	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TOBA
19	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	2	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	10,61	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	15,36	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TOBA
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,12	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TOBA
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TOBA
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat	4	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.2	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TOBA
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.2	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	274	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.1	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	47,5	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.1	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	77	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TOBA

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.1	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	23,1	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TOBA
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.1	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TOBA
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TOBA
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TOBA
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TOBA
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TOBA
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TOBA
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TOBA
1	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	745	Data diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba
2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	Data diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba
3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	Data diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba
4	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	359	Data diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba
5	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	32000	Data diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba
1	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	61	Data diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba.

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	73	Data diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba.
3	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	0	Data diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba.
4	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0	Data diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba.
5	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1	Data diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba.
6	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	Data diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba.
7	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	10	Data diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba.
8	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	2,21	Data diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba.
9	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	316,4	Data diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba.
10	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	6	Data diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba.
1	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Sarana pertanian yang diberikan	36	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERTANIAN KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Prasarana pertanian yang digunakan	30	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERTANIAN KABUPATEN TOBA
3	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Penerbitan izin usaha pertanian	9	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERTANIAN KABUPATEN TOBA

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
4	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Persentase prasarana yang digunakan	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERTANIAN KABUPATEN TOBA
5	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERTANIAN KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.2	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERTANIAN KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	DATAA DIPEROLEH DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	DATAA DIPEROLEH DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	DATAA DIPEROLEH DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0	DATAA DIPEROLEH DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB. TOBA
1a	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
1b	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase penerbitan TDG	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	22,22	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
4	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
5	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	50	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
3	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	40	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.2	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	10950,62	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	13,85	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.3	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
1	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB. TOBA
1	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.2	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB. TOBA
1	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.3	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB. TOBA
2	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.3	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB. TOBA
1	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.6	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	0,15	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB. TOBA
1	Urusan Pilihan	Transmigrasi	2.h.1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	DATA DIPEROLEH DARI DPMPTSP DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA
2	Urusan Pilihan	Transmigrasi	2.h.1	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	DATA DIPEROLEH DARI DPMPTSP DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA
3	Urusan Pilihan	Transmigrasi	2.h.1	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	DATA DIPEROLEH DARI DPMPTSP DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA

2.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 7730. Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 7764	99,5620814	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TOBA
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 27213. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 26993	100,815026	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TOBA
1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 17841. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 14186	125,764839	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TOBA
1.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 127. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 208	61,0576923	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TOBA
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 237. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 213924	0,110787	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 5. Jumlah RS di kabupaten/kota = 21	23,8095238	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 3496. Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 3964	88,1937437	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 3244. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 3784	85,7293869	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
1.b.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 3225. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 3604	89,4839068	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
1.b.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 16116. Jumlah balita di kabupaten/kota = 17434	92,4400597	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
1.b.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 9195. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 34757	26,4551026	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
1.b.8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 28382. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 132525	21,4163365	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
1.b.9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 26682. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 24184	110,329143	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
1.b.10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 37009. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 45193	81,8910008	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
1.b.11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 2834. Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 3396	83,451119	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
1.b.12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 199. Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 259	76,8339768	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
1.b.13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 3891. Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 3785	102,800528	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
1.b.14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 6191. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 5338	115,979768	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA
1.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 0. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 2175	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba.

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
1.c.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 0. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 0	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba.
1.c.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 962.548. luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 14068	6,8421098	Data diperoleh dari dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba.
1.c.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = 34015. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 44997	75,5939285	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba.
1.c.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 38141. Jumlah rumah di Kabupaten A = 44997	84,7634287	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
1.c.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 1144. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 1144	100	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba.
1.c.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 371.6. Jumlahtotal panjang jalan kabupaten/kota = 746.1	49,8056561	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba.
1.c.8.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis = 124. Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota = 150	82,6666667	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabuapten Toba.
1.c.8.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 330. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 330	100	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba.
1.d.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 528 Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 528	100	Bantuan yang diberikan berupa bantuan material. Data diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Toba.

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
1.d.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 0	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba.
1.d.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 3.22. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 160.43	2,0071059	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. TOBA
1.d.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 9711. Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 55247	17,577425	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TOBA
1.d.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 348. Jumlah unit rumah kab/kota = 55247	0,6298985	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. TOBA
1.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 37. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 37	100	DATA DIPEROLEH DARI SATPOL PP KABUPATEN TOBA
1.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksiyang ditegakkan = 8. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 18	44,4444444	DATA DIPEROLEH DARI SATPOL PP KABUPATEN TOBA

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
1.e.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 187316. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 187316	100	DATA DIPEROLEH DARI BPBD KABUPATEN TOBA
1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 187316. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 267594	70,0000747	DATA DIPEROLEH DARI BPBD KABUPATEN TOBA
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 871. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 871	100	DATA DIPEROLEH DARI BPBD KABUPATEN TOBA
1.e.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingk = 125. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 125	100	DATA DIPEROLEH DARI SATPOL PP KABUPATEN TOBA

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
1.e.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	20	DATA DIPEROLEH DARI SATPOL PP KABUPATEN TOBA
1.f.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 565. Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 565	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL
1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 528. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 528	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
2.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 4. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota = 8	50	DATA DIPEROLEH DARI DPMPTSP & KETENAGAKERJAAN KAB. TOBA
2.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	PersentaseTenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 87. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 8760	0,9931507	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMPTSP & KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
2.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 5888376100000. Jumlah tenaga kerja = 8760	6,7219E+10	DATA DIPEROLEH DARI DPMPTSP DAN KETENAGAKERJAAN SERTA BPS KAB. TOBA
2.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 34. Jumlah Perusahaan = 45	75,5555556	DATA DIPEROLEH DARI DPMPTSP & KETENAGAKERJAAN KAB. TOBA
2.a.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 599. Jumlah pencaker yang terdaftar = 599	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMPTSP DAN KETENAGAKERJAAN KAB. TOBA
2.g.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD = 672330923. Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 929211075705	0,072355	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMDPPA DAN BPKAD KABUPATEN TOBA
2.g.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 11. Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 11	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMDP&PA KABUPATEN TOBA
2.g.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 16. Jumlah penduduk perempuan = 107587	14,8716852	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMDP&PA SERTA DINAS DUKCATPIL KAB. TOBA

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
2.h.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota = 67211.64. Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan = 27801.56	241,754923	Data di peroleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba.
2.i.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 990. seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 990	100	Data diperoleh dari Dinas DPMPTSPTK Kabupaten Toba.
2.i.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 990. Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 990	100	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabuapten Toba.
2.i.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 0. Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 0	0	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba.
2.i.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; = 52. Jumlah penerima tanah obyek landreform = 204	25,4901961	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba.
2.i.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah = 990. Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = 990	100	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba.

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
2.i.6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 13. Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 13	100	Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba.
2.j.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota		69,19	DATA DIPEROLEH DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TOBA
2.j.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 18536. Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota = 29127	63,6385484	DATA DIPEROLEH DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TOBA

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
2.j.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = 27. usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 33	81,8181818	DATA DIPEROLEH DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TOBA
2.k.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 149106. Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 149205	99,9336483	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TOBA
2.k.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 27734. Jumlah anak usia 0-17 tahun = 68363	40,5687287	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TOBA
2.k.1.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 69700. Jumlah anak usia 0-18 tahun = 71853	97,0036046	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TOBA
2.k.1.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 7. Jumlah PD = 44	15,9090909	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TOBA
2.l.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 45. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 62	72,5806452	DATA DIPEROLEH DARI DPMDP&PA KABUPATEN TOBA

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
2.l.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 0. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 162	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMDP & PA KABUPATEN TOBA
2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,51	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PPKB KABUPATEN TOBA
2.m.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 19079. Jumlas Pasangan Usia Subur = 24513	77,8321707	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PPKB KABUPATEN TOBA
2.m.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 2941. Jumlas Pasangan Usia Subur = 24513	11,9977155	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PPKB KABUPATEN TOBA

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*
2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio konektvitas Kabupaten atau Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah	0,66	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TOBA

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
2.n.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	0,12	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TOBA
2.o.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 1. Jumlah PD = 44	2,2727273	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TOBA
2.o.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 13. Jumlah Layanan Publik = 13	100	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TOBA
2.o.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 190805. Jumlah penduduk = 213924	89,1928909	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TOBA
2.p.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas 	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 2. Jumlah seluruh koperasi aktif = 70	2,8571429	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI , UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
2.p.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 1640. Jumlah usaha mikro keseluruhan = 3427	47,855267	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB. TOBA

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
2.q	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = 215779253203. Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 141591053661	152,396107	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENANAMAN MODAL PTSP DAN KETENAGAKERJAAN KAB. TOBA
2.r.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota = 1600. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 47109	3,3963786	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM , PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN SERTA DARI DINAS DUKCATPIL KAB. TOBA
2.r.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota = 31. jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 47107	0,0658076	DATA DIPEROLEH DARI BADAN KESBANGPOL DAN DINAS DUKCATPIL KABUPATEN TOBA
2.r.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	21	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.s.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 37. jumlah PD = 44	84,0909091	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TOBA
2.s.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 37. jumlah PD = 44	84,0909091	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TOBA

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
2.t	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi = 2. Jumlah area penilaian = 5	40	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TOBA
2.u	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 10. Jumlah cagar budaya yang terdata = 450	2,2222222	Data diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba.
2.v.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		46,64	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TOBA
2.v.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		22,53	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TOBA
2.w.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)		37,15	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TOBA
2.w.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TOBA

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
3.a	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota = 1872339. Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 604667.02	309,647945	Data diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba.
3.b.1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 0. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 0	0	Data diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba.
3.b.2	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 830259. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 201335	412,376884	Capaian persentase data adalah 4.12%. Data diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba.
3.b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual = 75915. Jumlah kamar yang tersedia = 814	9326,16708	Data diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba.

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
3.b.4	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 1357105.4. Total PDRB Berlaku = 8943890.6	15,1735465	Data dihitung berdasarkan penjumlahan nilai perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum yang dituangkan dalam buku Kabupaten Toba dalam Angka 2023.
3.b.5	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata = 7019631682.58. Total realisasi PAD = 63708264330.03	11,0184004	DATA DIPEROLEH DARI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TOBA
3.c.1	Urusan Pilihan	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 210047.47. luas panen = 31716.7	662,261427	DATA DALAM SATUAN TON DAN DIPEROLEH DARI DINAS PERTANIAN KABUPATEN TOBA
3.c.2	Urusan Pilihan	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 275. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 278	98,9208633	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERTANIAN KABUPATEN TOBA

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
3.d	Urusan Pilihan	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TOBA (merupakan kewenangan provinsi)
3.e	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = 0. Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = 0	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
3.f.1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 789. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = 1782	44,2760943	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
3.f.2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi = 10950.87. RDKK = 11133	98,3640528	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PERTANIAN KABUPATEN TOBA (SATUAN DALAM TON)

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
3.f.3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 150. jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 1083	13,8504155	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB. TOBA
3.g.1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota 	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n–Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = 86. Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 1192	7,2147651	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB. TOBA
3.g.2	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB. TOBA
3.g.3	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 386. Jumlah izin yang dikeluarkan = 548	70,4379562	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
3.g.4	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
3.g.5	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
3.g.6	Urusan Pilihan	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		75	DATA DIPEROLEH DARI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
3.h	Urusan Pilihan	Transmigrasi			0	DATA DIPEROLEH DARI DINAS PMPTSP & KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA

2.2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
4.a.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = 134583632416. Jumlah APBD = 399421603747	33,69463	DATA DIPEROLEH DARI BPKAD KABUPATEN TOBA
4.a.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	Jumlah PAD = 63708264330.03. Jumlah Pendapatan pada APBD = 963222162766.03	6,6140779	DATA DARI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TOBA
4.a.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	DATA DIPEROLEH DARI INSPEKTORAT KABUPATEN TOBA
4.a.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	2	DATA DIPEROLEH DARI INSPEKTORAT KABUPATEN TOBA
4.a.5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 634145182033. jumlah belanja APBD = 1047287374552	60,55121	DATA DIPEROLEH DARI BPKAD KABUPATEN TOBA
4.a.6	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan		1	WTP pada TA 2021 dan untuk TA. 2022 masih dalam proses
4.b.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0. jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 559	0	DATA DIPEROLEH DARI BAGIAN PENGADAAN BARANG/ JASA SETDAKAB TOBA
4.b.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 35. Jumlah seluruh pengadaan = 559	6,2611807	DATA DIPEROLEH DARI BAGIAN PENGADAAN BARANG/ JASA SETDAKAB TOBA

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
4.b.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 83488146842.89. total belanja operasi dan modal = 929211075707	8,984842	DATA DIPEROLEH DARI BAGIAN PBJ DAN BPKAD KABUPATEN TOBA
4.b.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 131836946900.32. Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 129149273215	102,08106	DATA DIPEROLEH DARI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDAKAB TOBA
4.c.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 1033. Jumlah seluruh pegawai = 1401	73,733048	DATA DIPEROLEH DARI BKPSDM KAB. TOBA
4.c.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 292. seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 1401	20,842256	DATA DIPEROLEH DARI BKPSDM KAB. TOBA
4.c.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 32. seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 292	10,958904	DATA DIPEROLEH DARI BKPSDM KABUPATEN TOBA
4.d.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja = 1047287374552. Total Belanja APBD = 1186336391645	11,720876	DATA DIPEROLEH DARI BPKAD KAB. TOBA
4.d.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi = 73253546379.93. Total PAD dalam APBD = 72327296214	1,2806371	DATA DIPEROLEH DARI BPKAD KABUPATEN TOBA

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*
4.d.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	3	DATA DIPEROLEH DARI BPKAD KAB. TOBA
4.d.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA = 119822494703.42. total belanja anggaran tahun sebelumnya = 757063873275.1	15,827264	DATA DIPEROLEH DARI BPKAD KABUPATEN TOBA
4.e.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 408387963235. Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 1171894843872	34,848516	DATA DIPEROLEH DARI BAGIAN PENGADAAN BARANG/ JASA SETDAKAB TOBA
4.e.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 1. total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12	8,3333333	DATA DIPEROLEH DARI BPKAD KABUPATEN TOBA

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Akuntabilitas kinerja diukur dengan melakukan pengumpulan data kinerja yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Data Kinerja dimaksud dilakukan verifikasi data internal guna menjaga keakuratan data.

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Bupati.

RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Komprehensif lima tahunan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan Perangkat daerah selama 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun secara sistematis dengan mengedepankan isu–isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan daerah.

Setiap perangkat daerah selanjutnya menjabarkan Renstra kedalam Renja Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Tahun 2016- 2021 juga menjadi acuan untuk menyusun RKPD Kabupaten Toba. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya menjadi Recana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD).

Visi Pembangunan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah, berdasarkan defenisi tersebut maka Visi Pembangunan tersebut menggambarkan keadaan yang diharapkan pada akhir periode pembangunan daerah. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 tidak dapat disusun terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke 4 yang sesungguhnya menjadi landasan dari penjabaran Visi, Misi, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan, dan program Pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026 ini. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan tantangan yang dihadapi maka visi Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 dapat dirumuskan, yaitu:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR"

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (value) atau pokok pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan.

Kemudian capaian kinerja diukur dengan membandingkan realisasi dan target kinerja. Adapun penjabaran tiap-tiap Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RPJMD KAB. TOBA 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA	TARGET 2022
1	Indeks Infrastruktur	Indeks	**indeks Infrastruktur=** $(\frac{62}{100} x\ \ Indeks\ Sarana\ Prasarana) +$ $(\frac{20}{100} x\ Indeks\ Perumahan\ Permukiman) +$ $\frac{62}{100} x\ Indeks\ Konektivitas)$	**0,655**
2	IPM	Indeks	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ Dimensi kesehatan : $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ Dimensi Pendidikan : $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ Dimensi Pengeluaran : $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$	**76,58**
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Nilai Hasil Evaluasi Kemenpan dan RB	**CC/50,20**
4	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	$\frac{Kontribusi\ PDRB\ dari\ sektor\ pertanian/perkebunan}{Jumlah\ PDRB}$ X 100%	**33,88**
5	Indeks Kesehatan	Indeks	Dimensi kesehatan : $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	**0,45**
6	Pertumbuhan PDRB	Persen	$\frac{PDRB(t+s) - PDRB(t)}{PDRB\ (t)}$ X 100%	**3,8**

7	Penanganan PMKS	Indeks	(Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti + Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti + persentase warga Negara lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti + persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan jamsos + persentase PMKS yang tertangani) /5	80,59
8	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks	indeks ketentraman dan ketertiban $= \frac{rasio\ perda\ yang\ ditegakkan}{rasio\ tindak\ kriminal\ terhadap\ jumlah\ penduduk}$	0,998

INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD KAB. TOBA 2021-2026

MISI	SASARAN STRATEGIS	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun (2020)	Target 2022]
MISI I: Infrastruktur yang Bagus dan Merata					
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	Indeks sarana prasarana	Indeks	**0,5103**	**0,4777**
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	**Indeks perumahan pemukiman**	**Indeks**	**0,0966**	**0,1383**
	Meningkatnya kualitas konektivitas	**Indeks konektivitas daerah**	**Indeks**	**0,1548**	**0,1548**
MISI II: Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal					
	Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan	**indeks pendidikan**	**Indeks**	**0,724**	**0,738**
	Meningkatnya ketahanan keluarga	**indeks ketahanan keluarga**	**Indeks**	**1,00**	**1,03**
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**nilai**	**80**	**88**
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	**Opini BPK**	**opini**	**WTP**	**WTP**
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Nilai SAKIP**	**Nilai**	**CC**	**B/60**
MISI III: Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera					
	meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan	**Indeks Produksi Pertanian (IPP)**	**indeks**	**1,119**	**1,258**
	Meningkatnya ketersediaan Pangan	**Ketersediaan pangan utama**	**persen**	**318,33**	**321,38**

MISI	SASARAN STRATEGIS	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun (2020)	Target 2022]
MISI IV: Kesehatan yang Prima dan Terjangkau					
	Meningkatnya harapan hidup	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,08	70,24
MISI V: Pariwisata Berkat dan Meriah					
	Meningkatnya kesempatan kerja	TPT	%	2,50	2,28
	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan wisata	orang	217.462	531.810
	menurunkan angka kemiskinan	persentase Penduduk Miskin	%	8,71	8,57
MISI VI: Membangun Iman yang terpelihara					
	Menurunnya penyakit sosial	Laju penurunan Persentase PMKS	Angka	43,6	50,00
MISI VII: Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban					
	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	persen	98	100

I. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Toba dilakukan

dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran kinerja meliputi perjanjian kinerja dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Kabupaten Toba dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. *Rumus 1* : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. *Rumus 2* : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Toba, ditetapkan penilaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

85	ke atas	:	Sangat Berhasil
70	X < 85	:	Berhasil
55	X < 70	:	Cukup Berhasil
	X < 55	:	Kurang Berhasil

I. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022

IKU pemerintah daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2022	realisasi 2022	% CAPAIAN	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Indeks Infrastruktur	Indeks	**0,655**	**0,623**	**95,16%**	DATA DIOLAH
2	IPM	Indeks	**76,58**	**75,96**	**99,19%**	BPS
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	**CC/50,20**	**C/ 48,63**	**96,87%**	INSPEKTORAT/ BAGIAN ORGANISASI SETDA
4	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	**33,88**	**31,24**	**92,21%**	DINAS PERTANIAN/ BPS
5	Indeks Kesehatan	Indeks	**0,45**	**1,00**	**222,22%**	DINAS KESEHATAN
6	Pertumbuhan PDRB	Persen	**3,8**	**4,24**	**111,58%**	BPS
7	Penanganan PMKS	Indeks	**80,59**	**58,09**	**72,08%**	DATA DIOLAH
8	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks	**0,998**	**2,37**	**237,47%**	DATA DIOLAH

1. Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja daerah berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar. Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara rata-rata dari jumlah persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon. Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah kota maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kota tersebut semakin baik

Adapun formula untuk menghitung indikator tersebut adalah sebagai berikut:

indeks Infrastruktur=

$$(\frac{62}{100} x \ Indeks\ Sarana\ Prasarana) +$$

$$(\frac{20}{100} x\ Indeks\ Perumahan\ Permukiman) +$$

Perhitungan indeks infrastruktur disajikan dalam tabel pada halaman berikut sesuai dengan data yang didapatkan dari Dinas PUTR Kabupaten Toba

No.	Indikator	Formulasi (merujuk Permendagri 18/2020)	Sifat Data	Bobot	TAHUN 2020					TAHUN 2021			TAHUN 2022					
					Kondisi	Pembagi	satuan	Indeks	Persentasi Capaian				Pembagi	Target RPJMD/Renstra		Realisasi Tahun 2022		
														Target RPJMD/Renstra	Indeks	Kondisi	Persentasi	Indeks
I	**Indeks Sarana Prasrana**									Kondisi	Capaian	Indeks						
1	Tingkat kemantapan jalan	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap/Jumlah total panjang jalan kabupaten	Akumulasi	28,00 %	316,12	746,1	km	**0,1186**	42,37	345,04	46,25	0,1295	746,10	368,59	0,1383	371,62	100,8%	0,1395
2	Layanan irigasi	Jumlah luas areal yang dilayani irigasi/Jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi	Akumulasi	19,00 %	13134	14.068	ha	**0,1774**	93,36	13289	94,46	0,1795	14.068	13.443	0,1816	13.845	103,0%	0,1870
3	Ketersediaan tenaga konstruksi terlatih	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih/Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis	Akumulasi	9,00%	50	365	orang	**0,0000**	13,70	0	-	-	365	113	0,0279	82	72,6%	0,0202
4	Proyek tanpa kecelakaan	1 – (Jumlah proyek yang terjadi kecelakaan/Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasan)	Non akumulasi	9,00%	100	100		**0,0900**	100,00	0%	-	0,0900	100,00	100%	0,0900	100%	100,0%	0,0900
5	Kepatuhan IMB	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukan/Jumlah IMB yang berlaku	Akumulasi	9,00%	526	526		**0,0900**	100,00	100%	0,19	0,0900	526	100%	0,0900	389	74,0%	0,0666
6	Akses air minum	Jumlah rumah tangga berakses air minum terlindungi/Jumlah rumah tangga	Akumulasi	13,00 %	33.154	44.997	RT	**0,0958**	73,68	33154	73,68	0,0958	48.199	34.090	0,0985	33.399	98,0%	0,0901
7	Akses pengolahan limbah domestik	Jumlah rumah tangga berakses air limbah /Jumlah rumah tangga	Akumulasi	13,00 %	35.997	44.997	RT	**0,1040**	80,00	35997	80,00	0,1040	48.199	36.191	0,1046	36.279	100,2%	0,0978
	Indeks Sarana Prasrana			**50,00 %**				**0,6758**				**0,6888**			**0,7308**		**0,9265**	**0,6912**
II	**Indeks Perumahan**																	

No.	Indikator	Formulasi (merujuk Permendagri 18/2020)	Sifat Data	Bobot	TAHUN 2020					TAHUN 2021			TAHUN 2022					
					Kondisi	Pembagi	satuan	Indeks	Persentasi Capaian				Pembagi	Target RPJMD/Renstra		Realisasi Tahun 2022		
														Target RPJMD/Renstra	Indeks	Kondisi	Persentasi	Indeks
	Permukiman																	
1	Penanganan kawasan kumuh	Luas kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani/Luas kawasan kumuh di bawah 10 ha	Akumulasi	40,00 %	8,69	160,43	ha	**0,0217**	0,05416693	8,69		0,0217	160,43	16,69	0,0416	9,91	59,4%	0,02
2	Kelayakan rumah tinggal	1 – (Jumlah unit RTLH/Jumlah total unit rumah)	Akumulasi	40,00 %	11900	47.722	unit	**0,3003**		11900		0,3003	48.199	11.750	0,3015	11.453	97,5%	0,305
3	Layanan PSU perumahan	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi PSU/Jumlah total unit rumah	Akumulasi	20,00 %	28633	47.722	unit	**0,0000**		28633		0,1200	48.199	28.733	0,0796	28.933	100,7%	0,080
	Indeks Perumahan Permukiman			**30%**				**0,3219**				**0,4419**			**0,4227**			**0,4096**
III	**Indeks Konektivitas**																	
1	Konektivitas angkutan penumpang	Jumlah trayek angkutan penumpang yang dilayani/Jumlah trayek angkutan yang dibutuhkan	Akumulasi	34%	20	25	trayek	**0,2720**		20		0,2720	25	20	0,2720	20	100,0%	0,2720
2	Konektivitas ASDP	Jumlah trayek ASDP yang dilayani/Jumlah trayek ASDP yang dibutuhkan	Akumulasi	32%	11	16	trayek	**0,2200**		11		0,2200	16	11	0,2200	11	100,0%	0,2200
3	Kinerja lalulintas	Kategori V/C Rasio (A=1; B= 0,83; C=0,66, D=50; E=0,33; F=0)	Non akumulasi	34%	B			**0,2822**		B		0,2822		B	0,2822	B	100,0%	0,2822
	Indeks Konektivitas			**20%**				**0,7742**				**0,7742**			**0,7742**			**0,7742**
	Indeks Infrastruktur											**0,6318**			**0,6471**			**0,6233**

2. IPM

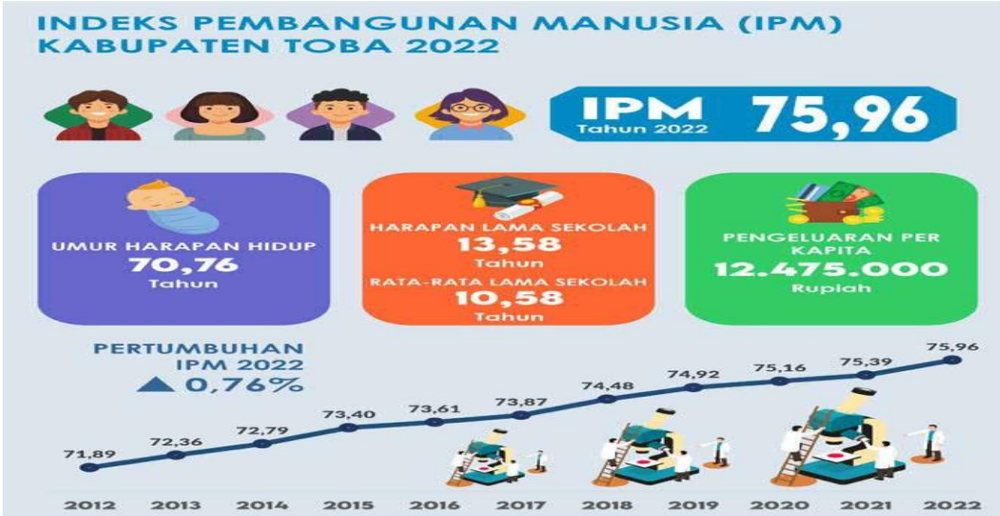

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan kesehatan pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Toba pada **tahun 2022 mencapai 75,96.** Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Kabupaten Toba 2022 adalah sebesar 75,96 atau tumbuh 0,76 persen (meningkat 0,57 poin) dibandingkan capaian IPM 2021. Peningkatan IPM 2022 didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya. Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada 2022 adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan meningkat 2,05 persen dibanding 2021.

Dari dimensi pendidikan, pada 2022 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,58 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,12 tahun dibandingkan 2021 yang mencapai 13,46 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,01 tahun, dari 10,57 tahun menjadi 10,58 tahun pada 2022.

Dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,76 tahun, lebih lama 0,47 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Dalam satu dekade ini pembangunan manusia di Kabupaten Toba terus mengalami kemajuan. IPM Kabupaten Toba meningkat dari 71,89 pada 2012 menjadi 75,96 pada 2022. Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,55 persen per tahun dan selalu berada pada kategori status **"tinggi".**

Capaian IPM Kabupaten Toba 2022 yang meningkat 0,57 poin didukung oleh peningkatan semua komponen penyusunnya. Peningkatan capaian IPM 2022 terutama didukung oleh peningkatan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan yang mengalami percepatan pertumbuhan paling tinggi dibandingkan komponen lainnya.

Perubahan IPM Kabupaten Toba selama satu dekade terlihat dari Gambar berikut,

TABEL IPM KABUPATEN TOBA 2012-2022

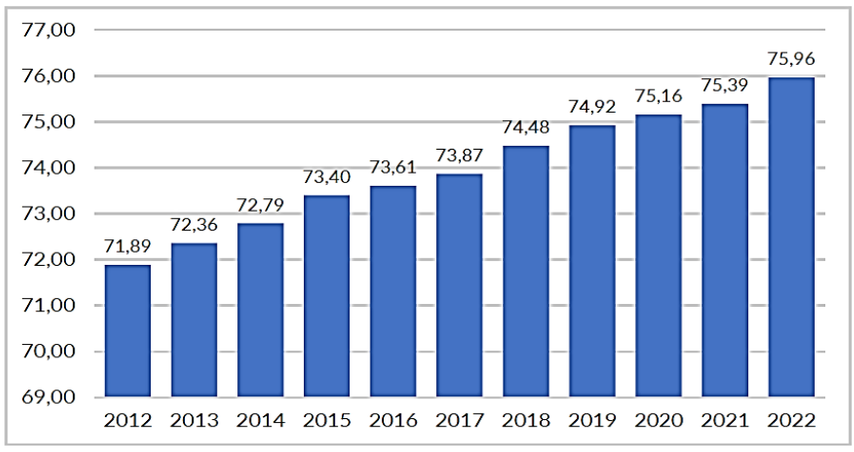

sedangkan perubahan komponen penyusunnya dapat terlihat dari Tabel berikut.

Komponen	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	68,86	68,94	69,04	69,14	69,25	69,36	69,59	69,93	70,08	70,29	70,76
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,62	12,89	13,16	13,18	13,19	13,25	13,26	13,28	13,45	13,46	13,58
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,75	9,79	9,83	10,08	10,09	10,10	10,34	10,36	10,52	10,57	10,58
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp 000	11 043	11 178	11 250	11 535	11 687	11 846	12 095	12 375	12 154	12 224	12 475
IPM		71,89	72,36	72,79	73,40	73,61	73,87	74,48	74,92	75,16	75,39	75,96

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Toba, No. 02/12/1206/Th. III, Desember 2022

3. Indeks Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2020-2024, telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Toba.

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif , kolaboratif, dan analisis yang holistik.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

a) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Toba di tahun 2022 adalah **48,63 atau kategori "C".** Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A .	**Komponen Pengungkit**			
1.	Pemenuhan	20,00	7,29	7,80
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	3,80	4,69
3.	Reform	30,00	4,63	5,21
Total Komponen Pengungkit		**60,00**	**15,72**	**17,70**
B.	**Komponen Hasil**			
	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6,51	6,77
	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,36	8,90
	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,70	8,49
	Kinerja Organisasi	10,00	4,26	6,76
Total Komponen Hasil		40	26,83	30,92
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)		**100**	**42,55**	**48,63**

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada total komponen pengungkit dan hasil. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Toba perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar mencapai target minimal indeks RB > 60 atau predikat "B".

b) Terdapat sembilan hasil antara Pemerintah Kabupaten Toba yang dilakukan pengukuran oleh instansi leading sector, dengan hasil sebagai berikut:

No	HASIL ANTARA	SKALA	NILAI 2021	NILAI 2022	SUMBER
1.	Indeks Sistem Merit	0-400	98	148,5	KASN
2.	Profesionalitas ASN	0-100	46,58	50,38	BKN
3.	Implementasi SPBE	01-May	1,69	1,86	Kementerian PANRB
4.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	33,84	27	LKPP
5.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	2,61	3,2	Kementerian PANRB
6.	Kapabilitas APIP	0-5	2	2	BPKP
7.	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BPKP
8.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	15,72	70,65	Ombudsman RI
9.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	45,51	24,08	ANRI

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rata rata indeks hasil antara pada Pemerintah Kabupaten Toba di tahun 2022 mengalami peningkatan kecuali penilaian pada Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengelolaan Arsip yang mengalami penurunan. Meskipun demikian, nilai hasil antara yang diperoleh oleh Kabupaten Toba masih tergolong di bawah rata-rata terutama pada penilaian ASN yang profesional, Indeks SPBE dan kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Kabupaten Toba juga masih pada zona Kuning.

c) Beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi di antaranya sebagai berikut:

i. Dalam Manajemen Perubahan:
   - Pembangunan reformasi birokrasi di tingkat Pemda dan Perangkat Daerah (PD) belum berorientasi pada reform, tetapi masih sebatas pada pelaksanaan kegiatan dan belum menyusun rencana aksi. Disamping itu, kelengkapan dokumen dan informasi yang telah disampaikan pada aplikasi PMPRB, belum cukup memadai untuk menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi.
   - Agen perubahan belum ditetapkan di tingkat PD.

ii. Belum memiliki hasil identifikasi kebijakan yang memetakan peraturan yang bersifat menghambat dan tidak harmonis;

iii. Belum menyusun Peta Proses Bisnis, sehingga belum tergambarkan kesesuaian efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi dengan kinerja;

iv. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SOM, antara lain assessment pegawai yang belum dilakukan secara menyeluruh, serta belum dilakukan terkait analisa beban kerja secara berkala, dan pemetaan jabatan ;

v. Telah disusun kebijakan pengawasan, antara lain kebijakan tentang Gratifikasi dan pengaduan masyarakat. Namun sosialisasi dan implementasi atas kebijakan tersebut belum optimal;

vi. Belum terdapat kebijakan mengenai benturan kepentingan dan Whistle Blowing System di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba ;

vii. Pemerintah Kabupaten Toba belum memiliki kebijakan sistem kompensasi kepada penerima layanan jika menerima layanan tidak sesuai standar;

viii. PD belum melaksanakan survei kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengukur sejauh mana tingkat efektivitas pelayanan yang diberikan;

ix. Sistem pelayanan publik melalui eperizinan.tobasamosirkab .go.id tidak dapat diakses.

d) Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Toba memperoleh nilai baik dengan rincian sebagai berikut:

No.	KOMPONEN HASIL	SKALA	Nilai 2022	SUMBER DATA
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	53,85	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	88,96	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	84,94	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh KPK
5	Survei Internal Organisasi	0-100	76,88	SPI Internal oleh KPK

e) Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di Pemerintah Kabupaten Toba, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempumakan yaitu:

- Mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak terbatas pada dokumen saja, namun juga memastikan bahwa reformasi birokrasi yang

dilaksanakan di Kabupaten Toba memiliki dampak terutama pada capaian indikator makro. Serta menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, di tingkat Pemda ataupun PD;

- Membentuk Agen perubahan hingga ke tingkat PD, serta menyusun rencana aksi mencakup peningkatan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, Core Value ASN BerAkhlak, area perubahan dalam Reformasi Birokrasi dan melakukan monitoring terkait tingkat keberhasilannya;
- Melakukan pemetaan kebijakan yang bersifat menghambat dan tidak harmonis secara berkala. Selanjutnya, menyusun peta keterkaitan antar kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Toba dengan kebijakan lain yang terkait baik kebijakan internal ataupun ekstemal, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam melakukan harmonisasi;
- Menyusun Peta Proses Bisnis dan selanjutnya menjabarkan menjadi SOP, untuk menggambarkan kesesuaian hubungan antara unit kerja untuk meningkatkan efektivitas;
- Melaksanakan assessment terhadap seluruh pegawai dan memanfaatkan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi. Serta melakukan analisa mengenai Beban Kerja minimal 1tahun sekali secara berkala sesuai PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
- Melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala atas implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi dan penanganan pengaduan masyarakat yang telah disusun, agar mengetahui apakah sistem pengawasan sudah baik, sehingga dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan yang dapat merugikan negara;
- Menetapkan kebijakan mengenai benturan kepentingan dan *Whistle Blowing System* untuk penguatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba;
- Menyusun kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima layanan apabila menerima layanan tidak sesuai standar yang bisa disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik pelayanan di masing-masing PD;
- Mendorong seluruh PD melaksanakan survei dan menginformasikan hasilnya kepada stakeholder serta melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan;
- Memperbaiki pelayanan publik melalui eperizinan.tobasamosirkab.go.id serta mendorong untuk integrasi antara layanan PD yang ada di Pemerintah Kabupaten Toba;
- Meningkatkan mutu self-assessment atas aspek-aspek pada hasil antara area perubahan, serta koordinasi dengan leading sector yang bersangkutan agar dapat meningkatkan hasil penilaian indeks-indeks hasil antara yang masih belum maksimal.

4. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Salah satu pilar pembangunan Kabupaten Toba yaitu terciptanya *'pertanian yang maju'*. Hal ini menunjukkan kemauan yang kuat dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Pertanian menjadi sektor andalan bagi Kabupaten Toba dalam menggerakan perekonomian daerah. Tahun 2022 sektor ini memberi kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Toba yaitu **sekitar 31,24 persen** terhadap total PDRB.

Tanaman sayur-sayuran seperti cabai rawit, cabai keriting, dan bawang merah memiliki produksi terbesar dibandingkan dengan komoditas lainnya yaitu masing-masing sebesar 9.342 kw, 9.080 kw, dan 8.038 kw dengan luas panen yang dapat dilihat pada tabel 5.1.1 -5.1.2. Untuk tanaman buahbuahan yang cukup potensial di Kabupaten Toba adalah durian, alpukat, jeruk siam, dan mangga (tabel 5.1.9 -5.1.10). Tanaman perkebunan umumnya merupakan usaha yang dikelola secara swadaya oleh rakyat. Tanaman perkebunan yang dikelola oleh perusahaan perkebunan masih relatif kecil.

Kelapa sawit merupakan komoditi andalan tanaman perkebunan rakyat yang mempunyai prospek yang baik. Dilihat dari luas tanam tanaman kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan rakyat dengan luas tanam terluas dibanding dengan tanaman perkebunan lainnya. Luas tanaman kelapa sawit tahun 2022 sebesar 4.760,28 Ha. Kecamatan Nassau merupakan daerah yang mempunyai areal tanaman kelapa sawit terluas yakni 2.314,90 Ha dengan 16.383,00 ton tahun 2022 dan Kecamatan Pintu Pohan Meranti merupakan daerah kecamatan yang mempunyai areal tanaman kelapa sawit terluas kedua di Kabupaten Toba dengan luas areal 2.085,98 Ha dan produksi sebesar 14.562,23 ton.

Usaha peternakan umumnya juga dikelola dan diusahakan oleh masyarakat sebagai usaha rumah tangga. Ternak dapat dikelompokkan menjadi ternak besar dan ternak kecil dan unggas. Ternak besar terdiri dari sapi kerbau dan kuda. Ternak kecil meliputi kambing domba dan babi. Sedangkan ternak unggas meliputi ayam dan itik. Pada tahun 2022 jumlah populasi ternak besar seperti sapi berjumlah 2.229 ekor dan kerbau 4.749 ekor.

Populasi ternak kecil pada tahun 2022 yaitu kambing sebanyak 882 ekor, sementara jumlah domba 73 ekor dan babi 7.671 ekor.

air deras dan pembenihan sedangkan usaha penangkapan dilakukan di danau sungai dan rawa. Pada tahun 2022 jumlah rumah tangga perikanan dengan budidaya secara kolam sebanyak 2.348 yang terdiri dari kolam, jaring apung, dan sawah masing-masing sebanyak 369 rumah tangga, 92 rumah tangga dan 1.887 rumah tangga. Produksi perikanan terbesar yaitu sawah di Kabupaten Toba pada tahun 2022 sebesar 554,51 ton dan produksi hasil budidaya secara keseluruhan sebesar 1.263,70 ton.

DRB LAPANGAN USAHA	LAJU PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN TOBA SAMOSIR Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2011-2022 (Persen)		
	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.41	2.86	**3.22**
Pertambangan dan Penggalian	-0.86	4.16	4.88
Industri Pengolahan	-0.11	3.07	5.64
Pengadaan Listrik dan Gas	2.06	5.00	5.15
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0.47	3.71	5.13
Konstruksi	-4.25	4.84	6.01
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0.11	3.41	6.09
Transportasi dan Pergudangan	-4.64	3.53	5.60
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0.81	0.20	3.67
Informasi dan Komunikasi	8.37	7.86	6.29
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.28	3.47	3.48
Real Estate	2.15	1.49	3.09
Jasa Perusahaan	-0.70	2.22	4.24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0.02	-0.22	0.47
Jasa Pendidikan	4.72	3.12	3.66
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.62	0.24	2.01
Jasa lainnya	-1.90	2.44	4.46
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-0.27	2.92	4.24

Sumber: https://tobasamosirkab.bps.go.id

5. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan menggambarkan jumlah kematian Ibu dan Kematian Bayi dalam jangka waktu satu tahun. Indeks Derajat Kesehatan bernilai 1 artinya tidak ada kematian pada periode waktu tersebut dan jika Indeks Derajat Kesehatan bernilai minus artinya angka kematian Ibu dan Bayi melebihi angka kematian maksimum pada periode 2011-2022.

Indeks Kesehatan sesuai metadata pada RPJMD 2021-2026 Kabupaten Toba dapat dihitung menggunakan formula:

Dimensi kesehatan :

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Berdasarkan data dibawah ini:

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Toba

Tahun	AHH
2011	68,72
2012	68,86
2013	68,94
2014	69,04
2015	69,14
2016	69,25
2017	69,36
2018	69,59
2019	69,93
2020	70,08
2021	70,29
2022	70,76

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Toba.

Jika dilakukan perhitungan maka:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

$$I_{kesehatan} = \frac{70,76 - 68,72}{70,76 - 68,72}$$

$$I_{kesehatan} = \mathbf{1,00}$$

6. Pertumbuhan PDRB

Sebagian besar penduduk Kabupaten Toba menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari luasnya hamparan pertanian khususnya lahan persawahan. Salah satu pilar pembangunan Kabupaten Toba yaitu terciptanya 'pertanian yang maju'. Hal ini menunjukkan kemauan yang kuat dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Pertanian menjadi sektor andalan bagi Kabupaten Toba dalam menggerakan perekonomian daerah. Tahun 2022 sektor ini memberi kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Toba yaitu sekitar 31,24 persen terhadap total PDRB.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan struktur ekonomi daerah peranan sektorsektor ekonomi dan pergeserannya yang didasarkan pada PDRB atas dasar harga berlaku. Disamping itu PDRB menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi baik secara total maupun per sektor dengan membandingkan PDRB tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya menggunakan atas dasar harga Konstan tahun 2022.

PDRB Kabupaten Toba atas dasar harga berlaku tahun 2022 sebesar 8.943.890,6 juta rupiah. **Berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 PDRB Kabupaten Toba tahun 2022 sebesar 5.888.376,1 juta rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,24 persen**. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang memberi peranan atau kontribusi yang terbesar terhadap PDRB tahun 2022. Tahun 2022 sektor ini memberi andil terhadap PDRB sebesar 31,24 persen walaupun sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan adanya peningkatan dalam pembentukan PDRB tahun 2022. Hal ini dapat dilihat dari peranannya tahun 2020 sebesar 31,13 persen.

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran atas dasar berlaku pada tahun 2022 adalah sebesar 8.943.890,63 juta rupiah, sedangkan untuk produk domestik regional bruto menurut pengeluaran atas dasar harga konstan adalah sebesar 5.888.376,19 juta rupiah. Distribusi persentase PDRB ADHB paling besar pada kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 53,54 persen dan paling kecil pada kelompok perubahan inventori sebesar 1,46 persen.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Toba Samosir atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

PDRB LAPANGAN USAHA	LAJU PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN TOBA SAMOSIR Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2011-2022 (Persen)		
	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.41	2.86	**3.22**
Pertambangan dan Penggalian	-0.86	4.16	4.88
Industri Pengolahan	-0.11	3.07	5.64
Pengadaan Listrik dan Gas	2.06	5.00	5.15
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0.47	3.71	5.13
Konstruksi	-4.25	4.84	6.01
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0.11	3.41	6.09
Transportasi dan Pergudangan	-4.64	3.53	5.60
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0.81	0.20	3.67
Informasi dan Komunikasi	8.37	7.86	6.29
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.28	3.47	3.48
Real Estate	2.15	1.49	3.09
Jasa Perusahaan	-0.70	2.22	4.24

PDRB LAPANGAN USAHA	LAJU PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN TOBA SAMOSIR Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2011-2022 (Persen)		
	2020	2021	2022
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0.02	-0.22	0.47
Jasa Pendidikan	4.72	3.12	3.66
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.62	0.24	2.01
Jasa lainnya	-1.90	2.44	4.46
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**-0.27**	**2.92**	**4.24**

Sumber: https://tobasamosirkab.bps.go.id

7. Penanganan PMKS

Indikator "Penanganan PMKS" dapat dihitung menggunakan formula:

(Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti + Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti + persentase warga Negara lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti + persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan jamsos + persentase PMKS yang tertangani) /5

INDIKATOR	realisasi
Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	77
Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	75
persentase warga Negara lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	19,85
persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan jamsos	100
persentase PMKS yang tertangani	18,59

Sumber: DINAS SOSIAL KAB TOBA, 2022

Berdasarkan data yang diberikan, maka didapatkan hasil realiasai indikator sebagai berikut:

$$Penanganan\ PMKS = \frac{77 + 75 + 19{,}85 + 100 + 18{,}59}{5}$$

$$Penanganan\ PMKS = \mathbf{58{,}09}$$

8. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Capaian atas indikator: Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum dapat dihitung menggunakan formula:

$$\text{indeks ketentraman dan ketertiban} = \frac{\textit{rasio perda yang ditegakkan}}{\textit{rasio tindak kriminal terhadap jumlah penduduk}}$$

- Sesuai dengan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba tahun 2022 Target kinerja PERDA dan PERKADA yang ditegakkan diperoleh dengan perbandingan antara jumlah PERDA / PERKADA yang memuat sanksi yang ditegakkan, dengan jumlah keseluruhan PERDA / PERKADA yang memuat sanksi yang ditegakkan.

  Tahun 2022 jumlah PERDA / PERKADA yang memuat sanksi yang ditegakkan sebanyak 8 perda/perkada dari 18 perda/perkada, maka didapatkan rasio atas PERDA/ PERKADA yang ditegakkan adalah: **8:18**

- Untuk angka kriminal dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Jenis Kejahatan/Pelanggaran *Type of Crime*	Dilaporan/ *Reported*	Diselesaikan/ *Solved*	Belum Selesai/ *Unsolved*
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Korupsi/*Coruption*	-	1	-
2. Kejahatan Terhadap Kepala Negara/ *Against of Head of State*	-	-	-
3. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum/ *Against Public Order*	2	1	1
4. Pembakaran/*Arson*	-	-	-
5. Kebakaran/*Fire*	-	-	-
6. Penyuapan/*Bribery*	-	-	-
7. Kejahatan Mata Uang/ *Crime Related to Money*	-	-	-
8. Kejahatan Meterai dan Merk/*Seal and Trade Mark Forgery*	-	-	-
9. Melanggar Kesopanan Perjinahan/ *Morality Offense Adultery*	4	1	3
10. Pemerkosaan/*Rape*	1	-	1
11. Perjudian/*Gambling*	9	7	2
12. Pencurian/*Kidnapping*	78	35	43
13. Pembunuhan/*Murder*	3	2	1
14. Penganiayaan Ringan/ *Light Violence*	109	113	10
15. Penganiayaan Biasa/ *Ordinary Violence*	114	115	-
16. Pencurian dengan Kekerasan/ *Theft by Force*	1	-	1
17. Pencurian dengan Pemberatan / *Theft and Heavy Violence*	-	-	-
18. Penghinaan/ *Contempt*	-	-	-
19. Pemerasan/ *Blackmail*	-	-	-
20. Penggelapan/ *Emblezzlement*	-	-	-
21. Penipuan/ *Swindle*	-	-	-
22. Merusak/ *Destruction*	-	-	-
23. Kekerasan dalam Rumah Tangga	-	-	-
24. Penadah/ *Fence*	-	-	-
25. Kejahatan Ekonomi/ *Economy Crime*	-	-	-
26. Pencurian Kendaraan Bermotor/ *Motorcycle Robbery*	-	-	-
27. Kejahatan Narkotika/ *Narcotic Crime*	-	-	-
28. Penyeludupan/ *Smuggle*	-	-	-
29. Kejahatan Surat	-	-	-
30. Melarikan anak dibawah umur	-	-	-
31. Perampasan	-	-	-

https://pasbanesirkab.bps.go.id

Jenis Kejahatan/Pelanggaran *Type of Crime*	Dilaporan/ *Reported*	Diselesaikan/ *Solved*	Belum Selesai/ *Unsolved*
(1)	(2)	(3)	(4)
32. Aniaya Secara Bersama-sama	35	34	1
33. Percobaan Pembunuhan	-	-	-
34. Penghasutan	-	-	-
35. Aniaya terhadap anak	-	-	-
36. Lawan Aparat	-	-	-
37. Terhadap Keamanan Negara	-	-	-
38. Illegal Mining	-	-	-
39. Membocorkan Rahasia Nasabah	-	-	-
40. Pencabulan	12	18	2
41. Menyebarkan Rekaman Tanpa Ijin	-	-	-
42. Penemuan Mayat/Janin	-	-	-
43. Pencemaran Nama Baik	6	2	4
44. Pencurian dalam Keluarga	-	-	-
45. Kehutanan	2	3	-
46. Penyerobotan Tanah	10	7	3
47. Senjata Softgun	-	-	-
48. Penyalahgunaan/Budidaya Pupuk	-	-	-
49. Penyalahgunaan ITE	18	-	18
50. Kelalaian mengakibatkan luka	-	-	-
51. Perlindungan terhadap Konsumen	-	-	-
52. Lain-lain kejahatan/*Others Crime*	-	-	-
Kabupaten Toba	**398**	**339**	**90**

https://toba.bpsdmkab.bps.go.id

Untuk angka kriminal yang terjadi pada tahun 2022 sesuai dari data yang oleh BPS Kabupaten Toba dapatkan dari Kepolisian Resor Toba adalah pada angka **398 kejadian.**

Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Toba pada tahun 2022 adalah sejumlah **212.133 jiwa** yang tersebar di seluruh wilayah.

Dengan demikian rasio tindak kriminal terhadap jumlah penduduk adalah: **398 : 212.133**

Maka:

$$\text{indeks ketentraman dan ketertiban} = \frac{rasio\ perda\ yang\ ditegakkan}{rasio\ tindak\ kriminal\ terhadap\ jumlah\ penduduk}$$

$$= \frac{\mathbf{8 : 18}}{\mathbf{398 : 212.133}}$$

$$= \mathbf{2,37}$$

II. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN TAHUN 2022

Adapun pengukuran kinerja dilakukan terhadap target tahunan (jangka pendek) yang dilakukan analisis terkait program dan kegiatan yang mendukung atau menghambat keberhasilannya serta permasalahan dan solusi atas keberhasilan capaian tersebut sebagai berikut:

A. MISI I: "Infrastruktur yang Bagus dan Merata"

Pada misi I terdapat 3 sasaran strategis yaitu:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	Indeks sarana prasarana	Indeks	0,4777	0,6912	144,69%
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Indeks perumahan pemukiman	Indeks	0,1383	0,4096	296,17%
3.	Meningkatnya kualitas konektivitas	Indeks konektivitas daerah	Indeks	0,1548	0,7742	500,13%

Rata-rata capaian Sasaran Strategis adalah **303,66%**

Penjelasan Indikator diberikan pada penjelasan INDIKATOR KINERJA UTAMA pada bagian sebelumnya.

B. MISI II: "Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal"

Pada misi II terdapat 5 (lima) sasaran strategis yaitu:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan	indeks pendidikan	Indeks	0,738	1,000	135,50%
2.	Meningkatnya ketahanan keluarga	indeks ketahanan keluarga	Indeks	1,03	0,48	46,60%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	88	85,50	97,16%
4	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan	Opini BPK	opini	WTP	**WTP** *	100 %

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	% CAPAIAN
	Aset Daerah					
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Nilai SAKIP	Nilai	B/60	CC/ 53,85	89,75 %

Rata-rata capaian Sasaran Strategis adalah **93,80%**

Penjelasan Indikator:

1) Indeks pendidikan;

Indeks Pendidikan dapat diukur melalui 2 komponen data yaitu ***rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS).***

Adapun formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Indeks dari kedua komponen tersebut diberi bobot yang sama dalam menyusun indeks pendidikan.

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$$

Untuk data yang didapatkan melalui data yang disediakan oleh BPS Kab. Toba yaitu melalui data IPM (indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:

Komponen	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	68,86	68,94	69,04	69,14	69,25	69,36	69,59	69,93	70,08	70,29	70,76
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,62	12,89	13,16	13,18	13,19	13,25	13,26	13,28	13,45	13,46	13,58
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,75	9,79	9,83	10,08	10,09	10,10	10,34	10,36	10,52	10,57	10,58
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp 000	11 043	11 178	11 250	11 535	11 687	11 846	12 095	12 375	12 154	12 224	12 475
IPM		71,89	72,36	72,79	73,40	73,61	73,87	74,48	74,92	75,16	75,39	75,96

Didapati bahwa angka ***rata-rata lama sekolah (RLS) tahun 2022 adalah 10,58 Tahun,*** *dan* ***harapan lama sekolah (HLS) adalah 13,58 Tahun.***

- Jika mempergunakan rumus di atas dengan perbandingan data antara tahun 2012 sampai dengan 2022, maka Indeks rata-rata lama sekolah (RLS) dapat dihitung sebagai berikut:

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{10{,}58 - 9{,}75}{10{,}58 - 9{,}75}$$

$$I_{RLS} = 1{,}00$$

- Jika mempergunakan rumus di atas dengan perbandingan data antara tahun 2012 sampai dengan 2022, maka ***Indeks harapan lama sekolah (HLS).***) dapat dihitung sebagai berikut:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{13{,}58 - 12{,}62}{13{,}58 - 12{,}62}$$

$$I_{HLS} = 1{,}00$$

Maka Indeks Pendidikan dapat diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{1 + 1}{1}$$

$$\boldsymbol{I_{pendidikan} = 1{,}00}$$

Maka Realisasi Indeks Pendidikan adalah: **1,00**

2) Indeks ketahanan keluarga;

Indeks Ketahanan Keluarga tahun 2022 dapat dihitung dengan menggunakan rumus

$$\boldsymbol{I_{KK}} = \frac{realisasi}{target} x\ 100\%$$

$$\boldsymbol{I_{KK}} = \frac{0{,}48}{1{,}03} x\ 100\%$$

$$I_{KK} = 46,60\%$$

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian indeks ketahanan keluarga keluarga berencana pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a) Memberikan penyuluhan materi 8 (delapan) fungsi keluarga pada kegiatan sosialisasi pada kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL dan Kelompok UPPKS);
b) Melakukan penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga dengan menggandeng mitra kerja (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Komite AIDS, PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Kepala Desa, Koramil, Bidan Desa, Camat);
c) Promosi tentang 8 (delapan) fungsi keluarga melalui media cetak dan elektronik (iklan radio) dan memanfaatkan momentum strategis seperti Hari Keluarga Nasional serta kegiatan lain yang melibatkan stakeholder dan mitra kerja;
d) Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam penggerakan Program Bangga Kencana;
e) Meningkatkan peran aktif stakeholder dalam penggerakan Program Bangga Kencana;
f) Meningkatkan intensitas pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
g) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggerakan Program Bangga Kencana;
h) Meningkatkan kegiatan Komunikasi Edukasi dan Informasi (KIE) Program Bangga Kencana melalui berbagai media;
i) Meningkatkan pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan, kader kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL) dan kelompok UPPKS;
j) Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelompok PIK Remaja;
k) Meningkatkan pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan, kader kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL) dan kelompok UPPKS yang didukung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
l) Meningkatkan kemudahan akses informasi bagi masyarakat terhadap Program Bangga Kencana;
m) Mengembangkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (KASIH), yang berlokasi di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba. PPKS KASIH tersebut disediakan untuk masyarakat secara terbuka, dengan tujuan untuk memudahkan akses

masyarakat dalam mengenal Program KB secara menyeluruh. Fasilitas yang disediakan PPKS KASIH adalah:

(1) Data dan Informasi Program KB;
(2) Layanan Konsultasi tentang Kesehatan Reprosuksi Remaja (KRR);
(3) Klinik Pelayanan KB;
(4) Pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB, BKR dan BKL);
(5) Stand produk unggulan Kelompok UPPKS;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target pada Tahun 2022 disebabkan antara lain :

(1) Kurang optimalnya sosialisasi tentang 8 (delapan) fungsi keluarga secara utuh pada keluarga, karena dalam analisa lanjut terkait penerapan 8 (delapan) fungsi keluarga sebenarnya sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh keluarga namun belum diketahui penamaan dari masing-masing 8 (delapan) fungsi keluarga;
(2) Belum dipahami isi pesan tentang 8 (delapan) fungsi keluarga oleh keluarga dan masyarakat;
(3) Kurang optimalnya sinergitas program pembangunan keluarga antar OPD yang menangani pembangunan keluarga;
(4) Kebijakan pembangunan keluarga belum diterjemahkan dalam bentuk Perda/Perbub di Kabupaten Toba;
(5) Menurunnya intensitas pembinaan ketahanan keluarga melalui kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS disebabkan kurangnya dukungan dana;
(6) Masih rendahnya kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan, kader kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL) dan kelompok UPPKS;
(7) Perbandingan jumlah desa/kelurahan binaan terhadap jumlah PKB/PLKB tidak proporsional (1 : 9), artinya setiap PKB/PLKB membina 8 – 9 desa binaan;
(8) Sering terjadinya pergantian Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD).

Pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, program/kegiatan yang paling menunjukkan output paling mendukung dalam pencapaian kinerja organisasi adalah "Program Keluarga Berencana", dimana program tersebut merupakan mampu memberikan dampak secara langsung terhadap masyarakat dalam penggerakan Program Bangga Kencana.

Namun perlu juga dipahami, bahwa sasaran dari setiap program/kegiatan yang dijalankan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan sebuah sistem, dimana antara program/kegiatan yang satu dengan lainnya tidak

bisa dipisahkan. Terjadinya keberhasilan salah satu sasaran, akan mempengaruhi keberhasilan sasaran yang lain. Sebaliknya, jika terjadinya kegagalan salah satu sasaran akan berdampak pada kegagalan dari sasaran yang lain. Keberhasilan dari rangkaian sistem yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, nantinya secara menyeluruh akan bermuara pada keberhasilan dalam pengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, khususnya di Kabupaten Toba.

Beberapa hal tersebut di atas, dapat dikaji berdasarkan pada fungsi dari setiap sasaran, yaitu:

a) Keluarga Berencana;

Merupakan sasaran yang ditujukan untuk memberikan pelayanan terhadap PUS yang ingin ber KB. Tingkat kapasitas dan kualitas pelayanan ber KB tersebut sangat menentukan besarnya tingkat keberhasilan dan kegagalan PUS ber KB. Semakin besar PUS yang dilayani KB, maka akan semakin besar peluang keberhasilan dalam menekan laju pertumbuhan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Sebaliknya, dengan kegagalan dalam pelayanan KB, akan berdampak pada terjadinya kehamilan yang secara langsung akan berdampak pada kegagalan dalam menekan laju pertumbuhan .

b) Penduduk Kesehatan Reproduksi Remaja

Sasaran tersebut ditujukan untuk meningkatkan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), hal ini diperlukan karena jumlah perkawinan usia muda (usia < 20 tahun) mulai bertambah. Dengan meningkatnya jumlah perkawinan usia muda, maka akan berdampak pada tingginya tingkat kelahiran yang tentunya akan berdampak pada meningkatnya laju pertumbuhan penduduk. Pada sisi lain, dengan semakin muda seorang wanita untuk menikah, maka masa subur yang berpeluang untuk hamil wanita tersebut akan semakin panjang. Jika ditinjau dari segi kesehatan, bahwa wanita usia di bawah 20 tahun masih tergolong usia belum matang untuk hamil.

c) Pengelolaan Data Kependudukan;

Sasaran Pengelolaan Data Kependudukan merupakan faktor mendasar yang menunjang dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana, hal ini merupakan kebijakan yang sekaligus untuk memudahkan akses data dan informasi bagi masyarakan tentang Program KB.

d) Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi;

Merupakan sasaran yang ditujukan untuk memberikan pelayanan terhadap PUS yang ingin ber KB. Tingkat kapasitas dan kualitas pelayanan ber KB

tersebut sangat menentukan besarnya tingkat keberhasilan dan kegagalan PUS ber KB. Semakin besar PUS yang dilayani KB, maka akan semakin besar peluang keberhasilan dalam menekan laju pertumbuhan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Sebaliknya, dengan kegagalan dalam pelayanan KB, akan berdampak pada terjadinya kehamilan yang secara langsung akan berdampak pada kegagalan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk.

e) Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Merupakan sasaran yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggerakan Program KB. Sasaran tersebut tergolong sangat strategis, hal ini mengingat bahwa keberadaan kader KB merupakan ujung tombak penggerakan Program KB di masyarakat. Pada sisi lain, bahwa kapasitas sumberdaya manusia yang berasal dari PLKB/PKB sangat terbatas. Melalui jaringan luas yang berasal dari masyarakat, akan mampu memberikan pemahaman dan penyadaran Program KB secara massal.

f) Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Ketahanan Keluarga, KIE dan Konseling Keluarga

Sasaran tersebut dimunculkan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas keluarga, yaitu dengan memperkuat ketahanan keluarga. Dengan meningkatnya ketahanan keluarga, tentunya meningkatkan kapasitas keluarga baik dari segi material maupun spiritual, sehingga terwujud keluarga sejahtera. Semakin meningkatnya kualitas keluarga, tentunya akan meningkatkan kualitas penduduk.

g) Peningkatan Ekonomi Keluarga

Sasaran tersebut dimunculkan dengan maksud untuk meningkatkan kemandirian keluarga, khususnya dari segi ketahanan ekonomi keluarga melalui kegiatan pemberdayaan. Dengan meningkatnya kapasitas kemandirian masyarakat.

h) Berdasarkan kajian tersebut di atas, menjelaskan bahwa dalam penggerakan Program KB harus dilaksanakan secara tersistem. Keberhasilan pemenuhan capaian sasaran perlu ditingkatkan lebih lanjut pada pengembangan kualitas sasaran, yang diarahkan pada kemantapan dan ketangguhan terhadap benturan permasalahan kependudukan.

3) Indeks Kepuasan Masyarakat;

Survei kepuasan masyarakat ini adalah kegiatan yang rutin dilakukan oleh pemerintah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasaan Masyarakat Unit

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Mengacu pada peraturan menteri ini, terdapat sembilan unsur pelayanan yang diukur, yaitu (1) Persyaratan, (2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, (3) Waktu Penyelesaian, (4) Biaya/ Tarif, (5) Produk Spesifikasi jenis pelayanan, (6) Kompetensi Pelaksana, (7) Perilaku pelaksana, (8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, dan (9) Sarana dan Prasarana.

Sembilan unsur inilah yang kemudian kami terjemahkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan kuesioner online. Melalui persiapan kuesioner yang dilaksanakan lebih awal, diharapkan pelaksanaan pengumpulan data dapat dilaksanakan lebih mudah dan dapat diisi oleh masyarakat kapan saja.
Jumlah sampel yang diperlukan cukup besar untuk dapat memperoleh informasi kepuasan masyarakat yang lebih valid terhadap layanan yang diberikan. Mengacu pada peraturan menteri yang telah disebutkan di atas, penentuan jumlah sampel dapat mengacu pada tabel Krejcie and Morgan.
Hasil perhitungan Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba pada semester II Tahun 2022 terhadap 155 orang responden. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan teknik survei memilih metode kuisioner melalui pengisian sendiri dengan keterbatasan biaya dan personil.

Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

Nilai unsur = Jumlah Nilai
Nilai rata-rata/ unsur= Jumlah nilai/Jumlah responden
Nilai rata-rata/terimbang = nilai rata-rata X N

Survey Kepuasan Masyarakat = Total dari nilai X 25
= 3,42 x 25
= 85.50

4) Opini BPK;

Laporan keuangan Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 belum dapat diketahui sehingga sasaran indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan belum bisa diketahui realisasi dan capaiannya karena laporan keuangan Kabupaten Toba masih dalam tahap proses pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Namun kami mempergunakan penilaian untuk Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Toba telah mendapatkan Opini BPK terhadap laporan keuangan yakni WTP pada tahun 2022.

Capaian Opini BPK tahun 2022 dapat dihitung dengan menggunakan rumus

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{realisasi}{target} x\ 100\%$$

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{\text{WTP}}{WTP} x\ 100\%$$

$$\boldsymbol{Capaian = 100\%}$$

5) *Nilai SAKIP*

Sesuai dengan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Toba menunjukkan bahwa nilai sebesar **53,85 dengan predikat "CC".** Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Cukup",** yaitu implementasi AKIP sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja dimana target Nilai SAKIP pada ahun 2022 adalah pada nilai B/60.

Capaian Nilai SAKIP tahun 2022 dapat dihitung dengan menggunakan rumus

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{realisasi}{target} x\ 100\%$$

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{\text{CC}/53{,}85}{B/60} x\ 100\%$$

$$\boldsymbol{Capaian = 89{,}75\%}$$

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	19,50
2.	Pengukuran Kinerja	30	14,70
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,95
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internai	25	8,70
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**53,85**

	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**CC**

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Toba tahun 2022 sebagai berikut:

a) Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Toba telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis, perjanjian kinerja dan dokumen lainnya pada tingkat Perangkat Daerah (PD) dengan sasaran strategis dan indikator yang lebih berorientasi hasil dan memberikan dampak terhadap masyarakat.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Masih terdapat rumusan tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tidak sesuai levelnya. Seperti pada Perjanjian Kinerja Bupati, dengan sasaran strategis "Meningkatnya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat" dengan indikator "presentasi gangguan trantibtum yang dapat diselesaikan" dengan target 100%. Serta sasaran strategis "Meningkatnya kunjungan wisata" pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- Terdapat progam/kegiatan yang tidak sesuai dengan kinerja yang diperjanjikan pada dokumen perjanjian kinerja. Seperti pada Dinas Sosial, pada "Program penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan", yang belum dilengkapi dengan indikator pengukuran keberhasilannya.
- Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria "SMART". Sebagai contoh pada perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdapat indikator "Jumlah Produk Ekonomi Kreatif" dengan target 0 Produk;
- Terdapat ketidakselarasan dalam penyusunan kinerja, antara eselon 3 dan 4 dengan kerja level diatasnya. Seperti pada Dinas Perhubungan, perjanjian kinerja Kepala Bidang memiliki sasaran strategis dan indikator yang sama, meskipun pada bidang yang berbeda.

b) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Toba dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran atas realisasi anggaran secara berkala dan melengkapi Indikator Kinerja Utama dengan definisi operasional.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Toba belum memiliki pedoman pengumpulan data kinerja,
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada beberapa PD masih berorientasi pada penyerapan anggaran. Sedangkan kinerja belum dilakukan monitoring dan evaluasi, sehingga belum diketahui tingkat ketercapaiannya.

c) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Toba telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 baik tingkat pemerintah daerah maupun tingkat PD. Secara umum, laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja dan realisasi anggaran.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021 maupun Iaporan kinerja PD belum dipublikasikan secara umum;
- Laporan kinerja pada level PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai di antaranya tentang analisis capaian kinerja. Sebagai contoh laporan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya berisi Penutup, serta pada Dinas Sosial yang belum menjelaskan mengenai faktor pendukung/penghambat dalam mencapai kinerja;
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, contoh penentuan target pada Dinas Perhubungan.

d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pemerintah Kabupaten Toba belum melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sampai level PD, sehingga belum diketahui implementasi SAKIP secara keseluruhan. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Toba juga belum memiliki pedoman teknis evaluasi kinerja internal. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan

akuntabilitas kinerja, rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan, agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya pada level pemerintah daerah dan PD, berorientasi pada hasil. Serta memastikan kecukupannya dalam mengukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis tersebut;
2) Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan logical *framework* dan *Critical Success Factor* (CSF) dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/cascading kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
3) Melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja khususnya untuk targettarget yang telah tercapai melebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya;
4) Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kinerja beserta rencana aksinya baik tingkat Pemerintah Daerah dan PD;
5) Menyusun Kebijakan/SOP terkait Perencanaan kinerja, pengumpulan datakinerja dan pelaporan data kinerja di Pemerintah Kabupaten Toba;
6) Membuat laporan kinerja pada level PD yang lebih komprehensif dan memberikan informasi yang memadai;
7) Menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya;
8) Memastikan Laporan kinerja seluruh PD, memiliki satuan pengukuran yang sama dengan dokumen perjanjian Kinerja;
9) Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah disesuaikan dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan mendorong inspektorat melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh Perangkat daerah.

C. MISI III: "Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera"

Pada misi III terdapat 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	% CAPAIAN
1.	meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan	Indeks Produksi Pertanian (IPP)	indeks	1,258	0,955	75,89%
2.	Meningkatnya ketersediaan Pangan	Ketersediaan pangan utama	persen	321,38	314,81	97,96%

Rata-rata capaian Sasaran Strategis adalah **86,93 %**

Penjelasan Indikator:

1) Indeks Produksi Pertanian (IPP);

Indeks Produktivitas Pertanian adalah gambaran produktivitas sektor pertanian dan peternakan yang diukur dari produksi pertanian dan peternakan. **Komoditi pertanian yang diukur produksinya adalah Jagung dan Padi** dan dari **sektor peternakan yang diukur adalah produksi daging Sapi, Kerbau, Ayam dan Babi**.

Jika Indeks pertanian bernilai 1 artinya semua komoditi pertanian dan peternakan yang menjadi komponen perhitungan Indeks Pertanian bernilai minimum berdasarkan data produksi dari tahun 2016-2020.

Angka indeks adalah angka yang digunakan untuk membandingkan 2 atau lebih kegiatan yang sama dalam waktu yang berbeda.

Angka indeks seringkali digunakan untuk menyatakan tingkat perubahan harga, kuantitas atau nilai pada suatu periode dibandingkan dengan periode tertentu (waktu dasar).

Angka indeks sering disebut dengan indeks. Satuan angka indeks adalah persen (%), namun pada prakteknya satuan tersebut jarang digunakan.

Dalam membuat angka indeks diperlukan dua macam waktu, yaitu:

(1) *Waktu dasar (base period)*

Waktu dasar adalah waktu dimana suatu kegiatan (kejadian) digunakan sebagai dasar perbandingan.

(2) *Waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan (current period)*

Waktu yang sedang berjalan adalah waktu dimana suatu kegiatan (kejadian) digunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan (kejadian) pada waktu dasar.

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pertanian Kab. Toba
Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	2021	2022
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,36 Ton/Ha/Tahun	6,10 Ton/Ha/Tahun
2	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	223.833,37 Ton/Ha	211.656,20 Ton/Ha
3	Produksi tanaman perkebunan	39.321,20 Ton/Ha	39.223,67 Ton/Ha
4	Produksi daging	616,45 Ton	956,81 Ton
5	Produksi pertanian dan peternakan	263.771,02 Ton	251.836,67 Ton
6	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-30,32%	-98,92%
7	Luas areal pengendalian dan penanggulangan serangan OPT	670 Ha	868,00 Ha
8	Cakupan bina kelompok tani	-	56,64%
9	Penunjang kinerja perangkat daerah	70%	75%

Sumber: LAKIP Dinas Pertanian Kab. Toba Tahun 2022

Indeks Produksi pertanian tahun 2022 dengan tahun dasar 2021 dapat dihitung dengan menggunakan rumus

$$I_{2022} = \frac{produksi\ pertanian\ tahun\ 2022}{produksi\ pertanian\ tahun\ 2021} x\ 100\%$$

$$I_{2022} = \frac{251.836{,}67\ \text{Ton}}{263.771{,}02\ \text{Ton}} x\ 100\%$$

$$I_{2022} = 95{,}48\%$$

Yang mana jika dikonversikan kedalam bentuk indeks adalah pada **nilai: 0,955**

Adapun nilai persentase capaian atas indikator ini adalah pada:

(1,258/ 0,955) x 100% = 75,89 %

Adapun analisa atas penyebab ketidak tercapaian atas target antara lain:

(1) Produktivitas Pertanian dari tahun 2020-2021 mengalami kenaikan tetapi pada tahun 2022 produktivitas pertanian mengalami penurunan. Namun, data yang didapat pada Tahun 2022 belum merupakan data Angka Tetap (ATAP) melainkan masih menggunakan data Angka Sementara (ASEM). Hal ini terjadi karena harus adanya koordinasi mengenai data Produktivitas bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toba sehingga pada akhirnya didapat angka Produktivitas Pertanian Kabupaten Toba yang tetap. Penurunan produktivitas pertanian juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni ketersediaan pupuk yang terbatas dan harga yang tinggi pada Tahun 2022 sehingga berpengaruh pada produktivitas komoditas pertanian serta harga bibit unggul yang juga tinggi menyebabkan cukup banyak petani yang mengulang hasil panen sebelumnya untuk ditanam kembali sehingga berpengaruh pada penurunan produktivitas.

(2) Produksi tanaman pangan dan hortikultura dari tahun 2020-2021 mengalami kenaikan tetapi pada tahun 2022 produksi tanaman pangan dan hortikultura mengalami penurunan. Faktor yang mempengaruhi penurunan produksi yaitu dikarenakan ketersediaan pupuk dan bibit unggul yang terbatas dan harganya yang tinggi. Namun, pada Tahun 2022 capaian kinerjanya melebihi target yaitu sebesar 102,42 %. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produksi tanaman pangan dan hortikultura yaitu adanya pengadaan bibit bawang merah dengan total luasan 8,5 Ha dan pengadaan bibit jahe seluas 10 Ha di Kabupaten Toba yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Toba, APBD Provinsi dan APBN yang berpengaruh pada peningkatan produksi tanaman tersebut.

(3) Produksi tanaman perkebunan dari tahun 2020-2021 mengalami kenaikan tetapi pada tahun 2022 produksi perkebunan mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat pada penurunan produksi komoditas kelapa sawit pada Tahun 2022 yang disebabkan karena kurangnya pemeliharaan terhadap tanaman tersebut dan tidak adanya kegiatan intensifikasi tanaman kelapa sawit pada Tahun 2022.

(4) Produksi daging dari tahun 2020-2022 mengalami peningkatan dan melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja. Hal ini dikarenakan tingginya angka pemotongan ternak dikarenakan peningkatan pemotongan ternak kerbau, babi, ayam dan kambing pada Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan data pada Tahun 2021. Peningkatan pemotongan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu meningkatnya permintaan masyarakat terutama wisatawan dan perantau yang berkunjung ke Kabupaten Toba pada musim libur NATARU dan akan dilaksanakannya event besar F1 Powerboat sehingga berdampak pada meningkatnya pemotongan ternak tersebut.

(5) Produksi pertanian dan peternakan pada Tahun 2022 melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah pemotongan ternak pada Tahun 2022 yang berpengaruh pada peningkatan produksi daging ternak.

(6) Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular dari tahun 2020-2021 dapat teratasi dan data ternak yang terkena penyakit mengalami penurunan jumlah kasus. Pada Tahun 2022, tidak terjadinya penurunan persentase kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular, bahkan kasus penyakit hewan menular mengalami kenaikan sebesar 98,92 % dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak besar seperti Sapi dan Kerbau pada beberapa wilayah di Kabupaten Toba yang mengakibatkan meningkatnya data kasus ternak yang terkena penyakit hewan menular (PHMS). Berdasarkan data statistik bidang peternakan dan kesehatan hewan, jumlah kejadian kasus penyakit hewan menular pada tahun 2022 adalah sebanyak 553 kasus sedangkan jumlah kejadian kasus penyakit hewan menular pada tahun 2021 adalah sebanyak 278 kasus, sehingga tidak terjadinya penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular pada Tahun 2022.

(7) Luas areal pengendalian dan penanggulangan serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dari tahun 2020-2022 mengalami peningkatan pengendalian dan penanggulangan

serta melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja. Hal ini dapat diperoleh karena adanya dukungan dan respon yang cepat dari Bidang Tanaman pangan dan Hortikultura terhadap laporan OPT di lapangan. Apabila didapat laporan dari petani, POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman) langsung melakukan monitoring ke lapangan lalu memberikan peringatan dini mengenai jumlah persentase serangan. Setelah didapatkan hasil, maka langsung dibuatkan laporan dan dikaji untuk tindakan selanjutnya apakah OPT tersebut dapat dikendalikan sendiri oleh petani atau harus melalui Gerdal (Gerakan Pengendalian) massal. Apabila OPT tersebut perlu dikendalikan secara massal, POPT mengarahkan Kelompok Tani agar membuat surat permohonan yang ditujukan ke Dinas Pertanian agar dilakukannya Gerdal (Gerakan Pengendalian). Surat permohonan yang disampaikan ke Dinas Pertanian biasanya ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1-2 hari serta menyesuaikan dengan jadwal dengan petani.

(8) Persentase cakupan bina kelompok tani pada Tahun 2022 telah melebihi dari target yang ditentukan dalam indikator kinerja. Hal ini dapat diperoleh dikarenakan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai pendamping Kelompok Tani yang berperan semakin aktif dalam membina Kelompok Tani agar lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung pembangunan pertanian. Kelompok Tani yang tercakup dalam pembinaan tersebut merupakan Kelompok Tani yang pada awal terbentuk belum memiliki akta notaris/badan hukum, setelah dilakukan pembinaan memiliki sudah memiliki akta notaris/badan hokum. Selain itu, pembinaan juga dilakukan pada Kelompok Tani agar lebih aktif pada pertemuan rutin seperti rapat bulanan.

2) Ketersediaan pangan utama;

Indikator Jumlah Ketersediaan Pangan Utama dengan Target 321,38% Realisasi 314,81%. Pencapaian realisasi 314,81% diperoleh dari Ketersediaan Beras sebanyak 67.211.640 kg di bagi jumlah penduduk 213.499 jiwa. Jumlah ketersediaan beras diperoleh dari produksi padi 131.576,96 yang dikonversi ke GKG:

131.576,96 x 86,02 % = 113.182,50 Ton.

Program yang mendukung terdapat pada Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota target 21 unit realisasi 17 Unit capain 80,95% Pagu Anggaran Rp.14.514.927,00 Realisasi Rp. 14.383.000,00 capaian 99,10%.

Sub Kegiatan Penyediaan Insfrastruktur Lumbung Pangan Target 4 Unit realisasi 4 unit dengan capaian 100% Pagu Anggaran Rp.14.514.927,00 Realisasi Rp. 14.383.000,00 dengan capaian 99,09%.

Ketersediaan Pangan Utama, ditargetkan 321,38% Realisasi 314,81% dengan capaian 97,96%. ***Capaian Ketersediaan Pangan Utama belum bisa 100% dikarenakan adanya alih fungsi lahan.***

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022:

Indikator	Capaian		
	2020	**2021**	**2022**
Ketersediaan pangan utama	81,27%	34,13%	97,96%

Indikator Ketersediaan Pangan:

Tahun 2020 Target 361.568 ton Realisasi 293.847,5 Ton dengan capaian 81,27%,

Tahun 2021 Target 376.740 ton Realisasi 128.588,9 Ton dengan capaian 34,13%,

Tahun 2022 target 321,38% Realisasi 314,81%.

D. MISI IV: "Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera"

Pada misi IV terdapat 1 (satu) sasaran strategis yaitu:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya harapan hidup	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,24	70.29	100,07 %

Rata-rata capaian Sasaran Strategis adalah **100,07 %**

Penjelasan Indikator:

Meningkatnya harapan hidup

Capaian AHH tahun 2022 dapat dihitung dengan menggunakan rumus

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{realisasi}{target} x\ 100\%$$

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{70{,}29}{70{,}29} x\ 100\%$$

$$\boldsymbol{Capaian = 100{,}07\%}$$

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh angka harapan hidup saat lahir (e0), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat ditempuh oleh bayi yang baru lahir untuk hidup dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh anak yang berumur 7 tahun di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan, berdasarkan nilai pengeluaran per kapita, indeks harga, dan paritas daya beli.

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Toba

Tahun	AHH
2011	68,72
2012	68,86
2013	68,94
2014	69,04
2015	69,14
2016	69,25
2017	69,36
2018	69,59
2019	69,93
2020	70,08
2021	70,29
2022	70,76

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Toba.

E. MISI V: "Pariwisata Berkat dan Meriah"

Pada misi V terdapat 3 sasaran strategis yaitu:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	% CAPAIAN

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya kesempatan kerja	TPT	%	2,28	1,39	139,04%
2.	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan wisata	orang	531.810	1.031.594	193,98%
3.	menurunkan angka emiskinan	persentase Penduduk Miskin	%	8,57	8,89	96,27%

Rata-rata capaian Sasaran Strategis adalah **143,09%**

Penjelasan Indikator:

1) TPT;

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Pengangguran terbuka adalah orang yang memiliki kualifikasi cukup, tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Fenomena tersebut dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan masyarakat, khususnya terjadi pada lulusan baru universitas.

Dalam konteks ini, seseorang bisa saja tengah mempersiapkan usaha, masih dalam proses wawancara maupun sudah mendapatkan kontrak, namun belum secara resmi mulai bekerja.

Sebagai penjelas, maksud dari mempersiapkan usaha adalah seseorang telah terhitung melakukan tindakan nyata seperti memiliki modal bisnis, menyediakan peralatan, memutuskan lokasi bagunan fisik atau toko online serta mempersiapkan hal yang terkait dengan perizinan.

Selain itu, yang termasuk contoh pengangguran terbuka lainnya, yaitu:

- Orang yang belum pernah bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan
- Orang yang sudah pernah bekerja namun diberhentikan serta sedang dalam proses mencari pekerjaan

Jenis pengangguran ini banyak ditemukan di area perkotaan, khususnya yang menjadi kawasan pusat bagi institusi perguruan tinggi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk

(umur 15 tahun ke atas)
menurut Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara
Tahun 2021-2022

No.	KABUPATEN/ KOTA	2021	2022
1	Nias	3,12	2,81
2	Mandailing Natal	6,12	7,64
3	Tapanuli Selatan	4	3,65
4	Tapanuli Tengah	7,24	7,97
5	Tapanuli Utara	1,54	1,07
6	**Toba**	**0,83**	**1,39**
7	Labuhanbatu	5,66	6,9
8	Asahan	6,39	6,26
9	Simalungun	4,17	5,51
10	Dairi	1,49	0,88
11	Karo	1,95	2,71
12	Deli Serdang	9,13	8,79
13	Langkat	5,12	6,88
14	Nias Selatan	3,91	3,69
15	Humbang Hasundutan	1,94	0,42
16	Pakpak Bharat	1,36	0,26
17	Samosir	0,7	1,16
18	Serdang Bedagai	3,93	4,98
19	Batu Bara	6,62	6,21
20	Padang Lawas Utara	3,19	4,31
21	Padang Lawas	4,07	5,9
22	Labuhanbatu Selatan	4,71	3,15
23	Labuhanbatu Utara	5,74	3,75
24	Nias Utara	3	2,59
25	Nias Barat	0,74	0,53
26	Sibolga	8,72	7,05
27	Tanjungbalai	6,59	4,62
28	Pematangsiantar	11	9,36
29	Tebing Tinggi	8,37	6,39
30	Medan	10,81	8,89
31	Binjai	7,86	6,36
32	Padangsidimpuan	7,18	7,76
33	Gunungsitoli	4,8	3,65
Sumatera Utara		**6,33**	**6,16**

Sumber: Toba Dalam Angka Tahun 2023 (BPS TOBA 2023)

Dari data yang didapatkan melalui informasi yang disediakan oleh BPS Kabupaten Toba dalam Toba Dalam Angka Tahun 2023, disebutkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Toba pada tahun 2022 adalah pada tingkat 1,38, jika dibandingkan dengan target pada indikator tersebut pada RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 adalah 2,26 maka didapatkan hasil:

$$\text{Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$Persentase\ Capaian\ TPT = \frac{2{,}28 - (1{,}39 - 2{,}28)}{2{,}28}$$

$Persentase\ Capaian\ TPT = \mathbf{139,04}\ \%$

2) Jumlah Kunjungan Wisata;

Salah satu visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba adalah menjadikan pariwisata yang indah di Toba. Didukung oleh sumber daya alam dan keindahan Danau Toba sektor pariwisata merupakan sektor potensial yang dapat menjadi andalan di Kabupaten Toba dimasa mendatang. Perencanaan pengembangan pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana yang baik akan menjadikan Kabupaten Toba sebagai tempat pariwisata yang indah.

JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA YANG DATANG PER BULAN KE KABUPATEN TOBA, 2022

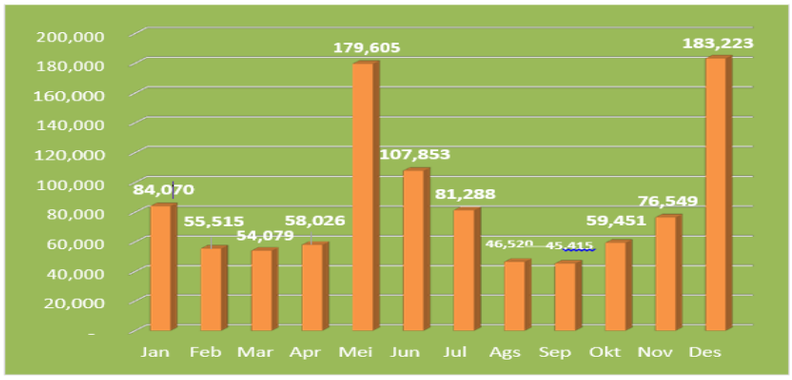

Jumlah Wisatawan Datang Ke Toba tahun 2022 sebanyak **1.031.594 wisatawan** terdiri dari 0 wisatawan mancanegera dan 1.031.594 wisatawan domestik. Jika dibandingkan dengan target indikator: "Jumlah Kunjungan Wisata" sebanyak 531.810 orang pada tahun 2022, maka didapat capaian:

$\%\ Capaian\ indikator$ "Jumlah Kunjungan Wisata"

$= (1.031.594\ \text{orang})/(531.810\ \text{orang})\ x\ 100\%$

$= \mathbf{193,98}\ \%$

Sektor pariwisata yang berkembang dengan baik dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru, meninkatkan pendapatan pajak dan pendapatan nasional, serta memberikan dukungan bagi sektor lain secara ekonomi. Efek limpahan yang dipicu oleh pariwisata meningkatkan permintaan barang modal dan bahan baku yang mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor seperti transportasi, komunikasi, perhotelan, kerajinan tangan, produk

konsumen, jasa, restoran, dan lain-lain. Di Indonesia, sektor pariwisata mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi telah menciptakan trade-off seperti ketimpangan pendapatan, degradasi lingkungan, dan gangguan sosial.

Kelimpahan sumber daya alam dan sumber daya lain dapat memicu kegiatan pariwisata. Namun demikian, faktor lain seperti aksesibilitas dan daya tarik penting bagi negara seperti Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya yang berlimpah dan beragam. Infrastruktur transportasi sangat penting dalam menghubungkan pengunjung ke tujuan wisata.

Peningkatan jumlah wisata di Kabupaten Toba pada Tahun 2022 didukung dengan ketersediaan Hotel dan akomodasi yang kian bertumbuh yang mana sampai dengan tahun 2022 tersedia sebanyak 40 Hotel/penginapan dengan tingkat ketersediaan kamar sejumlah 989 kamar, dan juga didukung oleh adanya pertumbuhan jumlah restoran dan rumah makan yang sudah mencapai 179 unit.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga telah melaksanakan 3 Event Pariwisata Danau Toba tahun 2022 yang dilaksanakan di Kabupaten Toba antara lain:

- **22-24 Juli Toba Caldera World Music Festival di Toba Caldera Resort, Toba.**

- **26-28 Agustus Toba Fashion Week di Balige, Toba.**

- **20-22 Oktober Kongres I Kebudayaan Batak Toba di Balige Toba.**

Pelaksanaan Kongres I Batak Toba berlangsung sukses di TB Silalahi Centre Balige Kabupaten Toba pada 20-23 Oktober 2022. Kongres tersebut memberikan apresiasi kepada Koperasi Marsisimppa Geopark Toba dengan memberikan plakat Apresiasi yang diterima secara langsung oleh Ketua Koperadu Dra. Debbie Riauni Panjaitan bersama Royana Marpaung pemilik produk yang ditampilkan.

Kongres yang diikuti para pencinta budaya Batak dari seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan membuka acara lewat zoom berpesan agar Kongres menghasilkan rumusan demi pelestarian, revitalisasi dan pengembangan Budaya Batak yang begitu kaya dengan keberagamannya.

Kehadiran Koperasi *Marsirimppa Geopark Toba* yang merupakan binaan Dinas Koperasi Pemprovsu dinilai memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM sektor budaya dan kearifan lokal. Koperasi yang fokus kepada produk yang berkaitan dengan budaya kawasan Danau Toba, khususnya Batak, menjadi harapan baru bagi pembinaan usaha-usaha tersebut.

Pada pelaksanaan Kongres Kebudayaan Batak Toba pertama ini, *Koperasi Marsirimppa* berpartisipasi dalam Pameran Produk berupa turunan Ulos dengan kreatifitas baju, tas, dompet, stola, topi yang semuannya dari tenunan ulos batak

yang layak jual di lokal hingga tingkat nasional bahkan internasional. Disamping itu pada puncak acara malam penutupan kongres, Koperasi Marsirimppa dengan produk anggota Koperasi *"Royana Collection"* yang perancang busananya adalah Royana Marpaung sebagai wanita Batak pencinta Ulos, kali ini menampilkan Fashion Etnic dengan tema "Ulos Ragi Hotang dalam Fashion Keseharian" yang dirancang bagi para wanita suku Batak. Konsep busana yang bertujuan agar para wanita batak semakin mencintai ulos sebagai kekayaan keragaman budaya batak, dan senantiasa berpenampilan dengan produk Ulos. Dengan tumbuhnya rasa memiliki, pasti akan diikuti peningkatkan kesejahteraan pelaku penenun ulos di kawasan *Toba Caldera UNESCO Global Geopark* dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat ulos sudah mendapat sertifikat Warisan Budaya Takbenda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak Tahun 2014 dan sedang diusung untuk menjadi warisan dunia ke UNESCO.

3) Persentase Penduduk Miskin.

Untuk mengukur kemiskinan dilakukan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non- Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Tabel : 4.4.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 2006 – 2022
Table Number and Percentage of People Under Poverty Line , 2006-2022

Tahun *Year*	Jumlah (000)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
2006	30,18	17,85
2007	25,60	15,28
2008	19,78	11,62
2009	17,34	10,07
2010	17,60	10,15
2011	16,93	9,67
2012	16,64	9,43
2013	16,96	9,54
2014	16,51	9,23
2015	18,31	10,21
2016	18,20	10,08
2017	18,49	10,19
2018	15,82	8,67
2019	15,78	8,60
2020	16,05	8,71
2021	16,61	8,99
2022	16,48	8,89

Sumber/ *Source :* BPS Survei Sosial Ekonomi Nasional/ *BPS-National Social Economic Survey*

https://tobasamosirkab.bps.go.id

Dalam perhitungannya Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$persentase\ capaian = \frac{8{,}57 - (8{,}89 - 8{,}57)}{8{,}57}\ x\ 100\%$$

Maka didapati hasil capaian adalah **96.27 %.**

F. MISI VI: "Membangun Iman yang terpelihara"

Pada misi VI terdapat 1 (satu) sasaran strategis yaitu:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Menurunnya penyakit sosial	Laju penurunan Persentase PMKS	Angka	50,00	84,43	96,27%

Rata-rata capaian Sasaran Strategis adalah **96,27 %**

Penjelasan Indikator:

"Menurunnya penyakit sosial"

REKAPITULASI DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) TAHUN 2020 - 2022

TAHUN	2020	2021	2022
Anak Balita Terlantar	2	-	2
Anak Terlantar	23	-	50
Anak Berhadapan dgn Hukum	25	15	14
Anak Jalanan	2	-	-
Anak Dengan Kedisabilitasan	33	-	244
Anak Korban Tindak Kekerasan	1	-	2
Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	11	-	32
Lanjut Usia	166	17.801	597
Penyandang Disabilitas	1.721	1.677	1.677
Tuna Susila	3	-	3
Gelandangan	-	-	13
Pengemis	-	-	2
Pemulung	3	-	17
Kelompok Minoritas	-	-	-
Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	7	-	20

TAHUN	2020	2021	2022
Orang Dengan HIV/AIDS	360	117	117
Korban Narkotika	5	-	3
Korban Trafficking (Korban Perdagangan Orang)	-	-	-
Korban Tindak Kekerasan	1	-	-
Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	-
Korban Bencana Alam	383	115	13
Korban Bencana Sosial	1	26	12
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	8	200	179
Fakir Miskin	9.348	21.633	3.438
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	76	-	41
Komunitas Adat Terpencil	-	-	-
JUMLAH	**12.179**	**41.584**	**6.476**

untuk menghitung realisasi penurunan "Menurunnya penyakit sosial" dapat dilakukan melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\textbf{Persentase}\ (\%) = \frac{(\textbf{awal} - \textbf{akhir})}{\textbf{awal}} \times \mathbf{100\%}$$

$$persentase\ penurunan = \frac{PMKS\ t\ 2021 - PMKS\ t\ 2022}{PMKS\ t\ 2021}\ x\ 100\%$$

$$persentase\ penurunan = \frac{41.584 - 6476}{41.584}\ x\ 100\%$$

$$persentase\ penurunan = \mathbf{84,43\%}$$

DAFTAR NAMA KASUS YANG DITANGANI OLEH TIM LK3 PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
JANUARI S/D DESEMBER 2022

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	UMUR	ALAMAT	KETERANGAN
1	Jesika Butar-butar	P	6 Tahun	Uluan	Korban Pemerkosaan
2	Ester Taruli Sianipar	P	14 Tahun	Balige	Korban Upaya Penculikan
3	Ronatio Siagian	P	16 Tahun	Pintu Pohan Meranti	Korban Pemerkosaan
4	Anju Parningotan Pangaribuan	L	13 Tahun	Laguboti	Tindak Kekerasan
5	Meyola Marpaung	P	6 Tahun	Parmaksian	Korban Pemerkosaan
6	Grace pangaribuan	P	14 Tahun	Laguboti	Korban Pelecehan Seksual
7	Ronauli Situmeang	P	6 Tahun	Silaen	Korban Bencana Alam/ Trauma
8	Sri Rahayu Situmeang	P	5 Tahun	Silaen	Korban Bencana Alam/Trauma
9	Kristin Hasian silalahi	P	14 Tahun	Silaen	Korban Pemekosaan
10	Damayanti Pangaribuan	P	13 Tahun	Laguboti	Korban Pemerkosaan
11	Yohana Cecilia Aruan	P	4 Tahun	Porsea	Korban Pemerkosaan
12	Renni Sianipar	P	42 tahun	Balige	Korban KDRT

a) Pemberian bantuan sosial selama tanggap darurat

Gambar Pemberian Bantuan Korban Bencana Alam Banjir Bandang di desa Lumbansangkalan kec. Bonatualunasi

Gambar Pemberian Bantuan Korban Bencana Alam Banjir di desa Siantar Utara Kecamatan Parmaksian.

G. MISI VII: "Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban"

Pada misi VII terdapat 1 (satu) sasaran strategis yaitu:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	persen	100	100	100%

Rata-rata capaian Sasaran Strategis adalah **100%**

Penjelasan Indikator:

"Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan"

Capaian persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan tahun 2022 dapat dihitung dengan menggunakan rumus

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{realisasi}{target} x\ 100\%$$

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} x\ 100\%$$

$$\boldsymbol{Capaian = 100\%}$$

Realisasi kinerja dengan indikator kinerja "Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan" yaitu sebesar 100% diperoleh dari

jumlah pengaduan yang tangani dibandingkan dengan jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk. Pada tahun 2022 jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 37 pengaduan dan jumlah pengaduan yang ditangani sebanyak 37 pengaduan sehingga persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan sebesar 100% artinya semua pengaduan yang masuk ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba bisa ditangani dengan baik. Rekapitulasi pengaduan yang masuk dan yang ditangani dapat dilihat pada tabel berikut:

NO.	TANGGAL	JENIS PELANGGARAN/ KEGIATAN	LOKASI
1	18 JANUARI 2022	OPERASI KASIH SAYANG	KEC. BALIGE
2	21 JANUARI 2022	OPERASI KASIH SAYANG	KEC. BALIGE
3	20 JANUARI 2022	OPERASI KASIH SAYANG	KEC. BALIGE
4	14 FEBRUARI 2022	OPERASI KASIH SAYANG	KEC. BALIGE
5	15 FEBRUARI 2022	OPERASI KASIH SAYANG	KEC. BALIGE
6	14 JANURAI 2022	UNJUK RASA TUTUP TPL	KEC. BALIGE
7	11 FEBRUARI 2022	OPERASI KASIH SAYANG	KEC. BALIGE
8	12 APRIL 2022	SOSIALISASI KE SEKOLAH	KEC. BALIGE
9	27 JULI 2022	PAM FESTIVAL LITERASI	KEC. BALIGE
10	01 MEI 2022	BERDAGANG DI TROTOAR	KEC. SIGUMPAR
11	02 MEI 2022	BERDAGANG DI TROTOAR	KEC. LAGUBOTI
12	09 MEI 2022	BERDAGANG DI TROTOAR	KEC. LAGUBOTI
13	08 MEI 2022	BERDAGANG DI TROTOAR	KEC. SIGUMPAR
14	06 MEI 2022	BERDAGANG DI TROTOAR	KEC. BALIGE
15	04 MEI 2022	BERDAGANG DI TROTOAR	KEC. PORSEA
16	30 MEI 2022	OPERASI KASIH SAYANG	KEC. BALIGE
17	28 MEI 2022	OPERASI KASIH SAYANG	KEC. BALIGE
18	25 MEI 2022	OPERASI KASIH SAYANG	KEC. BALIGE
19	14 April 2022	BERDAGANG DI TROTOAR	KEC. BALIGE
20	25 April 2022	OPERASI KASIH SAYANG	KEC. BALIGE
21	24 MEI 2022	OPERASI KASIH SAYANG	KEC. BALIGE
22	26 April 2022	OPERASI KASIH SAYANG	KEC. BALIGE
23	30 MARET 2022	OPERASI KASIH SAYANG	KEC. BALIGE
24	09 April 2022	OPERASI KASIH SAYANG	KEC. BALIGE
25	23 MEI 2022	OPERASI KASIH SAYANG	KEC. BALIGE
26	04 AGUSTUS 2022	PENERTIBAN PONDOK/ LESEHAN YANG BERDIRI DI LUAR JOGING TRACK	KEC. BALIGE
27	11 JUNI 2022	OPERASI KASIH SAYANG	KEC. BALIGE
28	14 JUNI 2022	OPERASI KASIH SAYANG	KEC. BALIGE
29	22 JUNI 2022	OPERASI KASIH SAYANG	KEC. BALIGE
30	27 JULI 2022	PENERTIBAN PONDOK/ LESEHAN YANG BERDIRI DI LUAR JOGING TRACK	KEC. BALIGE
31	09 JUNI 2022	OPERASI KASIH SAYANG	KEC. BALIGE
32	25 JULI 2022	OPERASI KASIH SAYANG	KEC. BALIGE
33	30 AGUSTUS 2022	PEMBONGKARAN BANGUNAN MILIK FERNANDO NAPITUPULU YANG TIDAK MEMILIKI IMB	KEC. BALIGE
34	03 NOPEMBER 2022	PENERTIBAN PKL	KEC. BALIGE
35	09 September 2022	OPERASI KASIH SAYANG	KEC. BALIGE

36	01 September 2022	PENERTIBAN PKL DAN BALIHO	KEC. BALIGE
37	08 September 2022	OPERASI KASIH SAYANG	KEC. BALIGE

Pengaduan yang masuk didominasi oleh kasus pelajar yang berkeliaran saat jam belajar berlangsung dan penertiban pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Toba. Penyelesaian setiap pengaduan yang masuk oleh personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Fasilitas dan sarana operasional dilapangan sangat mendukung keberhasilan tugas namun fasilitas dan sarana operasional yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba masih sangat minimum yaitu hanya tersedia 1 unit mobil dalmas dan 1 unit mobil patroli dengan wilayah operasi sebanyak 16 kecamatan dan jumlah personil sebanyak 185 orang.

Indikator ini dilaksanakan pada Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan Penanganan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah/ Kota, dan Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.

Untuk peningkatan Tantribum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba melaksanakan penertiban dengan berdasarkan pada:

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang pajak daerah yakni mendampingi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba dalam hal pemungutan pajak makan dan minum restoran;
- Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retrebusi Tempat Wisata dan Olah Raga yakni mendampingi Dinas Pariwisata Kabupaten Toba untuk melakukan pemungutan retribusi tempat wisata di Kabupaten Toba;
- Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan yakni mendampingi Dinas Ketahanan Pangan saat penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba Kecamatan Balige dan Laguboti;
- Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni pelaksanaan operasi kasih sayang, penertiban pedagang kaki lima, pengamanan unjuk rasa dan penertiban bangunan yang bersengketa;

- Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yakni melakukan sosialisasi kawasan tanpa rokok;
- Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2010 Tentang IMB yakni penertiban bangunan tanpa izin di Kabupaten Toba;
- Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Izin Penyelengaraan Reklame yakni melaksanakan penertiban spanduk dan baliho di fasilitas umum di Kabupaten Toba;

  Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 43 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan yakni melaksanakan himbauan kepada masyarakat di pasar rakyat, pesta, tempat ibadah, tempat wisata dan sekolah-sekolah di Kabupaten Toba.

II. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran sebagaimana LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 yang didapatkan dari BPKAD Kabupaten Toba ***(terlampir)*** melalui aplikasi Sim-DA ditemui bahwa:

- Anggaran Belanja APBD adalah: Rp. 1.186.336.391.645,00
- Realisasi Belanja APBD adalah: Rp. 1.047.287.374.552,00
- Sehingga persentase realisasi anggaran adalah sebesar: **88,28%**

III. KESIMPULAN

1) Mengacu kepada hasil analisa capaian kinerja sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
   - Rata-rata capaian INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022 adalah: **128,35%**
   - Rata-rata capaian INDIKATOR KINERJA SASARAN TAHUN 2022 adalah: **132,87%**
   - Sehingga rata-rata capaian atas seluruh indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Bupati Toba Tahun 2022 adalah sebesar:

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{128{,}35\% + 132{,}87\%}{2}$$

$$\textbf{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \mathbf{130{,}61}\ \%$$

Jika diambil nilai rata-rata capaian seluruh indikator kinerja skala keberhasilan masuk dalam

"Predikat Sangat Berhasil"

2) ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

Dalam pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Toba pada Tahun Anggaran 2022 pagu anggaran yang digunakan untuk membiayai seluruh program untuk mendukung terlaksananya seluruh Misi dan Sasaran Strategis adalah pagu anggaran sebesar Rp. 1.186.336.391.645,00 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.047.287.374.552,00 atau sebesar **88,28%,** dimana pencapaian atas seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja sasaran strategis terealisasi **130,61 %.**

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi atas penggunaan sumberdaya pada tahun 2022 adalah:

$$\text{EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA} = \frac{132{,}98\%}{88{,}28\%} x\ 100\%$$

$$\text{EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA} = \mathbf{147{,}95\%}$$

Sehingga didapatkan bahwa efektifitas penggunaan Sumber Daya dalam hal anggaran adalah:

SANGAT EFISIEN

IV. SARAN

Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Toba di masa mendatang maka secara umum disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan program dan kegiatan hendaknya tetap memperhatikan/mengacu kepada sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sehingga di masa mendatang pencapaian indikator kinerja dapat mencapai target dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya yang ada.
2. Peningkatan efektivitas kinerja di masa mendatang diharapkan dapat mengurangi pengeluaran anggaran tanpa mengurangi pencapaian target (efisiensi anggaran).

3. Untuk lebih menjamin pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, diharapkan setiap pimpinan OPD melakukan evaluasi kinerja secara berkala atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan.
4. Pada tahun selanjutnya, dalam rangka perbaikan terhadap penilaian SAKIP secara menyeluruh, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikannya yaitu:

a) Menyempurnakan dokumen-dokumen perencanaan untuk memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil/outcome seperti yang **telah dilakukan dengan menyusun dan menetapkan RPJMD Kabupaten Toba 2021-2026 dan dengan penetapan indikator Kinerja Utama Kabupaten Toba 2021-2026 melalui Peraturan Bupati Toba;**

b) Menyempurnakan perjanjian kinerja defenisi perjanjian kinerja;

c) Menyusun rencana aksi sebagai rincian kinerja atas perjanjian kinerja Perangkat Daerah dengan menentukan target kinerja secara periodik;

d) Menyajikan informasi hasil evaluasi dan analisa faktor keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan;

e) Melakukan evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan AKIP yang berkelanjutan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Poltak Sitorus
Jabatan : Bupati Toba

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Balige, 01 Maret 2022

BUPATI TOBA,

Ir. POLTAK SITORUS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	Indeks sarana prasarana	0,4777	Indeks
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Indeks perumahan pemukiman	0,1383	Indeks
3	Meningkatnya kualitas konektivitas	Indeks konektivitas daerah	0,1548	Indeks
4	Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan	indeks pendidikan	0,738	Indeks
5	Meningkatnya ketahanan keluarga	indeks ketahanan keluarga	1,03	Indeks
6	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	nilai
7	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	WTP	opini
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Nilai SAKIP	B/60	Nilai
9	meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan	Indeks Produksi Pertanian (IPP)	1,258	indeks
10	Meningkatnya ketersediaan Pangan	ketersediaan pangan utama	321,38	persen
11	Meningkatnya harapan hidup	Angka Harapan Hidup	70,24	Tahun
12	Meningkatnya kesempatan kerja	TPT	2,28	%
13	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan wisata	531.810	orang
14	menurunkan angka kemiskinan	persentase Penduduk Miskin	8,57	%
15	Menurunnya penyakit sosial	Laju penurunan Persentase PMKS	50	Angka
16	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	persen

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp	52.277.516.348
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp	13.245.000.000
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp	81.816.913.523
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp	1.680.000.000
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp	1.125.808.529
6	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp	16.758.167.045
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp	1.952.387.443
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp	2.201.893.301
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp	210.064.910
10	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp	3.195.327.608
11	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp	104.094.739
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp	56.625.982.381
13	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp	311.734.751
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp	685.342.790
15	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp	5.667.130.210
16	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp	110.167.478
17	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp	1.611.624.345
18	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp	971.410.529

19	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp	1.055.386.909
20	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp	656.243.773
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp	363.627.113
22	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp	1.172.519.510
23	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp	891.961.606
24	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp	710.625.988
25	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp	47.004.149
26	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp	265.087.387
27	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp	37.373.919
28	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp	172.205.243
29	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp	157.246.856
30	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp	51.552.458
31	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rp	61.935.027
32	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp	597.346.583
33	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp	50.847.787
34	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp	794.937.867
35	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Rp	39.967.397
36	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp	136.572.606
37	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp	95.713.312
38	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp	164.001.776
39	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp	109.656.346
40	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp	74.999.458
41	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp	40.359.698
42	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp	5.621.930.845
43	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp	632.795.219
44	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp	60.878.849
45	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp	96.819.538
46	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp	3.193.467.975
47	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp	452.076.855
48	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp	76.800.000
49	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp	2.911.224.078
50	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp	1.984.370.900
51	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp	8.138.928.067
52	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp	59.900.000
53	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp	10.250.000
54	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp	952.653.132
55	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp	55.756.304
56	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp	585.043.513
57	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp	241.799.726
58	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp	41.250.000
59	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp	84.255.000
60	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp	417.092.000
61	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp	32.380.000

62	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp	140.000.031
63	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp	1.282.034.126
64	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp	100.000.000
65	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp	20.962.274
66	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp	100.001.457
67	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp	1.447.827.690
68	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp	540.215.929
69	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp	65.780.825
70	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Rp	66.819.065
71	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp	18.805.696
72	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp	885.785.018
73	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp	7.127.153.057
74	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp	691.868.460
75	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp	702.722.943
76	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp	8.130.723.891
77	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp	4.381.275.725
78	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp	278.474.947
79	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp	177.461.272
80	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp	432.617.569
81	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp	40.709.081
82	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp	327.499.997
83	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp	106.149.263
84	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp	137.904.621
85	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp	215.235.449
86	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp	3.239.760.696
87	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Rp	120.237.765
88	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp	53.495.219
89	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp	3.762.175.678
90	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp	1.814.225.257
91	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp	12.085.753.438
92	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	213.400.358
93	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	803.786.585
94	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp	251.845.778.680
95	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp	599.999.203
96	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp	2.032.608.459
97	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp	2.000.402.300
98	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp	94.648.000
99	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp	274.998.422
100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp	1.063.104.712
101	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp	319.702.396
102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp	1.697.687.225
103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp	5.410.117.331
104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp	48.990.885

105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp	547.004.714
106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp	274.599.759
107	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp	241.805.235
108	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp	901.820.000
109	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp	230.000.000
110	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp	331.789.488
111	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	533.318.802.804

Balige, 01 Maret 2022

BUPATI TOBA,

Ir. POLTAK SITORUS

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Poltak Sitorus
Jabatan : Bupati Toba

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Balige, 6 Desember 2021

BUPATI TOBA,

Ir. POLTAK SITORUS

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Hasil evaluasi SAKIP/Tingkat Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	>75/BB	Nilai
		2 Tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Level
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,35	Nilai
3	Meningkatnya tertib pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah berlandaskan peraturan perundangan	1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD)	WTP	opini
		2 Persentase Peningkatan PAD	5,09	%
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1 Indeks Partisipasi Masyarakat	75	%
5	Meningkatnya layanan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, serta pelayanan tanggap darurat dan mitigasi bencana	1 Angka Kriminalitas	180	Kejadian
		2 Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	15	Menit
		3 Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah	25	kejadian
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur Publik	1 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	72,00	%
		2 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	75,70	%
		3 Persentase jalan Pedesaan/pemukiman dalam kondisi baik	51,00	%
		4 Persentase Rumah Tangga Sanitasi layak	88,00	%
		5 Persentase Rumah layak Huni	99,35	%
		6 Persentase Luasan kawasan permukiman kumuh	0	%
		7 Persentase penduduk yang berakses air minum	81,00	%
		8 Persentase dusun yang teraliri listrik	100,00	%
		9 Persentase gedung perkantoran pemerintah kondisi baik	100,00	%
		10 Persentase jumlah Jembatan dalam kondisi baik	100,00	%
7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Angka Harapan Hidup	71	%
		2 Jumlah Kematian Ibu	2	Jiwa
		3 Angka Kelangsungan Hidup Bayi	988	Per 1000 kelahiran
8	Meningkatnya Kualitas pendidikan.	1 Angka Melek Huruf	100,00	%
		2 Angka Rata Rata Lama Sekolah	11,00	Tahun
		3 Harapan Lama Sekolah	15,21	Tahun
9	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.	1 Laju Pertumbuhan Penduduk	0,5	Persen
		2 Indeks Pembinaan Keluarga Berencana	68,61	%
10	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak;	1 Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	90,50	%
		2 Jumlah kejadian KDRT	0	kasus
		3 Jumlah kejadian tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak	0	kasus
		4 Indeks Pembangunan Gender	99,80	Nilai
11	Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga	1 Cakupan prestasi generasi muda	57,22	%
12	Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat;	1 PDRB/Kapita	29.784,31	Rp. (Ribu)
		2 Tingkat partisipasi angkatan kerja	90,80	%
		3 Persentase jumlah penduduk Miskin	9,11	Persen
		4 Nilai Tukar Petani	105	%
13	Meningkatkan pengelolaan produk unggulan daerah	1 Jumlah Produk unggulan Daerah	6	Produk
14	Menjaga kualitas sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup;	1 Indeks Kualitas Air	30,00	%
		2 Tutupan Lahan	33,60	%
		3 Indek Kualitas udara	47,00	%
15	Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian.	1 Produktifitas		
		- Padi	63,30	Kw/ha
		- Jagung	64	Kw/ha
		2 Produksi Pertanian		
		- Produksi Padi	158.972	Ton
		- Produksi Jagung	64.473	Ton
		- Produksi Cabe Merah	2.168	Ton

		- Produksi Bawang merah	958	Ton
		- Produksi Kopi	3.925	Ton
		3 Produksi Daging		
		- Kerbau	121,26	Ton
		- Babi	264,96	Ton
16	Meningkatnya pengelolaan potensi wisata	1 Peningkatan jumlah wisatawan	11	%
		2 Jumlah kunjungan wisata;	901.378	Orang
		- *Wisman*	14.733	orang
		- *Wisnus*	886.645	orang
		3 Konstribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	11,5	%
17	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya	1 Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah	80	%

NO.	PROGRAM		ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	211.245.192.305
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	57.325.484.138
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp	13.511.580.891
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	82.823.883.263
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	108.146.910.512
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	1.708.662.283
7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp	489.559.000
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	520.621.050
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	9.361.950.517
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rp	7.552.041.657
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	2.937.202.804
12	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	881.307.007
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	2.320.032.000
14	Program Pengembangan Permukiman	Rp	8.800.175.529
15	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	1.293.889.218
16	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp	2.177.500.270
17	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	59.333.366.966
18	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp	227.357.878
19	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	1.012.763.262
20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.339.451.139
21	Program Kawasan Permukiman	Rp	302.429.125
22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	8.993.540.057
23	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp	1.623.288.590
24	Program Penanggulangan Bencana	Rp	2.285.600.547
25	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	10.035.000
26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.930.305.558
27	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	171.305.360
28	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	743.705.352
29	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp	569.219.670
30	Program Penanganan Bencana	Rp	895.109.522
31	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	46.013.398
32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.236.839.162
33	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	373.291.969
34	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	53.994.241
35	Program Hubungan Industrial	Rp	132.680.872
36	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	49.284.309

37.	Program Perlindungan Perempuan		
38.	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Rp	108.934.699
39.	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Rp	91.016.980
40.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	*Rp*	*6.009.256.354*
41.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	590.916.179
42.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp	40.200.000
43.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp	29.999.808
44.	*0program Penatagunaan Tanah*	Rp	29.999.677
45.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	*Rp*	*233.995.424*
46.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	3.878.425.725
47.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	203.086.236
48.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	86.704.000
49.	*Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan* Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Rp *Rp*	358.420.251 *106.271.006*
50.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Rp	332.430.602
51.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	32.500.198
52.	*Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup*	Rp	32.130.913
53.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	5.181.497.073
54.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5.090.525.301
55.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	176.209.808
56.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	96.099.831
57.	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Rp*	3.226.661.739
58.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	3.015.279.464
59.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	576.120.906
60.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.085.189.323
61.	*Program Pengendalian Penduduk*	Rp	70.700.885
62.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Rp	4.833.419.110
63.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Rp	108.501.660
64.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.410.967.851
65.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Rp	989.549.360
66.	*Program Pengelolaan Pelayaran*	*Rp*	202.970.000
67.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.657.241.950
68.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp	278.721.500
69.	Program Aplikasi Informatika	Rp	1.517.213.199
70.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5.088.204.631
71.	*Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi*	*Rp*	29.999.957
72.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp	153.663.400
73.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Rp	49.997.289
74.	Program Pengembangan Umkm	Rp	544.153.614
75.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.809.229.785
76.	*Program Pelayanan Penanaman Modal*	*Rp*	*99.475.000*
77.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	326.122.000
78.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	115.908.028
79.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp	1.319.071.166
80.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp	100.000.000
81.	*Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral*	*Rp*	*240.337.391*
82.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	40.999.335

83.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	117.649.980
84.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.938.286.735
85.	*Program Pembinaan Perpustakaan*	*Rp*	*399.707.798*
86.	Program Pengelolaan Arsip	Rp	92.571.760
87.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Rp	132.582.460
88.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	327.376.159
89.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	1.588.813.638
90.	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Rp*	*3.428.675.567*
91.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	11.060.113.856
92.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp	14.100.000
93.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp	676.127.144
94.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5.648.969.232
95.	*Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian*	*Rp*	*8.417.822.204*
96.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	2.752.977.881
97.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	59.987.868
98.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	102.348.435
99.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	436.981.965
100.	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Rp*	*15.000.000*
101.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	199.899.472
102.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp	34.559.860
103.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp	40.432.560
104.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp	921.298.761
105.	*Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional*	*Rp*	35.090.000
106.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	32.158.147.699
107.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	5.176.610.925
108.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp	1.399.643.814
109.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	21.662.052.711
110.	*Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd*	*Rp*	*12.704.535.725*
111.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.575.839.918
112.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	652.206.001
113.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	512.642.967
114.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	23.884.832.355
115.	*Program Pengelolaan Keuangan Daerah*	Rp	264.384.567.505
116.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	755.577.640
117.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	1.516.604.647
118.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.615.964.248
119.	Program Kepegawaian Daerah	Rp	1.638.609.220
120.	*Program Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*Rp*	*459.528.981*
121.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.424.046.751
122.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	903.414.375
123.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp	65.058.280
124.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	42.432.754.071
125.	*Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*	*Rp*	*7.367.859.523*
126.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	47.053.000
127.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	9.892.801.096
128.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	952.283.073
129.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	325.294.285
130.	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Rp*	*2.594.194.146*

131.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp	124.651.365
132.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	950.900.474
133.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	204.995.174
134.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp	49.128.270
135.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	435.355.729

Balige 6 Desember 2021

BUPATI TOBA,

Ir. POLTAK SITORUS

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tugas pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.

Adapun pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2022 yaitu tugas pembantuan yang yang diberikan oleh Kementerian Pertanian kepada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba.

a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dinas Pertanian Kabupaten Toba pada Tahun 2022 menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah melalui Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Toba, yaitu :

1. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, dengan dasar pada surat daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022. SP. DIPA-018, 08.4.079132/2022 Tanggal 17 November 2022.

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten

Pemberi Tugas Pembantuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Toba pada Tahun 2022, yaitu diberikan oleh Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Adapun bidang urusan yang menangani Tugas Pembantuan tersebut di Dinas Pertanian Kabupaten Toba, yaitu Tugas Pembantuan dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian oleh Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

Kementerian Pertanian memberikan bantuan dana kepada Dinas Pertanian Kabupaten Toba untuk digunakan pada program kegiatan :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang bersumber dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. Pengelolaan system penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian;
   b. Fasilitasi pupuk dan pestisida;
   c. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan.

   dengan output kegiatan :
   - Tersalurnya alat mesin pertanian Hand Traktor sebanyak 2 unit
   - Tersalurnya pupuk bersubsidi pada Kelompok Tani di 16 Kecamatan

Dinas Pertanian Kabupaten Toba pada Tahun Anggaran 2022 untuk sumber dana dari Tugas Pembantuan memperoleh anggaran yang bersumber dari 1 (satu) Direktorat Jenderal (Ditjen) Lingkup Kementerian Pertanian yaitu Ditjen Prasaran dan Sarana Pertanian sebesar Rp 361.379.000,-

- **Target Kinerja**

Adapun target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Toba pada Tahun 2022 yang didukung dari pelaksanaan penugasan dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian antara lain : Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian khususnya untuk komoditi padi dan jagung dengan target sebagai berikut :

No	Komoditi	Target	
		Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
1	*2*	*3*	*4*
1	Padi	62,00	137.306,81
2	Jagung	61,00	45.750,00

- **Realisasi**

Realisasi keuangan dari pelaksanaan penugasan dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian antara lain :
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas terealisasi sebesar 314.060.955,- atau 86,91 %.

Realisasi kinerja dari produksi dan produktivitas pertanian khususnya untuk komoditi padi dan jagung didukung dari pelaksanaan penugasan dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian:

No	Komoditi	Realisasi	
		Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
1	*2*	*3*	*4*
1	Padi	60,51	132.001,98
2	Jagung	61,45	58,271,50

- **Permasalahan dan Kendala**

Produksi pangan yang memadai sangat ditentukan oleh beberapa faktor pendukung. Permasalahan dan Kendala yang sering dihadapi, yaitu :

1. Keterbatasan SDM untuk proses budidaya pertanian sehingga menyebabkan jadwal tanam yang sering mundur.

2. Petani masih beranggapan bahwa operasional dan pemeliharaan alat mesin pertanian menjadi tanggung jawab Pemerintah.
3. Kemampuan petani dalam penerapan teknologi pertanian masih rendah.
4. Angka sasaran yang didapat masih menggunakan data Angka Sementara.

- **Saran dan Tindak Lanjut**

1. Agar target kinerja dpat tercapai, harus didukung dengan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Harus adanya akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat waktu.
3. Membangun kreativitas petani dalam peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah.

Terkait dengan pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Toba dari Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Toba
Tahun 2022

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Kementerian Pertanian	SP. DIPA-018, 08.4.079132/2022 Tanggal 17 November 2022	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**			**361.379.000**	**314.060.955**	**86,91**	**100**		
			Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian			**10.000.000**	**8.100.000**	**81,00**	**100**		
			- Bimtek Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Alat dan Mesin Pertanian			10.000.000	8.100.000	81,00			Kecamatan Penerima Hand Traktor Porsea dan Ajibata
			Fasilitasi Pupuk dan Pestisida			**333.379.000**	**287.967.805**	**86,38**	**100**		
			- Penyusunan e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi			185.969.000	151.397.300	81,41	100		945 Kelompok tani

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
			- Pelaksanaan Verivikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi			147.410.000	136.570.505	92,65	100		84 Kios Pupuk di Kab. Toba
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			**18.000.000**	**17.993.150**	**99,962**	**100**		
			- Layanan Manajemen dan Perkantoran			18.000.000	17.993.150	99,962	100		Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Adapun pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2022 yaitu tugas pembantuan yang diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar Rp. 3.700.000.000,-.

A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 900/8407 tanggal 31 Agustus 2021, hal Sinergitas dan Keselarasan Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten / Kota.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Gubernur Nomor 900/2892/2022 tanggal 16 Maret 2022 perihal Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provsu Tahun Anggaran 2022.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Adapun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pemberi Tugas Pembantuan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba Tahun 2022, sebesar Rp. 3.700.000.000,- :

Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air, dan Bidang Marga. Adapun Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yaitu :

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

   Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dengan Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, dengan rincian

Pembangunan Irigasi D.I. Silambanua Kec. Laguboti sebesar Rp. 750.000.000,-

2) Program Penyelenggaraan Jalan, dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :
   a. Pembangunan saluran drainase di desa sitangkola kec. Laguboti, sebesar Rp. 350.000.000,-
   b. Pengaspalan/perbaikan jalan di Desa Siringkiron Dusun II Kab. Toba, sebesar Rp. 700.000.000,-
   c. Pengaspalan/perbaikan jalan di Desa Siringkiron Dusun III Kab. Toba, sebesar Rp. 600.000.000,-
   d. Pengaspalan/perbaikan jalan di Sibosur - Taon Marisi Desa Tornagodang Kab. Toba, sebesar Rp. 700.000.000,-
   e. Pengaspalan/perbaikan jalan di Desa Banualuhu II Kab. Toba, sebesar Rp. 400.000.000,-
   f. Pembangunan Jembatan Desa Sigapiton, Kec. Ajibata, sebesar Rp. 200.000.000,-

C. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Toba.

1) Target Kinerja

Adapun target kinerja yang ingin dicapai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba pada tahun 2022 yang didukung dari pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara lain :

- Persentase Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik dengan target sebagai berikut :

No.	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target
1	2	3
1	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	***0,14 %***
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	**0,14 %**

No.	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target
1	2	3
	- Pembangunan Irigasi D.I. Silambanua Kec. Laguboti	547,60 m

1) Meningkatnya kemantapan jalan kabupaten

No.	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target
1	*2*	*3*
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	0,41 %
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	***0,41 %***
	Rehabilitasi Jalan	***3,07 Km***
	- Pembangunan saluran drainase di desa sitangkola kec. Laguboti	486,50 m
	- Pengaspalan/perbaikan jalan di Desa Siringkiron Dusun II Kab. Toba	1.130,00 m
	- Pengaspalan/perbaikan jalan di Desa Siringkiron Dusun III Kab. Toba	1.000,00 m
	- Pengaspalan/perbaikan jalan di Sibosur - Taon Marisi Desa Tornagodang Kab. Toba	600,00 m
	- Pengaspalan/perbaikan jalan di Desa Banualuhu II Kab. Toba	335,00 m
	- Pembangunan Jembatan Desa Sigapiton, Kec. Ajibata	1,00 unit

2) Realisasi

Realisasi keuangan dari pelaksanaan penugasan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu :

2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, dengan realisasi keungan sebesar 82, 66 %. Target Kinerja pada dokumen anggaran sebesar 0,14 %, realisasi 0,12 %, dengan capaian kinerja sebesar 88,51%.

No.	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target	Realisasi
1	2	3	4
1	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	0,14 %	0,12 %

No.	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target	Realisasi
1	2	3	4
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kotas	***0,14 %***	***0,12 %***
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	**0,14 %**	**0,12 %**
	- Pembangunan Irigasi D.I. Silambanua Kec. Laguboti	547,60 m	484,70 m

3) Program Penyelenggaraan Jalan pada Kegitan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan dengan realisasi keuangan sebesar 97,86 %. Target Kinerja pada dokumen anggaran sebesar 0,41 %, realisasi 0,34 , dengan capaian kinerja sebesar 82,06 %.

No.	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	0,41 %	0,34 %	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	***0,41 %***	***0,34 %***	
	Rehabilitasi Jalan	***3,07 Km***	***2,515 Km***	
	- Pembangunan saluran drainase di desa sitangkola kec. Laguboti	486,50 m	486,50 m	Drainase jalan
	- Pengaspalan/perbaikan jalan di Desa Siringkiron Dusun II Kab. Toba	1.130,00 m	580 m	Pengaspalan jalan
	- Pengaspalan/perbaikan jalan di Desa Siringkiron Dusun III Kab. Toba	1.000,00 m	1000 m	Pengaspalan jalan
	- Pengaspalan/perbaikan jalan di Sibosur - Taon Marisi Desa Tornagodang Kab. Toba	600,00 m	600 m	Pengaspalan jalan
	- Pengaspalan/perbaikan jalan di Desa Banualuhu II Kab. Toba	335,00 m	335 m	Pengaspalan jalan
	- Pembangunan Jembatan Desa	1,00 unit	1 unit	Penbangunan

No.	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5
	Sigapiton, Kec. Ajibata			Jembatan

D. Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

1) Hambatan / Permasalahan yang dihadapi

Dalam pelaksanaannya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sering menghadapi kendala dalam melaksanakan pekerjaan fisik di lapangan, antara lain :

- Kesiapan lahan
- Kurangnya dukungan dari masyarakat
- Perencanaan yang belum maksimal, sehingga sering terjadi menuntut perubahan di lapangan.

2) Upaya Penyelesaian

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum melaksanakan pekerjaan;
- Memaksimalkan perencanaan, agar dapat diterapkan di lapangan.

3.3 Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan

Tugas Pembantuan yang dapat diberikan Pemerintah Kabupaten Toba adalah kepada Kecamatan, Kelurahan maupun Desa di Kabupaten Toba. Namun sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Toba Samosir belum melakukan pemberian Tugas Pembantuan, akan tetapi masih tahap pengkajian terhadap beberapa urusan yang perlu dijadikan sebagai Tugas Pembantuan.

Sebagai langkah awal, kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toba untuk mempersiapkan penerima Tugas Pembantuan adalah dengan melakukan pembenahan dan pembekalan teknis terhadap aparatur Pemerintah Desa. Kegiatan dimaksud akan dilakukan secara berkesinambungan sehingga pada gilirannya penerima Tugas Pembantuan dapat mengemban dan memberhasilkan pelaksanaan tugas yang akan mereka terima.

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN KESEHATAN

A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dinas Kesehatan Kabupaten Toba melaksanakan urusan wajib kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Bidang Kesehatan terdiri atas :

a. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita;
e. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
j. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
l. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Penerapan SPM urusan bidang kesehatan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Mutu Pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri dari :

- Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan dan;

- Petunjuk teknis atau tata cara pembentukan standar.

B. Target Pencapaian SPM

Dinas Kesehatan Kabupaten Toba memiliki target SPM yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021 - 2026 yaitu bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarkat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Toba dari segi penganggarannya pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Pencapaian SPM

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
-1	-2	-3
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA
1 .	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**
	• Jumlah yang Harus Dilayani	*3.964*
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	589
	2 . Tablet tambah darah	356.760
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	20
	4 . Kartu ibu/rekam medis ibu	20
	5 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3.964
	6 . Dokter/dokter spesialis kebidanan	41
	7 . Bidan	414
	8 . Perawat	127
	JUMLAH	**361.935**
2 .	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**
	• Jumlah yang Harus Dilayani	*3.784*
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Formulir Partograf	3.784
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	20
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3.784
	4 . Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	4

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
-1	-2	-3
	5 . Bidan	414
	6 . Perawat	127
	JUMLAH	**8.133**
3 .	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total** **Yang Harus Dilayani**
	• Jumlah yang Harus Dilayani	*3.604*
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Vaksin Hepatitis B0	350
	2 . Vitamin K1 injeksi	2.080
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	1.400
	4 . Formulir bayi baru lahir	3.604
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	20
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3.604
	7 . Dokter/dokter spesialis Anak	5
	8 . Bidan	414
	9 . Perawat	127
	JUMLAH	**11.604**
4 .	**Pelayanan Kesehatan Balita**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total** **Yang Harus Dilayani**
	• Jumlah yang Harus Dilayani	*17.434*
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	17.000
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	17.000
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	3.964
	4 . Vitamin A Biru	3.520
	5 . Vitamin A Merah	13.914
	6 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	1.520
	7 . Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	2.532
	8 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	37.800
	9 . Peralatan Anafilaktik	0
	10 . Bidan	414
	11 . Dokter	36
	12 . Perawat	127
	13 . Ahli Gizi	24
	14 . Guru PAUD	0

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
-1	-2	-3
	15 . Kader Kesehatan	1.600
	JUMLAH	**99.451**
5 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**
	• Jumlah yang Harus Dilayani	*32.944*
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani -1
	1 . Buku raport kesehatanku	32.944
	2 . Buku pemantauan kesehatan	32.944
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	32.944
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	1
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	0
	6 . Dokter/Dokter gigi	41
	7 . Bidan	414
	8 . Perawat	127
	9 . Ahli Gizi	24
	10 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	39
	11 . Guru	0
	12 . Kader Kesehatan	445
	JUMLAH	**99.923**
6 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**
	• Jumlah yang Harus Dilayani	*28.382*
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani -1
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	19
	2 . Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	19
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	19
	4 . Dokter	38
	5 . Bidan	244

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
-1	-2	-3
	6 . Perawat	244
	7 . Ahli Gizi	19
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	19
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	0
	JUMLAH	**621**
7 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**
	• Jumlah yang Harus Dilayani	*27.589*
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	10.676
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	0
	3 . Buku kesehatan lansia	0
	4 . Dokter	3
	5 . Bidan	15
	6 . Perawat	5
	7 . Ahli Gizi	36
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	36
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	445
	JUMLAH	**11.216**
8 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**
	• Jumlah yang Harus Dilayani	*45.193*
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	19
	2 . Tensimeter	244
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	19
	4 . Dokter	38
	5 . Bidan	244
	6 . Perawat	244
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	19

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
-1	-2	-3
	JUMLAH	**827**
9 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**
	• Jumlah yang Harus Dilayani	*3.396*
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	244
	2 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	19
	3 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	19
	4 . Dokter	38
	5 . Bidan	244
	6 . Perawat	244
	7 . Ahli Gizi	19
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	19
	JUMLAH	**846**
10 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**
	• Jumlah yang Harus Dilayani	*259*
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	25
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	19
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	20
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	20
	5 . Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	20
	JUMLAH	**104**
11 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
-1	-2	-3
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**
	• Jumlah yang Harus Dilayani	*3.785*
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	22
	2 . Reagen Zn TB	269
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	19
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	7.600
	5 . Catridge tes cepat molekuler	7.920
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	46
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	19
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	38
	9 . Perawat	21
	10 . Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	21
	11 . Penata Rontgen	2
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	19
	13 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	244
	JUMLAH	**16.240**
12 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**
	• Jumlah yang Harus Dilayani	*5.338*
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	100
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	10.676
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	373
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana,	21

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
-1	-2	-3
	Nomor KTP/NIK	
	5 . Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	38
	6 . Perawat	21
	7 . Bidan	244
	8 . Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	21
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat	21
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	3
	JUMLAH	11.518

C. Anggaran

Dalam rangka mencapai target SPM yang telah ditetapkan, peran anggaran sangat penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya sebuah program/kegiatan. Sumber anggaran dalam program/kegiatan sub urusan wajib pemerintah bidang kesehatan berasal dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Umum Covid, Dana Bagi Hasil Propinsi, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Asli Daerah, Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 17.358.399.468,-
   b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.41.811.694.758,-
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 1.680.000000,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. 47.950.320,-
b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 339.270.000,-

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 65.495.222,-
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 58.905.465.126,-
   c. Administrasi Umum SKPD dengan anggaran sebesar Rp.363.753.826,-
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 61.259.670,-
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.532.498.650,-
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.304.034.800,-

Tabel 4.2
Anggaran Penerapan SPM

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN			PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN (%)
2			3	4	5
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**59.170.094.226**	**42.238.651.202**	**71,38 %**
1	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**41.811.694.758**	**29.401.103.044**	**70, 31 %**
	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	**1.873.286.406**	573.422.500	30,61 %
	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu	64.592.000	13.370.000	20,70 %

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN				PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN (%)
2				3	4	5
		Bersalin				
	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		71.785.800	57.665.000	80,33 %
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		243.403.000	182.025.000	74,78 %
	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			-	-
	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Reproduktif		103.030.000	46.410.000	45,05 %
	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		86.710.000	69.692.994	80,37 %
	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		138.500.366	92.800.000	67 %
	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		137.254.600	98.000.000	71,40 %
	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		70.110.000	65.700.000	93,71 %
	11	Pengelolaan Pelayanan Keshatan Orang Terduga Tuberkulosis		345.310.915	275.300.900	79,73 %
	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		230.873.944	161.000.000	69,74 %

D. Dukungan Personil

Adapun jumlah personil Dinas Kesehatan Kabupaten Toba pada Tahun 2022 didukung oleh personil 911 orang yang terdiri dari 744 orang PNS dan 167 orang Non PNS, dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan
Pangkat dan Golongan

No	Jlh Pegawai	Gol. Ruang		Latar belakang pendidikan		Jumlah pejabat struktural		Jumlah Pejabat fungsional
1	744	IV/c	3	S2	11	Ess. II	1	720
		IV/b	10	S1	140	Ess. III	4	
		IV/a	28	DIV	25	Ess. IV	19	
		III/d	215	DIII	496			
		III/c	86	DI	30			
		III/b	45	SLTA/SPK	41			
		III/a	63	SLTP	1			
		II/d	29	SD	0			
		II/c	262					
		II/b	1					
		II/a	2					
	NON ASN		167					
		Total Jumlah	**911**		**744**		**24**	

E. Hasil Capaian

- **Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**

Berdasarkan laporan dari teknis Bidang terkait yang melayani ibu hamil dari 3.964 orang ibu hamil di Kabupaten Toba ada 3.496 orang ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan secara lengkap. Semua pelayanan dasar kesehatan ini harusnya mencapai target 100 %.

Rumus/cara perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal lengkap}}{\text{Jumlah seluruh ibu hamil di wilayah dalam kurun waktu yang sama}} \text{ x } 100\%$$

$$\frac{3.496 \text{ ibu hamil}}{3.964 \text{ ibu hamil}} \text{ x } 100\% = 88{,}19\ \%$$

- **Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**

Berdasarkan laporan dari teknis Bidang terkait bidang Kesehatan Masyarakat yang melayani ibu bersalin dari 3.784 orang ibu bersalin di Kabupaten Toba ada 3.244 orang ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan di

fasilitas kesehatan. Semua pelayanan dasar kesehatan ini harusnya mencapai target 100 %.

Rumus/cara perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah seluruh ibu bersalin di wilayah dalam kurun waktu yang sama}} \text{ x } 100\%$$

$$\frac{3.244 \text{ ibu bersalin}}{3.784 \text{ ibu bersalin}} \text{ x } 100\% = 85{,}72\%$$

- **Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**

Berdasarkan laporan dari teknis Bidang terkait bidang Kesehatan Masyarakat yang melayani kesehatan bayi baru lahir dari 3.604 orang bayi baru lahir yang berusia 0 – 28 hari di Kabupaten Toba ada 3.225 orang bayi baru lahir yang berusia 0 – 28 hari yang mendapat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan secara lengkap minimal 3 kali yaitu 1 kali pada saat lahir usia 6 – 48 jam, 1 kali pada hari 3 – 7 hari dan 1 kali pada 8 – 28 hari di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Semua pelayanan dasar kesehatan ini harusnya mencapai target 100 %.

Rumus/cara perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang memperoleh pelayanan kesehatan seuai standar}}{\text{Jumlah seluruh bayi lahir hidup di wilayah dalam kurun waktu yang sama}} \text{ x } 100\%$$

$$\frac{3.255 \text{ bayi baru lahir}}{3.604 \text{ bayi baru lahir}} \text{ x } 100\% = 89{,}48\ \%$$

- **Pelayanan Kesehatan Balita**

Berdasarkan laporan dari teknis Bidang terkait bidang Kesehatan Masyarakat yang melayani kesehatan balita dari 17.434 orang balita yang berusia 0 – 59 bulan di Kabupaten Toba ada 16.116 orang balita yang berusia 0 – 59 bulan yang mendapat penimbangan dan pemberian vitamin A di fasilitas kesehatan. Semua pelayanan dasar kesehatan ini harusnya mencapai target 100 %.

Rumus/cara perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya menggunakan Buku seuai standar}}{\text{Jumlah sasaran balita di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \text{ x } 100\%$$

$$\frac{16.116 \text{ Balita}}{17.434 \text{ Balita}} \text{ x } 100\% = 92{,}44\ \%$$

- **Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**

Berdasarkan laporan dari teknis Bidang terkait bidang Kesehatan Masyarakat yang melayani kesehatan pada usia pendidikan dasar usia 7-15 Tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Dari 26.993 anak usia pendidikan dasar ada 9.195 anak usia pendidikan dasar yang dijaring kesehatannya. Penjaringan kesehatan oleh tenaga kesehatan seperti pelayanan pemeriksaan status gizi, pemeriksaan gigi, tajam penglihatan dan tajam pendengaran. Semua pelayanan dasar kesehatan ini harusnya mencapai target 100 %.

Rumus/cara perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang diperiksa kesehatannya sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di wilayah kerja dan kurun waktu yang sama}} \text{ x } 100\%$$

$$\frac{9.195 \text{ anak usia pendidikan dasar}}{26.993 \text{ anak usia pendidikan dasar}} \text{ x } 100\% = 34{,}06\ \%$$

- **Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif**

Berdasarkan laporan dari teknis Bidang terkait bidang P2P yang melayani kesehatan orang yang berusia produktif (15 – 59 tahun) dari 132.525 orang usia 15 – 59 tahun ada 28.382 usia 15 – 59 tahun yang mendapat skrinning kesehatan penyakit tidak menular di Kabupaten Toba. Semua pelayanan dasar kesehatan ini harusnya mencapai target 100 %.

Rumus/cara perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrinning kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15–59 tahun di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama}} \text{ x } 100\%$$

$$\frac{28.382 \text{ orang usia } 15 - 59 \text{ tahun}}{132.525\ orang\ usia\ 15 - 59\ tahun} \text{ x } 100\% = 21{,}41\ \%$$

- **Pelayanan kesehatan pada usia lanjut**

Berdasarkan laporan dari teknis Bidang terkait bidang Kesmas yang melayani kesehatan orang yang berusia lanjut (usia 60 tahun ke atas) dari 24.184 orang usia 60 tahun keatas ada 26.682 orang usia 60 tahun keatas yang mendapat skrinning kesehatan penyakit

di Kabupaten Toba. Semua pelayanan dasar kesehatan ini harusnya mencapai target 100 %.

Rumus/cara perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah warga negara yang berusia 60 tahun atau lebih mendapat pelayanan skrinning kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama}} \text{ x } 100\%$$

$$\frac{26.682 \text{ orang usia 60 tahun atau lebih}}{24.184\ orang\ usia\ 60\ tahun\ atau\ lebih} \text{ x } 100\% = 110{,}32\ \%$$

- **Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi**

Berdasarkan laporan dari teknis Bidang terkait bidang P2P yang melayani kesehatan orang yang berusia 15 tahun atau lebih yang menderita penyakit Hipertensi dari 45.193 orang estimasi penderita Hipertensi ada 37.009 orang penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Toba. Semua pelayanan dasar kesehatan ini harusnya mencapai target 100 %.

Rumus/cara perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah penderita Hipertensi usia 15 tahun atau lebih yang mendapat skrinning kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia 15 tahun atau lebih di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama}} \text{ x } 100\%$$

$$\frac{37.009 \text{ orang penderita Hipertensi}}{45.193\ penderita\ Hipertensi} \text{ x } 100\% = 81{,}89\ \%$$

- **Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus**

Berdasarkan laporan dari teknis Bidang terkait bidang P2P yang melayani kesehatan orang yang berusia 15 tahun atau lebih yang menderita penyakit Diabetes Melitus dari 3.396 orang estimasi penderita Diabetes Melitus ada 2.834 orang penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Toba. Semua pelayanan dasar kesehatan ini harusnya mencapai target 100 %.

Rumus/cara perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun atau lebih yang mendapat skrinning kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah estimasi penderita Diabetes Melitus berusia 15 tahun atau lebih di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama}} \text{ x } 100\%$$

$$\frac{3.396 \text{ orang penderita Diabetes Melitus}}{2.834\ penderita\ Diabetes\ Melitus} \text{ x } 100\% = 83{,}45\ \%$$

- **Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**

Berdasarkan laporan dari teknis Bidang terkait bidang P2P yang melayani pelayanan Kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat dari 259 estimasi penderita ODGJ ada 199 orang penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Toba. Semua pelayanan dasar kesehatan ini harusnya mencapai target 100 %.

Rumus/cara perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah estimasi penderita ODGJ di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \text{ x } 100\%$$

$$\frac{199 \text{ penderita ODGJ}}{259 \ \ estimasi\ penderita\ ODGJ} \text{ x } 100\% = 76{,}83\ \%$$

- **Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis**

Berdasarkan laporan dari teknis Bidang terkait bidang P2P yang melayani pelayanan Kesehatan pada orang terduga penyakit Tuberkulosis dari 3.785 orang terduga Tuberkulosis estimasi ada 3.891 orang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Tuberkulosis sesuai standar di Kabupaten Toba. Semua pelayanan dasar kesehatan ini harusnya mencapai target 100 %.

Rumus/cara perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan Tuberkulosis sesuai standar}}{\text{Jumlah estimasi orang terduga Tuberkulosis di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \text{ x } 100\%$$

$$\frac{3.891 \text{ orang terduga Tuberkulosis}}{3.785\ orang\ terduga\ Tuberkulosis} \text{ x } 100\% = 102{,}80\ \%$$

- **Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)**

Berdasarkan laporan dari teknis Bidang terkait bidang P2P yang melayani pelayanan Kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia dari 5.338 orang terduga HIV ada 6.191 orang terduga HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di Kabupaten Toba. Semua pelayanan dasar kesehatan ini harusnya mencapai target 100 %.

Rumus/cara perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeeksi HIV di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$$

$$\frac{6.191 \text{ orang berisiko HIV}}{5.338\ orang\ berisiko\ terinfeksi\ HIV} \times 100\% = 115{,}97\ \%$$

Tabel 4.4.
Hasil Capaian SPM Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total capaian
-1	-2	-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS MADYA			86.14 %
1	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**				90.55 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**70.55 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani	*3.964*	*3.496*	**468**	**88%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
		Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	100.00 %
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	589	589	0	**100.00 %**
	2 . Tablet tambah darah	356.760	356.760	0	**100.00 %**
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	20	20	0	**100.00 %**
	4 . Kartu ibu/rekam medis ibu	20	20	0	**100.00 %**
	5 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3.964	3.964	0	**100.00 %**
	6 . Dokter/dokter spesialis kebidanan	41	41	0	**100.00 %**
	7 . Bidan	414	414	0	**100.00 %**
	8 . Perawat	127	127	0	**100.00 %**
	JUMLAH	**361.935**	**361.935**	**0**	**800.00 %**
2 .	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**				88.58 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**68.58 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani	*3.784*	*3.244*	540	**86%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
		Jumlah yang	**Jumlah yang**	**Jumlah yang**	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total capaian
-1	-2	-3			-4
		harus dilayani -1	terlayani -2	belum terlayani -3	
	1 . Formulir Partograf	3.784	3.784	0	**100.00 %**
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	20	20	0	**100.00 %**
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3.784	3.784	0	**100.00 %**
	4 . Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	4	4	0	**100.00 %**
	5 . Bidan	414	414	0	**100.00 %**
	6 . Perawat	127	127	0	**100.00 %**
	JUMLAH	**8.133**	**8.133**	**0**	**600.00 %**
3 .	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**				91.59 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**71.59 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani	*3.604*	*3.225*	379	**89%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
		Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	100.00 %
	1 . Vaksin Hepatitis B0	350	350	0	**100.00 %**
	2 . Vitamin K1 injeksi	2.080	2.080	0	**100.00 %**
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	1.400	1.400	0	**100.00 %**
	4 . Formulir bayi baru lahir	3.604	3.604	0	**100.00 %**
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	20	20	0	**100.00 %**
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3.604	3.604	0	**100.00 %**
	7 . Dokter/dokter spesialis Anak	5	5	0	**100.00 %**
	8 . Bidan	414	414	0	**100.00 %**
	9 . Perawat	127	127	0	**100.00 %**
	JUMLAH	**11.604**	**11.604**	**0**	**900.00 %**
4 .	**Pelayanan Kesehatan Balita**				87.29 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**73.95 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani	*17.434*	*16.116*	**1.318**	**92%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**13.33 %**
		Jumlah yang	**Jumlah yang**	**Jumlah yang**	66.67 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total capaian
-1	-2	-3			-4
		harus dilayani -1	terlayani -2	belum terlayani -3	
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	17.000	17.000	0	**100.00 %**
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	17.000	17.000	0	**100.00 %**
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	3.964	3.964	0	**100.00 %**
	4 . Vitamin A Biru	3.520	3.520	0	**100.00 %**
	5 . Vitamin A Merah	13.914	13.914	0	**100.00 %**
	6 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	1.520	0	1.520	**0%**
	7 . Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	2.532	0	2.532	**0%**
	8 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	37.800	0	37.800	**0%**
	9 . Peralatan Anafilaktik	0	0	0	**0%**
	10 . Bidan	414	414	0	**100.00 %**
	11 . Dokter	36	36	0	**100.00 %**
	12 . Perawat	127	127	0	**100.00 %**
	13 . Ahli Gizi	24	24	0	**100.00 %**
	14 . Guru PAUD	0	0	0	**0%**
	15 . Kader Kesehatan	1.600	1.600	0	**100.00 %**
	JUMLAH	**99.451**	**57.599**	**41.852**	**1,000.00 %**
5 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**				34.93 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**22.33 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani	*32.944*	*9.195*	**23.749**	**28%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**12.60 %**
		Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	62.99 %
	1 . Buku raport kesehatanku	32.944	9.195	23.749	**27.91 %**
	2 . Buku pemantauan kesehatan	32.944	9.195	23.749	**27.91 %**
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	32.944	0	32.944	**0%**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total capaian
-1	-2	-3			-4
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	1	1	0	**100.00 %**
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	0	0	0	**0%**
	6 . Dokter/Dokter gigi	41	41	0	**100.00 %**
	7 . Bidan	414	414	0	**100.00 %**
	8 . Perawat	127	127	0	**100.00 %**
	9 . Ahli Gizi	24	24	0	**100.00 %**
	10 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	39	39	0	**100.00 %**
	11 . Guru	0	0	0	**0%**
	12 . Kader Kesehatan	445	445	0	**100.00 %**
	JUMLAH	99.923	19.481	**80.442**	**755.82 %**
6 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**				97.78 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani	*28.382*	*28.382*	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**17.78 %**
		Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	88.89 %
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	19	19	**0**	**100.00 %**
	2 . Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	19	19	**0**	**100.00 %**
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	19	19	**0**	**100.00 %**
	4 . Dokter	38	38	**0**	**100.00 %**
	5 . Bidan	244	244	**0**	**100.00 %**
	6 . Perawat	244	244	**0**	**100.00 %**
	7 . Ahli Gizi	19	19	**0**	**100.00 %**
	8 . Tenaga Kesehatan	19	19	**0**	**100.00 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total capaian
-1	-2	-3			-4
	Masyarakat				
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	0	0	**0**	**0%**
	JUMLAH	**621**	**621**	**0**	**800.00 %**
7 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**				90.70 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**77.37 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani	*27.589*	*26.682*	**907**	**97%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**13.33 %**
		Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	66.67 %
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	10.676	10.676	0	**100.00 %**
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	0	0	0	**0%**
	3 . Buku kesehatan lansia	0	0	0	**0%**
	4 . Dokter	3	3	0	**100.00 %**
	5 . Bidan	15	0	15	**0%**
	6 . Perawat	5	5	0	**100.00 %**
	7 . Ahli Gizi	36	36	0	**100.00 %**
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	36	36	0	**100.00 %**
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	445	445	0	**100.00 %**
	JUMLAH	**11.216**	**11.201**	**15**	**600.00 %**
8 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**				85.51 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**65.51 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani	*45.193*	*37.009*	**8.184**	**82%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total capaian
-1	-2	-3			-4
		-1	-2	-3	
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	19	19	0	**100.00 %**
	2 . Tensimeter	244	244	0	**100.00 %**
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	19	19	0	**100.00 %**
	4 . Dokter	38	38	0	**100.00 %**
	5 . Bidan	244	244	0	**100.00 %**
	6 . Perawat	244	244	0	**100.00 %**
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	19	19	0	**100.00 %**
	JUMLAH	**827**	**827**	**0**	**700.00 %**
9 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**				86.76 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**66.76 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani	*3.396*	*2.834*	**562**	**83%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
		Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	100.00 %
	1 . Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	244	244	0	**100.00 %**
	2 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	19	19	0	**100.00 %**
	3 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	19	19	0	**100.00 %**
	4 . Dokter	38	38	0	**100.00 %**
	5 . Bidan	244	244	0	**100.00 %**
	6 . Perawat	244	244	0	**100.00 %**
	7 . Ahli Gizi	19	19	0	**100.00 %**
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	19	19	0	**100.00 %**
	JUMLAH	**846**	**846**	**0**	**800.00 %**
10 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**				81.47 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**61.47 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total capaian
-1	-2	-3			-4
	• Jumlah yang Harus Dilayani	*259*	*199*	**60**	**77%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
		Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	100.00 %
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	25	25	**0**	**100.00 %**
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	19	19	**0**	**100.00 %**
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	20	20	**0**	**100.00 %**
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	20	20	**0**	**100.00 %**
	5 . Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	20	20	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**104**	**104**	**0**	**500.00 %**
11 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**				99.24 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani	*3.785*	*3.785*	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**19.24 %**
		Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	96.19 %
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	22	22	0	**100.00 %**
	2 . Reagen Zn TB	269	269	0	**100.00 %**
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	19	19	0	**100.00 %**
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	7.600	7.600	0	**100.00 %**
	5 . Catridge tes cepat molekuler	7.920	4.000	3.920	**50.51 %**
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	46	46	0	**100.00 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total capaian
-1	-2	-3			-4
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	19	19	0	**100.00 %**
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	38	38	0	**100.00 %**
	9 . Perawat	21	21	0	**100.00 %**
	10 . Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	21	21	0	**100.00 %**
	11 . Penata Rontgen	2	2	0	**100.00 %**
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	19	19	0	**100.00 %**
	13 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	244	244	0	**100.00 %**
	JUMLAH	16.240	12.320	**3.920**	**1,250.51 %**
12	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**				99.31 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani	*5.338*	*5.338*	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**19.31 %**
		Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	96.56 %
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	100	100	0	**100.00 %**
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	10.676	7.000	3.676	**65.57 %**
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	373	373	0	**100.00 %**
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	21	21	0	**100.00 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total capaian
-1	-2	-3			-4
	5 . Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	38	38	0	**100.00 %**
	6 . Perawat	21	21	0	**100.00 %**
	7 . Bidan	244	244	0	**100.00 %**
	8 . Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	21	21	0	**100.00 %**
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat	21	21	0	**100.00 %**
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	3	3	0	**100.00 %**
	JUMLAH	**11.518**	**7.842**	**3.676**	**965.57 %**

F. Kendala, Permasalahan dan Solusi

1. Kendala dan Permasalahan

a) Terbatasnya pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan ibu bersalin karena penyakit Covid-19 yang membatasi pelayanan di posyandu pada ibu hamil, ibu bersalin dan balita.

b) Banyak anggaran kegiatan SPM pelayanan dasar kesehatan yang dialihkan untuk penanggulangan penyakit Covid-19.

c) Kompetensi petugas yang perlu ditingkatkan dalam penanggulangan penyakit Covid-19.

2. Solusi

a) Meningkatkan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Toba dalam penambahan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Kesehatan untuk mencapai pelayanan yang maksimal dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.

b) Sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang penuh resiko akibat penyakit Covid-19 diharapkan kompetensi petugas kesehatan dalam perlindungan diri lebih ditingkatkan.

c) Perlu terus diupayakan peningkatan kompetensi petugas kesehatan dalam penanggulangan Penyakit Covid-19.

4.2 URUSAN PENDIDIKAN

A. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan mengatur tentang:

(a) Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

(b) SPM Pendidikan di dalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar.

(c) Penerima pelayanan dasar pada:
- SPM pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- SPM pendidikan dasar merupakan peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- SPM pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

(d) Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, sedangkan jenis pendidikan dasar pada SPM pendidikan daerah provinsi terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

(e) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan tata cara pemenuhan standar.

Pada Bagian Ketiga dan Keempat mulai dari Pasal 17 hingga Pasal 34 Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, untuk Kewenangan Kabupaten/Kota, memaktubkan:

1. Pemenuhan standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mencakup satuan pendidikan anak usia

dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan kesetaraan, satuan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun. Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
   (a) Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar; dan;
   (b) Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.

   Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.
3. Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik. Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun. Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
   (a) Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
   (b) Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.

Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

4. Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik. Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun. Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
   (a) Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
   (b) Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.

   Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.
5. Pemenuhan modul belajar pada pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik. Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun. Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam satu tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
   (a) Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket modul belajar dikali biaya satuan modul belajar; dan

(b) Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.

Biaya satuan modul belajar dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

6. Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat berupa: (a) menyediakan perlengkapan dasar; dan/atau (b) memberikan uang tunai untuk pemenuhan perlengkapan dasar kepada Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
7. Pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan. Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan pendidikan.
8. Pemenuhan standar biaya pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diprioritaskan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Toba memiliki target SPM yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021 - 2026 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

Kabupaten Toba dari segi penganggarannya pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Target Capaian SPM Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
1	2	3
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA
1 .	**Pendidikan Dasar Usia Dini**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total**
		Yang Harus Dilayani
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	5,557
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Buku gambar	11,546
	2 . Alat mewarnai	11,546
	3 . Penyediaan biaya personil Peserta Didik	3,521,530,000
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	206
	5 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	345
	JUMLAH	**3,521,553,643**
2 .	**Pendidikan Dasar**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total**
		Yang Harus Dilayani
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	38,441
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Buku teks pelajaran	38,441
	2 . Perlengkapan belajar	38,441
	3 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	276
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	111
	5 . Jumlah rombongan belajar di satuan Pendidikan	1,969
	6 . Penyediaan biaya personil peserta didik	41,536,000,000
	7 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	2,965
	8 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	276
	JUMLAH	**41,536,082,479**
3 .	**Pendidikan Kesetaraan**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total**
		Yang Harus Dilayani
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	13

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
1	2	3
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Modul belajar	13
	2 . Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	13
	3 . Penyediaan biaya personil peserta didik	171,800,000
	4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	35
	5 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	3
	6 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	3
	7 . Perlengkapan belajar	3
	8 . PKBM Terakreditasi minimal C	3
	JUMLAH	**171,800,073**

C. Anggaran Standar Pelayanan Minimal

Adapun anggaran penerapan standar pelayanan minimal Urusan Pendidikan yang ada pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Toba dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.6.
Anggaran SPM Tahun 2022

NO	PENDANAAN	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH	1,071,439,678,433			
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	306,373,497,150	28.59%		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	56,195,217,180		5.24%	18.34%
4	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM SUMBER LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT (CONTOH : DANA DESA, KERJASAMA, DANA BAGI HASIL DAN LAIN-LAIN)	5,738,902,000			
	A. APBN	0			
	B. APBD	0			
	B. DAK	5,738,902,000			
	C. LAINYA	0			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan ruang kelas baru	180,000,000
			Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU	200,000,000
			Pembangunan Ruang Unit Sekolah	180,000,000
			Pembangunan perpustakaan sekolah	200,000,000
			Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1,155,000,000
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	735,000,000
			Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	598,258,690
			Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah	180,379,000
			Pengadaan Alat praktik dan peraga siswa	920,000,000
			Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	1,488,369,134
			Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	24,921,600,000
			Pembangunan laboratorium sekolah	600,000,000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembanguna ruang unit kesehatan sekolah	922,104,000
			Pembangunan laboratorium	1,100,000,000
			Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	800,000,000
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	200,000,000
			Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan	150,000,000
			Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	969,757,000
			Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	160,000,000
			Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah	202,413,715
			Pengadaan Alat praktik dan peraga siswa	153,930,000
			Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	189,907,554
			Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	16,614,400,000
		Pengelolaan PAUD	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	3,184,200,964
		Pengelolaan Pendidikan nonformal/kesetaraan	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah nonformal/kesetaraan	189,897,223
			Total	56,195,217,280

D. Dukungan Personil

Dukungan personil yang ada pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai pelaksana Urusan Pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut **:**

Tabel 4.7.
Dukungan Personil Tahun 2022

No	NAMA/NIP/JABATAN
1	Drs. Rikardo Hutajulu, M.Pd/Plt. Kepala Dinas (Sekretaris) NIP. 197004162000121002
3	Mangisar Panjaitan, S.Pd/Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan NIP. 197202071998011001
4	Bereghman S A Pane, S.Pd / Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar NIP. 19780104 2002121004

5	Pintor Napitupulu, SE, MM/ Kabid Pembinaan Kepemudaan NIP. 19791226201001 1 013
6	Henri Simarmata, S.Pd.M.Si/ Kabid Pembinaan Keolahragaan NIP. 19720806 200604 1 011
7	Lenni Waty Sitinjak, SS.M.Si/Kabid PAUD dan Pendidikan Masyarakat
8	Romauli Silalahi/Kasubbag Umum dan Kepegawaian NIP. 19661028 198602 2 001
9	Lamhot Sitorus, ST/ Kasi Pembinaan SD NIP. 19740308 200604 1 004
10	Jhon Ferry Hutagaol, ST/Kasi Pembinaan SMP NIP. 19800316 201001 1 014
11	Gokna Sihombing, SH/ Kasi Pembinaan Guru dan Tendik SD NIP. 19710331 2011012 001
12	Gokma Malau, SE/ Analis Kebijakan Ahli Muda NIP. 19780804 200701 2 002
13	Asrina Sidabutar, SE/ Analis Kebijakan Ahli Muda NIP. 19791209 200701 2 001
14	Tingkos Parhusip, S.Pd/ Analis Kebijakan Ahli Muda NIP. 197004302001031001
15	Rafles Silitonga, SH, MM/Analis Kebijakan Ahli Muda NIP. 19770722 200701 1 002
16	Maria Masdalena Tampubolon,S.Pd/Kasi Pendidikan Masyarakat NIP. 19860717 201001 2 027
17	Rudi HPJ Siahaan, ST, MM / Kasi PAUD NIP. 19771206201212 1 003
18	Wajon Sirait, S.Pd, M.Si / Pengelola Peserta Didik NIP. 197710102009031002
19	Roma Intan Pardede, S.Pd / Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan NIP. 198305112009032003
20	Rachman M Pasaribu, SE, MM / Pemelihara Sarana Prasarana Kantor NIP. 19860715 200502 1 002
21	Johannes Manalu, S.Kom / Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan NIP. 19860108 2015061 001
22	Braveto Situmorang, S.Pd, MM / Bendahara NIP. 199006122015061001
23	Parsaoran Siahaan, SE / Pengelola Kepegawaian NIP. 19671001 200701 1 006
24	Elprida Lubis, A.Md / Pengelola Peserta Didik NIP. 19840808 201001 2 026
25	Ronal Simanungkalit / Pengelola Kurikulum NIP. 19790429 201212 1 001
26	Fetty Farida Tamba, SE, M.Si / Pengelola Karir Pendidik

	NIP. 19860409 201212 2 003
27	Herlina Sitorus, SE / Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan PAUD NIP. 19850706 201212 2 002
28	Benget Benediktus Sihombing, SE / Penyusun Program, Anggaran & Pelaporan NIP. 19700124200604 1 002
29	Darma Sarinauli Nababan, S.Pd / Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan NIP. 19940625 202012 2 004
30	Erison Lamskama Sianipar, SE / Penyusun Program, Anggaran & Pelaporan NIP. 19910813 202203 1 001
31	Sarinah Parapat, A.Md / Pengelola Sarana dan Prasarana Paud NIP. 19730409 201408 2 001
32	Fredy Simon Kulman Simanjuntak / Pemelihara Sarana dan Prasarana Kantor NIP. 19720214 201212 1 002
33	Yosephin Natalia Tampubolon / Pengadministrasi Keuangan NIP. 19801219 201408 2 004
34	Artauli Marbun / Pengadministrasi Umum NIP. 19840227 201408 2 003
35	Fernando Hasiholan Situmorang, A.Md / Pengelola Sarana & Prasarana Dikdas NIP. 19930607202012004
36	Desi Astuty Manurung, A.Md.Kom / Pengelola Peserta Didik NIP. 19941220202012206
37	Elsi Asmita Tamba, A.Md / Pengelola Sarana dan Prasarana Paud NIP. 199804272020122004
38	Relina, A.Md.AB / Pengelola Sarana & Prasarana Dikdas NIP. 19970705 202203 2 010
39	Yulia Sianturi, A.Md.T / Pengelola Sarana & Prasarana Kantor NIP. 19980729 202203 2 017
40	Ronny Paulus Simanjuntak, S.Pd
41	Rustauli Natalina Sitorus, SE
42	Evalina Wati Parhusip, SE
43	Imelda Marpaung, S.Pd
44	Sarman Simangunsong
45	Remon Harianja
46	Hendri Rusman Siahaan
47	Mery Tampubolon, A.Md
48	Prayri H Panjaitan, S.Pd
49	Hotmaria Siagian, S.Pd
50	Margomgom Marbun, S.Pd
51	Arta Manova Siahaan, A.Md
52	Iyone Francs P.S

53	Ribka Siahaan
54	Ivana Hutajulu
55	Janson Siahaan
56	James Erikkar Siahaan
57	Candra D Siahaan
58	Renta Sigalingging
59	Erma Kustilianti Hutabarat

- **Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat**

No	Nama	Jabatan
1	*2*	*3*
1	Bereghman S A Pane, S.Pd	Kabid
2	Rudi HPJ Siahaan, ST, MM	Kasi Pembinaan PAUD
3	Maria Masdalena Tampubolon,S.Pd	Kasi Pendidikan Masyarakat
4	Herlina Sitorus, SE	Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan PAUD
5	Sarinah Parapat, A.Md	Pengelola Sarana dan Prasarana Paud
6	Elsi Asmita Tamba, A.Md	Pengelola Sarana dan Prasarana Paud
7	Hendri Rusman Siahaan	Staff
8	Prayri H Panjaitan, S.Pd	Staff
9	Hotmaria Siagian, S.Pd	Staff

- **Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar**

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Lenni Waty Sitinjak, SS.M.Si	Kabid
2	Lamhot Sitorus, ST	Kasi Pembinaan SD
3	Jhon Ferry Hutagaol, ST Kasi Pembinaan SMP	Kasi Pembinaan SMP
4	Elprida Lubis, A.Md	Pengelola Peserta Didik
5	Ronal Simanungkalit	Pengelola Kurikulum
6	Fernando Hasiholan Situmorang, A.Md	Pengelola Sarana & Prasarana Dikdas
7	Desi Astuty Manurung, A.Md.Kom	Pengelola Peserta Didik

No	Nama	Jabatan
1	2	3
8	Relina, A.Md.AB	Pengelola Sarana & Prasarana Dikdas
9	Evalina Wati Parhusip, SE	Staff
10	Remon Harianja	Staff
11	Margomgom Marbun, S.Pd	Staff

E. Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun capaian penerapan standar pelayanan minimal Urusan Pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.8
Capaian Penerapan SPM

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS UTAMA			97.00 %
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini				96.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	5,773	5,773	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.00 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100% -4
		-1	-2	-3	
	1 . Buku gambar	11,546	11,546	0	100.00 %
	2 . Alat mewarnai	11,546	11,546	0	100.00 %
	3 . Penyediaan biaya personil Peserta Didik	3,521,530,000	0	3,521,530,000	0%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	*-2*	*-3*			*-4*
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	206	206	0	100.00 %
	5 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	345	345	0	100.00 %
	JUMLAH	**3,521,553,643**	**23,643**	**3,521,530,000**	**400.00 %**
2 .	**Pendidikan Dasar**				97.50 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*38,441*	*38,441*	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**17.50 %**
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan **-1**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia** **-2**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia** **-3**	87.50 %
	1 . Buku teks pelajaran	38,441	38,441	0	100.00 %
	2 . Perlengkapan belajar	38,441	38,441	0	100.00 %
	3 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	276	276	0	100.00 %
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	111	111	0	100.00 %
	5 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1,969	1,969	0	100.00 %
	6 . Penyediaan biaya personil peserta didik	41,536,000,000	0	41,536,000,000	0%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
	7 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	2,965	2,965	0	100.00 %
	8 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	276	276	0	100.00 %
	JUMLAH	**41,536,082,479**	**82,479**	**41,536,000,000**	**700.00 %**
3 .	**Pendidikan Kesetaraan**				97.50 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*13*	*13*	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**17.50 %**
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan -1	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia -2**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia -3**	87.50 %
	1 . Modul belajar	13	13	0	100.00 %
	2 . Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	13	13	0	100.00 %
	3 . Penyediaan biaya personil peserta didik	171,800,000	0	171,800,000	0%
	4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	35	35	0	100.00 %
	5 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	3	3	0	100.00 %
	6 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	3	3	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	*-2*	*-3*			*-4*
	7 . Perlengkapan belajar	3	3	0	100.00 %
	8 . PKBM Terakreditasi minimal C	3	3	0	100.00 %
	JUMLAH	**171,800,073**	**73**	**171,800,000**	**700.00 %**

F. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahn yang dialami dalam penerapan SPM Urusan Pendidikan kabupaten Toba antara lain :

1. Kurangnya pengetahuan mengenai penerapan SPM di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba oleh pegawai menyebabakan kurang masksimal dalam mengeksekusi Penerapan SPM.
2. Belum tersedianya database mengenai data siswa, data tenaga pendidik yang akurat.
3. Penerapan SPM untuk PAUD masih terkendala dengan kurangnya jumlah PAUD baik negeri maupun swasta di kabupaten Toba, minimal 1 PAUD satu Desa.

Solusi yang ditempuh dalam penyelesaian masalah antara lain:

1. Perlunya bimbingan teknis kepada personel pegawai pemerintahan terutama di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga agar bias memperdalam pengetahuan mengenai penerapan SPM.
2. Perlu dibuat dan ditentukan metode-metode pengumpulan data indikator penerapan SPM setiap tahun agar mendapatkan database yang tepat dan akurat tidak hanya mengandalkan data bidang atau dapodik.
3. Perlunya kerjasama dengan Dinas lain seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk berkolaborasi membuat regulasi agar 1 desa dapat memiliki 1 satuan pendidikan PAUD.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum adalah:

a. Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

b. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari

Untuk keseluruhan Standar Pelayanan Minimal yang ada di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Pekerjaan Umum berada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba, dikarenakan Program Kegiatan sesuai dengan SPM tersebut dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba.

4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba memiliki target SPM yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021 - 2026 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Toba dari segi penganggarannya pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9.
Target Pencapaian SPM

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
-1	-2	-3
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA
1 .	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA	**Jumlah Total**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
-1	-2	-3
	LAYANAN DASAR (80%)	**Yang Harus Dilayani**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*44,997*
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
		-1
	1 . Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	10,799,280
	2 . Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	0
	3 . Jaringan perpipaan	26,195
	4 . Jaringan bukan perpipaan	18,802
	JUMLAH	**10,844,277**
2 .	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*44,997*
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani -1
	1 . Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	44,997
	2 . Kualitas pelayanan air limbah domestik	100
	3 . Sub-Sistem pengolahan setempat	44,779
	4 . Sub-sistem pengangkutan	3
	5 . Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	3
	6 . Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	3
	JUMLAH	**89,885**

4.3 Anggaran Standar Pelayanan Minimal

Angaran penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba pada tahun 2022 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.10
Anggaran Penerapan SPM

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN
-1	2	-3	-4
	KAB. TOBA SAMOSIR		**3,940,016,928**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN
-1	2			-3	-4
1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**				**1,884,333,628**
	1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K20220131033558**			**1,884,333,628**
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	53,683,300
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/ perbaikan SPAM	Dokumen	46,677,000
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	191,815,580
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	424,657,748
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	120,000,000
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	1,047,500,000
		8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum		0
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM		0
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0
		20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0
		21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0
	JUMLAH INDIKATOR				**1,884,333,628**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN
-1	2			-3	-4
	JUMLAH PROGRAM				**1,884,333,628**
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**				**2,055,683,300**
	2	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota K20220131034234**			**2,055,683,300**
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	53,683,300
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0
		4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0
		5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan /perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman		0
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	2,002,000,000
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen	0
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN
-1	2			-3	-4
		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan /perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0
	JUMLAH INDIKATOR				**2,055,683,300**
	JUMLAH PROGRAM				**2,055,683,300**

4.4 Dukungan Personil

Adapun dukungan personil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba sebagai pelaksana Urusan Pekerjaan Umum per Tahun 2022 dapat dilihat melalui Stuktur Organisasi sebagaimana terlampir.

4.5 Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun capaian standar pelayanan minimal urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2022 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.11
Capaian Penerapan SPM

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	*-2*	*-3*			*-4*
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PRATAMA			75.76 %
1 .	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**				71.81 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**60.48 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*44,997*	*34,015*	**10,982**	**76%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**11.34 %**
		Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	56.69 %
	1 . Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	10,799,280	8,163,600	**2,635,680**	**75.59 %**
	2 . Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	0	0	**0**	**0%**
	3 . Jaringan perpipaan	26,195	19,827	**6,368**	**75.69 %**
	4 . Jaringan bukan perpipaan	18,802	14,188	**4,614**	**75.46 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
	JUMLAH	**10,844,277**	**8,197,615**	**2,646,662**	**226.74 %**
2 .	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**				79.71 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**67.81 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*44,997*	*38,141*	**6,856**	**85%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**11.90 %**
		Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	59.51 %
	1 . Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	44,997	38,141	**6,856**	**84.76 %**
	2 . Kualitas pelayanan air limbah domestik	100	90	**10**	**90.00 %**
	3 . Sub-Sistem pengolahan setempat	44,779	36,846	**7,933**	**82.28 %**
	4 . Sub-sistem pengangkutan	3	1	**2**	**33.33 %**
	5 . Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	3	0	**3**	**0%**
	6 . Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	3	2	**1**	**66.67 %**
	JUMLAH	**89,885**	**75,08**	**14,805**	**357.04 %**

4.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

1) Kendala, Permasalahan

Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari

- Sumber air yang ada saat ini adalah air dari Danau Toba, yg membutuhkan operasional yang besar agar sampai ke pemanfaat;
- Jaringan perpipaan yang umurnya sudah tua sehingga banyak yang mengalami kebocoran sehingga jumlah pemanfaat yg dapat dilayani jadi berkurang dan mutu air tercemar;
- Sumber air yang berupa mata air, jaraknya cukup jauh dari permukiman penduduk (pemanfaat).

Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

- Masyarakat masih kurang paham tentang Septic tank, sehingga pembuangan air limbah yang ada masih akses dasar/layak.
- Masih banyak masyarakat yang keberatan apabila akan dibangun ipal komunal karena merasa aka nada pencemaran udara.

2) Solusi
   - Dicari sumber air yang lain, yang dalam pengoperasiannya mengandalkan gravitasi;
   - Ditampung anggaran untuk kegiatan rehabilitasi jaringan air minum;
   - Anggaran untuk pembangunan SPAM dibesarkan.
   - Sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat tentang Sanitasi dan membangun SPAL-T yang baik untuk masyarakat.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah:

a. Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana
b. Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah.

4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kabupaten Toba memiliki target SPM yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021 - 2026 yaitu Urusan Perumahan Rakyat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Toba dari segi penganggarannya pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11
Target Pencapaian SPM

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output	
-1	-2	-3	
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA	
1 .	**Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**		
		Tidak Terjadi Bencana	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	0	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**
		-1	
	1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	
	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	0	
	3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	
	4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	0	
	JUMLAH	**0**	
2 .	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	22	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**
		-1	
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	22	
	2 . Subsidi uang sewa	0	
	3 . Penyediaan rumah layak huni	22	
	JUMLAH	**44**	

4.3 Anggaran Standar Pelayanan Minimal

Untuk tahun 2022 belum ada dianggarkan dana untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimum.

4.4 Dukungan Personil

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba, berdasarkan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba mempunyai pegawai sebanyak 27 orang yang terdiri dari 17 orang ASN dan 10 orang pegawai honorer, berikut keadaan kepegawaian yang ada (periode 31 Desember 2022).

Tabel 4.12
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan
Pangkat dan Golongan

No.	Gol. Ruang	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah (Orang)	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	IV/b	S1/S2	2	
2.	IV/a	S1/S2	2	
3.	III/d	S1/S2	4	
4.	III/c	S1	1	
5.	III/b	S1	3	
6.	III/a	S1	5	
7.	Non ASN		10	
	Jumlah		27	

4.5 Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal

Penerapan SPM Tahun 2022 Tidak ada capaian karena tidak adanya target dan anggaran yang tersedia untuk pencapaian SPM Perumahan TA. 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Hasil Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Waktu Pencapaian
		Indikator	Realisasi	

1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena bencana	0	2022
2.	Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	Terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah kabupaten.	0	2022

4.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

- Kendala

Pada tahun anggaran 2022 tidak tersedia anggaran untuk pelayanan dasar maupun pelaksanaan penerapan untuk pencapaian SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- Solusi

Agar pada tahun 2023 untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar telah tersedia.

4.5 URUSAN TRANTIBUMLINMAS

1. SUB URUSAN - TRANTIBUM

4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba melaksanakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas : pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;

a. Pelayanan informasi rawan bencana;
b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Penerapan SPM lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi:

- Standar operasional prosedur Satpol PP;
- Standar sarana prasarana Satpol PP;
- Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat;
- Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada.

4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba memiliki target SPM yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021 - 2026 yaitu ketertiban umum, ketenteraman umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Toba dari segi penganggarannya pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14
Target Capaian SPM

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		
No	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Indikator Pencapaian / Output**
-1	**-2**	**-3**
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		TUNTAS PARIPURNA
1 .	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	500
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**
	1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0
	2 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0
	3 . Standar operasional prosedur Satpol PP	5

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
-1	-2	-3
	4 . Standar sarana prasarana Satpol PP	3
	5 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	188
	6 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	0

4.3 Anggaran Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka mencapai target SPM yang telah ditetapkan, peran anggaran sangat penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya sebuah program/kegiatan. Sumber keseluruhan anggaran dalam program/kegiatan sub urusan pemerintah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten Toba, dengan rincian program/kegiatan untuk Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), dengan total anggaran sebesar Rp. 3.080.803.045,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp. 2.608.978.144,-
   b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota dengan anggaran sebesar Rp.463.772.992,-
   c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp. 8.051.909,-

Tabel 4.15
Anggaran Penerapan SPM

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN		PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1		2	3	4
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TOBA				
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)		3.080.803.045	2.946.088.228	95,63 %

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN				PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1				2	3	4
1	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**2.608.978.144**	**2.537.112.771**	**97,25 %**
	1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan		2.453.970.984	2.449.558.984	99,82 %
	2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa		-	-	0%
	3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota		-	-	0%
	4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka		155.007.160	87.553.787	56,48 %

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN				PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1				2	3	4
		ketentraman dan ketertiban umum				
	5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia		-	-	0%
	6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		-	-	0%
	7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum		-	-	0%
	8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		-	-	0%
	9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		-	-	0%
2	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali**			**463.772.992**	**402.160.757**	**86,72 %**

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN				PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1				2	3	4
	Kota					
	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		39.278.535	24.617.101	62,67 %
	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		-	-	0%
	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		424.494.457	377.543.656	88,94 %
3	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**			**8.051.909**	**6.814.700**	**84,63 %**
	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS		8.051.909	6.814.700	84,63 %
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						Tidak ada

4.4 Dukungan Personil

Adapun jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dalam mendukung terlaksananya SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran pada Tahun 2022 didukung oleh personil sebanyak 185 orang (PNS sebanyak 45 orang dan non PNS sebanyak 140 orang).

Tabel 4.16
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan Pangkat dan Golongan

No.	Gol. Ruang	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah (Orang)	Ket
1.	IV/b	S1	3	1 orang = pejabat struktural dan 2 orang = JF
2.	IV/a	S1/S2	5	2 orang adalah PPNS
3.	III/d	S1	4	Pejabat struktural Ess IV dan 1 orang adalah PPNS
4.	III/c	S1	-	-
5.	III/b	S1	2	JF
6.	III/a	S1	3	JF
9	II/d	SLTA	4	JF
10	II/c	SLTA	3	JF
11	II/b	SLTA	2	JF
12	II/a	SLTA	19	JF
13	Non ASN		140	Satgas Pol PP dan Satga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah		**185**	

4.5 Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan laporan dari masyarakat dan/atau pantauan dari Satpol PP Kabupaten Toba terdapat 500 (Lima Ratus) kasus gangguan trantibum maupun pelanggaran perda / perkada di wilayah Kabupaten Toba yang dilayani dan jumlah kasus gangguan trantibum maupun pelanggaran perda / perkada yang dapat ditangani sebanyak 452 (empat ratus lima puluh dua) kasus, sehingga efektivitas dari pelaksanaan kegiatan tersebut pada Tahun 2022 sebagai berikut :

Rumus/cara perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah total yang harus dilayani}}{\text{Jumlah total yang terlayani}} \text{ x } 100\%$$

$$\frac{500 \text{ kasus}}{452 \text{ kasus}} \text{ x } 100\% = 90{,}40\ \%$$

Pada Tahun 2022 Satpol PP Kabupaten Toba memiliki kinerja dalam upaya pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum sebesar 90,40% dan masih belum sesuai target capaian SPM yaitu sebesar 100%. Dibandingkan terhadap pencapaian SPM Tahun 2021 sebesar 75%, ada peningkatan kasus yang ditangani sehingga perlu direncanakan adanya upaya penyadaran kepada masyarakat untuk lebih taat dan berkolaborasi dalam penciptaan

ketenteraman dan ketertiban umum demi kenyamanan kehidupan masyarakat. Adapun rincian bidang yang menangani pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai berikut :

a. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
   1) Pendampingan perangkat daerah dalam pemungutan retribusi pajak makan minum restoran, tempat wisata ;
   2) Pembebasan kawasan bebas PKL ;
   3) Penertiban keramba jaring apung ;
   4) Penertiban reklame ;
   5) Penertiban bangunan tanpa izin ;
   6) Melaksanakan sosialisasi kawasan tanpa rokok ;
   7) Kegiatan operasi kasih sayang pada peserta didik ;
   8) Pengamanan aset daerah ;
   9) Pengamanan terhadap gangguan keamanan daerah ;
   10) Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.

b. Bidang Perlindungan Masyarakat

   Kinerja Pemerintah Kabupaten Toba dalam hal perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui pembentukan Satlinmas di desa dan kelurahan. Pada Tahun 2022 Satpol PP melalui Bidang Perlindungan Masyarakat menargetkan terbentuknya Satlinmas di desa se Kabupaten Toba dan sebagai langkah awal membentuk sebanyak 140 orang Satlinmas di wilayah Kecamatan Narumonda. Pembentukan Satlinmas dilakukan secara bertahap di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Toba. Selain itu Bidang Perlindungan Masyarakat juga melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembentukan Satlinmas di setiap Kecamatan / Kelurahan / Desa. Pembentukan Satlinmas kecamatan/desa/kelurahan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Adapun capaian penerima layanan dan mutu layanan sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.17
Hasil Capaian SPM Tahun 2022

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
-1	-2	-3			-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		TUNTAS PRATAMA			75.65 %
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				75.65 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	72.32 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	500	452	48	90.40 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				3.33 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	16.67 %
	1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	0%
	2 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	0%
	3 . Standar operasional prosedur Satpol PP	5	0	5	0%
	4 . Standar sarana prasarana Satpol PP	3	3	0	100.00 %
	5 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	188	0	188	0%
	6 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	0	0	0	0%

4.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

1. Kendala dan Permasalahan

a) Terbatasnya anggaran dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat terkhusus jika terjadi peristiwa yang berbenturan dengan masyarakat.

b) Penambahan personil Satpol PP dan peningkatan kapasitas SDM dalam pelaksanaan pengamanan dan penertiban. Penyelenggaraan yang intens dalam memperoleh pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dalam melaksanakan tindakan penegakan perda serta peyelenggaraan ketentraman dan ketertiban terhadap personil Satpol PP.

c) Peningkatan peran PPNS dalam menempuh pengambilan tindakan non yudistisia terhadap pelanggar peraturan daerah.

d) Ketersediaan peralatan sarana dan prasarana kendaraan operasional dinas patroli ketentraman dan ketertiban umum, sehingga patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak bisa maksimal dilaksanakan.

e) Dalam pelaksanaan tugas Satpol PP sering dihadapkan situasi resiko yang tinggi perlu diterapkan management resiko dalam pelaksanaan tugas, untuk itu perlu adanya jaminan kepada petugas yang mengalami resiko pada pelaksanaan tugasnya.

f) Kapasitas petugas yang perlu ditingkatkan dan bersertifikasi.

2. Solusi

a) Meningkatkan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Toba dalam penambahan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai pelayanan yang maksimal dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum.

b) Sehubungan dengan pelaksanaan yang penuh resiko diharapkan adanya tunjangan resiko dalam pelaksaan tugas

c) Perlu penambahan sarana dan prasarana dalam pencegahan penanggulangan bencana bahaya kebakaran.

d) Perlunya dilaksanakan Pelatihan dan bimbingan tehknis dalam penegakan Perda dan peyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban.

e) Sangat diperlukan penambahan sarana dan prasana untuk mencapai Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas
f) Penyusunan manajemen wilayah kebakaran demi optimalisasi pelayanan.

2. SUB URUSAN – DAMKAR

A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba melaksanakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas : pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;

e. Pelayanan informasi rawan bencana;
f. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
g. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
h. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota bahwa Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan paling sedikit memuat:

a. Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Adapun Mutu Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran meliputi:

b. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
c. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
d. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
e. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
f. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
g. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba memiliki target SPM yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021 - 2026 yaitu ketertiban umum, ketenteraman umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Toba dari segi penganggarannya pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.18
Target Pencapaian SPM

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		
No	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Indikator Pencapaian / Output**
-1	**-2**	**-3**
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR		
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
-1	-2	-3
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		TUNTAS PARIPURNA
1 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	300

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
-1	-2	-3
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	15
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	32
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	6

C. Anggaran Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka mencapai target SPM yang telah ditetapkan, peran anggaran sangat penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya sebuah program/kegiatan. Sumber keseluruhan anggaran dalam program/kegiatan sub urusan pemerintah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten Toba, dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar), dengan total anggaran sebesar Rp. 655.716.363,-
    1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
        a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp. 635.753.158,-
        b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 19.963.205,-

Tabel 4.19
Anggaran Penerapan SPM

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN		PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1		2	3	4
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TOBA				

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN				PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1				2	3	4
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				**655.716.363**	**613.885.507**	**93,62 %**
1	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**635.753.158**	**613.885.507**	**96,56 %**
	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		-	-	0%
	2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		490.973.000	471.307.907	95,99 %
	3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran		-	-	0%
	4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		-	-	0%
	5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri		-	-	0%
	6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri		144.780.158	142.577.600	98,48 %
	7	Pembinaan aparatur		-	-	0%

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN				PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1				2	3	4
		pemadam kebakaran				
	8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)		-	-	0%
	9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran		-	-	0%
	10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga		-	-	0%
2	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**			**-**	**-**	**0%**
	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran		-	-	0%
	2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran		-	-	0%
3	**Investigasi Kejadian Kebakaran**			**-**	**-**	**0%**
	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran		-	-	0%

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN				PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1				2	3	4
4	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**			**19.963.205**	**-**	**0%**
	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat		19.963.205	-	0%
	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran		-	-	0%
	3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana		-	-	0%
5	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**			**-**	**-**	**0%**
	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia		-	-	0%
	2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi		-	-	0%

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN				PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1				2	3	4
		membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi				
	3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi		-	-	0%
	4	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi		-	-	0%
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						

D. Dukungan Personil

Adapun jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dalam mendukung terlaksananya SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran pada Tahun 2022 didukung oleh personil sebanyak 185 orang (PNS sebanyak 45 orang dan non PNS sebanyak 140 orang).

Tabel 4.20
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan Pangkat dan Golongan

No.	Gol. Ruang	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah (Orang)	Ket
1.	IV/b	S1	3	1 orang = pejabat struktural dan 2 orang = JF

No.	Gol. Ruang	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah (Orang)	Ket
2.	IV/a	S1/S2	5	2 orang adalah PPNS
3.	III/d	S1	4	Pejabat struktural Ess IV dan 1 orang adalah PPNS
4.	III/c	S1	-	-
5.	III/b	S1	2	JF
6.	III/a	S1	3	JF
9	II/d	SLTA	4	JF
10	II/c	SLTA	3	JF
11	II/b	SLTA	2	JF
12	II/a	SLTA	19	JF
13	Non ASN		140	Satgas Pol PP dan Satga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah		**185**	

E. Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal

Jumlah kejadian penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran selama Tahun 2022 yang ditangani oleh Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan yaitu sebanyak 260 kejadian dengan target capaian yaitu 300 kejadian atau 86,67%, dan realisasi tingkat respon time 20 menit dari yang seharusnya respon time adalah 15 menit.

Adapun capaian penerima layanan dan mutu layanan sub urusan pelayanan dan evakuasi korban kebakaran pada tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.21
Hasil Pencapaian SPM

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
No	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Indikator Pencapaian / Output**			**Capaian**
-1	**-2**	**-3**			**-4**
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		TUNTAS PRATAMA			75.65 %
1 .	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**				75.65 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**72.32 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	500	452	**48**	**90.40 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**3.33 %**

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
No	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Indikator Pencapaian / Output**			**Capaian**
-1	**-2**	**-3**			**-4**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	16.67 %
	1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	**0**	**0%**
	2 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	**0**	**0%**
	3 . Standar operasional prosedur Satpol PP	5	0	**5**	**0%**
	4 . Standar sarana prasarana Satpol PP	3	3	**0**	**100.00 %**
	5 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	188	0	**188**	**0%**
	6 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	0	0	**0**	**0%**
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		TUNTAS PRATAMA			75.74 %
1 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**				75.74 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**69.33 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	300	260	40	**86.67 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**6.41 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa /	**Jumlah Mutu Barang /**	**Jumlah Mutu Barang /**	**Jumlah Mutu Barang /**	32.03 %

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
-1	-2	-3			-4
	SDM	Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	15	15	**0**	**100.00 %**
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2	0	**2**	**0%**
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	32	9	**23**	**28.13 %**
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	6	0	**6**	**0%**

F. Kendala, Permasalahan dan Solusi

1. Kendala dan Permasalahan

a) Terbatasnya anggaran dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat terkhusus jika terjadi peristiwa yang berbenturan dengan masyarakat.

b) Peningkatan kapasitas SDM dalam memperoleh pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis terhadap personil Satpol PP.

c) Ketersediaan peralatan sarana dan prasarana kendaraan operasional dinas yang kurang memadai sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak bisa maksimal dilaksanakan.

d) Dalam pelaksanaan tugas sering dihadapkan situasi resiko yang tinggi perlu diterapkan management resiko dalam pelaksanaan tugas, untuk itu perlu adanya jaminan kepada petugas yang mengalami resiko pada pelaksanaan tugasnya.

e) Pemenuhan tingkat respon time pemadaman kebakaran masih lebih besar dari 15 menit dikarenakan dukungan sarana dan prasarana yang kurang (jumlah kendaraan

operasional lapangan masih minim dan pengelolaan wilayah manajemen kebakaran yang belum maksimal mendekatkan petugas dengan titik kejadian yang mempengaruhi jarak tempuh menjangkau lokasi kejadian).

f) Kapasitas petugas yang perlu ditingkatkan dan bersertifikasi.

2. Solusi

a) Meningkatkan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Toba dalam penambahan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai pelayanan yang maksimal dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum.

b) Sehubungan dengan pelaksanaan yang penuh resiko diharapkan adanya tunjangan resiko dalam pelaksaan tugas

c) Perlu penambahan sarana dan prasarana dalam pencegahan penanggulangan bencana bahaya kebakaran.

d) Perlunya dilaksanakan Pelatihan dan bimbingan tehknis.

e) Sangat diperlukan penambahan sarana dan prasana untuk mencapai Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas

f) Penyusunan manajemen wilayah kebakaran demi optimalisasi pelayanan.

3. SUB URUSAN - BENCANA

A. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pasal 3 dan Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki jenis pelayanan dasar meliputi:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; d
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, paling sedikit memuat:

(1) penyusunan kajian risiko bencana; dan

(2) Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.

Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, paling sedikit memuat:

(1) penyusunan rencana penanggulangan bencana;

(2) pembuatan rencana kontinjensi;

(3) pelatihan pencegahan dan mitigasi;

(4) gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;

(5) pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan

(6) penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, paling sedikit memuat:

(1) respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;

(2) respon cepat darurat bencana;

(3) aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;

(4) pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan

(5) pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Adapun Mutu pelayanan dasar sub urusan bencana meliputi standar:

(1) prosedur operasional penanggulangan bencana;

(2) sarana prasarana penanggulangan bencana;

(3) peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan

(4) pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM pada Badan Penanggulangaan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22
Target Pencapaian SPM

No	Indikator SPM	TARGET CAPAIAN	PEMBIAYAAN (Rp)
1	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)**	**1500 Orang**	0,00
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	0	0,00
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	0	0,00
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	0	0,00
	4 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	0	0,00
	5 . Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	0	0,00
2	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)**	**16 Kecamatan**	176.329.217,00
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana	0	0,00
	2. Peningkatan kapasitas personil/ Sumber Daya Manusia (SDM)	0	0,00
3	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)**	**50 Kejadian**	904.592.612,00
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	0	0,00
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	210 KK	0,00
	3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	0	0,00
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	0	0,00
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	50 Kejadian	904.592.612,00

C. Anggaran Standar Pelayanan Minimal

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki anggaran untuk Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

Tabel 4.23
Anggaran Penerapan SPM

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)			
1	*2*	*3*			
1.	Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba				
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	3.986.114.306			
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	1.080.921.829			
		Triwulan I (Rp)	Triwulan II (Rp)	Triwulan III (Rp)	Triwulan IV (Rp)
		445.192.279	405.080.346	104.379.196	126.270.008
4.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya yang sah dan tidak mengikat (Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil)	0			
	a. APBN	0			
	b. DAK	0			
	c. Lainnya (CSR, Bantuan Perorangan, dll)	0			

D. Dukungan Personil

Dalam rangka menjalankan administrasi dan operasionalnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba didukung oleh pegawai sebanyak 18 orang PNS (terdiri dari laki-laki 15 orang dan perempuan 3 orang) dan 24 orang tenaga teknis/ Satgas Penanggulangan Bencana (terdiri dari laki-laki 19 orang dan perempuan 5 orang) dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 4.24
Daftar Personil (Pns Dan Non Asn)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2022

No	Nama Petugas	Jabatan	Pendidikan
1	2	3	4
1	dr. Pontas Humisar Batubara, M.Kes	Kepala Unsur Pelaksana	Strata 2
2	Marasi Simamora, S.Pd	Sekretaris	Strata 1

No	Nama Petugas	Jabatan	Pendidikan
1	2	3	4
3	Ir. Jhon Piter Silalahi, MT	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Strata 2
4	Ridolf Simanjuntak, SH	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Strata 1
5	Welman Christian Sibarani, SE, MM	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Strata 2
6	Parlindungan Pasaribu, SE	Kasi Kedaruratan	Strata 1
7	Hermanto Sitorus, ST	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Publik	Strata 1
8	Edward Simaremare, ST	Kasi Logistik dan Peralatan	Strata 1
9	Koorsas Tampubolon, ST, MM	Kasi Kesiapsiagaan	Strata 2
10	Maradong Napitupulu, SH	Kasi Rehabilitasi	Strata 1
11	Rivayanti Sagala, SE	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Strata 1
12	Parlindungan Panjaitan, SE	Penelaah Bahan Kajian Bencana alam	Strata 1
13	Nikson Hutagaol, A.Md	Bendahara	Diploma 3
14	Jultri M. Purba, SE	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	Strata 1
15	Tongam M. Silalahi	Pengelola Kepegawaian	SLTA
16	Ladi Riahta Tambunan, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Strata 1
17	Payaman Silalahi	Pengadministrasi Umum	SLTA
18	Anry Andreas Jeksen H Pakpahan, A.Md	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Diploma 3
19	Arnold Panjaitan	Tenaga Kontrak	SLTA
20	Benjamin Silalahi	Tenaga Kontrak	SLTA
21	Bernard P. Sagala	Tenaga Kontrak	Strata 1
22	Bindu Vinaldi Sianturi	Tenaga Kontrak	SLTA
23	Budiomo Hasugian	Tenaga Kontrak	SLTA
24	Daniel S.M. Tambunan	Tenaga Kontrak	SLTA
25	Eva Manalu	Tenaga Kontrak	Strata 1
26	Evi Christina Sipahutar	Tenaga Kontrak	Strata 1
27	Famres Simangunsong	Tenaga Kontrak	SLTA
28	Gudeng S. Lumbangaol	Tenaga Kontrak	SLTA
29	Guna Artin Luter Aruan	Tenaga Kontrak	SLTA
30	Hisar Jepri Siahaan	Tenaga Kontrak	Strata 1
31	Jimmi H. Siahaan	Tenaga Kontrak	SLTA
32	Kardo Simbolon	Tenaga Kontrak	SLTA
33	Laide Simbolon	Tenaga Kontrak	SLTA
34	Lasma Yanti Napitupulu	Tenaga Kontrak	SLTA

No	Nama Petugas	Jabatan	Pendidikan
1	2	3	4
35	Lomo Tambunan	Tenaga Kontrak	SLTA
37	Rico Ferdinan Siregar	Tenaga Kontrak	SLTA
38	Riko Dedi Handoko Pasaribu	Tenaga Kontrak	SLTA
39	Robin Pardede	Tenaga Kontrak	SLTA
40	Rosianna Simorangkir	Tenaga Kontrak	SLTA
41	Teddy Suryadi Nainggolan	Tenaga Kontrak	SLTA
42	Tico Lazio Sibuea	Tenaga Kontrak	SLTA

E. Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal

Hasil capaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba sebagai berikut:

Tabel 4.25
Capaian Penerapan SPM

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian
1	*2*	*3*			*4*
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	BELUM TUNTAS			49,32%
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	1500 Orang			0,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1500 Orang	0	0	0,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	0	0	0,00	0,00%
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	0	0	0,00	0,00%
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	0	0	0,00	0,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian
1	*2*	*3*			*4*
	4 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	0	0	0,00	0,00%
	5 . Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	0	0	0,00	0,00%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	16 Kecamatan			81,25%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	16 Kecamatan	13 Kecamatan	3 Kecamatan	81,25%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	%
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana	0	0	0,00	%
	2. Peningkatan kapasitas personil/ Sumber Daya Manusia (SDM)	0	0	0,00	%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	50 Kejadian			94,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	50 Kejadian	47 Kejadian	3 Kejadian	94,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	%
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	0	0	0,00	0,00%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	210 KK	210 KK	0,00	100,00%
	3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	0	0	0,00	0,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian
1	*2*	*3*			*4*
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	0	0	0,00	0,00%
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	50 Kejadian	47 Kejadian	3 Kejadian	94,00%

F. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan Permasalahan

Adapun beberapa kendala dan permasalahan dalam penerapan SPM sub urusan Bencana, yaitu :

(1) Belum memadainya anggaran; dan

(2) Tidak adanya Peta Rawan Bencana dan Dokumen Kontijensi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba.

Solusi

Solusi permasalahan agar SPM sub urusan bencana terlaksana dengan baik adalah dengan adanya Peta Rawan Bencana dan Dokumen Kontijensi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba.

4.6 URUSAN SOSIAL

A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), di Bidag Sosial di daerah Kabupaten Toba melaksanakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

b. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;

c. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;

d. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;

e. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan

f. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Penerapan SPM lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Bidang Sosial di Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi:

a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial;
c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis, Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Thaun 2018 yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

a. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasarpenyandang disabilitas telantar di luar panti;
b. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti;
c. Lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
d. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
e. Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dinas Sosial Kabupaten Toba memiliki target SPM yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021 - 2026 yaitu Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial; Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial; Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial; Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban

Bencana daerah kabupaten/kota. yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Toba dari segi penganggarannya pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.26
Target Pencapaian SPM

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
-1	*-2*	*-3*
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*190*
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Layanan data dan pengaduan	1
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1
	4 . Penyediaan permakanan	1
	5 . Penyediaan sandang	1
	6 . Penyediaan alat bantu	190
	7 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1
	8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1
	9 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	1
	10 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1
	11 . Akses ke layanan pendidikan	1
	12 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1
	13 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1
	14 . Layanan rujukan	1

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
-1	*-2*	*-3*
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1
	JUMLAH	**204**
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*1*
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani -1
	1 . Layanan data dan pengaduan	1
	2 . Penyediaan permakanan	1
	3 . Penyediaan sandang	1
	4 . Penyediaan alat bantu	1
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	1
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1
	9 . Akses ke layanan pendidikan	1
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1
	12 . Layanan rujukan	1
	13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
-1	*-2*	*-3*
	JUMLAH	**15**
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*500*
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani -1
	1 . Layanan data dan pengaduan	1
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1
	3 . Penyediaan permakanan	500
	4 . Penyediaan sandang	1
	5 . Penyediaan alat bantu	1
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	1
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1
	10 . Akses ke layanan pendidikan	1
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1
	13 . Layanan rujukan	1
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1
	JUMLAH	**514**
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
-1	*-2*	*-3*
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*16*
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani -1
	1 . Layanan data dan pengaduan	1
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1
	3 . Penyediaan permakanan	1
	4 . Penyediaan sandang	1
	5 . Penyediaan alat bantu	1
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	1
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	1
	10 . Akses ke layanan pendidikan	1
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1
	13 . Layanan rujukan	9
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1
	JUMLAH	**23**
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*529*

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
-1	*-2*	*-3*
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani -1
	1 . Penyediaan permakanan	1
	2 . Penyediaan sandang	529
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	1
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	1
	JUMLAH	**533**

C. Anggaran Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka mencapai target SPM yang telah ditetapkan, peran anggaran sangat penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya sebuah program/kegiatan. Sumber keseluruhan anggaran dalam program/kegiatan sub urusan pemerintah bidang Sosial seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten Toba, dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut :

Pelayanan Sosial, dengan total anggaran sebesar Rp.1.206.383.196,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Rehabilitasi Sosial
   - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp. 812.362.729,-
2. Program Penanganan dan Perlindungan Korban Bencana Alam/Sosial, dengan total anggaran sebesar Rp. 394.020.467,-
   - Penyediaan Makanan dan Sandang dalam Daerah Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp. 292.858.882
   - Penyelenggaraan Pemeberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap Siagaan Bencana di Wilayah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 101.161.585,-

Tabel 4.27
Kegiatan dan Anggaran SPM

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-2	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*
KAB. TOBA SAMOSIR				**2,054,852,261**	**1,489,530,432**	**72.49 %**
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				**2,054,852,261**	**1,489,530,432**	**72.49 %**
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**			**1,030,914,567**	**874,128,686**	**84.79 %**
	1	Penyediaan permakanan	Orang	1	1	100.00 %
	2	Penyediaan sandang	Orang	1	1	100.00 %
	3	Penyediaan alat bantu	Orang	239,878,307	185,773,086	77.44 %
	4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	100.00 %
	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	70,846,115	51,615,915	72.86 %
	6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	720,190,136	636,739,676	88.41 %
	7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	1	1	100.00 %
	8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	100.00 %
	9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	100.00 %
	10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	1	1	100.00 %

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	100.00 %
	12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	1	1	100.00 %
JUMLAH INDIKATOR				**1,030,914,567**	**874,128,686**	**84.79 %**
2	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**			**1,023,937,694**	**615,401,746**	**60.10 %**
	1	Penyediaan makanan	Orang	502,191,984	293,656,036	58.47 %
	2	Penyediaan sandang	Orang	521,745,710	321,745,710	61.67 %
	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0%
	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0%
	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				**1,023,937,694**	**615,401,746**	**60.10 %**
JUMLAH PROGRAM				**2,054,852,261**	**1,489,530,432**	**72.49 %**
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA				Tidak ada		

D. Dukungan Personil

Adapun jumlah personil Dinas Sosial Kabupaten Toba dalam mendukung terlaksananya SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran pada Tahun 2022 didukung oleh personil sebanyak 31 orang (PNS sebanyak 20 orang dan non PNS sebanyak 11 orang).

Tabel 4.28
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

No.	Gol. Ruang	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah (Orang)	Ket
1	2	3	4	5
1.	IV/b	S1	2	2 orang = pejabat struktural
2.	IV/a	S1/S2	4	4 orang adalah PNS Struktural
3.	III/d	S1	2	1 orang Pejabat struktural, 1 orang JF
4.	III/c	S1	4	3 orang Strutural, 1 orang JF

No.	Gol. Ruang	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah (Orang)	Ket
1	2	3	4	5
5.	III/b	S1	3	1 orang structural, 2 orang JF
6.	III/a	S1/DIV	4	1 orang = structural 3 orang = JF
9	III/a	SLTA	1	srtuktural
10	Non ASN		11	Tenaga Kontrak
	Jumlah		**31**	

E. Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun hasil capaian penerapan spm urusan sosial pada tahun 2022, dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.29
Hasil Pencapaian SPM

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*			*4*
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS MADYA			88.93 %
1.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*190*	*190*	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	
		-1	***-2***	***-3***	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	1	1	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar	1	1	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*			*4*
	Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru				
	4 . Penyediaan permakanan	1	1	0	100.00 %
	5 . Penyediaan sandang	1	1	0	100.00 %
	6 . Penyediaan alat bantu	190	190	0	100.00 %
	7 . Penyediaan perbekalan Kesehatan	1	1	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1	1	0	100.00 %
	9 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	1	1	0	100.00 %
	10 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	0	100.00 %
	11 . Akses ke layanan Pendidikan	1	1	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	0	100.00 %
	13 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	0	100.00 %
	14 . Layanan rujukan	1	1	0	100.00 %
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
	JUMLAH	**204**	**204**	**0**	**1500.00 %**
2.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar**				100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*			*4*
	Panti				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*1*	*2*	3	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang Belumt erlayani -3	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	1	1	0	100.00 %
	2 . Penyediaan permakanan	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan sandang	1	1	0	100.00 %
	4 . Penyediaan alat bantu	1	1	0	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan Kesehatan	1	1	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1	1	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	1	1	0	100.00 %
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan Pendidikan	1	1	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	1	1	0	100.00 %
	13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki	1	1	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*			*4*
	kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti				
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	**0**	**100.00 %**
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
	JUMLAH	**15**	**15**	**0**	**1500.00 %**
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**				79.67 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**60.00 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*500*	*375*	125	75%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**19.67 %**
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	98.33 %
		-1	*-2*	*-3*	
	1 . Layanan data dan pengaduan	1	1	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*			*4*
	3 . Penyediaan permakanan	500	375	125	75.00 %
	4 . Penyediaan sandang	1	1	0	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	1	1	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan Kesehatan	1	1	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1	1	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	1	1	0	100.00 %
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan Pendidikan	1	1	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	1	1	0	100.00 %
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan	1	1	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*			*4*
	pengadaan kendaraan baru				
	JUMLAH	**514**	**389**	**125**	**1,475.00 %**
4.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**				65.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**45.00 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*16*	*9*	7	**56%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
		Jumlah yang harus dilayani *-1*	**Jumlah yang terlayani** *-2*	**Jumlah yang belum terlayani** *-3*	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	1	1	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	1	1	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	1	1	0	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	1	1	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan Kesehatan	1	1	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1	1	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	1	1	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*			*4*
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	1	1	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan Pendidikan	1	1	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	9	9	0	100.00 %
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100.00 %
	JUMLAH	**23**	**23**	**0**	**1,500.00 %**
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*529*	*529*	**0**	**100%**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*			*4*
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
		Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	100.00 %
	1 . Penyediaan permakanan	1	1	0	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang	529	529	0	100.00 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1	0	100.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	1	1	0	100.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	1	1	0	100.00 %
	JUMLAH	**533**	**533**	**0**	**500.00 %**

F. Kendala, Permasalahan dan Solusi

1) Kendala dan Permasalahan

- Terbatasnya anggaran dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat terkhusus jika terjadi peristiwa yang berbenturan dengan masyarakat.
- Kurangnya SDM yang meliputi Pendamping Penyandang Disabilitas, Pendamping Lanjut Usia, Pendamping Korban Penyalahgunaan NAPZA, dan SDM Profesi Psikolog
- Peningkatan peran PPNS dalam menempuh pengambilan tindakan non yudistisia terhadap pelanggar peraturan daerah.
- Ketersediaan peralatan sarana dan prasarana kendaraan operasional dinas Sosial.
- Kapasitas Penyuluh Sosial yang perlu ditingkatkan dan bersertifikasi.

2) Solusi

- Meningkatkan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Toba dalam penambahan anggaran Dinas Sosial untuk mencapai pelayanan yang maksimal.

- Perlu penambahan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kinerja
- Perlunya dilaksanakan Pelatihan dan bimbingan tehknis dalam Melakukan Pendampingan dan Penyluhan
- Sangat diperlukan penambahan sarana dan prasana untuk mencapai Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas
- Penyusunan manajemen wilayah kebakaran demi optimalisasi pelayanan.

4.7 PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

A. Urusan Kesehatan

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal urusan kesehatan pada tahun 2022 dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 4.30
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Kesehatan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU T.A. 2022	REALISASI
1	*2*	*3*	*4*
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**61.232.507.294**	**57.595.333.854**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	65.495.222	58.422.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.495.222	22.793.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	16.953.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	18.676.000
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	58.905.465.126	55.428.456.336
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.895.465.500	55.418.890.766
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.999.626	9.565.570
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	363.753.826	312.480.470

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU T.A. 2022	REALISASI
1	*2*	*3*	*4*
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.732.401	5.391.300
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.081.251	37.742.321
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.265.402	6.082.800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.383.240	35.074.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.361.532	22.015.858
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	19.920.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.930.000	186.254.191
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	61.259.670	51.003.948
	Pengadaan Mebel	15.600.420	15.411.240
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.659.250	35.592.708
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.532.498.650	1.519.208.464
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.998.650	76.708.464
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	286.000.000	207.735.236
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	304.034.000	225.762.636
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	285.000.000	207.735.236
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.034.000	18.027.000
2.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**59.170.094.226**	**42.238.651.202**
	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	17.358.399.468	12.837.548.158
	Pembangunan Puskesmas	456.474.951	456.474.951
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.269.915.000	4.957.000.000

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU T.A. 2022	REALISASI
1	*2*	*3*	*4*
	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.136.318.534	2.629.604.165
	Pengadaan Obat, Vaksin	3.292.014.324	2.510.063.352
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.033.533.659	2.207.852.690
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Faslitas Kesehatan Lainnya	170.143.000	76.553.000
	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	41.811.694.758	29.401.103.044
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.873.286.406	573.422.500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	64.592.000	13.370.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	71.785.800	57.665.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	243.403.000	182.025.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	103.030.000	46.410.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	86.710.000	69.692.994
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3.751.081.131	1.070.590.500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.462.058.795	870.714.425
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	90.369.050	51.495.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.703.065.490	639.854.206
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	945.165.180	583.120.200
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.946.100.781	3.331.902.400
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	70.110.000	65.700.000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.308.739.435	1.441.131.945
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21.821.365.960	19.494.646.922
	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.715.059.780	837.276.092
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	466.512.000	0
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	21.335.950	8.297.300
3.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA**	**1.680.000.000**	**1.674.000.000**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU T.A. 2022	REALISASI
1	*2*	*3*	*4*
	MANUSIA KESEHATAN		
	PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/ KOTA	1.680.000.000	1.674.000.000
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.680.000.000	1.674.000.000
4.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	387.220.320	332.320.000
	ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	47.950.320	24.395.000
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	47.950.320	24.395.000
	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	339.270.000	307.925.000
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	339.270.000	307.925.000
	JUMLAH	**122.469.821.840**	**101.840.305.056**

b. Urusan Pendidikan

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal urusan pendidikan pada tahun 2022 dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 4.31
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Pendidikan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan ruang kelas baru	180,000,000
			Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU	200,000,000
			Pembangunan Ruang Unit Sekolah	180,000,000
			Pembangunan perpustakaan sekolah	200,000,000
			Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1,155,000,000
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	735,000,000
			Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	598,258,690
			Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah	180,379,000
			Pengadaan Alat praktik dan peraga siswa	920,000,000
			Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	1,488,369,134
			Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	24,921,600,000
			Pembangunan laboratorium sekolah	600,000,000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembanguna ruang unit kesehatan sekolah	922,104,000
			Pembangunan laboratorium	1,100,000,000
			Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	800,000,000
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	200,000,000
			Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan	150,000,000
			Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	969,757,000
			Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	160,000,000
			Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah	202,413,715
			Pengadaan Alat praktik dan peraga siswa	153,930,000
			Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	189,907,554
			Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	16,614,400,000
		Pengelolaan PAUD	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	3,184,200,964
		Pengelolaan Pendidikan nonformal/kesetaraan	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah nonformal/kesetaraan	189,897,223
			Total	56,195,217,280

c. Urusan Pekerjaan Umum

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal urusan pekerjaan umum pada tahun 2022 dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 4.32
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN
-1	-2			-3	-4
	KAB. TOBA SAMOSIR				**3,940,016,928**
1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**				**1,884,333,628**
	1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K20220131033558**			**1,884,333,628**
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	53,683,300
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	46,677,000
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	191,815,580
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	424,657,748
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	120,000,000
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	1,047,500,000
		8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum		0
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM		0
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN
-1	-2			-3	-4
		20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0
		21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0
	JUMLAH INDIKATOR				**1,884,333,628**
	JUMLAH PROGRAM				**1,884,333,628**
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**				**2,055,683,300**
	2	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota K20220131034234**			**2,055,683,300**
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	53,683,300
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0
		4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0
		5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkat an/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman		0
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	2,002,000,000

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN
-1	-2			-3	-4
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen	0
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0
		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0
	JUMLAH INDIKATOR				**2,055,683,300**
	JUMLAH PROGRAM				**2,055,683,300**
KEGIATAN LAINNYA					
3	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA**				
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA					

d. Urusan Perumahan Rakyat

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal urusan perumahan rakyat pada tahun 2022 dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 4.33
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat

No.	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1.	Tidak ada program, kegiatan maupun sub kegiatan untuk SPM Perumahan TA. 2022

e. Urusan Trantibumlinmas

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal urusan trantibumlinmas pada tahun 2022 dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 4.34
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Trantibumlinmas

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU T.A. 2022	REALISASI
1	*2*	*3*	*4*
1.	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**3.080.803.045**	**2.946.088.228**
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**2.608.978.144**	**2.537.112.771**
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2.453.970.984	2.449.558.984
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	155.007.160	87.553.787
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**463.772.992**	**402.160.757**
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	424.494.457	377.543.656
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Wali Kota	39.278.535	24.617.101
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten /Kota	**8.051.909**	**6.814.700**
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	8.051.909	6.814.700
2.	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**655.716.363**	**613.885.507**
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**635.753.158**	**613.885.507**
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah	490.973.000	471.307.907

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU T.A. 2022	REALISASI
1	*2*	*3*	*4*
	Kabupaten/Kota		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	144.780.158	142.577.600
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	0	0
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**19.963.205**	**0**
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	19.963.205	0
	T O T A L	**3.736.519.408**	**3.559.973.735**
3.	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	0	0
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	126.312.174	126.272.644
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	50.017.043	49.405.861
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	904.592.612	666.251.247
	Bencana Alam	154.592.612	153.581.100
	Bencana Non Alam (Covid-19)	750.000.000	512.670.147

f. Urusan Sosial

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal urusan sosial pada tahun 2022 dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 4.35
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Sosial

NO.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU T.A. 2022	REALISASI
1	2	3	4
1.	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.030.914.558**	**876.128.677**
	Penyediaan Alat Bantu	239.878.307	185.773.086
	Pemberiab Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	70.846.115	53.615.915
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.	720.190.136	636.739.676
	Program Penanganan Bencana	1.092.337.694	671.201.746
	Penyediaan Makan dan Sandang	1.023.937.694	615.401.746
	Kordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dan Tagana	68.400.000	55.800.000
	T O T A L	2.123.252.252	1.547.330.423

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KABUPATEN TOBA
TAHUN 2022

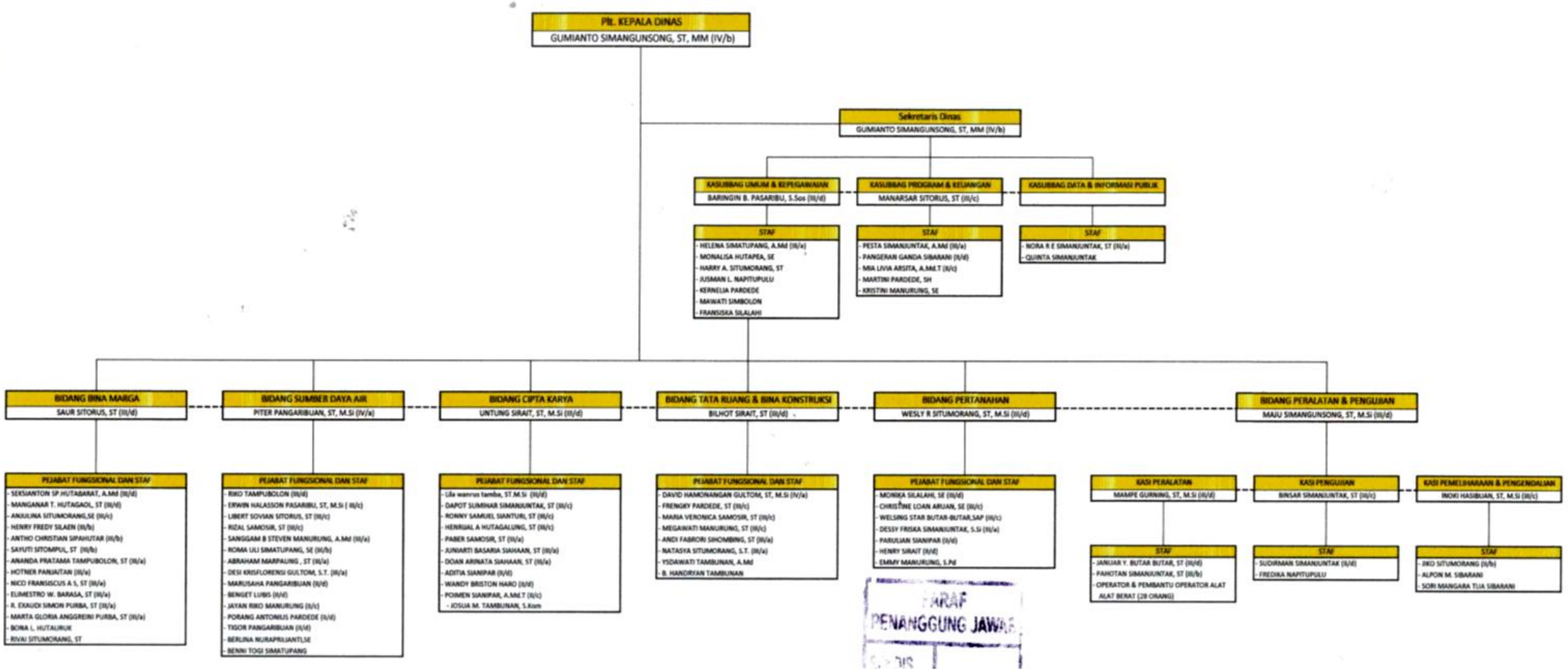

PARAF
PENANGGUNG JAWAB

BAB V
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan penjelasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah yang diselenggarakan selama kurun waktu tahun 2022 baik Urusan Pemerintahan Wajib (Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar), Urusan Pilihan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, serta penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Toba untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi mewujudkan kesejahteraan bersama di Kabupaten Toba ini.

Demikian buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun, Kami menyadari masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kami terbuka untuk setiap kritik dan masukan yang membangun demi perbaikan pada tahun-tahun yang akan datang. Besar harapan kami, buku laporan ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas daerah guna mewujudkan peningkatan daya saing, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan menyertai kita.

BUPATI TOBA ,

Ir. POLTAK SITORUS